

CAKRAWALA PENDIDIKAN

**Implikasi Standarisasi Pendidikan Nasional
terhadap Penyelenggaraan Pendidikan**

**Penyunting:
Udin S. Winataputra**



Lembaga Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat
UNIVERSITAS TERBUKA

2006

CAKRAWALA PENDIDIKAN

Hak Cipta ©

Pada Universitas Terbuka
Kotak Pos 666 – Jakarta 10001
Indonesia

Dilarang mengutip sebagian ataupun seluruh buku ini
dalam bentuk apapun tanpa izin dari penerbit.

Cetakan pertama, September 2006

Lay Outer: Budi Susila Shobariady

Desain Cover: Lili Sutrisna
Adri Sarosa

370

CAK

CAKRAWALA pendidikan: implikasi standarisasi
pendidikan nasional terhadap penyelenggaraan
pendidikan / penyunting Udin S. Winataputra
-- Cet. 1 --. Jakarta: Universitas Terbuka, 2006.
viii + 237p. : ill. ; 22 cm.
ISBN: 979-689-973-6

1. *pendidikan*

I. Winataputra, Udin S.

Daftar Isi

DAFTAR ISI / KATA PENGANTAR /// PENDAHULUAN v

1. Standar Nasional Pendidikan: Konsep dan Implikasi
(*Udin S. Winataputra*) 1
2. Standar Nasional Pendidikan: Sebuah Paparan
tentang Konsep dan Implikasi
(*Teguh Prakoso & Agus Tatang Sopandi*) 30
3. Implikasi Standar Nasional Pendidikan pada
Pengembangan Kurikulum Program Studi S1
Penyuluhan & Komunikasi Penyuluhan
(*Endang Indrawati & Ila Fadila*) 44
4. Kompetensi Lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga
Kependidikan
(*Suripto & Sri Sumiyati*) 71
5. Cakupan Kompetensi dan Standard Kompetensi
Lulusan Perguruan Tinggi
(*Endang Nugraheni*) 89
6. Penilaian Proses dan Hasil Pendidikan pada Program
Pascasarjana Universitas Terbuka
(*Agnes P. Sudarmo & Susanti*) 111
7. Konteks, Struktur, dan Pola Organisasi Materi
Kurikulum Sekolah Dasar
(*Mohammad Imam Farisi*) 129
8. Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Serta
Lingkup Materi pada Tingkat Pendidikan Tinggi
(*A.P. Hardhono*) 148
9. Analisis Kualitatif Soal Persiapan Ujian Akhir Nasional
(*Suroyo & Atun Ismarwati*) 164
10. Evaluasi Pembelajaran Bahasa
(*Lis Setiawati*) 184

11. Kajian Standar Minimal Sarana dan Prasarana di Sekolah Menengah Pertama (SMP)
(*Agnes P. Sudarmo & Tita Rosita*) 204
12. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam Peningkatan Mutu SDM
(*Wia Zuwila Nuzia*) 228

Kata Pengantar

Universitas Terbuka (UT) sebagai sebuah perguruan tinggi memiliki kepedulian terhadap pendidikan pada umumnya dan pendidikan tinggi pada khususnya. Salah satu kepedulian ini diwujudkan dalam penerbitan buku mengenai pendidikan yang diharapkan dapat memperluas cakrawala pendidik, mereka yang berkecimpung di dunia pendidikan, dan pengamat, serta pemerhati pendidikan. Alasan ini menyebabkan UT menerbitkan buku seri Cakrawala Pendidikan yang diharapkan mampu memperluas cakrawala pemikiran mengenai pendidikan. Seri cakrawala pendidikan diharapkan dapat menjadi wadah refleksi dan tukar pikiran.

Pada tahun 1999, UT menerbitkan Cakrawala Pendidikan seri pertama dengan fokus pendidikan secara umum. Pada tahun 2002, UT kembali menerbitkan Cakrawala Pendidikan seri ke dua dengan fokus e-learning dalam pendidikan. Pada tahun 2006 ini, UT kembali menerbitkan Cakrawala pendidikan seri ke tiga dengan fokus pada implementasi standarisasi pendidikan nasional terhadap penyelenggaraan pendidikan.

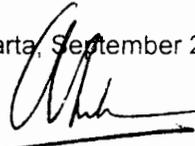
Fokus tersebut dipilih sebagai kontribusi UT terhadap reformasi pendidikan yang merupakan bagian integral dari reformasi menyeluruh dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengeluarkan Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sebagai acuan peningkatan mutu pendidikan nasional, SNP mencakup standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan

Dalam konteks tersebut, UT sebagai salah satu pemangku kepentingan pendidikan nasional, terpenggil untuk menghimpun berbagai pemikiran yang terkait dengan implementasi SNP terhadap penyelenggaraan pendidikan. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kepada para penulis atas

partisipasi dalam mengisi buku ini. Terima kasih saya sampaikan pula kepada Prof. Dr. Udin S. Winataputra, MA sebagai editor buku ini. Terima kasih saya sampaikan pula kepada Lili Sutrisna dan Adri Sarosa yang mendesain cover serta Budi Susila Shobariady yang melakukan *lay out* buku ini.

Mudah-mudahan seri Cakrawala Pendidikan pada umumnya dan Cakrawala Pendidikan 3 pada khususnya dapat membuka cakrawala pemikiran kita.

Jakarta, September 2006



Atwi Suparman
Rektor Universitas Terbuka

Pendahuluan

*R*eformasi pendidikan merupakan bagian integral dari reformasi menyeluruh dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia. Secara konseptual reformasi pendidikan merupakan gerakan nasional sadar mutu. Secara sosiopolitis gerakan ini terpusat pada upaya penerapan prinsip demokrasi yang berkeadilan dan berkeajahteraan serta melindungi dan memajukan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Dalam rangka penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, cita-cita, nilai dan prinsip-prinsip demokrasi tersebut diyakini akan memberikan dampak terhadap proses instrumentasi dan praksis sistem pendidikan nasional. Sementara itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, yang dalam banyak hal memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam idealisasi, instrumentasi dan praksis sistem pendidikan, telah memperkuat semangat dan komitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan nasional. Oleh karena itu pembaharuan sistem pendidikan merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

Dalam rangka menjawab tuntutan nasional tersebut, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), telah ditetapkan *legal framework* tentang Standar Nasional Pendidikan, yang harus dikembangkan oleh Badan Standarisasi Pendidikan Nasional. Sebagai acuan peningkatan mutu pendidikan nasional, SNP mencakup standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Secara konseptual dan programatik SNP merupakan kriteria dalam melakukan penjaminan mutu pendidikan nasional, yang harus menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan. Secara substantif-akademik standar nasional pendidikan merupakan domain kajian baru dalam bidang keilmuan pendidikan, yang memerlukan

pemahaman, kajian analitik secara kritis, serta evaluasi sistemik dari pemangku kepentingan, khususnya para pakar, birokrat, dan praktisi pendidikan nasional.

Dalam konteks pemikiran tersebut di atas, Universitas Terbuka (UT) sebagai salah satu pemangku kepentingan pendidikan nasional, terpanggil untuk menghimpun berbagai pemikiran terkait pada SNP, dari staf akademik dan manager pembelajaran yang ada di lingkungan UT. Pemikiran yang dihimpun dimaksudkan untuk memberikan analisis teoritik-empirik dan gambaran empirik dan tentang instrumentasi dan praksis pendidikan nasional sampai dengan saat ini, dan pemikiran prospektif tentang beberapa aspek pendidikan nasional sebagai implikasi dari adanya legal framework standar nasional pendidikan. *Cakrawala Pendidikan*, sebagai salah satu publikasi resmi UT, mencoba mengangkat semua pemikiran tersebut, dengan harapan dapat menjadi pemicu bagi tumbuhnya diskursus akademik dan profesional dalam komunitas pemikir, praktisis, dan pengamat pendidikan nasional. Walaupun demikian perlu diberi catatan bahwa manuskrip yang disajikan dalam *Cakrawala Pendidikan* edisi ini bukanlah merupakan sajian pemikiran dengan format pembahasan yang utuh dan koheren, melainkan lebih merupakan mozaik pemikiran yang secara konseptual atau operasional terkait pada esensi standar nasional pendidikan. Karena itu pada saat pembaca berkesempatan merenungkan keseluruhan isi tulisan masih akan terasa adanya kesenjangan bahasan yang masih memerlukan pemikiran yang bersifat melengkapi untuk dapat memberikan wawasan yang komprehensif tentang standar nasional pendidikan.

Tulisan pertama, Konsep dan Implikasi Standar Nasional Pendidikan, yang dipaparkan oleh Udin S. Winataputra menyajikan kerangka konseptual tentang apa, mengapa, dan bagaimana standar nasional pendidikan nasional, serta implikasinya terhadap instrumentasi dan praksis pendidikan nasional ke depan. Sejalan dengan tulisan pertama, Teguh Prakoso dan Tatang Sopandi menyoroti SNP dari sisi konsep beserta implikasinya terhadap perwujudan pendidikan nasional yang bermutu dalam konteks Indonesia yang bersifat majemuk atau multikultural. Sementara itu, Endang Indrawati dan Ila Fadila, secara khusus menyoroti implikasi konseptual SNP terhadap

pengembangan Kurikulum Program Studi S1 Penyuluhan dan Komunikasi Penyuluhan pada FMIPA Universitas Terbuka. Tulisan ini lebih merupakan analisis reflektif terhadap proses pengembangan dan profil kurikulum program sarjana Penyuluhan Pertanian.

Tiga tulisan berikutnya menyoroti konsep, cakupan dan penilaian kompetensi pada jenjang pendidikan tinggi. Suropto dan Sri Sumiyati secara khusus membahas tentang kompetensi lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang dalam pembahasannya memberi tekanan pada pentingnya penguasaan materi ajar, strategi pembelajaran, pengelolaan kelas, dan pemanfaatan media dan sumber belajar bagi guru. Di lain pihak Endang Nugraheni membahas cakupan kompetensi dan standar kompetensi lulusan perguruan tinggi. Disimpulkan bahwa dalam upaya mencapai visi dan misi umum perguruan tinggi, kompetensi lulusan perguruan tinggi hendaknya mencakup kompetensi yang terkait pada kemampuan belajar untuk tahu (*learning to know*), belajar untuk bekerja (*learning to do*), belajar untuk hidup (*learning to be*), dan belajar untuk hidup bermasyarakat (*learning to live together*). Sementara itu Agnes P. Sudarmo, dan Susanti, secara khusus menyoroti penilaian proses dan hasil belajar pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Kedua penulis menyimpulkan bahwa sistem penilaian proses dan hasil belajar pada program PPs UT yang menerapkan penilaian utuh melalui pelaksanaan tugas dan partisipasi dalam tutorial (*on line* dan tatap muka) dan ujian akhir semester, secara programatik dinilai sebagai sistem penilaian belajar yang sudah menerapkan konsep dan prosedur penilaian berbasis kompetensi.

Satu-satunya tulisan yang membahas konsep dan implikasi SNP terhadap kurikulum jenjang pendidikan dasar adalah tulisan Mohamad Imam Farisi. Secara argumentatif Imam membahas konteks, struktur, dan pola organisasi kurikulum sekolah dasar dalam kaitannya dengan konsep kurikulum berbasis kompetensi. Disimpulkan bahwa kurikulum SD pada dasarnya telah menerapkan konsep kurikulum berbasis kompetensi dengan pola organisasi yang ditata secara pedagogis, psikologis dan sosial-kultural. Sebagai domain otonomi perguruan tinggi, kerangka dasar, struktur kurikulum dan lingkup materi pada tingkat perguruan tinggi yang ditulis oleh A.P.

Hardhono, menyajikan pembahasan peran pendidikan tinggi dalam pengembangan aspek sosial, ekonomi dan kultural. Kompetensi lulusan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi seyogyanya merupakan hasil kajian kolaboratif perguruan tinggi dan masyarakat pengguna lulusan, seperti dunia usaha dan lembaga sosial, ekonomi dan kultural.

Dua tulisan lainnya mencoba menghadirkan pembahasan topik terkait pada penilaian pendidikan. Suroyo dan Atun Ismawarti menyajikan analisis kualitatif soal persiapan ujian akhir nasional. Disimpulkan bahwa UAN yang dilaksanakan, khusus untuk bidang studi Matematika SMA/MA tahun 2005 mencerminkan keterwakilan sebaran materi pokok dengan soal, tritik berat pada pengetahuan prosedural, sebaran soal yang termasuk dalam kategori mudah, sedang, dan sukar yang cukup proporsional, dan waktu pengerjaan soal yang relatif cukup. Di lain pihak Lis Setiawati menyajikan pembahasan berbagai aspek tentang evaluasi pembelajaran bahasa. Disimpulkan bahwa evaluasi pembelajaran bahasa dilakukan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran bahasa yang mencakup evaluasi proses dan hasil. Cakupan penilaian harus mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotorik

Menutup Cakrawala edisi ini, disajikan tulisan tentang sarana dan prasarana pendidikan. Agnes P. Sudarme dan Tita Rosita membahas tentang standar minimal sarana dan prasarana di sekolah menengah pertama. Esensi dari tulisan ini menyimpulkan bahwa penetapan standar minimal sarana dan prasarana pendidikan sangat erat kaitannya dengan peningkatan kinerja sekolah yang efisien dan efektif. Karena itu untuk mewujudkan manajemen berbasis sekolah, diperlukan dukungan sarana dan prasarana minimal. Sementara itu Wia Zuwila Nuzia menyajikan pembahasan tentang betapa pentingnya sarana dan prasarana pendidikan dalam menghasilkan iklim belajar yang kondusif, yang pada gilirannya memberi kontribusi terhadap lahirnya lulusan pendidikan yang bermutu.

Pondok Cabe, 7 Agustus 2006
Editor.
Udin S. Winataputra

Standar Nasional Pendidikan: Konsep dan Implikasi

Udin S. Winataputra

Secara etimologis kata *standar* diambil dari kata dalam bahasa Inggris, *standard*, yang secara umum dapat diartikan *ukuran, takaran*. Istilah *standard* mulai digunakan secara teknis dalam khasanah pendidikan untuk memberi makna terhadap ukuran-ukuran yang digunakan dalam berbagai elemen pendidikan. Istilah *standar* sangat populer digunakan dalam bidang kurikulum dan pembelajaran, seperti yang muncul di USA mulai tahun pada tahun 1980-an digunakan istilah *curriculum standard* yang mencakup *content standard* dan *pedagogical standard* (NCSS: 1994). Sejalan dengan kecenderungan semakin tertinggalnya hasil pendidikan dan meningkatnya komitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan nasional, konsep *standar nasional pendidikan* secara yuridis formal digunakan dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut Pasal 1 butir 17 Undang-undang tersebut Standar Nasional Pendidikan diartikan sebagai kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konsep standar nasional pendidikan tersebut secara filosofis dan sosio-politis terkait erat pada komitmen nasional untuk untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang pada alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang secara instrumental harus didasarkan pada dan dilakukan dengan satu sistem pendidikan nasional (Ps 31 UUD 1945). Hal itu perlu disadari karena sejak Indonesia merdeka sampai dengan saat ini, penyelenggaraan sistem pendidikan nasional itu belum didasarkan pada standar nasional pendidikan.

Sebagai gantinya pemerintah sejak tahun 1946 telah menetapkan adanya kurikulum persekolahan yang bersifat nasional (Kurikulum 1946, Kurikulum 1957, Kurikulum 1961, Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, dan Kurikulum 1994) dan ujian negara tahun 1950- 1970an dan ujian nasional sejak tahun 1970-an sebagai sarana psikopedagogis dan kurikuler dalam upaya melakukan penjaminan mutu pendidikan. Namun demikian harus diakui juga bahwa ternyata yang dapat dicapai dari penasionalan semua itu bukanlah mutu pendidikan yang bertaraf nasional tetapi justru disparitas mutu pendidikan antar sekolah dan antar daerah, karena kurikulum dan ujian nasional belum berfungsi sebagai sarana penjaminan mutu pendidikan bertaraf nasional, melainkan berperan sebagai ritual pendidikan nasional yang sarat dengan formalitas. (Winataputra, 2005).

Gerakan nasional sadar mutu pendidikan muncul antara lain dalam bentuk gerakan reformasi pendidikan yang merupakan bagian integral dari reformasi menyeluruh dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia. Gerakan itu secara sosiopolitis terpusat pada upaya yang menuntut diterapkannya prinsip demokrasi yang berkeadilan dan berkeajahteraan serta melindungi dan memajukan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Dalam konteks pendidikan nasional, cita-cita, nilai dan prinsip-prinsip demokrasi tersebut diyakini akan memberikan dampak yang mendasar pada instrumentasi dan praksis sistem pendidikan nasional. Bersamaan dengan itu kita menyaksikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, dalam banyak hal memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam idealisasi, instrumentasi dan praksis sistem pendidikan. Tuntutan tersebut pada dasarnya berkenaan dengan perlunya pembaharuan sistem pendidikan.

Tuntutan nasional tersebut memberi indikasi kuat tentang perlunya Pendidikan Nasional memiliki Standar Nasional Pendidikan, sebagai sarana penjaminan mutu pendidikan nasional, yang pengembangan dan pemantauannya dilakukan oleh badan akreditasi, standarisasi, dan evaluasi pendidikan. Untuk itu diperlukan kebijakan nasional untuk segera mewujudkan badan tersebut yang segera bertugas mengembangkan standar nasional pendidikan. Oleh karena diperlukan Standar Pendidikan

Nasional. Secara ideal, memang pendidikan nasional perlu dikembangkan demikian rupa sehingga berpotensi kuat untuk dapat mewujudkan proses pendidikan yang mampu menciptakan lingkungan belajar dan pembelajaran yang mampu menumbuhkan-kembangan potensi peserta didik dalam bentuk kemampuan mencari tahu (*learning to know*), kemampuan untuk menggunakan pengetahuan untuk bekerja (*learning to do*), kemampuan untuk hidup harmonis dan produktif dalam lingkungannya (*learning to live together*), dan kemampuan untuk hidup dan belajar sepanjang hayat (*learning to be*) termasuk didalamnya mampu hidup melalui kehidupan itu sendiri (*learning through life*). Untuk mewujudkan konsep ideal pendidikan sebagaimana dipancarkan oleh UNESCO sebagai pilar pendidikan, pembaharuan sistem pendidikan nasional perlu dilakukan untuk memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional.

Dalam konteks semua tuntutan tersebut, maka perwujudan pendidikan di masa depan harus sepenuhnya dikaitkan dengan visi dan misi pendidikan nasional. Menurut Penjelasan UU Sisdiknas 20/2003, pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Untuk mewujudkan Visi tersebut dijabarkan misi Pendidikan Nasional sebagai berikut:

1. mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
3. meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
4. meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan

5. memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI.

Untuk mewujudkan visi dan misi pendidikan nasional tersebut, pendidikan nasional secara makro-nasional dirancang agar berfungsi:

"mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."

(UU Sisdiknas 20/2003). Untuk mewadahi upaya sistemik dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Umum UU Sisdiknas 20/2003, maka pembaharuan sistem pendidikan secara konstitusional digariskan perlunya strategi pembangunan melalui:

1. pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia;
2. pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi;
3. proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
4. evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan;
5. peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan;
6. penyediaan sarana belajar yang mendidik;
7. pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan;
8. penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata;
9. pelaksanaan wajib belajar;
10. pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan;
11. pemberdayaan peran masyarakat;
12. pusat kebudayaan dan pembangunan masyarakat; dan
13. pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.

Dengan strategi tersebut diharapkan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional dapat diwujudkan secara efektif dengan

melibatkan berbagai pihak yang ada dalam masyarakat, secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan sesuai dengan kemampuan dan komitmennya. Secara kontekstual–sosial-politik pembaruan sistem pendidikan nasional perlu pula disesuaikan dengan pelaksanaan otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana hal itu diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Untuk itu maka diperlukan Standar Nasional Pendidikan yang bersifat menyeluruh dan menyangkut semua elemen pendidikan nasional.

Bagaimana Standar Nasional Pendidikan

Dalam Penjelasan Umum PP-SNP 19/2005 dikemukakan bahwa Dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi pendidikan nasional, diperlukan suatu acuan dasar (*benchmark*) oleh setiap penyelenggara dan satuan pendidikan, yang antara lain meliputi kriteria dan kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Kriteria penyelenggaraan pendidikan tersebut secara konseptual dan normatif dijadikan pedoman untuk mewujudkan: (1) pendidikan yang berisi muatan yang seimbang dan holistik; (2) proses pembelajaran yang demokratis, mendidik, memotivasi, mendorong kreativitas, dan dialogis; (3) hasil pendidikan yang bermutu dan terukur; (4) berkembangnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan; (5) tersedianya sarana dan prasarana belajar yang memungkinkan berkembangnya potensi peserta didik secara optimal; (6) berkembangnya pengelolaan pendidikan yang memberdayakan satuan pendidikan; dan (7) terlaksananya evaluasi, akreditasi dan sertifikasi yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Acuan dasar tersebut di atas merupakan standar nasional pendidikan yang dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Selain itu, standar nasional pendidikan juga dimaksudkan sebagai

perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Untuk mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu, itulah maka digariskan perlunya Standar Nasional Pendidikan. (Pasal 35). Pada Ayat (1) dinyatakan bahwa Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Sedangkan pada Ayat (2) digariskan dengan tegas bahwa Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Lebih jauh pada Ayat (3) dinyatakan bahwa Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. Khusus berkenaan dengan standar nasional pendidikan ini telah diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP. SNP 19/2005), termasuk pembentukan Badan Standardisasi Nasional Pendidikan (BSNP) yang kini sudah mulai bekerja.

Pengaturan mengenai SNP digariskan dalam dalam Pasal 2 ayat (1) s/d (3) PP-SNP 19/2005 sebagai berikut. Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi: standar isi; standar proses; standar kompetensi lulusan; standar pendidik dan tenaga kependidikan; standar sarana dan prasarana; standar pengelolaan; standar pembiayaan; dan standar penilaian pendidikan. Secara elaboratif masing-masing standar tersebut dalam pasal 1 butir 5-12 PP-SNP 19/2005 dikemukakan sebagai berikut.

1. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
2. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus

dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

3. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
5. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
6. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
7. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
8. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi dan sertifikasi. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan tersebut di atas mengandung arti bahwa sebagai implikasi dari komitmen nasional untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, maka komponen pendidikan nasional perlu distandarisasi sehingga kita mempunyai takaran yang sama dalam bentuk: standar isi; standar proses; standar kompetensi lulusan; standar pendidik dan tenaga kependidikan; standar sarana dan

prasarana; standar pengelolaan; standar pembiayaan; dan standar penilaian pendidikan. Adanya semua standar tersebut sangat penting agar kita mempunyai tolok ukur mutu pendidikan yang dapat digunakan sebagai kriteria internal (*internal criteria*) untuk menilai keberhasilan pendidikan secara periodik.

Oleh karena itu sangat logis jika ditetapkan bahwa Standar Nasional Pendidikan tersebut diperlakukan bukan sebagai takaran kaku dan statis tetapi sebagai standar dinamis yang perlu disempurnakan secara berkelanjutan. Dengan begitu, maka takaran mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut dapat dan terbuka untuk ditingkatkan secara terencana dan berkala sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan situasi. Untuk melakukan semua itu konstitusi telah memberi kewenangan penuh kepada BSNP dengan cara melibatkan unsur pendidik dan tenaga kependidikan, organisasi profesi yang relevan, dunia usaha, industri, lembaga masyarakat dan unsur departemen terkait secara proporsional dan profesional. Semua itu secara konseptual-normatif dalam pasal 3 PP 19/2005 ditegaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Tujuannya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 PP 19/2005 adalah untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Bagaimana Implikasi Standar Nasional Pendidikan

Kurikulum Terstandar Nasional Berdiversifikasi.

Sebelum ditetapkannya UU Sisdiknas 20/2003, sistem kurikulum yang berlaku adalah kurikulum nasional yang berlaku sampai dengan Kurikulum 1994, sangat tersentralisasi. Oleh karena itu dokumen kurikulum yang pokok seperti Ketentuan Pokok dan Garis-garis Besar Program Pembelajaran (BBPP) atau sejenisnya serta ketentuan mengenai pembelajaran dan penilaian semuanya dikembangkan secara nasional di bawah tanggung jawab Pusat Kurikulum (Puskur) Balitbang Diknas. Dalam

paradigma nasional tersebut, terutama kurikulum pendidikan dasar dan menengah menjadi bersifat nasional-konformistik, artinya di seluruh tanah air peserta didik dipolakan untuk belajar secara serbasama, walau kondisi psikologis dan lingkungan belajarnya sangat beranekaragam atau heterogin.

Paradigma kurikulum menurut UU Sisdiknas 20/2003, mengalami perubahan yang sangat signifikan secara filosofis (latar pertimbangan pemikiran dan teori), sosiopedagogis (tatanan lingkungan pembelajaran) dan psikopedagogis (tatanan sistem belajar dan pembelajaran). Di dalam Pasal 36 Ayat (1)-(3) UU Sisdiknas 20/2003, secara eksplisit digariskan bahwa Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Ayat (1)). Ketentuan ini menekankan bahwa landasan pokok pengembangan kurikulum adalah standar nasional pendidikan yang menjadi titik tolak sekaligus takaran keberhasilan kurikulum tersebut. Selanjutnya digariskan bahwa Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Ketentuan ini menggariskan paradigma nasional-diversifikatif dan menggantikan paradigma nasional-konformistik yang selama lebih dari 50 tahun dianut dalam sistem pendidikan di Indonesia. Diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam merupakan kebutuhan yang rasional dan mendesak.

Diversifikasi kurikulum menurut jenis pendidikan perlu dilakukan secara profesional yang mencakup penyusunan standar kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah, penyesuaian dengan kondisi setempat; penyusunan standar kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan tuntutan pelaksanaan tugas secara profesional; penyusunan standar pendanaan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan sesuai prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan; pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah dan perwujudan otonomi perguruan tinggi; serta penyelenggaraan pendidikan dengan sistem terbuka dan multimakna. Pembaharuan sistem kurikulum ini juga dimaksudkan untuk menopang upaya penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan

pendidikan yang dikelola masyarakat, serta perbedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum.

Dimensi nasional dari kurikulum digariskan dalam bentuk enumerasi bahan kajian yang harus menjadi dasar dan orientasi serta dasar psikopedagogis dan sosiopedagogis dari kurikulum sebagaimana hal itu dinyatakan pada Ayat (3) bahwa:

Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:

1. peningkatan iman dan takwa;
2. peningkatan akhlak mulia;
3. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
4. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
5. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
6. tuntutan dunia kerja;
7. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
8. agama;
9. dinamika perkembangan global; dan
10. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Sebagai latar belakang pemikiran perlu disadari bahwa Kurikulum pendidikan dasar dan menengah sampai dengan saat ini (Mulai dari Kurikulum 1946 s/d Kurikulum 1994) dirasakan terlalu sarat isi dengan organisasi yang sangat terstruktur, steril terhadap lingkungan dan perkembangan masyarakat, dan lebih menekankan pada penguasaan pengetahuan relatif terhadap pengembangan sikap dan keterampilan hidup. Kondisi tersebut terjadi karena kuatnya tradisi kurikulum berbasis mata pelajaran (*subject-centered curriculum*) dan tidak terjadinya kajian kebutuhan kurikuler yang memadai sebagai landasan pengembangan kurikulum. Hal itu diperparah lagi oleh penyiapan sarana dan prasarana pembelajaran yang tidak mendukung implementasi kurikulum secara memadai, mulai dari perencanaan, pengadaan, dan pendistribusian sarana dan prasarana pendidikan, antara lain buku pelajaran, secara nasional.

Oleh karena itu agar kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang akan datang itu lebih diversifikatif sehingga lebih fleksibel dan adaptif terhadap kehidupan masyarakat, diperlukan strategi pengembangan kurikulum yang bersifat sistemik atas

dasar kajian komprehensif mengenai kebutuhan dan prospek kehidupan masyarakat Indonesia dan tuntutan kehidupan global. Selain itu, diperlukan dukungan sarana dan prasarana pendidikan yang bermutu dan tepat konteks yang sengaja dirancang untuk menopang pelaksanaan kurikulum tersebut. Untuk itu seyogyanya segera ada kebijakan nasional tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum yang bersifat nasional sebagai landasar konseptual dan operasional pengembangan silabus di tingkat daerah, sebagaimana dimaksudkan oleh UU RI No. 20 tahun 2003.

Pilar yang menjadi titik tolak sekaligus orientasi dari sistem kurikulum nasional-diversifikatif ini adalah komitmen nasional pada: peningkatan iman dan takwa; peningkatan akhlak mulia; peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; keragaman potensi daerah dan lingkungan; tuntutan pembangunan daerah dan nasional; tuntutan dunia kerja; perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; agama; dinamika perkembangan global; dan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Dalam konteks itu maka dapat dihamai mengapa UU Sisdiknas 20/2003 dalam Pasal 37 Ayat (10 dan (2) menetapkan muatan kurikulum yang bersifat nasional sebagai berikut.

1. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:
 - a. pendidikan agama;
 - b. pendidikan kewarganegaraan;
 - c. bahasa;
 - d. matematika;
 - e. ilmu pengetahuan alam;
 - f. ilmu pengetahuan sosial;
 - g. seni dan budaya;
 - h. pendidikan jasmani dan olahraga;
 - i. keterampilan/kejuruan; dan
 - j. muatan lokal.
2. Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:
 - a. pendidikan agama;
 - b. pendidikan kewarganegaraan; dan
 - c. bahasa.

Semua bidang kajian yang ditetapkan sebagai muatan wajib kurikulum tersebut, secara makro-nasional harus kita

pahami sebagai benang-merah komitmen-nasional pendidikan dalam paradigma kurikulum nasional-diversifikatif. Substansi dan proses pendidikan agama; pendidikan kewarganegaraan; bahasa; matematika; ilmu pengetahuan alam; ilmu pengetahuan sosial; seni dan budaya; pendidikan jasmani dan olahraga; keterampilan/kejuruan; dan muatan lokal merupakan integrating forces atau pemersatu nasional pendidikan. Demikian pula untuk kurikulum pendidikan tinggi substansi dan proses pendidikan agama; pendidikan kewarganegaraan; dan bahasa yang wajib dimuat merupakan pengikat kesatuan dan persatuan nasional melalui pendidikan. Hal ini diperkuat dengan penetapan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. (Pasal 33 Ayat (1) UU Sisdiknas 20/2003 dengan tetap memberi peluang penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu. (Pasal 33 Ayat (2)) dan penggunaan bahasa asing sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik (Pasal 33 Ayat (3)) UU Sisdiknas 20/2003.

Sebagaimana dipesankan dalam pasal; 38 Ayat (1) UU Sisdiknas 20/2003 bahwa Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini merupakan suatu keniscayaan bagi penjaminan mutu pendidikan melalui kurikulum yang bersifat nasional-diversifikatif. Relevan dengan ketentuan tersebut dalam PP-SNP 19/2005 telah ditetapkan Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum. Dalam pasal 6 ayat (1) telah diatur hal-hal sebagai berikut.

1. Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:
 - a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
 - b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
 - c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. kelompok mata pelajaran estetika;
 - e. kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.

Pembelajaran yang Mendidik, Dialogis, Membudayakan, dan Memberdayakan

Tidaklah cukup hanya kurikulum yang memerlukan pembenahan tetapi juga proses pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan. Sampai saat ini proses pembelajaran di sekolah-sekolah belum sepenuhnya, untuk tidak dikatakan masih jauh dari sifat mendidik dan mencerdaskan. Pendekatan pembelajaran ekspositoris dan naratif yang mementingkan penguasaan fakta dan konsep-konsep yang steril, merupakan hal yang semakin memfosil. Peserta didik sudah terkondisi untuk belajar sekedar lulus ujian, yang juga menekankan pada penguasaan pengetahuan yang tidak fungsional. Karena itu bimbingan test berkembang menjadi bisnis pendidikan yang sangat laku karena terkesan lebih dihargai masyarakat dari pada pembelajaran di sekolah.

Kondisi tersebut muncul dengan salah satu penyebabnya adalah belum terjaminnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan, dan tidak adanya standar nasional proses pembelajaran. Proses pembelajaran saat ini dalam banyak hal dirasakan tidak lebih dari ritual pedagogis yang berisi diskursus yang tidak menarik, dan tidak memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan seluruh potensinya, termasuk potensi untuk menjadi pebelajar sepanjang hayat.

Bersamaan dengan itu, akses sekolah, guru dan peserta didik terhadap berbagai sumber belajar perlu diperluas dengan cara mengembangkan perpustakaan sekolah dan perpustakaan daerah, serta pemanfaatan sarana teknologi informasi dan komunikasi secara memadai. Dengan cara itu proses pembelajaran akan menjadi sarana pengembangan budaya belajar (membaca, menulis, dan berhitung) yang *powerful*, yang pada gilirannya akan mendukung tumbuhnya masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge society*), sebagaimana hal itu juga menjadi prinsip pendidikan nasional menurut UU No. 20 tahun 2003. Paradigma kurikulum nasional-diversifikatif ini, diperankan sebagai wahana politikopedagogis (politik pendidikan) untuk mengembangkan dan mewujudkan sistem kurikulum nasional dengan desentralisasi pendidikan dalam konteks dan komitmen politik serta strategi nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembelajaran atau instruction yang merupakan konsep pedagogik secara teknis harus diartikan sebagai upaya sistematis dan sistemik untuk menciptakan lingkungan belajar yang potensial menghasilkan proses belajar yang bermuara pada berkembangnya potensi individu sebagai peserta didik. Secara legal-formal, dalam Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas 20/2003) pembelajaran diartikan sebagai "...proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar". (Pasal 1 butir 20). Dari pengertian tersebut tampak bahwa antara belajar atau learning dan pembelajaran atau instruction satu sama lain memiliki keterkaitan substantif dan fungsional.

Belajar sebagai proses manusiawi memiliki kedudukan dan peran penting baik dalam kehidupan masyarakat tradisional maupun modern. Pentingnya proses belajar dapat dipahami dari *traditional wisdom*, filsafat, temuan penelitian dan teori tentang belajar. *Traditional wisdom* adalah ungkapan verbal dalam bentuk frasa, peribahasa, adagium, maksim, kata mutiara, petatah-petitih atau puisi yang mengandung makna eksplisit atau implisit tentang pentingnya belajar dalam kehidupan manusia. Sebagai contoh: *lqra bismirobbika ladzi kholaq* (Bacalah alam semesta ini dengan nama tuhanmu); Belajarlah sampai ke negeri China sekalipun (Belajarlah tentang apa saja, dari siapa saja dan dimana saja); *Bend the willow when it is young* (Didiklah anak selagi masih muda); Berakit-rakit ke hulu berenang-renang ketepian (Belajar lebih dahulu nanti akan dapat menikmati hasilnya).

Dalam pandangan yang lebih komprehensif konsep belajar dapat digali dari berbagai sumber seperti filsafat, penelitian empiris, dan teori. Para ahli filsafat telah mengembangkan konsep belajar secara sistematis atas dasar pertimbangan nalar dan logis tentang realita kebenaran, kebajikan dan keindahan. Karena itu filsafat merupakan pandangan yang koheren dalam melihat hubungan manusia dengan alam semesta. Plato, (dalam Bell-Gredler, 1986) melihat pengetahuan sebagai sesuatu yang ada dalam diri manusia dan di bawa lahir. Sementara itu Aristoteles melihat pengetahuan sebagai sesuatu yang ada dalam dunia fisik bukan dalam pikiran. Kedua kutub pandangan filosofis tersebut berimplikasi pada pandangan tentang belajar. Bagi penganut filsafat idealisme hakikat realita

terdapat dalam pikiran, sumber pengetahuan adalah ide dalam diri manusia, dan proses belajar adalah pengembangan ide yang telah ada dalam pikiran. Sedang bagi penganut realisme realita terdapat dalam dunia fisik, sumber pengetahuan adalah pengalaman sensori, dan belajar merupakan kontak atau interaksi individu dengan lingkungan fisik.

Pandangan lain tentang belajar, selain dari pandangan para filosof idealisme dan realisme tersebut di atas, berasal dari pandangan para ahli psikologi (Suryabrata, 1980), yang antara lain dirintis oleh William James, John Dewey, James Cattell dan Edward Thorndike tahun 1890-1900 (Bell-Gredler, 1986). Pada dasarnya para ahli psikologi melihat belajar sebagai proses psikologis yang disimpulkan dari hasil penelitian tentang bagaimana anak berpikir (Hall, 1883), atau disimpulkan dari bagaimana binatang belajar (Thorndike, 1898) atau dari hasil pengamatan praktek pendidikan (Dewey, 1899). Sejalan dengan mulai berkembangnya disiplin psikologi pada awal abad 20 berkembang pula berbagai pemikiran tentang belajar yang digali dari berbagai penelitian empiris. Pada jaman itu mulai berkembang dua kutub teori belajar yakni teori behaviorisme dan teori gestalt. Kunci dari teori behaviorisme yang digali dari penelitian Ivan Pavlov pemenang hadiah Nobel tahun 1904, dan V.M. Bechterev serta A.B. Watson adalah proses relasi antara stimulus dan respon (S-R), sedang teori gestalt adalah relasi antara bagian dengan totalitas pengalaman. Sejak itu maka berkembang berbagai teori belajar yang bertolak dari ontologi penelitian yang berbeda-beda tetapi semua bertujuan untuk menjelaskan bagaimana belajar sesungguhnya terjadi.

Keterkaitan substantif dan fungsional belajar dan pembelajaran terletak pada simpul terjadinya perubahan perilaku dalam diri individu. Keterkaitan fungsional pembelajaran dengan belajar adalah bahwa pembelajaran sengaja dilakukan untuk menghasilkan belajar atau dengan kata lain belajar merupakan parameter pembelajaran. Walaupun demikian perlu diingat bahwa tidak semua proses belajar merupakan konsekuensi dari pembelajaran. Misalnya, seseorang berubah perilakunya yang cenderung ceroboh dalam menyeberang jalan raya setelah ia secara kebetulan melihat ada orang lain yang, ketika menyeberang, tertabrak sepeda motor karena ketidakhati-

hatiannya. Oleh karena itu dapat pula dikatakan bahwa akuntabilitas belajar bersifat internal-individual, sedangkan akuntabilitas pembelajaran bersifat publik. Dalam konteks pendidikan nasional sesuai dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, proses pembelajaran dalam arti yang luas merupakan jantungnya dari pendidikan nilai untuk membangun watak atau karakter dalam rangka pencerdasan kehidupan bangsa. Pencapaian tujuan pendidikan nasional melalui pembelajaran yang mendidik, dialogis, membudayakan dan memberdayakan yang secara substantif-pedagogis harus menyentuh semua esensi tujuan pendidikan nasional mulai dari iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab", secara operasional sangat tergantung pada kualitas proses pembelajarannya. Karena itu pembelajaran memiliki misi psiko-pedagogis dan sosio-pedagogis, dalam rangka pengembangan konsep, nilai-nilai dan keterampilan yang berkenaan dengan: keberagaman dalam konteks beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; moral sosial keberagaman dalam konteks berakhlak mulia; nilai ketahanan jasmani dan rohani dalam konteks sehat; kebenaran dan kejujuran akademis dalam konteks berilmu melekat; terampil dan cermat dalam konteks cakap; kebaruan (*novelty*) dalam konteks kreatif; ketekunan dan percaya diri dalam konteks mandiri; dan kebangsaan, demokrasi dan patriotisme dalam konteks warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab" seyogyanya dilakukan dengan mengorganisasikan proses pembelajaran yang bukan saja harus berorientasi pada substansi nilai itu tetapi juga proses pembelajarannya itu harus menjadi model situasi yang mencerminkan suasana dan iklim belajar yang sarat dengan semua nilai tersebut.

Penilaian yang Mengkaji dan Mengembangkan

Untuk mengetahui seberapa jauhkah pendidikan nilai sebagai wahana pedagogis pembangunan watak atau karakter dalam rangka pencerdasan kehidupan bangsa itu mencapai dimensi tujuan pendidikan nasional mulai dari iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia, sehat, berilmu,

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab, diperlukan sarana penilaian yang mampu mengungkapkan dan menangkap indikator hasil belajar tersebut. Oleh karena itu kita perlu mengkaji bagaimana melakukan penilaian terhadap keterwujudan indikator dari nilai-nilai: keberagaman dalam konteks beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; moral sosial kebergamaan dalam konteks berakhlak mulia; nilai ketahanan jasmani dan rohani dalam konteks sehat; kebenaran dan kejujuran akademis dalam konteks berilmu melekat; terampil dan cermat dalam konteks cakap; kebaruan (*novelty*) dalam konteks kreatif; ketekunan dan percaya diri dalam konteks mandiri; dan kebangsaan, demokrasi dan patriotisme dalam konteks warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab.

Dengan demikian kita sebagai pendidik mampu memperoleh informasi yang cukup untuk dapat menyimpulkan berhasil tidaknya proses pendidikan nilai yang kita lakukan, dengan menerapkan konsep dan prosedur penilaian yang relevan dengan hakikat dan tujuan pendidikan nilai di sekolah.

Pendidik yang Berkualifikasi Akademik dan Profesional

Untuk menghasilkan lulusan yang cerdas dan baik, sebagaimana dituntut dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional, perlu segera dikembangkan standar nasional proses pembelajaran dan standar tenaga kependidikan. Sistem pengadaan, pengangkatan, penugasan, dan pembinaan tenaga kependidikan mendesak untuk dibenahi. Proses pembelajaran yang mendidik dan mencerdaskan hanya akan tumbuh apabila guru dan tenaga kependidikan lainnya benar-benar terdidik dengan baik, terlatih dengan baik, dan terjamin kesejahteraannya. Dalam pengertian generik tenaga kependidikan mencakup pendidik. Karena itu dalam Pasal 1 butir 6 UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, dikemukakan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Secara spesifik dalam Pasal 39 ayat (1) UU tersebut dinyatakan bahwa

Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Ayat ini mempunyai konotasi bahwa, pertama, tenaga kependidikan hanya mencakup tenaga penunjang proses pendidikan, dan kedua, pendidik selain tugas utamanya juga mempunyai tugas tambahan dalam bidang administrasi dan pengelolaan. Sementara itu menurut ayat (2) Pasal tersebut di atas digariskan dengan tegas bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Pada ayat ini tampak bahwa pendidik memiliki sisi tugas profesional dalam pembelajaran dan sisi lainnya dalam manajemen dan pengembangan pendidikan. Malah dalam kasus penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang pendidikan ada sejumlah pendidik yang mendapat tugas tambahan menjadi Kepala Sekolah (TK,SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK) Ketua Jurusan atau Dekan atau Rektor di perguruan tinggi yang sehari-hari menjalankan fungsi sebagai pendidik dan manager pendidikan.

Dilihat dari sisi hak azasi manusia Pasal 40 UU No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas tersebut, mengatur hak dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan lainnya sebagai berikut.

1. Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:
 - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
 - e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:
 - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
 - c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Ayat (1) tersebut dengan tegas Undang-undang tersebut melindungi hak-hak sosial, hak ekonomis, hak profesional, dan hak hukum dari pendidik dan tenaga kependidikan. Tentu saja diluar hak-hak azasi terkait profesinya, mereka mempunyai hak azasi lainnya sebagai warga negara dan sebagai manusia yang diatur dalam perundang-undangan lainnya. Pada sisi kewajiban, ayat (2) tersebut di atas mengikat pendidik dan tenaga kependidikan untuk menjalankan kewajiban profesional, personal dan sosial, tentu saja selain kewajiban lainnya terkait statusnya sebagai warga masyarakat, warga negara, dan manusia, yang juga diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugasnya pada satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya, Pasal 41 Undang-Undang tersebut di atas, mengatur hal-hal sebagai berikut.

1. Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah.
2. Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal.
3. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.
4. Ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal tersebut di atas terkait erat pada konsep dan paradigma desentralisasi pendidikan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain menyerahkan urusan pusat dalam hal pengangkatan, penempatan, dan pembinaan pendidik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam instrumentasi dan praksisnya, ternyata berpotensi menimbulkan daerah-sentris dan friksi atau gesekan negatif antar daerah yang dapat melemahkan konsepsi peningkatan mutu pendidikan secara nasional yang merupakan inti dari pendidikan nasional. Dalam kaitan dengan kecenderungan itu, ayat (1) tersebut sesungguhnya sudah merupakan jalan keluar normatif yang harus diadakan pengaturan lebih lanjut guna mengatasi kecenderungan negatif dari desentralisasi pendidikan tersebut. Kelihatannya pengaturan lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut akan dapat kita lihat dalam Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Undang-Undang Guru yang keduanya, pada saat ini sedang dalam tahap-tahap akhir pembahasan untuk pengundangan.

Hal yang tak kalah pentingnya berkaitan dengan pendidik adalah tentang kualifikasi dan sertifikasi. Secara konseptual kualifikasi sangat terkait pada kewenangan akademis yang terkait tingkat pendidikan formal dari pendidik, sedangkan sertifikasi terkait pada kewenangan profesional sebagai pendidik. Pasal 42 dan 43 Undang-Undang tersebut di atas, mengatur kualifikasi, sertifikasi, dan persyaratan lainnya sebagai pendidik. Dalam pasal 42 tersebut dinyatakan sebagai berikut.

1. Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
2. Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.

3. Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Lebih lanjut dalam Pasal 43 dinyatakan sebagai berikut.

1. Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.
2. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.
3. Ketentuan mengenai promosi, penghargaan, dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Dari kedua pasal tersebut kita dapat memahami bahwa secara akademik seorang pendidik harus merupakan lulusan dari perguruan tinggi terakreditasi. Hak ini dapat diartikan baik perguruan tinggi kependidikan maupun non-kependidikan. Sedangkan sertifikat pendidik harus diperoleh dari perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan atau LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) yaitu IKIP, FKIP, dan STKIP yang sebagian dari IKIP (lama) sudah berubah menjadi Universitas dengan *wider-mandate*, seperti UNJ, UPI, UNP, UNM. Dengan demikian seseorang yang ingin menjadi pendidik harus mempunyai ijazah dalam salah satu bidang, misalnya, matematika, biologi, ekonomi, bahasa Indonesia atau lintas bidang keilmuan seperti guru kelas SD dan guru kelas TK, dan sertifikat kompetensi pendidik dalam bidang dan jenjang pendidikan yang relevan setelah lulus uji kompetensi. Acuan normatif mengenai hal tersebut dapat dibaca dan dimaknai Pasal 61 ayat (1) dan (2) UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.

Khusus yang menyangkut tentang kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik untuk berbagai jenjang pendidikan dasar dan menengah, dalam PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), yakni dalam Pasal 29 ayat (1)-(6) dengan tegas dinyatakan bahwa pendidik untuk pendidikan anak usia dini, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SDLB/SMPLB/SMALB, SMK/MAK harus memiliki kualifikasi akademik diploma empat (D-

IV) atau sarjana (S1) dengan latar belakang yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan dan sertifikat profesi guru untuk masing-masing jenis pendidikan yang relevan. Sedang untuk pendidik pada perguruan tinggi disyaratkan memiliki ijazah D-IV atau S1 untuk program diploma, S2 untuk S1, dan S3 untuk program magister dan program doktor ditambah sertifikat kompetensi yang relevan, bagi mereka yang mengajar pada program pendidikan profesi, seperti dokter, akuntan, notariat. Yang sangat menarik untuk diingat dan disimak adalah semangat dari Pasal 94 huruf c PP tersebut, yang menyatakan bahwa standar kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berlaku efektif sepenuhnya 15 (lima belas) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini. Hal ini mengandung makna bahwa pada tahun 2020 seluruh pendidik pada semua jenjang pendidikan formal harus memiliki kualifikasi akademik yang dipersyaratkan oleh Pasal 29 PP tersebut. Sungguh suatu komitmen normatif yang sangat tinggi untuk menopang perwujudan pendidikan nasional yang bermutu dan sebagai pranata sosial yang handal dan berwibawa. Untuk itu, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 44 UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, maka Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah (Ayat 1).

Hal ini mengandung arti bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus tetap bersinergi guna mewujudkan sumberdaya pendidikan yang memadai. Selain itu juga ditegaskan bahwa Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya (Ayat 2). Hal ini mengandung arti bahwa masyarakat mempunyai kewajiban yang sama dengan perintah dalam membina pendidikan dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang didirikan dan diselenggarakannya. Tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah masih tetap besar karena masih wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat (Ayat 3).

Lingkungan Belajar yang Kondusif

Secara konstitusional pada dasarnya pendidikan adalah tanggung jawab negara, yang dalam instrumentasi dan praktisnya ditangani bersama oleh Pemerintah dan pemerintah daerah, lembaga legislatif, lembaga-lembaga negara departemental dan nondepartemental yang relevan serta seluruh lapisan masyarakat. Keseluruhan upaya yang dilakukan oleh semua unsur terkait pada prinsipnya merupakan upaya bersama untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional pada berbagai lini organisasi dan aneka satuan dan lingkungan pendidikan. Inilah makna dasar dari mangemen pendidikan nasional.

Konsep dan prinsip dasar pengelolaan pendidikan nasional telah diatur dalam Pasal 50 UU No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Secara institusional-nasional pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab menteri. (Ayat 1). Implikasi dari tanggung jawab tersebut maka Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional (Ayat 2). Dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa melalui sektor pendidikan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional (Ayat 3). Untuk mendukung keseluruhan upaya sistemik pendidikan nasional maka Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah (Ayat 4). Selain untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam konteks pergaulan global, keunggulan lokapun sudah seharusnya mendapat perhatian sehingga tidak akan terjadi ketimpangan pendidikan secara internal dan eksternal. Untuk itu telah digariskan bahwa Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal (Ayat 5). Khusus untuk perguruan tinggi, sesuai dengan kedudukannya sebagai lembaga pendidikan yang memiliki otonomi keilmuan dan pengelolaan maka perguruan tinggi diberi kewenangan untuk menentukan kebijakan dan

memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya. (Ayat 6) Mengingat begitu kompleksnya pengelolaan pendidikan nasional diperlukan ketentuan mengenai pengelolaan pendidikan dalam bentuk peraturan pemerintah.

Mengenai pengelolaan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, dalam Pasal 51 dan 52 UU Nomor 20 tahun 2003 tersebut di atas ditegaskan ketentuan bahwa. Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah (Pasal 51 ayat 1). Sedangkan Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan (Pasal 51 ayat). Sementara itu Pengelolaan satuan pendidikan nonformal dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (Pasal 52 ayat 1).

Dalam pengelolaan pendidikan nasional pengawasan merupakan unsur penting untuk melihat efektivitas penyelenggaraan pendidikan nasional secara menyeluruh. Dalam pasal 66 ayat (1) ditetapkan bahwa Pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing (Ayat 1). Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut diterapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik (Ayat 2). Demikian juga sarana dan prasarana merupakan daya dukung harus ada. Oleh karena itu secara normatif telah ditentukan bahwa Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik (Pasal 45 ayat 1)

Dalam upaya untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan, pendirian dan penyelenggaraan pendidikan yang berdasarkan pada standar nasional pendidikan, secara normatif dalam Pasal 62 UU No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas diatur sebagai berikut.

1. Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah daerah.

2. Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.
3. Pemerintah atau pemerintah daerah memberi atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Ketentuan mengenai pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Ketentuan perundang-undangan tersebut di atas berlaku bagi satuan pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara lain .(Pasal 63). Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi peserta didik warga negara asing, dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan atas persetujuan Pemerintah Republik Indonesia (Pasal 64), yang secara khusus diatur dalam Pasal 65 sebagai berikut.

1. Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik warga negara Indonesia.
3. Penyelenggaraan pendidikan asing wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan pengelola warga negara Indonesia.
4. Kegiatan pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan negara lain yang diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Ketentuan mengenai pnggaraan pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Kesimpulan

1. Secara kontekstual–sosial-politik pembaruan sistem pendidikan nasional perlu pula disesuaikan dengan pelaksanaan otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana hal itu diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Untuk itu maka diperlukan Standar Nasional Pendidikan yang bersifat menyeluruh dan menyangkut semua elemen pendidikan nasional.
2. Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi dan sertifikasi. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.
3. Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan tersebut di atas mengandung arti bahwa sebagai implikasi dari komitmen nasional untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, maka komponen pendidikan nasional perlu distandarisasi sehingga kita mempunyai takaran yang sama dalam bentuk: standar isi; standar proses; standar kompetensi lulusan; standar pendidik dan tenaga kependidikan; standar sarana dan prasarana; standar pengelolaan; standar pembiayaan; dan standar penilaian pendidikan. Adanya semua standar tersebut sangat penting agar kita mempunyai tolok ukur mutu pendidikan yang dapat digunakan sebagai kriteria internal (*internal criteria*) untuk menilai keberhasilan pendidikan secara periodik.
4. Agar kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang akan datang itu lebih diversifikatif sehingga lebih fleksibel dan adaptif terhadap kehidupan masyarakat, diperlukan strategi pengembangan kurikulum yang bersifat sistemik atas dasar kajian komprehensif mengenai kebutuhan dan prospek kehidupan masyarakat Indonesia dan tuntutan kehidupan

global. Selain itu, diperlukan dukungan sarana dan prasarana pendidikan yang bermutu dan tepat konteks yang sengaja dirancang untuk menopang pelaksanaan kurikulum tersebut. Untuk itu seyogyanya segera ada kebijakan nasional tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum yang bersifat nasional sebagai landasar konseptual dan operasional pengembangan silabus di tingkat daerah,

5. Pembelajaran memiliki misi psiko-pedagogis dan sosio-pedagogis, karena itu pembelajarannya seyogyanya dilaksanakan dalam rangka pengembangan konsep, nilai-nilai dan keterampilan yang berkenaan dengan: keberagamaan dalam konteks beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; moral sosial kebergamaan dalam konteks berakhlak mulia; nilai ketahanan jasmani dan rohani dalam konteks sehat; kebenaran dan kejujuran akademis dalam konteks berilmu melekat; terampil dan cermat dalam konteks cakap; kebaruan (*novelty*) dalam konteks kreatif; ketekunan dan percaya diri dalam konteks mandiri; dan kebangsaan, demokrasi dan patriotisme dalam konteks warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab". Untuk itu pembelajaran seyogyanya dilakukan dengan cara mengorganisasikan proses pembelajaran yang bukan saja harus berorientasi pada substansi nilai itu tetapi juga proses pembelajarannya itu harus menjadi model situasi yang mencerminkan suasana dan iklim belajar yang sarat dengan semua nilai tersebut.
6. Secara akademik seorang pendidik harus merupakan lulusan dari perguruan tinggi terakreditasi baik perguruan tinggi kependidikan maupun non-kependidikan. Sedangkan sertifikat pendidik harus diperoleh dari perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan atau LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan).

Daftar Pustaka

- Arifin, A. (2003). *Memahami pro-kontra RUU Sisdiknas*. Jakarta: Panja RUU Sisdiknas.
- Brameld, T. (1965). *Education as power*. USA: Holt, Rivehart and Winston, Inc.
- Beauchamp, R.J. (1975). *Curriculum theory*. New York: Macmillan Co.
- Beeby, D. (1976). *Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Civitas International (1998). *International partnership for civic awareness conference report*. Strasbourg: Civitas International.
- Cohen, D.W. (1978). *Curriculum study*. Sydney: Macquarie University.
- Coombs, P.W.(1972). *The world educational crisis*. Paris: UNESCO.
- Depdiknas (2002). *Standar kompetensi guru Sekolah Dasar*. Jakarta: Ditjen Dikti.
- Dewan Perwakilan Rakyat RI (2003). *Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretariat DPR RI.
- Djojonegoro, W. (1996). *Lima puluh tahun pendidikan Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Houston, R.W., et al. (1996). *Touch the future teach*. New York: Macmillan Co.
- Purkey, L.S. & Novak, B.S. (1990). *Site-based management*. Houston.
- Republik Indonesia (2003). *Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Republik Indonesia (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sanusi, A. (1998). *Pendidikan alternatif: Menyentuh azas dasar persoalan pendidikan dan kemasyarakatan*. Bandung: PT Grafindo Media Pratama.

- Suryabrata, S. (1980). *Psikologi pendidikan*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Winataputra, U.S. (2001). *Jatidiri pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana sistemik pendidikan demokrasi*. Bandung: PPS UPI. *Disertasi*.
- Winataputra, U.S. (2003). *Analisis konseptual terhadap Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas)*. Jakarta (Makalah).

Standar Nasional Pendidikan: Sebuah Paparan tentang Konsep dan Implikasi

Tegeh Prakoso

Agus Tatang Sopandi

P

embicaraan tentang segala hal yang berkaitan dengan permasalahan pendidikan di Indonesia selalu menyedot perhatian masyarakat dan menjadi salah satu wacana yang sering kali dijadikan komoditas politik bagi sebagian anggota parlemen dan para birokrat pemerintahan. Penentuan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN, misalnya, telah menjadi 'senjata' ampuh untuk menghipnotis massa pada kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden beberapa waktu yang lalu. Bahkan, kalkulasi angka 20% ini pun menjadi ajang partai politik tertentu yang berseberangan dengan pemerintah untuk mengkritik kebijakan dalam bidang pendidikan yang kemudian memang, dengan berbagai alasan, pemerintah belum dapat memberikan porsi 20% tersebut.

Dalam beberapa waktu terakhir wacana tentang RUU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 yang telah disahkan menjadi UU Guru dan Dosen juga telah banyak menyita perhatian di banyak media massa. Munculnya UU Guru dan Dosen tersebut setidaknya juga memberikan gambaran bahwa ada sesuatu yang harus dibenahi dalam sistem pendidikan di Indonesia dalam kaitannya dengan kesejahteraan dan pembinaan sumber daya manusia (SDM), dalam hal ini guru dan dosen. Meskipun dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, keberadaan mereka telah terakomodasi, munculnya

rancangan tersebut membuktikan bahwa pemerintah dinilai belum mampu memberikan sesuatu yang terbaik bagi para warga negaranya yang berprofesi sebagai pendidik. Oleh karena itu, hal pertama yang membuat pembahasan tentang permasalahan pendidikan menarik adalah jika dikaitkan dengan kesejahteraan. Apalagi sudah menjadi rahasia umum bahwa para guru besar yang merupakan jabatan tertinggi dalam institusi pendidikan digaji kurang dari tiga juta rupiah sehingga akhirnya muncul jargon bahwa dosen singkatan dari *ngomonge sak dos bayarane sak sen* (Bicaranya harus banyak tetapi gajinya hanya satu sen).

Pengesahan RUU menjadi UU Guru dan Dosen tersebut oleh pemerintah pada tanggal 6 Desember 2005 ternyata banyak menuai kritik. Salah satu hal yang dianggap cukup krusial adalah adanya kesan perbedaan perlakuan dari pemerintah karena UU tersebut dianggap menggarisbawahi paradigma berpikir antagonis-dikotomis antara guru negeri dengan guru swasta, juga dosen negeri dan dosen swasta. Guru dan dosen non-PNS dan siswa di lembaga pendidikan swasta adalah warga kelas dua. Oleh karena itu, baru beberapa hari disahkan oleh pemerintah, wacana amandemen terhadap UU ini pun sudah bergulir (*Kompas*, 9/12/2005).

Selain permasalahan yang dipandang mengesampingkan para guru dan dosen swasta, UU tersebut juga belum mampu memberikan kepastian tentang kesejahteraan. Meskipun sejak awal penyusunan rancangannya, apresiasi tentang kesejahteraan mendapat tanggapan yang sangat positif, kalangan guru dan dosen pantas kecewa. Selama tiga bulan RUU tersebut diwacanakan, terutama beberapa pasal yang dianggap krusial, di antaranya pasal 14 yang menyebut bahwa guru berstatus PNS memperoleh gaji dua kali lipat dari gaji PNS nonguru pada golongan yang sama. Pasal 14 ini, setelah disahkan menjadi UU, bergeser menjadi pasal 15, tetapi dengan tambahan ayat yang berisi persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gaji yang dua kali lipat tersebut, yang bunyinya "besarnya gaji tersebut akan ditentukan lewat pemerintah".

Namun demikian, mestinya kita dapat memberikan penilaian yang seimbang terhadap UU Guru dan Dosen yang tentu saja dalam proses penyusunan dan pengesahannya telah melibatkan banyak pakar pendidikan. Kita harus ingat betul

bahwa pemerintah tentu akan berupaya memberikan yang terbaik bagi warganya. Tentang adanya persyaratan sertifikasi bagi guru, misalnya, hendaknya juga dipandang sebagai upaya positif pemerintah untuk dapat lebih meningkatkan profesionalitas guru-guru di Indonesia. Seandainya sertifikasi ini tidak dipersyaratkan, apakah kemudian seluruh guru di tanah air dianggap memiliki kemampuan yang sama? Tentu tidak demikian bukan?

Fatah (Kompas, 9/12/2005), seorang guru besar UPI, mengemukakan bahwa hampir separuh dari sekitar 2,6 juta guru di Indonesia tidak layak mengajar karena kualifikasi dan kompetensinya tidak sesuai. Kenyataan ini diduga sebagai penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Lebih lanjut Fatah menjelaskan bahwa jumlah guru yang tidak layak mengajar tercatat 912.505 orang, terdiri atas 605.217 guru SD, 167.643 guru SMP, 75.684 guru SMA, dan 63.961 guru SMK. Data ini setidaknya membuktikan bahwa ada yang harus dibenahi dalam profesionalitas guru di tanah air.

Selain itu, apa yang dikemukakan Fatah ini sebenarnya tidak mengherankan karena mereka yang memasuki lembaga pendidikan guru pada umumnya bukanlah yang memilih jabatan guru sebagai pilihan pertama, melainkan karena banyak di antara mereka yang takut tidak diterima dan/atau tidak dapat diterima di lembaga pendidikan lainnya. Padahal James B. Conant (Soedijarto, 2002) dalam rekomendasinya menyarankan agar mereka yang menjadi guru harusnya mereka yang termasuk dalam 20% teratas lulusan sekolah menengah.

Munculnya Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 (PP Nomor 19 Tahun 2005) tentang Standar Nasional Pendidikan setidaknya dapat memberikan arah kebijakan tentang sistem pendidikan di Indonesia, termasuk dalam hal profesionalitas guru. Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa ruang lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi delapan standar, mulai dari standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, sampai pada penilaian pendidikan. Standar ini kemudian berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Dengan munculnya standar ini, tekad pemerintah untuk lebih

meningkatkan kualitas pendidikan nasional setidaknya telah terakomodasi dengan baik, karena pemerintah, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia juga telah mengesahkannya dalam sebuah PP. Tentu saja PP ini harus dijadikan acuan bagi seluruh insan pendidikan di Indonesia.

Berkaitan dengan PP tersebut, melalui makalah ini penulis bermaksud menyoroti dua hal yang perlu untuk diperhatikan, yakni yang berkaitan dengan konsep dan implikasinya. Oleh karena itu, untuk memenuhi tujuan tersebut, dalam makalah ini, penulis membagi tulisan ini menjadi dua hal, yakni (1) Konsep dan Implikasi Standar Nasional Pendidikan terhadap Substansi Pendidikan serta (2) Konsep dan Implikasi Standar Nasional Pendidikan terhadap Manajemen Pendidikan.

Konsep dan Implikasi Standar Nasional Pendidikan terhadap Substansi Pendidikan

Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kestuan Republik Indonesia. SNP ini bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Jika dikaitkan dengan kondisi bangsa Indonesia yang berangsur-angsur bangkit dari krisis multidimensi yang menerpa sejak masa 98-an yang lalu, tujuan ini sangatlah sesuai. Beberapa kritikan dari berbagai pihak yang ditujukan kepada para insan pendidikan, misalnya yang menyoroti rendahnya budi pekerti sebagian peserta didik yang berakibat pada turunnya penilaian terhadap kualitas pendidikan kita, berusaha diperbaiki pemerintah dengan disahkannya PP tentang SNP ini.

Untuk mengaitkan SNP dengan substansi pendidikan, penulis akan mengawali pembahasan makalah ini dengan menampilkan hakikat pendidikan dalam konteks pembangunan nasional, sebagaimana diatur dalam bagian penjelasan SNP, yang memiliki beberapa fungsi. Setelah fungsi-fungsi tersebut dipenuhi, perlu dipahami pula visi dan misi yang dapat berfungsi sebagai arah, sebagai navigasi, dalam mencapai tujuan pendidikan nasional yang diinginkan.

Fungsi Pendidikan Nasional

Dalam konteks pembangunan nasional, pendidikan memiliki tiga fungsi, yakni (a) pemersatu bangsa, (b) penyamaan kesempatan, dan (c) pengembangan potensi diri. Dalam implikasinya, pendidikan diharapkan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memberi kesempatan yang bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan memungkinkan setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal.

Jika fungsi pendidikan ini diderivasikan dalam fungsi pendidikan yang diemban oleh Universitas Terbuka (UT), misalnya, maka ketiga fungsi tersebut telah dijalankan oleh UT secara berkesinambungan dengan tetap mengutamakan perbaikan kualitas pembelajarannya. UT sebagai satu-satunya institusi pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh telah berupaya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap warga negara Indonesia di seluruh Nusantara, yang karena satu dan lain hal tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka, untuk meningkatkan kemampuan intelektualnya, tanpa mereka harus meninggalkan aktivitas kesehariannya. Apa yang telah dilaksanakan oleh UT setidaknya juga mencerminkan bahwa pemerintah konsisten terhadap upaya peningkatan kualitas mutu sumber daya manusianya, termasuk upaya melalui sistem pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh.

Visi Pendidikan Nasional

Visi pendidikan nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Visi ini tidaklah berlebihan mengingat tantangan globalisasi mengharuskan kita cepat tanggap dalam menghadapi perkembangan yang sangat cepat. Tidak adanya satu perguruan tinggi Indonesia dalam daftar deretan perguruan tinggi di Asia setidaknya menunjukkan bahwa sudah seharusnya bangsa

Indonesia sadar bahwa atmosfer akademik yang harus selalu menaungi setiap penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia ternyata belum mampu mengimbangi laju percepatan pendidikan di dunia yang amat pesat.

Misi Pendidikan Nasional

Visi yang telah ditetapkan dalam penjelasan tentang SNP ini tentu saja harus dijabarkan secara konkret dalam tujuh misi pendidikan nasional yang terdiri atas: (a) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; (b) meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional; (c) meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dengan tantangan global; (d) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; (e) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; (f) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar yang bersifat nasional dan global; dan (g) mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkait dengan visi dan misi pendidikan nasional tersebut, terdapat empat hal yang harus disikapi kaitannya dengan reformasi pendidikan. Pertama, penyelenggaraan pendidikan dinyatakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, sehingga harus ada pendidik yang memberikan keteladanan dan mampu membangun kemauan, serta mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik. Dalam konteks ini, munculnya UU tentang Guru dan Dosen setidaknya memberikan jaminan bahwa pemerintah sangat memerhatikan peningkatan kualitas pendidik di tanah air. Ke dua, adanya perubahan tentang peran manusia dari paradigma manusia sebagai sumber daya pembangunan, menjadi

paradigma manusia sebagai subjek pembangunan secara utuh. Artinya, masyarakat juga harus ikut berperan aktif dalam proses pembentukan manusia Indonesia seutuhnya seperti yang ingin dihasilkan melalui tujuan pendidikan. Ke tiga, adanya pandangan terhadap keberadaan peserta didik yang terintegrasi dengan lingkungan sosiokulturalnya dan pada gilirannya akan menumbuhkan individu sebagai pribadi dan anggota masyarakat mandiri yang berbudaya. Dalam konteks ini, cara pandang terhadap peserta didik selama ini harus diperbaiki karena dalam proses pembelajarannya ia melalui proses pentahapan aktualisasi, mulai dari yang paling sederhana, seperti intelektual, emosional, dan spiritual, sampai pada tahapan yang paling rumit, yakni yang berkenaan dengan pemahaman diri dan lingkungan kulturalnya. Ke empat, dalam rangka mewujudkan visi dan misi tujuan pendidikan tersebut, diperlukan suatu acuan dasar (*benchmark*) oleh penyelenggara dan satuan pendidikan, yang antara lain meliputi kriteria dan kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Atas dasar ini, revitalisasi dan reaktualisasi kurikulum dalam satuan pendidikan merupakan hal yang harus diperhatikan. Hal ini mengingat cepatnya perkembangan global yang jika tidak diantisipasi dengan penggunaan kurikulum yang sesuai tentu akan menjadikan bangsa Indonesia melulu sebagai objek teknologi dunia.

Paparan tentang penjelasan visi dan misi pendidikan di Indonesia ini pada akhirnya diharapkan dapat menjawab pertanyaan para pakar maupun praktisi pendidikan yang sering melontarkan kritik kaitannya dengan ukuran keberhasilan jenjang satuan pendidikan. Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) merupakan salah satu contoh yang sering mendapatkan sorotan. Selama ini, ukuran keberhasilan pendidikan dilihat tingkat kelulusan dan kualitas lulusan yang diukur berdasarkan kemampuan peserta didik dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penguasaan pengetahuan. Sampai pada tingkat jenjang pendidikan menengah, pertanyaan tersebut umumnya disusun dalam bentuk soal objektif tes seperti yang terdapat dalam UN. Akibatnya, apa yang dikerjakan, baik oleh guru maupun peserta didik, hanya didorong oleh motivasi untuk mencapai standar nilai terendah dalam UN.

Apalagi pemerintah juga berencana meningkatkan nilai standar kelulusan dari 4,26 menjadi 5,00 yang membuat siswa dan wali murid panik. Kebijakan tersebut dinilai sangat memberatkan siswa. Bahkan, jika kenaikan tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikannya dikhawatirkan menimbulkan masalah baru dalam pendidikan (Kedaulatan Rakyat, 10/12/2005). Padahal penguasaan seorang peserta didik terhadap pengetahuan seperti yang diukur melalui UN bukan cermin dari kemampuan seseorang untuk mengerjakan atau melaksanakan sesuatu dan bukan pula indikator yang menunjukkan terbentuknya watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Selain tentang standar kelulusan UN, sertifikasi kini juga muncul sebagai wacana yang mendapat tanggapan amat beragam, seperti yang telah penulis singgung dalam bagian pengantar. Sertifikasi ini begitu menggema menyertai disahkannya UU Guru dan Dosen. Sertifikasi yang dipersyaratkan bagi guru dan dosen ini dikhawatirkan memacu pihak-pihak berkepentingan untuk melakukan sertifikasi massal. Kondisi objektif yang menunjukkan bahwa tidak satu pun dari total sekitar 1,6 juta guru di tanah air yang memegang sertifikat mengajar. Bukan tidak mungkin memicu lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK), termasuk universitas eks-IKIP, menggenjot sertifikasi massal dengan pendekatan proyek (Kompas, 10/12/2005).

Sebagai gambaran bagi pembaca, tampaknya menarik apa yang dikemukakan Soedijarto (2000) yang memaparkan bahwa untuk menjadikan seseorang mengetahui pengetahuan memang dapat ditempuh dalam proses pembelajaran yang sangat tradisional, yakni seorang guru menerangkan sementara peserta didik mencatat atau membaca dan menghafal isi buku. Namun, proses semacam ini, terutama di negara berkembang seperti Indonesia yang masih adanya perbedaan nilai-nilai di sekolah dengan nilai-nilai di keluarga, maka tidak memungkinkan tertanamnya berbagai kemampuan, nilai, sikap, watak, dan perilaku, seperti yang diharapkan oleh keberadaansistem pendidikan nasional. Hanya melalui proses sosialisasi dan pembudayaan, yaitu proses pembelajaran yang menantang dan merangsang otak (kognitif), menyentuh dan menggerakkan hati

(afektif), dan mendorong peserta didik untuk melakukan (motorik), dengan didukung sistem evaluasi yang merupakan bagian dari sistem penguatan tingkah laku yang baik dan meniadakan tingkah laku yang negatif itulah maka berbagai kemampuan dan nilai dapat ditanamkan.

Dalam kalimat Jacques Delors (Soedijarto, 2000), hal tersebut disebut pembelajaran yang mengacu pada empat pilar belajar untuk memasuki abad ke-21, yakni *learning to know*, *learning to do*, *learning to be*, dan *learning to live together*. Melalui proses pembelajaran yang semacam ini peserta didik, di semua jenjang pendidikan baik, dasar, menengah, maupun tinggi, akan merasakan nikmatnya belajar sehingga dorongan untuk belajar terus tumbuh. Dengan demikian, peserta didik secara tidak sadar dengan didukung oleh sistem evaluasi yang relevan, akan memprioritaskan berbagai nilai modern, seperti sikap ilmiah, sikap ingin tahu yang terus-menerus, disiplin, dan berbagai sikap yang diharapkan tumbuh melalui proses pendidikan.

Dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP ini pemerintah juga membentuk salah satu badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi standar nasional pendidikan. Badan tersebut adalah Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan diketahui oleh Prof. Dr. Bambang Suhendro, mantan Dirjen Pendidikan Tinggi, yang tentu saja tidak perlu diragukan kredibilitas dan kepakarannya dalam permasalahan pendidikan. Badan ini memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam mendukung terwujudnya tujuan pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Badan independen yang kedudukannya termaktub dalam Bab XI PP Nomor 19/2005 ini juga diharapkan mampu menjembatani pemikiran para praktisi maupun pakar pendidikan yang sering kali memunculkan sikap pro-kontra dalam menanggapi kebijakan pemerintah tentang keputusan-keputusan yang menyangkut pendidikan. Standar kelulusan UN dan sertifikasi adalah dua contoh yang harus segera dicarikan jalan keluarnya. Pemikiran-pemikiran yang berbeda dalam memandang standar dan sertifikasi tersebut hendaknya dapat diwadahi dalam bentuk pengakomodasian untuk kemudian dicarikan jalan keluar terbaiknya. Setidaknya hal inilah yang menggambarkan bahwa

SNP benar-benar digunakan pemerintah untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia karena standar isi, proses, kompetensi lulusan, sampai dengan penilaian pendidikan telah menjadi tugas dan tanggung jawabnya, bersama dengan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) dan Badan Akreditasi Nasional (BAN), baik dalam jenjang pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi.

Konsep dan Implikasi Standar Nasional Pendidikan terhadap Manajemen Pendidikan

Konsep dan implikasi SNP terhadap manajemen pendidikan yang dimaksud dalam makalah ini adalah konsep dan implikasi yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan pendidikan. Jika dikaitkan dengan semangat desentralisasi, semua konsep tersebut harus berada dalam semangat membangun inovasi pendidikan yang relevan dengan UU Nomor 32/2004 tentang Otonomi Daerah dan UU Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam UU tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu dari 16 urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, sementara UU tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa pemerintah daerah turut bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, beberapa hal yang berkait dengan pendidikan, khususnya manajemen pelaksanaannya, pemerintah daerah harus turut bertanggung jawab.

Standar Sarana dan Prasarana

Dalam SNP, Standar Sarana dan Prasarana diwadahi dalam bab ke-7 yang di dalamnya terdiri atas tujuh pasal, mulai dari Pasal 42 sampai dengan Pasal 48. Berdasarkan tujuh pasal tersebut, terdapat satu hal mendasar yang penting untuk penulis tampilkan, yakni dalam hal sarana dan prasarana yang diperlukan guna menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Dalam Pasal 42 dijelaskan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan

pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan. Selain itu, setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berekreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Hal ini mengandung implikasi bahwa masyarakat harus jeli dalam memilih satuan pendidikan, khususnya satuan pendidikan tinggi yang selama ini sering menggunakan tempat belajar berupa rumah toko, yang juga menawarkan berbagai kemudahan dalam mengikuti sistem pendidikan yang ditawarkannya. Dalam jangka panjang, pemerintah juga wajib menerbitkan satuan pendidikan yang memiliki fasilitas seperti terdapat dalam Pasal 42 tersebut. Ketentuan ini sekaligus memberikan petunjuk bagi institusi swasta yang ingin mendirikan satuan pendidikan, khususnya pendidikan prasekolah dan pendidikan dasar bahwa sekurang-kurangnya sekolah yang akan mereka dirikan itu memiliki lahan yang dapat digunakan sebagai sarana olahraga dan arena bermain.

Standar Pengelolaan

Dalam SNP, Standar Pengelolaan dibagi dalam tiga pengelolaan, yakni oleh satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan pemerintah. Dalam hal standar pengelolaan oleh satuan pendidikan dan pemerintah daerah terdapat satu konsep krusial yang penting untuk dipahami. Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Untuk mendukung pelaksanaan ini, pemerintah daerah wajib menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan yang harus disetujui dan dipertanggungjawabkan oleh gubernur atau bupati/walikota. Rencana kerja yang disusun harus memprioritaskan (1) wajib belajar; (2) peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah; (3)

penuntasan pemberantasan buta aksara; (4) penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat; (5) peningkatan status guru sebagai profesi; (6) akreditasi pendidikan; (7) peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat; dan (8) pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan.

Sementara itu, pengelolaan satuan pendidikan di perguruan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan, dan arena kepengolaan fungsional lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.

Sistem pengelolaan satuan pendidikan semacam ini harus dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh setiap institusi pendidikan sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi peserta didik. Khusus di UT, wacana otonomi perguruan tinggi yang telah lama bergulir hendaknya dapat dipersiapkan secara cermat dan teliti, disertai dengan tahap sosialisasi yang matang, agar di kemudian hari dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*) UT. Yang jelas, otonomi perguruan tinggi hendaknya tidak diartikan secara sempit hanya sebagai "pengaturan keuangan secara mandiri".

Standar Pembiayaan Pendidikan

Dalam SNP, Standar Pembiayaan terdapat dalam Pasal 62 yang penjelasannya adalah bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

Penutup

Dalam bagian akhir makalah ini, penulis perlu pula menjelaskan bahwa sebagai bangsa yang majemuk, maka pengelolaan pendidikan nasional pun mestinya berdasarkan pada keragaman nilai dan sekaligus dikembangkan untuk tetap menjaga pluralisme sebagai bangsa, yang bukan hanya milik

suku Jawa, Sunda ataupun Sumatra saja. Oleh karena itu, upaya peningkatan mutu pendidikan nasional hendaknya tetap dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Berbagai daerah boleh berlomba-lomba dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada para masyarakatnya, tetapi dalam beberapa segi tetap harus dapat dipertanggungjawabkan secara objektif.

Munculnya PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP hendaknya dipandang sebagai upaya pemerintah untuk memberikan sesuatu yang terbaik demi peningkatan kualitas pendidikan di Nusantara. Meskipun beberapa waktu terakhir sering muncul wacana yang menyudutkan kualitas pendidikan yang semakin merosot, yang diakibatkan rendahnya kesejahteraan para pendidiknya, dan kurang mengenyakan tujuan pendidikan sebagai salah satu sarana pembentuk watak dan kepribadian, seperti sering maraknya tawuran pelajar dan indikasi seks bebas yang melibatkan guru (seperti kasus di Cianjur), telah menggambarkan bahwa memang ada yang perlu dibenahi dalam pendidikan di Indonesia. Namun, kita pun tidak dapat menutup mata bahwa ternyata masih tetap muncul duta-duta pelajar Indonesia yang memperoleh penghargaan, baik emas, perak, maupun perunggu. Bahkan, satu di antaranya adalah prestasi yang diraih oleh I Made Agus Irawan, pelajar SMA asal Bangli, Bali, yang mendapat penghargaan *The First Step to Nobel Prize* atau penghargaan tertinggi riset fisika (Iswordo dalam Kompas, 10/12/2005). Ini membuktikan bahwa kualitas pendidikan yang di Indonesia tidaklah seburuk yang banyak dilontarkan banyak pihak.

Daftar Pustaka

- Darmaningtyas (2002). Yang disembunyikan dalam praktik pendidikan dalam *Pendidikan Untuk Masyarakat Baru: 70 Tahun Dr. H.A.R. Tilaar, M.Sc.Ed.* Jakarta: Grasindo.
- Isworo, B. (2004). Negara yang kaya bibit unggul. *Kompas*, 10 Desember 2005 halaman 36.
- Kedaulatan Rakyat, 10 Desember 2005, halaman 1 kolom 5.
- Kompas, 9 Desember 2005, halaman 12, kolom 3.
- Departemen Pendidikan Nasional (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Depdiknas.
- Soedijarto (2000). *Pendidikan nasional sebagai wahana mencerdaskan keidupan bangsa dan membangun peradaban negara-bangsa (Sebuah usaha memahami makna UUD 1945)*. Jakarta: Center for Information and National Policy Studies (CINAPS).
- Soedijarto (2002). Rekrutmen, pendidikan, dan penempatan, serta pembinaan guru untuk menunjang pendidikan yang relevan dan bermutu dalam *Pendidikan Untuk Masyarakat Baru: 70 Tahun Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, M.Sc.Ed.* Jakarta: Grasindo.
- Departemen Pendidikan Nasional (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional.
- Departemen Dalam Negeri (2004). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Otonomi Daerah*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.

Implikasi Standar Nasional Pendidikan pada Pengembangan Kurikulum Program Studi S1 Penyuluhan & Komunikasi Penyuluhan

Endang Indrawati

Ila Fadila

Sebagai negara agraris, sektor pertanian di Indonesia mempunyai peranan penting dalam menunjang pembangunan nasional. Dukungan sektor Pertanian terhadap nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia adalah sebesar 15,9% (BPS, 2004). Jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian diperkirakan sekitar 40%.

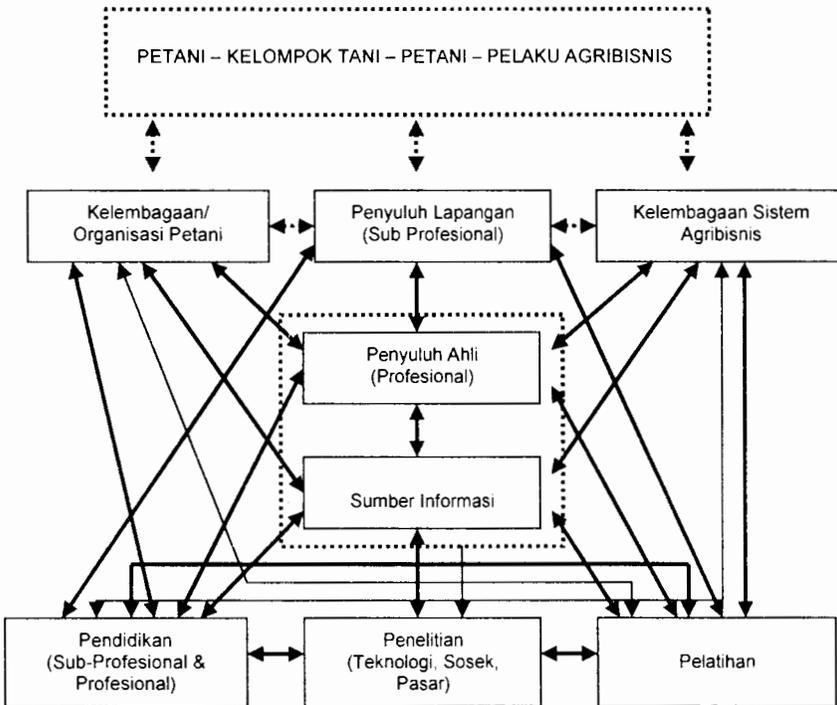
Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecepatan dan keragaman informasi, serta adanya persaingan pasar, dibutuhkan masyarakat petani yang mampu beradaptasi dengan cepat serta mampu memanfaatkan peluang agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Potret masyarakat petani saat ini adalah memiliki kualitas dan kuantitas usahatani yang masih rendah, kualitas individu yang belum berkembang, akibatnya belum mampu memanfaatkan peluang berusahatani dengan baik. Kondisi masyarakat petani tersebut membutuhkan penyuluh pertanian sebagai agen perubahan (*agent of change*) yang bertugas mengubah usahatani sekaligus mengubah perilaku petani dan masyarakatnya. Dengan demikian, hasil pembangunan pertanian diharapkan tercapai dengan lebih baik dan lebih cepat.

Mengacu pada kondisi tersebut, pembangunan pertanian memiliki sasaran untuk mewujudkan masyarakat petani madani. Adapun yang dimaksud dengan masyarakat petani madani adalah masyarakat petani yang dapat menerima adanya keragaman, mampu mengembangkan diri, mengetahui kebutuhan dan cara mendapatkannya, serta mengetahui potensi diri, yang pada akhirnya berani mengambil keputusan dalam rangka memperbaiki kehidupannya. Untuk mewujudkan masyarakat petani madani tidak cukup hanya dengan menggunakan tenaga penyuluh pertanian lapangan tetapi dibutuhkan peran penyuluh pertanian ahli yang memiliki kemampuan lebih tinggi.

Untuk meningkatkan kemampuan penyuluh pertanian lapangan menjadi penyuluh pertanian ahli dibutuhkan pendidikan Strata Satu (S1). Seorang penyuluh ahli diharapkan menjadi tenaga ahli di bidangnya dan mampu membuat keputusan terhadap materi yang akan disuluhkan berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, misalnya dari lapangan yaitu petani dan kelembagaannya, dari hasil-hasil penelitian, dan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tugas utama penyuluh pertanian adalah mengubah usahatani dan sekaligus mengubah petani dan masyarakatnya. Jadi seorang penyuluh pertanian harus menguasai ilmu dan teknologi pertanian sekaligus mempengaruhi petani dan masyarakatnya sampai terjadi perubahan perilaku. Secara skematis peran penyuluh ahli dapat diperiksa pada Bagan 1.

Saat ini telah ada 13 perguruan tinggi yang menawarkan program pendidikan S1 bagi penyuluh pertanian, dengan daya tampung \pm 500 mahasiswa per tahun. Perguruan tinggi tersebut tersebar di 13 propinsi dengan target mahasiswa lulusan langsung SLTA atau sederajat dan diselenggarakan secara tatap muka. Jika dilihat dari sebaran lokasi penyuluh yang saat ini telah bekerja, ke-13 perguruan tinggi tersebut tidak sepenuhnya dapat menjangkau para penyuluh yang tersebar di seluruh pelosok tanah air tersebut. Keterbatasan daya jangkauan tersebut juga disebabkan oleh keterbatasan usia penyuluh dan ketersediaan waktu untuk kuliah penuh waktu sehubungan dengan tugas-tugas penyuluh yang tidak mungkin meninggalkan lapangan. Oleh sebab itu, S1-PKP UT dikembangkan untuk memberikan kesempatan studi untuk calon mahasiswa yang tidak dapat

terjangkau oleh perguruan tinggi tatap muka. Dengan demikian, diharapkan tidak akan terjadi persaingan dengan perguruan tinggi lain yang menawarkan program studi sejenis.



Bagan 1. Membangun Sistem Penyuluhan Pertanian
Sumber: Slamet, M. (2003).

Prospek dan Tantangan Ilmu Penyuluhan Pembangunan Pertanian di Indonesia

Kebutuhan akan layanan program pendidikan strata 1 bagi para penyuluh pertanian lapangan ini sangat dirasakan oleh Departemen Pertanian (Deptan). Hal ini ditunjukkan dengan permintaan Departemen Pertanian kepada UT untuk menyelenggarakan program studi penyuluhan pada jenjang S1.

Berdasarkan adanya kebutuhan masyarakat dan Deptan inilah akhirnya UT menyelenggarakan program S1-PKP yang sudah ditawarkan sejak masa registrasi 2004.2.

Artikel ini membahas tentang implikasi standar nasional pendidikan pada pengembangan kurikulum di program studi S1-PKP. Secara spesifik beberapa topik yang dibahas meliputi: prospek dan tantangan penyuluhan pertanian, studi kelayakan, standar pendidikan tinggi, pengembangan kurikulum (tujuan program, nama dan bentuk program studi, struktur kurikulum, kelulusan dan sertifikasi), dan diakhiri dengan pembahasan tentang keberlanjutan program studi S1-PKP.

Prospek dan Tantangan Penyuluhan Pertanian

Menjadikan sektor pertanian yang handal dalam menghadapi segala perubahan dan tantangan, perlu pembenahan berbagai aspek; salah satunya adalah faktor kualitas sumberdaya manusianya. Petani sebagai salah satu sumber daya manusia pertanian selama ini masih mendapatkan posisi yang belum diperhitungkan, antara lain akibat dari kemampuan dan kualitasnya yang belum baik. Upaya peningkatan kualitas petani dilakukan antara lain melalui peranan penyuluh pertanian lapangan.

Penyuluh pertanian lapangan merupakan agen perubahan yang langsung berhubungan dengan petani, dengan fungsi utama adalah merubah perilaku petani melalui pendidikan non-formal sehingga petani memiliki kehidupan yang lebih baik secara berkelanjutan. Penyuluh dapat mempengaruhi melalui perannya sebagai motivator, edukator, penghubung, dinamisator, organisator, komunikator, maupun sebagai penasehat petani (Yarmie, 1994). Berbagai peran tersebut diterapkan oleh penyuluh dengan kadar yang berbeda, tergantung pada karakteristik/ciri petani termasuk potensinya; misal: wilayah yang mulai menerima ide baru, wilayah sedang berkembang maju, ataupun wilayah maju). Sehingga, saat ini peran penyuluh mencakup pemberian materi perubahan bagi petani serta melakukan *proses* penyampaian sehingga diharapkan masyarakat petani akan timbul kesadaran sendiri (*self-reliance*) untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik.

Pada era otonomi daerah, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan penyuluh pertanian menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah. Dengan wewenang yang dimilikinya, pemerintah daerah sekarang ini dapat secara optimal memanfaatkan seluruh sumber daya penyuluhan pertanian yang tersedia. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang menyangkut aspek-aspek perencanaan, kelembagaan, ketenagaan, program manajemen, kerja sama dan anggaran, hendaknya menjadi kebutuhan Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagai salah satu upaya untuk membangun sumber daya manusia pertanian yang berkarakter, profesional, berjiwa wirausaha, disiplin, mempunyai etos kerja, dan dedikasi yang tinggi.

Pembangunan pertanian dalam era otonomi daerah berarti pembangunan yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat petani, sesuai potensi dan keanekaragaman/ciri-ciri setempat. Dalam kondisi yang menghargai adanya keanekaragaman sesuai potensi yang dimiliki wilayah tertentu, maka penyuluh dituntut pula untuk dapat menyesuaikan diri melalui perannya yang sesuai dengan kemampuan ataupun potensi yang dimiliki masyarakat petani setempat. Penyuluh dituntut mampu menyeleksi dan memprioritaskan perannya yang sesuai dengan ciri masyarakat setempat dalam mengembangkan potensi dirinya maupun wilayahnya.

Pembangunan pertanian kerakyatan merupakan salah satu alternatif dalam rangka pemberdayaan petani menghadapi sistem Otda; yaitu pembangunan pertanian yang memihak kepada petani (Rivai, 2000). Pembangunan pertanian kerakyatan tersebut, menggeser paradigma *farmer last-top down* menjadi *farmer first-bottom up*. Dalam kondisi tersebut, petani dapat berperan aktif dalam setiap aspek kegiatan pertanian, serta menikmati hasilnya; yang semula bersifat pasif, menunggu petunjuk, menerima program, dan tidak memiliki posisi tawar yang tinggi. Sementara itu, penyuluh pertanian harus mampu berperan lebih sebagai komunikator atau penasihat/konsultan, fasilitator; bukan lagi hanya sebagai pengajar/edukator, transfer teknologi, ataupun pembina. Pembangunan pertanian kerakyatan merupakan jawaban bagi peningkatan kesejahteraan petani yang

lebih baik. Untuk mencapai pembangunan pertanian kerakyatan, perlu peran penyuluh dan tentunya membutuhkan waktu dan proses yang tidak sederhana. Proses ini dapat dilakukan antara lain melalui peningkatan pendidikan bagi para penyuluh pertanian lapangan.

Studi Kelayakan

Untuk mengetahui sejauh mana minat dan kebutuhan calon mahasiswa terhadap program studi S1-PKP, telah dilakukan studi kelayakan. Sebagai respondennya adalah alumni program D-III Penyuluhan Pertanian, mahasiswa UT, dan pengelola daerah. Di samping itu juga dilakukan wawancara dan seminar dengan pakar Ilmu Penyuluhan.

Menurut data Departemen Pertanian pada tahun 2002 perkembangan keseluruhan penyuluh pertanian berjumlah 34.630 orang dengan rincian sebagai berikut: penyuluh pertanian dengan latar belakang pendidikan mayoritas non sarjana (SLTA dan diploma) sejumlah 31.175 orang, dan yang berlatar belakang sarjana (S1 dan S2) adalah 3.455 orang. Dari data ini terlihat bahwa jumlah penyuluh yang berlatar belakang sarjana masih sangat sedikit (10 %).

Dilihat dari tersebarnya lokasi penyuluh bertugas, S1-PKP UT memberikan kesempatan studi untuk mahasiswa yang tidak bisa dijangkau pendidikan konvensional. Oleh karena itu diharapkan tidak akan terjadi persaingan dengan perguruan tinggi lainnya yang menawarkan program studi sejenis. Karena terjadi perubahan peran dan tugas seorang penyuluh maka tidak cukup dengan hanya terampil melakukan suatu pekerjaan saja tetapi harus menguasai bidang ilmu terkait.

Dalam peningkatan pendidikan penyuluh pertanian, Universitas Terbuka telah berpartisipasi sejak tahun 1993 dengan membuka program D-III Penyuluhan Pertanian dan dari tahun 1998 s/d 2003 Program Studi D III Penyuluhan Pertanian telah meluluskan 5.313 orang yang tersebar di seluruh tanah air meliputi bidang keahlian Pertanian (4.281 orang), Peternakan (575 orang) dan Perikanan (457 orang).

Pada setiap temuwicara dalam acara wisuda sebagian besar alumni program D-III Penyuluhan Pertanian (PTPL)

menginginkan adanya pendidikan lanjutan yang lebih tinggi. Di samping itu, FMIPA-UT telah mengadakan studi kelayakan dengan mendedarkan kuesioner kepada alumni dan mahasiswa program D-III Penyuluhan Pertanian. Hasil kuesioner yang didarkan tersebut diperoleh data yang berminat melanjutkan ke S1-PKP berjumlah 79,5% dan sisanya 20,5% tidak menjawab berminat karena masa kerja responden lebih dari 20 tahun atau mendekati masa pensiun atau karena adanya perubahan struktur organisasi penyuluhan.

Dari hasil studi kelayakan tahun 2003, dapat disimpulkan bahwa peluang untuk membuka Program Studi S1-PKP sangat dibutuhkan oleh responden, dilihat dari tiga bidang utama yaitu data kepegawaian, karir, dan pekerjaan. Aspek materi yang mendukung, ditinjau dari masa kerja penyuluh, golongan kepegawaian, usia responden, latar belakang pendidikan akhir, minat, sistem pendidikan dilakukan secara jarak jauh sesuai bidang keahlian, dan potensi pasar untuk peminat non penyuluh.

Potensi calon mahasiswa program S-1 PKP dapat berasal dari mahasiswa program D-III Penyuluhan Pertanian. Jumlah mahasiswa yang aktif 1.430 orang, sedangkan jumlah mahasiswa non aktif 316 orang (sumber data BAAK-Rensi UT, 24 Desember 2003). Masukan calon sasaran didik dapat juga berasal dari lulusan sekolah menengah kejuruan bidang pertanian/peternakan/perikanan seperti dari SPMA (Sekolah Pertanian Menengah Atas), SPBMA (Sekolah Perkebunan Menengah Atas), SNAKMA (Sekolah Peternakan Menengah Atas), dan SPP (Sekolah Penyuluhan Pertanian) yang tidak tertampung di STPP (Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian) Departemen Pertanian. Di samping itu, kelompok masyarakat yang potensial untuk menjadi mahasiswa adalah kelompok penyuluh swakarsa. Penyuluh swakarsa merupakan salah satu program andalan Departemen Pertanian untuk dapat membantu mewujudkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Penyuluh swakarsa baik yang berstatus pegawai maupun non pegawai, para kontak tani dan eks tenaga pendamping petani, apabila mereka mempunyai ijazah SMU atau yang sederajat dan berminat untuk meneruskan pendidikannya dapat memilih program S1-PKP.

Prospek pekerjaan bagi lulusan program S1-PKP adalah sebagai penyuluh profesional yang berstatus Pegawai Negeri Sipil

(PNS), penyuluh swakarsa, konsultan penyuluhan dan agribisnis bidang pertanian/ peternakan/perikanan, ataupun dapat bekerja di LSM-LSM bidang pertanian/peternakan/perikanan, dan lain-lain.

Dari hasil pertemuan Menteri Pertanian dengan Rektor UT dalam kegiatan penyerahan ijasah lulusan program D-III Penyuluhan Pertanian di Magelang pada tanggal 28 Mei 2003, diharapkan adanya upaya memfasilitasi peningkatan kualitas/kemampuan penyuluh pertanian dengan membuka program S1. Selanjutnya FMIPA-UT menindaklanjuti permintaan dan pertemuan tersebut di atas dengan mengembangkan program S1-PKP. Hal tersebut di atas yang mendorong UT untuk membuka program studi S1 Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian sebagai sarana peningkatan pendidikan tenaga penyuluh pertanian. Telah keluar dukungan secara tertulis berupa surat rekomendasi dari instansi pengguna yaitu Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian (surat rekomendasi terlampir).

Hasil pertemuan dan seminar dengan pakar Ilmu Penyuluhan dan Ketua Himpunan Penyuluhan Nasional yaitu Bapak Prof. Dr. H.R. Margono Slamet, dalam rangka studi kelayakan pembukaan program S-1 PKP diperoleh masukan bahwa Penyuluh Pertanian harus mampu menjadi agen perubahan dalam mewujudkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan menuju masyarakat tani yang madani, untuk itu diperlukan pengetahuan tentang Ilmu dan Teknologi Pertanian, Ekonomi dan Agribisnis, Kemasyarakatan/ Pendidikan Orang Dewasa dan Psikologi Sosial. Di samping itu, dalam membahas kurikulum program S1-PKP juga memperhatikan prospek dan tantangan penyuluhan di Indonesia tersebut di atas. Hal inilah yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kurikulum S1-PKP agar sesuai kebutuhan dan tepat guna.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Standar nasional pendidikan untuk pembukaan dan pematuan program studi baru mengacu kepada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Depdiknas Nomor 108/DIKTI/Kep/2001

tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembukaan program studi, dan Surat Dirjen Dikti Nomor 302/DT/2003 tentang Evaluasi Ijin Penyelenggaraan Program Studi.

Untuk menjamin kualitas program baik program akademis maupun profesional, UT telah membuat pedoman umum pembukaan dan penutupan program (JKAK KR00), ruang lingkupnya terdiri dari beberapa pedoman, meliputi :

1. Pedoman Pengembangan Studi Kelayakan (JKAK KR01).
2. Pedoman Usulan Pembukaan Program Studi ke Tingkat Universitas (JKAK KR02).
3. Pedoman Penulisan Naskah Akademik Program Studi (JKAK KR03).
 - a. Pedoman Pengembangan Kurikulum Program Studi (JKAK KR03a).
 - b. Pedoman Pengembangan Rancangan Matakuliah (JKAK KR03b).
4. Pedoman Usulan Pembukaan Program Studi ke DIKTI (JKAK KR04).
5. Pedoman Evaluasi Program (JKAK KR05).
6. Pedoman Prosedur Penutupan Program (JKAK KR06).

Sesuai dengan Keputusan Ditjen Dikti Depdiknas nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembukaan program studi, kajian kelayakan akademik dan administratif suatu program studi harus memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Adanya prospek pekerjaan yang nyata bagi lulusan program studi sehingga tidak menimbulkan pengangguran baru (didukung dengan data survei).
2. Kepastian bahwa dengan pendirian perguruan tinggi dan pembukaan program studi tidak mengakibatkan beban tambahan bagi pemerintah (secara finansial) dan misi utama perguruan tinggi masih tetap tertangani dengan baik.
3. Untuk menjamin tidak terjadinya kelebihan pasokan lulusan, maka program studi yang diusulkan harus dapat ditutup dan dibuka sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu diperlukan kemampuan melakukan relokasi sumber daya perguruan tinggi.

4. Pembukaan program studi baru harus memperhatikan keadaan lingkungan yaitu penyelenggaraan program studi oleh perguruan tinggi lain atau sekitarnya atau di wilayahnya sehingga tidak terjadi persaingan yang tidak sehat antar perguruan tinggi.
5. Pembukaan program studi atau jurusan baru dapat menjanjikan peningkatan pemanfaatan sumber daya pendidikan tinggi yang ada dan meningkatkan layanan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
6. Pembukaan program studi atau jurusan baru tidak akan menimbulkan gesekan internal dalam perguruan tinggi sehingga menurunkan mutu kinerjanya.

Untuk memenuhi kriteria tersebut, ada lima langkah utama yang harus ditempuh dalam mengembangkan studi kelayakan pembukaan program studi, yaitu analisis kebutuhan, pengembangan kurikulum, pengembangan sumber daya, pengembangan pendanaan, dan pengembangan manajemen akademis.

Artikel ini hanya membahas secara lebih mendalam tentang proses pengembangan kurikulum program studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, FMIPA-UT.

Pengembangan Kurikulum

Tujuan Program

Program S1-PKP diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan penyuluh pertanian, selanjutnya diharapkan dapat berkontribusi terhadap pembangunan pertanian khususnya tingkat kehidupan petani.

Menurut kebijakan nasional penyelenggaraan penyuluhan pertanian tahun 2002 dicantumkan Penyuluh Pertanian bertugas :

1. Menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas menuju masyarakat madani.
2. Menyiapkan sumber daya manusia yang mampu melaksanakan dan memanfaatkan otonomi daerah dengan baik demi peningkatan mutu kehidupan masyarakat di daerahnya.

3. Menyiapkan masyarakat dan petani untuk membangun pertanian yang berwawasan agribisnis.
4. Memberdayakan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan.

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok tersebut dan menyiapkan tenaga penyuluh yang mempunyai wawasan sesuai dengan perubahan paradigma baru penyuluhan, seorang penyuluh ahli dituntut untuk memiliki : pemahaman dan pengenalan petani, penguasaan materi pertanian yang disuluhkan, penguasaan strategi penyampaian materi pertanian kepada petani dan pengelolaan program penyuluhan secara efektif, serta mampu mengembangkan diri sebagai penyuluh profesional. Oleh karena itu, penyuluh pertanian diharapkan mempunyai kompetensi umum dan khusus sebagai berikut.

1. Kompetensi umum:

Secara umum, seorang penyuluh pertanian diharapkan bertaqwa kepada Tuhan YME, jujur, disiplin, mandiri, luwes dan terbuka, tanggap/peka, mampu bekerja sama, bertanggungjawab dan obyektif, mampu berkomunikasi dengan jelas dan kritis, serta berwawasan lingkungan.

2. Kompetensi khusus:

Secara khusus, seorang penyuluh diharapkan:

- a. Menguasai teori dan sistem penyuluhan, perkembangan petani dan kehidupan masyarakat.
- b. Memiliki sikap dan kemampuan untuk mengembangkan berbagai aspek pertanian/peternakan/perikanan guna mendukung penyuluhan.
- c. Menguasai materi pertanian yang disuluhkan serta strategi penyampaiannya.
- d. Memiliki kemampuan menjabarkan materi pertanian yang disuluhkan dengan membuat program dan mengevaluasi proses serta hasil penyuluhan.
- e. Menguasai teori dan keterampilan penyuluhan yang bersifat umum maupun hal-hal yang khusus.
- f. Memiliki sikap/perilaku yang dapat memotivasi serta mendorong petani untuk berubah.
- g. Memiliki kemampuan melakukan penelitian praktis baik berkaitan dengan materi penyuluhan maupun materi

lainnya yang mendukung pelaksanaan kegiatan penyuluhan.

- h. Memiliki kemampuan melaksanakan tugas administratif dan manajerial yang mendukung upaya penyuluhan.

Guna memenuhi kompetensi yang diharapkan agar dikuasai oleh para penyuluh maka Program S1-PKP diarahkan untuk menghasilkan penyuluh yang menguasai materi pertanian/peternakan/perikanan dan agribisnis yang akan disampaikan kepada para petani, serta memiliki pengetahuan dan keterampilan penyuluhan.

Perangkat profil kompetensi lulusan S1-PKP dapat dipilah menjadi 3 (tiga) kompetensi yaitu kompetensi utama, pendukung, dan kompetensi lain. Sedangkan dari segi substansi dikelompokkan menjadi 4 (empat) rumpun kompetensi yaitu penguasaan bidang studi, pengetahuan tentang sasaran penyuluhan, penyuluhan yang mendidik, serta pengembangan kepribadian dan keprofesionalan seorang penyuluh. Penjabaran selengkapnya mengenai profil lulusan program S1-PKP dapat dilihat pada Tabel 1.

Kompetensi akhir lulusan Program S1-PKP adalah sarjana yang menguasai ilmu Penyuluhan yang dapat mengaplikasikan ilmu Penyuluhan dan Komunikasi serta agribisnis di bidang pertanian/peternakan/perikanan kepada masyarakat tani nelayan. Kurikulum S1-PKP mengacu pada Keputusan Mendiknas No. 0311/U/1994 Pasal 11, yaitu Kurikulum Nasional Program Sarjana Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian. Dengan pohon ilmu utamanya adalah ilmu Pertanian, terdiri dari 5 (lima) kelompok matakuliah yaitu MPK, MKK, MKB, MPB dan MBB sesuai kurnas S1-PKP tahun 1994. S1-PKP UT dirancang untuk tiga bidang keahlian yaitu penyuluh bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Kompetensi yang harus dikuasai adalah sebagai berikut.

1. Memiliki kesadaran dan perilaku sebagai warganegara berpendidikan yang agamis, demokratis dan cerdas.
2. Mampu menciptakan tatanan sosial budaya di lingkungan petani yang memungkinkan terjadinya proses pengembangan diri para petani.

3. Menguasai konsep-konsep ilmu penyuluhan terutama yang berkaitan dengan materi pertanian/peternakan/perikanan dan agribisnis.
4. Menguasai materi penyuluhan pertanian dan agribisnis dari pembuatan program hingga mengevaluasi proses dan hasil kegiatan penyuluhan.
5. Mampu meningkatkan wawasan dan kemampuan profesional dalam penyuluhan pertanian/peternakan/perikanan dan agribisnis.
6. Mampu menemukan dan memecahkan permasalahan penyuluhan pertanian dalam arti luas.
7. Memiliki kemampuan melakukan penelitian praktis baik berkaitan dengan materi penyuluhan maupun materi lainnya yang mendukung pelaksanaan kegiatan penyuluhan.
8. Mampu mengelola dan mengembangkan penyelenggaraan penyuluhan di bidang pertanian/peternakan/perikanan dan agribisnis.
9. Mampu mengapresiasi IPTEKS sehingga mampu berfikir dan bertindak sebagai Sarjana Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian.
10. Mampu mengembangkan diri secara mandiri, sehingga senantiasa dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan secara global.

Nama dan Bentuk Program

Sebagaimana dengan profil lulusan yang diharapkan, program yang direncanakan akan diselenggarakan adalah Program Sarjana Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian (Program S1-PKP). Program ini merupakan program jalur akademik untuk menghasilkan lulusan yang dapat melaksanakan tugas sebagai praktisi penyuluhan yang handal dan profesional berdasarkan kaidah dan etika keilmuan yang dipelajarinya. Program ini diharapkan dapat memacu motivasi penyuluh pertanian untuk terus berupaya meningkatkan kualitas penyuluhan pertanian.

Pada tahap awal program S1-PKP merupakan program pendidikan dalam jabatan yang diselenggarakan melalui sistem pendidikan jarak jauh. Sistem belajar jarak jauh merupakan

Tabel 1. Profil Kemampuan Lulusan Program Sarjana (S1) Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Universitas Terbuka

Rumpun Tataran	Penguasaan Bidang Studi	Pengetahuan tentang Sasaran Penyuluhan	Penyuluhan yang Mendidik	Pengembangan Kepribadian dan Keprofesionalan
Kompetensi Utama	Penguasaan substansi kurikuler 3 bidang keahlian mencakup konsep dasar penyuluhan dan komunikasi, pertanian berkelanjutan dan penerapannya.	Pengetahuan tentang latar belakang, situasi dan kondisi sasaran penyuluhan, yaitu masyarakat petani nelayan.	Pengelolaan penyuluhan dan komunikasi sesuai kebutuhan sasaran penyuluhan menuju masyarakat pertanian yang madani	Pengembangan diri secara profesional sehingga senantiasa dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan secara global.
Kompetensi Pendukung	Penguasaan materi dan metodologi dasar 3 bidang keahlian yang mendukung substansi kurikuler	Pengetahuan tentang kemampuan awal dan keterampilan sasaran penyuluhan untuk berproses dalam mencapai tujuan yang dikehendaki	Penguasaan strategi penyuluhan secara lebih rinci dan utuh yang mencakup peningkatan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik	Peningkatan wawasan dan kemampuan profesional dalam penyuluhan, komunikasi, dan agribisnis pada 3 bidang keahlian.
Kompetensi Lain	Penguasaan substansi ilmu-ilmu dasar yang mendukung tercapainya tujuan utuh penyuluhan terhadap sasaran			Pemanfaatan sumber daya dan teknologi termasuk didalamnya teknologi informasi untuk pertumbuhan profesional dan pengembangan pribadi.

pendidikan massal, lintas wilayah, dan lintas waktu. Program ini ditujukan bagi penyuluh pertanian yang telah diangkat dan bekerja di lingkup pertanian sebagai penyuluh pertanian. Untuk selanjutnya dalam jangka panjang program S1-PKP diharapkan dapat menampung lulusan SPP dan sederajat, terutama yang berminat menjadi calon penyuluh swakarsa.

Program S1-PKP dirancang berisikan matakuliah yang berkaitan langsung dengan pengembangan dan peningkatan kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas sebagai penyuluh pertanian yang profesional. Dengan demikian materi dalam Program S1-PKP memiliki motivasi aplikasi praktis yang cukup tinggi. Mengingat program ini pada awalnya merupakan program pendidikan dalam jabatan berdasarkan sistem pendidikan jarak jauh yang memungkinkan penyuluh untuk berpartisipasi tanpa harus meninggalkan tugas di sehari-hari. Tugas di lapang bagi para penyuluh yang sedang bertugas dapat digunakan secara langsung sebagai laboratorium praktis untuk menguji dan menerapkan pengetahuan baru yang diperoleh selama/setelah mengikuti pendidikan.

Struktur Kurikulum

Kurikulum S1-PKP dikembangkan melalui beberapa tahap sebagai berikut.

1. Penelusuran informasi tentang tugas penyuluh pertanian. Tujuannya untuk memperoleh masukan tentang tugas penyuluh baik berdasarkan aturan maupun berdasarkan kenyataan di lapangan. Masukan berasal dari produsen, pengguna tenaga penyuluh, serta para penyuluh yang berguna bagi landasan perancangan pendidikan lanjutan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pendidikan penyuluhan masih cenderung membutuhkan dan menuntut penyuluh pertanian yang profesional dan handal.
2. Pengkajian kurikulum pendidikan nasional program studi sarjana S1, yang bersumber pada buku KURNAS Program Sarjana yang dikeluarkan oleh DIKTI, tahun 1994. Sekarang KURNAS sudah tidak ada lagi digantikan oleh kesepakatan komunitas bidang ilmu. Untuk Ilmu Penyuluhan Pertanian

sampai sekarang belum ada kesepakatan komunitas bidang ilmu secara tertulis.

3. Pengkajian kurikulum dari perguruan tinggi lain yang menawarkan program sejenis, yaitu dari :
 - a. Universitas Lampung (UNILA) program studi S1 Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian.
 - b. Institut Pertanian Bogor (IPB) program studi S1 Penyuluhan dan Pembangunan Masyarakat Desa.
 - c. Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Departemen Pertanian.

Hasilnya digunakan sebagai bahan perbandingan dengan kurikulum program S1-PKP Universitas Terbuka.

4. Pengkajian kurikulum program D-III Penyuluhan Pertanian. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengkaji kompetensi yang diharapkan dicapai oleh mahasiswa program D-III Penyuluhan Pertanian dan ruang lingkup materi kurikulum program D-III Penyuluhan Pertanian. Selanjutnya dilihat keterkaitan antara kurikulum program D-III Penyuluhan Pertanian dan S1-PKP. Hasil dari kegiatan ini memberikan masukan untuk pengembangan kurikulum program S1-PKP beserta rancangan matakuliah, Garis-Garis Besar Program Pengajaran dan kelengkapannya lainnya.
5. Diskusi dengan pakar penyuluhan tentang kemampuan atau kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh para penyuluh pertanian yang berkualifikasi sarjana. Sumbang saran difokuskan pada fungsi dan peran seorang Sarjana Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian yang profesional dalam mengembangkan, melaksanakan, dan menilai program pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas penyuluhan pertanian berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah. Dari kegiatan ini diperoleh hasil berupa profil lulusan S1-PKP.

Tindak lanjut dari serangkaian kegiatan tersebut dan dengan bekal rumusan profil lulusan S1-PKP maka dilakukan penyempurnaan kurikulum dengan kurikulum berbasis kompetensi. Hasil penyempurnaan tersebut dapat dilihat pada struktur kurikulum S1-PKP UT.

Program S1-PKP FMIPA-UT mempunyai 3 (tiga) bidang keahlian yaitu Pertanian, Peternakan, dan Perikanan.

Kurikulumnya dirancang dengan beban studi 144 sks, dengan rincian sebagai berikut:

1. Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) = 11 sks
2. Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) = 26-27 sks
3. Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB) = 53-55 sks
4. Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB) = 35 sks
5. Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) = 13-14 sks
6. Tugas Akhir Program (TAP) = 4 sks.

Sebaran matakuliah S1-PKP untuk masing-masing bidang keahlian dapat dilihat dalam Tabel 2.

Tabel 2. Distribusi Kelompok Matakuliah S1-PKP menurut Bidang Keahlian

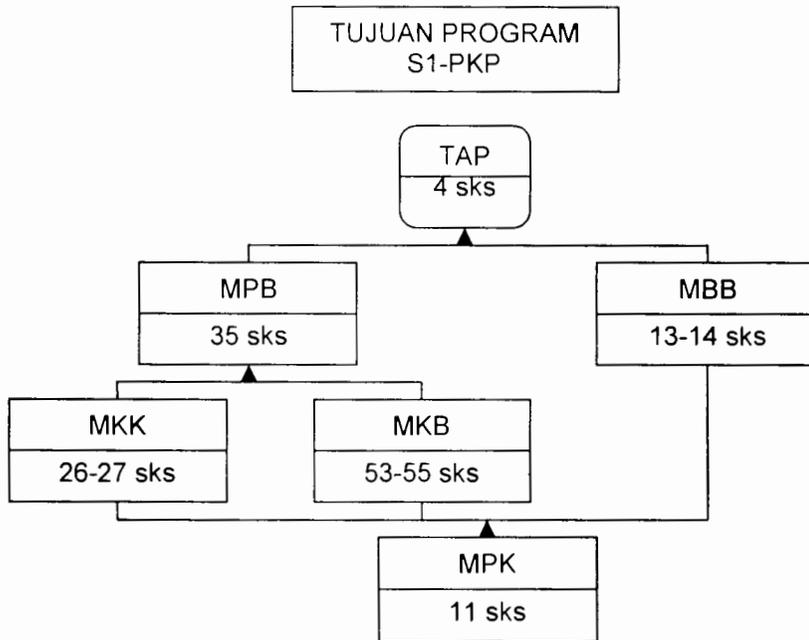
Matakuliah	Bidang Keahlian		
	Pertanian	Peternakan	Perikanan
Pengembangan Kepribadian (MPK)	11	11	11
Keilmuan dan Keterampilan (MKK)	26	26	27
Keahlian Berkarya (MKB)	55	54	53
Perilaku Berkarya (MPB)	35	35	35
Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)	13	14	14
Tugas Akhir Program (TAP)	4	4	4

Matakuliah muatan lokal sebagai ciri khusus program S1-PKP UT dirancang untuk memenuhi tuntutan kemampuan dan kompetensi yang diharapkan dapat dimiliki oleh seorang penyuluh ahli, yaitu di bidang ekonomi dan agribisnis, meliputi matakuliah Dasar-dasar Agribisnis, Manajemen Agribisnis, Studi Kelayakan Agribisnis, Manajemen Keuangan Pertanian, Tataniaga Pertanian/Peternakan/Perikanan, Ekonomi Produksi, dan Kewirausahaan.

Kajian antara kelompok matakuliah tersebut dengan tujuan program S1-PKP digambarkan dalam Bagan 2 tentang pencapaian tujuan program S1-PKP.

Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) menjadi landasan bagi pengembangan pribadi penyuluh sebagai manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) berbobot 11 sks dirancang untuk membentuk

wawasan, keterampilan, dan kebiasaan penyuluh sebagai warga negara yang berpendidikan tinggi (kualifikasi sarjana) sebagaimana yang ditetapkan dalam tujuan program S1-PKP.



Bagan 2. Pencapaian Tujuan Program S1-PKP

Kelompok Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) yang berbobot 26-27 sks merupakan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan sebagai penyuluh pertanian. Kelompok matakuliah ini membekali penyuluh dengan wawasan, termasuk perkembangan IPTEKS, dan keterampilan untuk menjalankan fungsinya sebagai tenaga penyuluh di bidang pertanian/peternakan/perikanan. Hal ini sejalan dengan ciri penyuluh yang profesional, selaku penyedia layanan ahli berlandaskan pada penguasaan bidang ilmu yang diakui sebagai landasan profesi tersebut. Dengan demikian, penyuluh menjadi lebih mampu mengartikulasikan segi kemengapaan dari kegiatan praktis yang

dilakukannya dalam proses belajar, serta mampu mengambil keputusan, baik yang bersifat situasional maupun transaksional berdasarkan kaidah ilmiah keilmuannya.

Kelompok Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB) memberikan dasar kaidah keilmuan dan keterampilan berperilaku sebagai ilmuwan dalam bidang penyuluhan pertanian menjalankan fungsi dan kekerjanya. Kelompok matakuliah ini berbobot 53-55 sks. Terdiri dari pendalaman materi, konsep, dan strategi pembelajaran matakuliah inti bidang penyuluhan, pengembangan wawasan dalam teori pertanian/ peternakan/ perikanan dan kecenderungan aplikasi praktis dalam sistem pendidikan, serta pembentukan sebagai seorang penyuluh profesional di bidangnya.

Pendalaman materi penyuluhan pertanian sangat diperlukan untuk mengembangkan dan meningkatkan penguasaan penyuluh, karena banyak kasus menunjukkan bahwa penguasaan para penyuluh terhadap materi pendukung penyuluhan di bidang agribisnis dan sosial kemasyarakatan masih belum optimal. Rangkaian matakuliah pendalaman bidang ilmu tersebut merupakan matakuliah lintas bidang studi yang merupakan bagian terpadu dari program sarjana penyuluhan. Matakuliah tersebut harus ditempuh oleh mahasiswa S1-PPK dengan menggunakan bahan ajar dan ujian yang sama dengan mahasiswa dari program sarjana bidang studi lain.

Sementara itu, kelompok Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB) diberikan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan penyuluh dalam berkarya menurut tingkat keahlian serta berdasarkan kaidah keilmuan dan keterampilan yang dipelajarinya. Kelompok matakuliah ini berbobot 35 sks yang selain membekali mahasiswa dengan keterampilan dan kaidah perilaku berkarya, juga membuka kesempatan kepada mahasiswa untuk menunjukkan kemampuannya dalam mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan nilai yang telah diperoleh dari berbagai matakuliah lain.

Kelompok Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) membekali penyuluh untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai bagian dari masyarakat berdasarkan kaidah berkehidupan bermasyarakat, serta sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya. Kelompok matakuliah ini berbobot 13-14

sks yang diambil dari program sarjana bidang studi lain serta bersifat lintas bidang studi.

Beberapa matakuliah dalam kurikulum S1-PKP mewajibkan adanya praktikum. Mahasiswa dapat mengikuti praktikum di STPP/UPT Deptan/PTN yang terdekat wilayahnya, dan dibimbing oleh instruktur/pembimbing dibawah koordinasi UPBJJ-UT setempat. UT Pusat dan UPBJJ-UT memantau penyelenggaraannya. UT Pusat menerima nilai praktikum dari instruktur yang disahkan oleh pengelola daerah dan disahkan oleh Kepala UPBJJ-UT setempat. Nilai praktikum mempunyai kontribusi 30% terhadap nilai akhir mahasiswa.

Sebagai tahap akhir praktikum mahasiswa diwajibkan mengambil matakuliah Seminar dan Praktek Kerja Lapangan (PKL). Materi Seminar merupakan proposal PKL, dan diujikan secara lisan dengan cara presentasi. PKL dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapang, penyusunan laporan, dan ujian PKL dilakukan secara lisan di hadapan pembimbing dan penguji.

Akhirnya, sebagai puncak dari proses penyelesaian studi, mahasiswa diwajibkan untuk mengambil Tugas Akhir Program (TAP) yang berbobot 4 sks. TAP merupakan ujian akhir program yang bertujuan untuk mengukur kemampuan berpikir komprehensif terhadap materi dan praktek yang telah diperoleh mahasiswa selama mengikuti program studi S1-PKP. TAP dirancang berbasiskan 6 (enam) matakuliah pendukung, yaitu:

1. Pembangunan Pertanian (LUHT4210)
2. Komunikasi Inovasi (SKOM4316)
3. Metode Penelitian Sosial (ISIP4216)
4. Teknik Penulisan Ilmiah (LUHT4353)
5. Studi Kelayakan Agribisnis (LUHT4312)
6. Programa & Evaluasi Penyuluhan Pertanian (LUHT4429).

TAP PKP dilakukan dengan tujuan yaitu 1) menguji tingkat penguasaan mahasiswa secara komprehensif terhadap bidang ilmu dalam program studi S1-PKP sesuai bidang keahlian yang dipilih; 2) untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pertanian S1; 3) menyelenggarakan tutorial tatap muka TAP yang menghasilkan suatu bentuk tugas menulis makalah ilmiah; serta 4) menyelenggarakan ujian

uraian yang bersumber dari beberapa matakuliah pendukung TAP untuk mengetahui wawasan mahasiswa terhadap penerapan ilmu-ilmu yang telah dipelajari. Program studi memberikan panduan belajar kepada semua mahasiswa yang memenuhi syarat untuk mengikuti TAP setiap semester.

Dengan program dan kurikulum tersebut, diharapkan program S1-PKP akan dapat menghasilkan lulusan penyuluhan pertanian yang berkualifikasi sarjana yang mengenal masyarakat yang disuluh, menguasai materi yang disuluhkan, terampil menyampaikan materi penyuluhan secara menarik, serta menjadi model dan panutan dalam berperilaku bagi masyarakat. Struktur kurikulum dan rincian matakuliah selengkapnya dapat dilihat dalam Katalog UT tahun 2005-2006, pada halaman 62-72.

Kelulusan

Jumlah dan mutu lulusan merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh FMIPA-UT untuk melihat kualitas dan keberhasilan pelaksanaan program S1-PKP. Secara akademik, mahasiswa dinyatakan lulus jika mencapai IPK minimal 2 (dua). Masa studi berlangsung selama 12 semester (6 tahun) dengan beban SKS per semester kurang lebih antara 12 – 15 SKS. Mahasiswa diwajibkan memiliki paket bahan ajar yang disediakan oleh UT dan mengikuti tutorial tatap muka rancangan khusus untuk matakuliah tertentu. Diharapkan dengan memiliki bahan ajar, pemberian bantuan belajar, dan pelayanan yang optimal, UT akan mampu menjaga jumlah dan mutu lulusan.

Seorang mahasiswa dapat dinyatakan lulus dari program S1-PKP jika memenuhi syarat berikut.

1. Telah menyelesaikan seluruh matakuliah yang disyaratkan, minimal 144 sks (tanpa ada nilai E).
2. Nilai MKDU4104 (Pendidikan Pancasila) minimal C.
3. Nilai Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan Tugas Akhir Program (TAP) minimal C
4. IPK minimal 2,00.

Sertifikasi

Ijasah dan gelar Sarjana Pertanian (SP) diberikan kepada mahasiswa yang telah memenuhi kelulusan, dengan mekanisme pemberian ijasah sebagai berikut.

1. Ijasah diberikan setelah mahasiswa diwisuda.
2. Penyerahan ijasah dilakukan di UT Pusat atau di UPBJJ-UT.

Keberlanjutan Program

Keberlanjutan program S1-PKP sangat tergantung pada beberapa hal, antara lain kecenderungan eksternal, perkembangan kebutuhan dalam negeri, serta sistem penyelenggaraan program studi.

Penyerapan tenaga terbesar saat ini adalah di sektor pertanian (40-50%), namun demikian tingkat pendidikannya masih rendah sehingga perlu adanya peningkatan kemampuan SDM, termasuk tenaga Penyuluh Pertanian. Kecenderungan eksternal menunjukkan semakin tingginya tuntutan kualitas terhadap berbagai bidang. Tuntutan peningkatan kualitas terhadap Penyuluh Pertanian tidak akan pernah berhenti. Beragam perkembangan bidang ilmu yang terjadi, kemajuan teknologi yang sangat cepat, serta terjadinya perubahan standar kompetensi profesi akibat persaingan dalam skala global dan atau nasional menyebabkan Penyuluh Pertanian perlu selalu meningkatkan kualitas dirinya. Peningkatan kualitas diri berdampak pada peningkatan kemampuan dan profesionalisme Penyuluh Pertanian. Berdasarkan hal tersebut, pada saatnya, jenjang sarjana (S1) akan menjadi jenjang kualifikasi minimal dari Penyuluh Pertanian yang profesional untuk memenuhi tuntutan tersebut.

Kebangkitan masyarakat Indonesia dari krisis politik dan ekonomi, yang mudah-mudahan dapat tercapai dalam waktu segera, akan memberikan peluang untuk meningkatnya kebutuhan sumber daya manusia, dan meningkatnya daya beli masyarakat. Dalam hal ini, Penyuluh Pertanian perlu dibentuk menjadi SDM handal bagi dunia pertanian. Dengan situasi yang semakin membaik (dari berbagai aspek), kebutuhan dan minat untuk meningkatkan diri penyuluh meningkat, serta kebutuhan dan minat untuk menjadi penyuluh juga bertambah. Selanjutnya,

jika situasi tersebut dibarengi oleh daya beli masyarakat yang meningkat dan dapat mengakibatkan prioritas terhadap proses pendidikan dan peningkatan kualitas diri, maka kebutuhan akan pendidikan penyuluh menjadi tidak dapat ditawar lagi. Dalam menjawab tantangan tersebut, Program S1-PKP yang ditawarkan UT menjadi salah satu alternatif yang handal. Pada dasarnya, program S1-PKP dapat berfungsi sebagai program yang dapat membantu meningkatkan kualitas penyuluh pertanian.

Dengan telah diperolehnya ijin penyelenggaraan program studi dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor surat 2050/D/T/2004 pada tanggal 11 Juni 2004 maka program studi ini mulai ditawarkan kepada mahasiswa UT mulai masa registrasi 2004.2 sampai dengan sekarang. Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan program studi tersebut, penerimaan mahasiswa akan dibatasi jumlahnya dan dilakukan secara bertahap untuk wilayah-wilayah UPBJJ-UT tertentu. Pentahapan penerimaan mahasiswa dilakukan dengan pertimbangan kesiapan sistem penyelenggaraan, sarana dan prasarana di pusat dan di daerah, ketersediaan SDM, dan jumlah mahasiswa untuk memenuhi syarat minimal terselenggaranya praktikum.

Pada tahap awal, program S1-PKP sebagai program pendidikan dalam jabatan, yaitu untuk memberikan peluang Penyuluh Pertanian yang sudah bekerja, sudah diangkat sebagai PNS, serta sudah memegang kualifikasi D-III Penyuluhan Pertanian, untuk melanjutkan studinya. Namun demikian, sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar, maka pada tahap selanjutnya program S1-PKP dapat diselenggarakan sebagai program tuah yang terbuka bagi siapa saja yang berminat untuk berpartisipasi dalam upaya pendidikan dan peningkatan kemampuan penyuluh. Dalam hal ini meliputi penyuluh pertanian yang sudah bekerja dan belum berkualifikasi D-III Penyuluhan Pertanian dan penyuluh pertanian swakarsa yang dapat berasal dari lulusan SPP atau sederajat, kontak tani, eks pendamping petani, dan lain-lain.

Pada masa 2004.2 penawaran program S1-PKP hanya dibuka di 11 UPBJJ-UT Bengkulu, Padang, Jambi, Bandar Lampung, Banjarmasin, Samarinda, dan Purwokerto. Pada tahap awal calon mahasiswa dibatasi hanya bagi lulusan program D-III Penyuluhan Pertanian UT. Pada masa 2005.1 calon mahasiswa

dapat berasal dari mahasiswa yang mempunyai latar belakang D-III Penyuluhan atau bidang yang sederajat. Direncanakan mulai masa registrasi 2006.1, program ini bisa ditawarkan bagi calon mahasiswa yang berijazah sekolah menengah umum atau yang sederajat. Program ini juga menerima alih kredit dari mahasiswa yang berlatar belakang pendidikan diploma bidang pertanian/peternakan/ perikanan atau yang sederajat.

Berdasarkan hal tersebut, pengembangan program S1-PKP selanjutnya diarahkan sebagai program utuh yang memiliki keluwesan sistem *multi entry* setiap penyuluh dapat berpartisipasi pada jenjang awal yang berbeda-beda. Sistem *multi entry* ini merupakan sistem yang sejauh ini sudah diterapkan oleh UT sebagai penyelenggara pendidikan terbuka dan jarak jauh.

Dalam upaya agar program S1-PKP mampu menjawab beragam tantangan tersebut, perlu diupayakan pemenuhan dan penjaminan kualitas program S1-PKP melalui evaluasi dan peningkatan kualitas yang berkelanjutan (*check, recheck, and revise*), peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mengelola program S1-PKP melalui pendidikan formal lanjut dan atau pelatihan berkelanjutan, serta peningkatan kualitas pengelolaan program S1-PKP (efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan kolaborasi).

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Kebijakan pemerintah saat ini menetapkan bahwa kualifikasi minimal Penyuluh Pertanian adalah lulusan program Diploma III. Namun demikian, agar penyuluh dapat melaksanakan tugas secara profesional, seyogyanya penyuluh berpartisipasi dalam proses pengembangan diri secara berkelanjutan. Berkenaan dengan itu, UT membuka program S1 Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian yang bertujuan menghasilkan penyuluh yang menguasai materi bidang studi serta memiliki keterampilan Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian.

Melalui program S1-PKP yang diselenggarakan UT berdasarkan sistem belajar terbuka dan jarak jauh. Penyuluh Pertanian memiliki kesempatan untuk belajar sambil bekerja,

sekaligus menguji dan menerapkan pengetahuan serta keterampilan yang diperolehnya dalam proses pembelajaran pertanian. Dengan bekal jumlah dan kualitas SDM yang memadai, baik di pusat maupun di daerah, ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan program, kemantapan pengalaman dalam menyelenggarakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh, serta ketersediaan jaringan kerjasama yang telah dirintis, maka UT memiliki keyakinan dapat menyelenggarakan program S1 Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian dengan baik.

Saran

Dalam proses persiapan hingga pembukaan suatu program studi khususnya di lingkungan Universitas Terbuka sebagai Perguruan Tinggi Jarak Jauh (PTJJ), hal penting yang perlu diperhatikan adalah penyusunan struktur kurikulum yang mapan sejalan dengan persiapan ketersediaan bahan ajar cetak dan non cetak, sehingga pada saat keluarnya ijin operasional program studi tidak terhambat oleh ketersediaan bahan ajar bagi mahasiswa sebagai peserta didik.

Dalam upaya agar program S1-PKP mampu menjawab beragam latarbelakang pendidikan yang dapat berpartisipasi dalam studi, perlu diupayakan pemenuhan dan penjaminan kualitas program S1-PKP melalui evaluasi dan peningkatan kualitas yang berkelanjutan (*check, recheck, and revise*), peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mengelola program S1-PKP melalui pendidikan formal lanjut dan atau pelatihan berkelanjutan, serta peningkatan kualitas pengelolaan program S1-PKP (efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan kolaborasi).

Daftar Pustaka

- Biro Pusat Statistik (2004). Gross domestic product at constant market prices by industrial origin, 1996-2002 (billion rupiahs), dari <http://www.bps.go.id/> diambil Maret 2004.
- Daniel, J.S. (1996). *Mega universities and knowledge media technology strategies for higher education*. London, UK: Kogan Page.
- Departemen Pertanian (2002). *Kebijaksanaan nasional penyelenggaraan penyuluhan pertanian*. Jakarta: Departemen Pertanian.
- Departemen Pertanian (2004). Jumlah penyuluh pertanian berdasarkan latar belakang pendidikan. <http://www.deptan.go.id/bpsdm/>, diambil Januari 2004.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (1994). *Himpunan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Jarmie, M.Y. (2001). Peranan ilmu penyuluhan pembangunan menuju pembangunan pertanian yang berwawasan agribisnis dalam R. Pambudi & A.K. Adhi (Eds.) *Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Menuju Masyarakat Madani*, hal.67-85. Bogor: BPSMP-BPPP-IPB.
- Universitas Terbuka (2004). *Pedoman Umum Pembukaan dan Penutupan Program Studi JKAK KR00*. Departemen Pendidikan Nasional, Universitas Terbuka.
- Universitas Terbuka (2004). *Pedoman Pengembangan Studi Kelayakan JKAK KR01*. Departemen Pendidikan Nasional, Universitas Terbuka.
- Universitas Terbuka (2004). *Pedoman Usulan Pembukaan Program Studi Tingkat Universitas JKAK KR02*. Departemen Pendidikan Nasional, Universitas Terbuka.

- Universitas Terbuka (2004). *Pedoman Penulisan Naskah Akademik Program Studi. JKAK KR03*. Departemen Pendidikan Nasional, Universitas Terbuka.
- Universitas Terbuka (2004). *Pedoman Pengajuan Usulan Pembukaan Program Studi ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. JKAK KR04*. Departemen Pendidikan Nasional, Universitas Terbuka.
- Universitas Terbuka (2004). *Pedoman Evaluasi Program Studi. JKAK KR05*. Departemen Pendidikan Nasional, Universitas Terbuka.
- Universitas Terbuka (2004). *Pedoman Penutupan Program Studi. JKAK KR06*. Departemen Pendidikan Nasional, Universitas Terbuka.
- Universitas Terbuka (2004). *Studi Kelayakan Pembukaan Program Sarjana (S1) Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian*. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Terbuka, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Rivai, M.A. (2000). Reorientasi penyuluhan pertanian prasyarat pertanian kerakyatan.
<http://www.east.asu.edu/msabr/research/indonesia/ringkasan.htm>, diambil 15 Januari 2004.
- Slamet, M. (2003). *Prospek dan tantangan ilmu Penyuluhan Pembangunan Pertanian di Indonesia*. Makalah seminar. IPB-Bogor.

Kompetensi Lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan

Suripto

Sri Sumiyati

Stilah kompetensi banyak digunakan dalam dunia pekerjaan pada umumnya, tidak terkecuali pekerjaan keguruan. Kompetensi berasal dari bahasa Inggris *competence*, yang berarti kecakapan atau kemampuan. Dalam keguruan hal ini berarti, kemampuan atau kecakapan tersebut erat kaitannya dengan pemilikan pengetahuan, kecakapan atau keterampilan sebagai guru. Dengan demikian kompetensi merupakan suatu kemampuan yang mutlak dimiliki guru agar tugasnya sebagai pendidik dapat terlaksana dengan baik. Beranjak dari pengertian ini, maka kompetensi merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pendidikan dan pengajaran. Sebelum melangkah pada uraian berikutnya, perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian mengenai kompetensi menurut pendapat beberapa ahli.

Menurut Ecclestone (1996) "*Competency is the ability to perform a range of tasks or jobs in a range of situations and contexts and under different, real life conditions*" (hal. 111). Dari pernyataan tersebut dijelaskan bahwa, kompetensi adalah kemampuan melaksanakan serangkaian tugas atau pekerjaan dalam situasi dan kondisi berbeda.

Seperti diketahui, guru menyandang tugas berat namun suci dan mulia. Guru dalam tugasnya mengajar dan mendidik siswanya adalah berupa memberikan bimbingan, petunjuk, teladan, bantuan, latihan, penerangan, pengetahuan, pengertian, kecakapan, keterampilan, nilai-nilai, norma-norma, kesusilaan, kebenaran, kejujuran, sikap-sikap, dan sifat-sifat yang baik serta

terpuji. Untuk keperluan tersebut seorang guru harus mengetahui dan mempelajari ilmu keguruan agar ia berkompoten dalam menunaikan tugasnya sebagai pendidik formal bagi siswanya.

Niepoth (1983) mendukung pernyataan tersebut dengan mengatakan bahwa kompetensi, "*Competencies may be defined, as the ability to effectively perform required core processes, compatible with the personal characteristics of the worker in those situations typically encountered*" (hal. 32). Kompetensi dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk melaksanakan proses inti yang dikehendaki dengan lebih efektif, sesuai karakteristik seseorang dalam menghadapi situasi khusus.

Guru yang berkompoten harus dapat memahami isi, jiwa, sifat mental, minat, dan kebutuhan setiap siswanya agar ia dapat memberikan bimbingan dan pelajaran sebaik-baiknya serta sesuai dengan sifat-sifat individual setiap siswa. Karakteristik guru yang berkompoten mencerminkan pemahamannya akan tuntutan tugas yang menjadi tanggungjawabnya.

Selanjutnya Hall dan Jones (1976) berpendapat tentang kompetensi, "*Competencies are composite skills, behavior, or knowledge that can be demonstrated by the learner and are derived from explicit conceptualizations of the desired outcomes of learning*" (hal. 11). Pendapat tersebut mengatakan bahwa kompetensi adalah gabungan dari pengetahuan, keterampilan, atau perilaku yang dapat ditunjukkan oleh para pembelajar dan diperoleh dari konsep yang jelas mengenai hasil belajar yang diinginkan.

Suatu kompetensi adalah suatu pernyataan yang menggambarkan perbuatan nyata dari gabungan keterampilan yang sifatnya khusus tersebut. Pemilikan pengetahuan, keterampilan, atau perilaku ini dituntut oleh jabatan atau pekerjaan tertentu dan kemampuan tersebut umumnya diperoleh melalui pendidikan atau latihan. Misalnya guru melalui pendidikan keguruan. Jadi suatu kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, atau perilaku yang harus dimiliki oleh seseorang yang berguna dalam pelaksanaan tugasnya. Khusus dalam bidang keguruan, hal ini berarti kemampuan tersebut mengimplikasikan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang guru dalam pelaksanaan tugasnya.

Hal senada diungkapkan Barbara & Terry Field (1994) yang memberikan definisi kompetensi sebagai berikut, "*The definition of competencies is the type of skill, knowledge, and attitudes that will form the basis of effective professional practice*" (hal. 8). Kompetensi adalah suatu bentuk keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang akan menjadi dasar yang kuat bagi efektivitas pelaksanaan tugas keprofesionalan.

Tugas profesional keguruan adalah mengajar. Menurut Connel (1965) mengajar diartikan sebagai proses inti dari interaksi antara guru dan siswa. Untuk dapat mengajar, seorang guru harus memiliki seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memungkinkan ia melaksanakan suatu aturan dari tugas pada posisi yang tepat dan kemudian membuatnya berkompeten dalam aturan tersebut.

Sedangkan Cohen (1983) memberi batasan kompetensi, "*Competence describes the structural model and the rules it functions in a pure and ideal form*" (hal. 4). Batasan tersebut menjelaskan bahwa, kompetensi menggambarkan model struktur dan aturan-aturan yang berfungsi dalam bentuk yang murni dan tepat.

Suatu kompetensi menggambarkan aturan-aturan yang menjadi pola bagi pembentukan guru yang professional. Kompetensi merupakan gambaran umum bagaimana seharusnya seorang guru dalam menjalankan tugas keprofesionalannya. Berpijak pada kompetensi ini, seorang guru dapat dikatakan pekerja profesional apabila ia berkompeten dalam pembentukan watak, mental, dan intelektual siswanya.

Selanjutnya Borich & Fenton (1977) mengatakan bahwa kompetensi, "*A competency can be described in terms of its form, which place it in a sequence with other competencies*" (hal. 6-7). Suatu kompetensi dapat dijabarkan dalam suatu bentuk istilah yang ditempatkan secara khusus ke dalam kategori struktur dan perilaku. Penempatan itu sesuai dengan kompetensi lainnya. Ditambahkannya pula, bahwa terdapat tiga bentuk kompetensi : (1) kompetensi pengetahuan, mengenai pemahaman calon guru yang berhubungan dengan segi kognitif; (2) kompetensi penampilan, mengenai kemampuan mengajar calon guru, dan; (3) kompetensi hasil, mengenai keberhasilan belajar siswa yang diajar.

Adapun kompetensi profesional mengajar telah dirumuskan oleh P3G (Proyek Pengembangan Pendidikan Guru), meliputi: (1) menguasai bahan; (2) mengelola program belajar mengajar; (3) mengelola kelas; (4) menggunakan media sumber; (5) menguasai landasan-landasan kependidikan; (6) mengelola interaksi belajar-mengajar; (7) menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran; (8) mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan penyuluhan; (9) mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, dan; (10) memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran (Samana, 1994, hal.123-133).

Kompetensi mengajar yang tertuang dalam sepuluh kompetensi tersebut, idealnya dapat dilaksanakan dengan baik oleh pengajar, namun tidak menutup kemungkinan hanya pada aspek tertentu yang dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam penelitian ini penulis membatasi hanya pada empat kompetensi mengajar yang mengacu pada pelaksanaan pengajaran di kelas, sebagaimana tertuang dalam Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG). Keempat macam kompetensi mengajar tersebut adalah: (1) penguasaan bahan; (2) penguasaan metode; (3) pengelolaan kelas, dan: (4) penggunaan media (Imron, 1995). Berikut ini gambaran mengenai masing-masing kompetensi tersebut.

Penguasaan Bahan

Kompetensi pertama yang harus dimiliki seorang guru adalah penguasaan bahan bidang studi. Penguasaan ini menjadi landasan pokok untuk keterampilan pengajaran. Selain itu menurut Parkay & Stanford (1992) kemampuan dalam menguasai bahan berhubungan erat dengan tiga aturan pokok bagi guru, yakni: (1) guru sebagai pembelajar; (2) guru sebagai agen perubahan, dan; (3) guru sebagai suri tauladan.

Sebagai pembelajar, guru memiliki kebutuhan untuk menjadi berpengetahuan di luar area keilmuannya. Untuk itu, ia senantiasa menimba ilmu sebanyak-banyaknya guna mengembangkan cakrawala berpikir bagi dirinya dan siswa pada gilirannya. Guru sebagai agen perubahan diharuskan membimbing siswanya dari posisi tidak tahu menjadi tahu atau dari tidak baik menjadi baik. Hal ini membutuhkan kerjasama dari

siswa dalam proses pencapaiannya. Selanjutnya, seorang guru dituntut memiliki kepribadian yang baik agar dapat dijadikan suri tauladan bagi siswanya, sehingga dapat terjalin hubungan yang harmonis satu sama lain.

Penguasaan bahan yang dimaksudkan dalam tulisan ini tidak membahas mengenai bahan bidang studi tertentu, tetapi mengenai cara-cara suatu bahan bidang studi dapat dikuasai seorang guru. Penguasaan bahan bidang studi dapat dilakukan dengan membaca buku-buku pelajaran. Proses membacanya dilakukan dengan enam tahap: (1) membaca untuk dihafalkan; (2) membaca untuk dipahami; (3) membaca untuk diaplikasikan; (4) membaca untuk dianalisis; (5) membaca untuk disintesis, dan; (6) membaca untuk dievaluasi.

Jika dilihat dari keseluruhan bidang studi bahan itu beraneka ragam. Dalam menelaah bahan bidang studi ini harus menempatkan diri dari sudut mana memandangnya. Ada dua cara memandang macam bahan bidang studi, yang pertama dari sudut isi bahan itu sendiri, dan kedua dari sudut cara melakukan pendekatannya.

Adapun dilihat dari sudut isi bahan bidang studi, bahan bidang studi itu ada enam jenis: (1) bahan bidang studi fakta, terdiri atas sejumlah fakta atau informasi yang kebenarannya tidak dapat diragukan lagi untuk diperdebatkan; (2) bahan bidang studi konsep, berupa gagasan, idea, pendapat, teori, atau dalil; (3) bahan bidang studi prinsip, berupa tuntutan praktis bagi terselenggaranya perbuatan tertentu, seperti dalam belajar dan mengajar; (4) bahan bidang studi keterampilan, terdiri atas keterampilan-keterampilan tertentu yang harus dikuasai, terutama yang menyangkut keterampilan motorik; (5) bahan bidang studi pemecahan masalah, dan; (6) bahan bidang studi proses, melukiskan proses terjadinya sesuatu.

Pengklasifikasian bahan bidang studi yang dilihat dari sudut cara pendekatannya, dibagi dalam empat bagian sebagai berikut: (1) bahan bidang studi linear, disusun secara berurutan dari yang mudah kepada yang sukar, atau dari yang sederhana kepada yang kompleks; (2) bahan bidang studi kumulatif, menggunakan pendekatan metodologi *child centered*, yaitu pengajaran itu seluruhnya berpusat pada kebutuhan, minat, dan perhatian siswa; (3) bahan bidang studi praktikal, menggunakan

drill atau pelatihan, dan; (4) bahan bidang studi eksperiensial, menekankan unsur kreativitas.

Kriteria pemilihan bahan bidang studi: (1) bidang studi itu harus diseleksi dan disesuaikan dengan kebutuhan; (2) bahan bidang studi yang tidak relevan dengan kebutuhan diganti dengan yang baru; (3) bahan bidang studi yang makin bertambah itu harus dipelajari melalui berbagai media komunikasi, dan; (4) bahan bidang studi yang makin bertambah itu dipelajari melalui berbagai pendekatan modul.

Usaha memecahkan masalah bertambahnya bahan bidang studi itu dilakukan dengan berbagai cara. Cara-cara itu antara lain sebagai berikut: (1) mengganti bahan bidang studi yang tidak sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi; (2) mengembangkan sistem pendekatan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak; (3) menerapkan prinsip belajar yang modern, seperti; CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif), dan; (4) memilih dan menggunakan metode dan media yang bervariasi.

Di dalam kerangka memilih bahan bidang studi, kriteria yang digunakan sebagai berikut: (1) bahan bidang studi yang diajarkan adalah yang bersifat fundamental; (2) bahan bidang studi yang hangat; (3) bahan bidang studi yang selalu dihadapi berulang-ulang oleh manusia dalam kehidupan ; (4) bahan bidang studi yang mengandung unsur pemecahan masalah; (5) bahan bidang studi yang praktis, artinya bahan yang dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari, dan; (6) bahan bidang studi yang memiliki kedalaman dan keluasan yang berimbang.

Cara-cara menentukan bahan bidang studi adalah dengan menentukan pokok bahasan ke dalam jenis bahan bidang studi, baik isi maupun cara pendekatannya dan pada prinsipnya sama. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: (1) guru harus mengetahui dan memahami dulu jenis-jenis bahan bidang studi itu, dan; (2) mempelajari pokok-pokok bahasan dalam GBPP (Garis-garis Besar Program Pengajaran).

Selain itu seorang guru harus memiliki keterampilan menentukan jenis bahan bidang studi yang akan diajarkannya dengan alasan sebagai berikut: (1) untuk menambah khazanah keterampilan menjabarkan pokok bahasan ke dalam metode belajar mengajar yang akan dipakainya; (2) pengetahuan tentang

jenis-jenis bahan bidang studi itu akan membantu di dalam menentukan proses belajar mengajar; (3) untuk membantu guru dalam memilih dan menggunakan media instruksional dan sumber belajar yang tepat, dan; (4) tugas guru tidak sekedar mengajarkan bahan bidang studi keahliannya, tetapi juga bertugas sebagai tenaga ahli kependidikan di bidang perencanaan dan pengembangan kurikulum.

Penguasaan Metode

Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam proses belajar mengajar, metode yang diperlukan seorang guru bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai setelah pengajaran berakhir. Untuk itu menurut Inlow (1963) suatu metode didisain sedemikian rupa guna memudahkan proses belajar yang secara langsung dapat menimbulkan perubahan pada diri si pembelajar (hal. 49). Dengan demikian, seorang guru tidak akan dapat melaksanakan tugasnya bila ia tidak menguasai satupun metode mengajar.

Dalam proses mengajar, guru tidak harus terpaku dengan menggunakan satu metode, tetapi harus menggunakan metode yang bervariasi agar jalan pengajaran tidak membosankan, tetapi menarik perhatian siswa. Meski penggunaan metode yang bervariasi tidak akan menguntungkan proses belajar mengajar bila penggunaan metode tidak tepat dengan situasi yang mendukungnya. Disinilah kompetensi guru diperlukan dalam hal pemilihan metode yang tepat.

Ada banyak metode mengajar yang dapat digunakan sesuai dengan situasi yang mendukungnya. Namun, hanya tiga metode mengajar yang akan dibahas, karena ketiganya merupakan metode mengajar yang umumnya digunakan oleh para guru. Ketiga metode mengajar yang dimaksud adalah: (1) metode ceramah; (2) metode tanya jawab, dan; (3) metode diskusi.

Metode ceramah, adalah metode yang boleh dikatakan metode tradisional, karena sejak dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dengan siswa dalam proses belajar mengajar. Meski metode ini lebih banyak menuntut keaktifan guru daripada siswa tetapi metode ini

tetap tidak bisa ditinggalkan begitu saja dalam kegiatan pengajaran. Apalagi dalam pendidikan dan pengajaran tradisional seperti di pedesaan yang kekurangan fasilitas.

Ceramah adalah penuturan lisan dari guru kepada siswanya. Pada hakikatnya, ceramah adalah kegiatan memberikan informasi dengan kata-kata di depan orang banyak. Penyampaian informasi dengan kata-kata sering mengaburkan dan kadang-kadang ditafsirkan salah. Hal ini dimungkinkan pula oleh sifat metodenya itu sendiri, yaitu: (1) metode ceramah tidak banyak memberikan kesempatan untuk berdiskusi; (2) metode ceramah kurang memberi kesempatan kepada siswa untuk mengeluarkan pendapat; (3) pertanyaan lisan dalam ceramah kurang dapat ditangkap oleh pendengaran, dan; (4) metode ceramah kurang cocok dengan tingkat kemampuan anak yang masih kecil. Agar ceramah menjadi metode yang baik, perlu diperhatikan saran berikut: (1) metode ceramah digunakan jika jumlah khalayak cukup banyak; (2) metode ceramah dipakai jika guru akan memperkenalkan materi pelajaran baru; (3) metode ceramah dipakai jika khalayaknya telah mampu menerima informasi melalui kata-kata; (4) sebaiknya ceramah diselingi oleh penjelasan melalui gambar, gerak, dan alat-alat visual lainnya, dan; (5) sebelum ceramah dimulai, sebaiknya guru berlatih dulu memberikan ceramah.

Langkah-langkah dalam memberikan metode ceramah agar efektif dan efisien adalah: (1) melakukan kegiatan pendahuluan sebelum bahan baru diberikan, dengan cara; merumuskan tujuan, mengemukakan pokok-pokok materi, dan memancing pengalaman siswa yang cocok dengan materi; (2) menyajikan bahan baru dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut; perhatian siswa dari awal sampai akhir harus tetap dipelihara, menyajikan pelajaran secara sistematis, dan kegiatan belajar diciptakan secara variatif, dan; (3) menutup pelajaran pada akhir pelajaran, dengan cara; mengambil kesimpulan dari semua pelajaran yang telah diberikan, memberi kesempatan kepada siswa untuk menanggapi materi pelajaran, dan melaksanakan penilaian secara komprehensif.

Metode tanya jawab. Banyak hal yang dapat dibicarakan tentang teknik mengajar yang baik, antara lain melalui teknik bertanya. Pertanyaan adalah pembangkit motivasi yang dapat

merangsang siswa untuk berpikir. Melalui pertanyaan, siswa didorong untuk mencari dan menemukan jawaban yang tepat dan memuaskan. Dalam mencari dan menemukan itu ia berpikir menghubungkan-hubungkan bagian pengetahuan yang ada pada dirinya dengan isi pertanyaan itu. Jawaban segera diperoleh jika isi pertanyaan banyak kaitannya dengan pengetahuan yang ada pada dirinya. Jika jawaban yang diminta belum siap dimilikinya, maka hal ini menjadi pendorong untuk menemukannya. Ia akan menjelajahi data-data jawaban melalui berbagai cara yang tepat. Proses yang dilakukannya ialah dengan membaca, meneliti, atau diskusi. Membaca informasi dari berbagai sumber adalah salah satu teknik untuk menemukan jawaban, penelitian di laboratorium, di lapangan, di museum, atau di tempat-tempat sumber belajar lainnya juga merupakan cara untuk menemukan jawaban. Jika pencarian jawaban dilakukan melalui penelitian atau dengan membaca informasi dari berbagai sumber sebanyak-banyaknya, maka guru telah berhasil menciptakan suasana belajar yang baik. Kegiatan belajar seperti itu sangat membantu dalam membina manusia seutuhnya.

Penggunaan metode tanya jawab adalah wajar apabila ditujukan untuk: (1) meninjau pelajaran lalu, dan; (2) mengulangi pembicaraan untuk mendapatkan kerjasama siswa. Jika dilihat dari isi intensitasnya, pertanyaan itu ada yang baik dan ada yang buruk. Pertanyaan yang baik, ditandai oleh: (1) adanya respon dari pihak siswa untuk menjawabnya; (2) adanya rasa tidak puas atas jawaban yang diberikan; (3) adanya pertanyaan yang tidak terlampau menghendaki jawaban 'ya' atau 'bukan', dan; (4) pertanyaan yang jelas dan mudah dipahami.

Pertanyaan yang baik bergantung pada: (1) cara seseorang bertanya; (2) sikap seseorang mengajukan pertanyaan, dan; (3) cara memberi giliran dalam menjawab pertanyaan. Sikap guru bertanya kepada seseorang berbeda dengan sikap guru bertanya kepada kelompok atau kelas. Sikap lain yang perlu dikembangkan dalam mengajukan pertanyaan ialah sebagai berikut; (1) pertanyaan yang pernah diucapkan jangan sering diulang; (2) isi pertanyaan hendaknya berkisar pada pokok bahasan tertentu; (3) pupuklah sikap mengajak siswa untuk bertanya, dan (4) selalu menuntun siswa dalam menjawab pertanyaan kepada pokok pelajaran.

Metode diskusi. Dalam kehidupan sehari-hari manusia seringkali dihadapkan pada persoalan-persoalan yang tidak dapat dipecahkan hanya dengan satu jawaban atau satu cara saja, tetapi perlu, menggunakan banyak pengetahuan dan macam-macam cara pemecahan dan mencari jalan yang terbaik. Tambahan pula banyak masalah-masalah di dunia dewasa ini yang memerlukan pembahasan oleh lebih dari satu orang saja, yakni masalah-masalah yang memerlukan kerjasama dan musyawarah. Dan bilamana demikian maka musyawarah atau diskusi yang memberi kemungkinan pemecahan yang terbaik.

Pertanyaan yang layak didiskusikan ialah yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: (1) menarik minat siswa yang sesuai dengan tarafnya; (2) mempunyai kemungkinan-kemungkinan jawaban lebih dari sebuah, dan; (3) mengutamakan pertanyaan yang mempertimbangkan atau membandingkan.

Peranan guru sebagai pemimpin diskusi memainkan tiga peranan: (1) pemimpin sebagai pengatur lalu lintas, bertujuan untuk mengumpulkan pendapat dari semua orang; (2) pemimpin sebagai dinding penangkis, senantiasa menerima pertanyaan-pertanyaan dari peserta untuk dipantulkan kembali kepada kelompok, dan; (3) pemimpin sebagai penunjuk jalan, memberi petunjuk-petunjuk umum mengenai kemajuan-kemajuan diskusi.

Pengelompokkan Kelas

Pengelompokkan kelas adalah salah satu tugas guru yang tidak pernah ditinggalkan. Guru selalu mengelola kelas ketika ia melaksanakan tugasnya. Pengelolaan kelas dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi anak didik sehingga tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Sebelum beranjak lebih jauh, maka penting untuk diketahui pengertian pengelolaan kelas berikut ini.

Pengelolaan kelas terdiri dari dua kata, yaitu pengelolaan dan kelas. Pengelolaan itu sendiri akar katanya adalah 'kelola', ditambah awalan 'pe' dan akhiran 'an'. Istilah lain dari kata pengelolaan adalah 'manajemen'. Manajemen adalah kata yang aslinya dari bahasa Inggris, yaitu '*management*', yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, pengelolaan. Sedangkan kelas adalah ruangan yang dibatasi oleh empat dinding, tempat

sejumlah siswa berkumpul untuk mendapatkan pengajaran dari guru.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dengan sengaja dilakukan guru mencapai tujuan pengajaran. Kesimpulan yang sangat sederhana adalah, bahwa pengelolaan kelas merupakan kegiatan pengaturan kelas untuk kepentingan pengajaran. Pengertian lain dari pengertian pengelolaan kelas ditinjau dari paham lama, yaitu mempertahankan ketertiban kelas. Sedangkan menurut pengertian paham baru dikemukakan bahwa pengelolaan kelas adalah proses seleksi dan penggunaan alat-alat yang tepat terhadap problem dan simulasi kelas. Dalam hal ini guru bertugas menciptakan, mempertahankan, dan memelihara sistem/organisasi kelas, sehingga siswa dapat memanfaatkan kemampuannya, bakatnya, dan energinya pada tugas-tugas individual. Hal ini sejalan dengan pengertian pengelolaan kelas yang diberikan oleh Lemlech sebagai berikut,

“Classroom management is the archestration of the classroom life; planning curriculum, organizing, procedures and resources, arranging the environment to maximize efficiency, monitoring student progress, anticipating potential problems (Lemlech, 1979, hal. 5).

Menurut bahasa ini, yang dimaksud dengan pengelolaan kelas adalah usaha dari pihak guru untuk menata kehidupan kelas dimulai dari perencanaan kurikulum, penataan prosedur dan sumber belajar, pengaturan lingkungan untuk memaksimumkan efisiensi, memantau kemajuan siswa, dan mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin timbul.

Dari pemahaman tersebut diketahui, bahwa pengelolaan kelas meliputi dua hal, yaitu: (1) pengelolaan siswa, dan; (2) pengelolaan fisik. Dalam hal pengelolaan siswa, guru memberikan bimbingan kegiatan belajar siswa sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa itu sendiri. Untuk menunjang kegiatan belajar tersebut, guru mengelompokkan siswa ke dalam tiga kelompok: (1) mengelompokkan menurut kesenangan berkawan; (2) mengelompokkan menurut kemampuan, dan; (3) mengelompokkan menurut minat.

Pada pengelompokan menurut kesenangan berkawan, kelas dibagi dalam beberapa kelompok (jumlah kelompok tergantung pada besarnya kelas) atas dasar perkawanan/kesenangan bergaul diantara mereka. Kelompok terdiri dari 4-6 orang atau lebih yang menurut mereka merupakan kawan-kawan dekat. Mereka duduk mengelilingi meja yang telah disusun sedemikian rupa dalam keadaan berhadapan. Dalam pengelompokan seperti ini, setiap siswa mempelajari atau berbuat hal yang sama dengan sumber yang sama.

Selanjutnya pengelompokan menurut kemampuan, didasarkan pada kenyataan bahwa ada siswa yang pandai, sedang, dan lambat dalam mempelajari sesuatu. Untuk memudahkan pelayanan guru, siswa dikelompokkan ke dalam kelompok cerdas, sedang/menengah, dan lambat. Pengelompokan seperti ini diubah sesuai kesanggupan individual dalam mempelajari mata pelajaran. Pengelompokan demikian akan menuntut program-program khusus (bantuan remidi) untuk membantu siswa-siswa tertentu yang mengalami kesulitan khusus dalam mata pelajaran tertentu.

Sedangkan pada pengelompokan menurut minat, guru perlu terus-menerus mengamati setiap minat siswa, kemudian siswa-siswa yang melakukan kegiatan belajar yang sama dikelompokkan. Di samping itu, guru perlu beri dorongan kepada siswa untuk berpindah dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain.

Ihwal pengelolaan fisik diarahkan pada penataan ruang kelas yang mencakup: (1) pengaturan tempat duduk; (2) pengaturan alat-alat pelajaran; (3) penataan keindahan dan kebersihan kelas, dan; (4) ventilasi dan cahaya. Pada umumnya luas ruangan sebuah kelas di Indonesia adalah 56 m². Secara ideal ruangan kelas selalu ini diisi oleh sekitar 20-25 siswa. Jika ruangan itu diisi lebih dari itu, maka efisiensi belajar tidak akan tercapai. Sebab, besar atau kecilnya ruang kelas ikut menentukan proses belajar mengajar. Ruang kelas yang terlalu besar adalah keluhan umum para guru dan bahkan banyak yang percaya bahwa perbaikan mutu pengajaran langsung dapat dicapai dengan mengurangi besarnya kelas. Hal ini dimaklumi, karena dengan besarnya kelas akan menyulitkan guru mengelola proses belajar mengajar yang kondusif. Sebaliknya, kecilnya kelas akan

memudahkan guru mengelola proses belajar mengajar, sebab dengan kelas kecil, jumlah siswa juga relatif sedikit.

Kelas adalah suatu ruangan sebagai tempat terjadinya proses belajar mengajar. Suasana kelas yang baik dan serasi adalah kelas yang dapat menyediakan kondisi yang kondusif. Oleh karena itu guru harus mengelola kelas agar tercipta proses belajar mengajar yang kondusif. Rung kelas yang kotor, meja dan kursi yang tidak teratur, tidak memiliki jendela, sampah berhamburan, tidak memiliki gambar-gambar yang berhubungan dengan pendidikan dan sebagainya tidak akan mungkin dapat menciptakan proses belajar mengajar yang kondusif. Kondisi seperti ini mengganggu jalannya penyampaian bahan pelajaran kepada siswa. Siswa tidak betah di dalam kelas yang disebabkan kelas tidak menyediakan udara yang segar dan sehat.

Kondisi di atas menjadi tanggung jawab guru bagaimana mengatur meja dan kursi, membuat jendela, menjaga kebersihan ruang kelas, mengatur hiasan di dinding dengan meletakkan pada posisi yang tepat dan sebagainya di dalam ruang kelas. Guru harus pandai mengelola kelas agar siswa betah tinggal di dalamnya untuk menerima bahan pelajaran dalam interval waktu tertentu.

Dalam usaha pengelolaan kelas, guru bisa melibatkan siswa secara langsung. Mendidik mereka bagaimana cara mengelola kelas yang baik dan benar. Kepada mereka diserahkan tugas dan kewajiban untuk membersihkan ruang kelas secara bergiliran. Untuk itu guru sebaiknya mendidik mereka bagaimana membuat jadwal menyapu, jadwal pelajaran dan sebagainya.

Dalam proses belajar mengajar, guru harus bisa menyediakan iklim yang serasi. Iklim belajar yang tidak serasi apabila ada di antara tingkah laku siswa yang tidak terlibat dalam aktivitas belajar. Gejala ini akan terlihat bila ada siswa yang membuat keributan, mengantuk, mengganggu temannya yang sedang belajar, keluar masuk kelas, dan sebagainya. Tingkah laku siswa yang demikian harus diarahkan guru dengan cara menghentikannya dan memerintahkannya pada perbuatan yang produktif dan bermakna.

Dalam hal pengaturan tempat duduk, dapat dikelompokkan sebagai berikut: (1) anggota kelompok (siswa) yang ditempatkan di tengah kemungkinan besar keluar sebagai

pemimpin kelompok (siswa); (2) pemimpin-pemimpin kelompok (siswa) mungkin muncul dari bagian meja yang paling sedikit pesertanya (siswanya); (3) apabila komunikasi bebas; komunikasi terbanyak akan terjadi antara mereka (siswa) yang duduk berhadapan, sementara komunikasi minimal akan terjadi antara mereka yang duduk bersebelahan. Dengan kata lain, komunikasi akan cenderung mengalir menyilang ketimbang mengitari meja. Jadi, pengaturan tempat duduk mempengaruhi jalannya diskusi (proses belajar mengajar), yang pada gilirannya mempengaruhi munculnya pola kepemimpinan dalam kelompok (siswa).

Guru dapat memanfaatkan penemuan ini, siswa yang pemalu dan agak tersisih dapat didudukkan di tempat-tempat di mana mereka lebih dimungkinkan untuk menyumbangkan buah pikiran dalam situasi normal. Sedangkan siswa yang cerewet dan terbuka dapat didudukkan di tempat-tempat yang mungkin agak membatasi sumbangan pikiran mereka. Selain itu, guru sekurang-kurangnya sudah agak dapat memastikan, siapa yang akan berlatih sebagai pemimpin, dengan menempatkan seorang siswa di tengah atau pada sisi meja di mana paling kurang peserta didik yang duduk dalam kelompok.

Oleh karena itu, pengaturan tempat duduk akan mempengaruhi proses belajar mengajar. Daya serap siswa terhadap suara/penjelasan guru juga berbeda, siswa yang duduk berdekatan dengan meja guru atau yang duduk di depan kelas lebih jelas mendengarkan penjelasan guru dan sebagian besar bahan pelajaran dapat diperhatikan dengan baik. Sementara siswa yang duduk paling belakang kelas kurang jelas mendengarkan penjelasan guru dan kemungkinan besar bahan pelajaran kurang diperhatikan. Apalagi dengan suara guru yang terlalu kecil dan ruang kelas yang besar dengan jumlah siswa yang besar pula.

Penempatan alat peraga, media, dan gambar-gambar harus ditempatkan sesuai dengan tujuan pengajaran. Alat-alat itu sebaiknya mudah dilihat dan leluasa untuk diperagakan. Jika menggunakan OHP (*Over Head Projector*), sebaiknya di tempat yang aman dan leluasa untuk dilihat. Gambar digantungkan di tempat yang cukup menarik, mudah dilihat, dan tidak mengganggu pandangan yang lain.

Penempatan lemari atau rak tempat penyimpanan barang-barang tidak ditaruh di mana saja, tetapi sebaiknya diatur menurut prinsip: (1) mudah dalam mengambil barang; (2) tidak mengganggu lalu lintas; dan; (3) dipandang estetik. Prinsip tersebut diberlakukan dalam rangka menunjang proses belajar mengajar yang kondusif.

Ventilasi dan penempatan cahaya. Ruang belajar yang pengap akan menyebabkan kebosanan bekerja, apalagi jika ruang itu gelap. Untuk diperoleh macam ruang yang representatif untuk kegiatan belajar, perancang bangunan harus bekerja sama dengan ahli kurikulum. Ia akan senantiasa memberikan penjelasan tentang segala kebutuhan bagi keperluan belajar, terutama tentang ventilasi dan cahaya.

Penggunaan Media

Kata 'media' berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari kata 'medium', yang secara harfiah berarti 'perantara atau pengantar'. Dengan demikian, media merupakan wahana penyalur pesan atau informasi belajar. Dalam makna yang demikian, maka media bisa dikonotasikan dengan istilah 'alat' dalam pendidikan. Dalam pendidikan, alat didefinisikan sebagai apa saja yang dapat dijadikan perantara untuk mencapai tujuan pendidikan.

Menurut Gerlach, Vernon S., et. al. (1980) mengenai media, "*A medium, broadly conceived, is any person, material, or even that establishes conditions which enable the learner to acquire knowledge, skills, and attitudes*" (hal. 241). Pendapat tersebut mengatakan bahwa, suatu media merupakan gambaran menyeluruh mengenai seseorang, benda, atau peristiwa yang memungkinkan pembelajaran memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dalam hal ini, guru, materi pelajaran, dan lingkungan sekolah dapat dikategorikan sebagai media.

Penggunaan media antara lain adalah untuk mengurangi verbalisme agar siswa mudah memahami bahan pelajaran yang disajikan. Penggunaan media harus disesuaikan dengan pencapaian tujuan. Bila penggunaan media tidak tepat membawa akibat pada pencapaian tujuan pengajaran kurang efektif dan

efisien. Untuk itu guru harus terampil memilih media agar tidak mengalami kesukaran dalam menunaikan tugas.

Beberapa jenis media yang lazim dipakai dalam kegiatan belajar mengajar khususnya di Indonesia adalah: (1) media grafis, seperti; gambar/foto; sketsa; diagram; bagan/*chart*; grafik; kartun; poster; peta/*globe*; papan flannel, dan papan bulletin; (2) media audio, seperti; radio; alat perekam pita magnetik, dan laboratorium bahasa, dan; (3) media proyeksi diam, seperti; film bingkai; film rangkai; media transparansi; proyektor tak tembus pandang; mikrofis; film; film gelang; televisi; video, dan permainan/simulasi.

Sedangkan media lain yang tergolong media pendidikan adalah manusia (pengajar), benda yang sesungguhnya, dan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Ada pula yang dikenal dengan media tulis dan cetak, seperti; surat kabar; majalah, dan lain sebagainya. Selain media tersebut di atas masih ada lagi media yang lain seperti papan tulis, meja, kursi, dan sebagainya. Semua media ini disebut media material, sebab semuanya konkret dan dapat dilihat dengan mata. Media material ini disebut juga sebagai 'alat bantu audiovisual'.

Dalam proses belajar mengajar, bukan hanya media material saja yang dijadikan penunjang pencapaian tujuan, media non materialpun dipergunakan. Ada beberapa macam media nonmaterial yang sering dipakai sebagai media pendidikan pada umumnya. Media-media itu adalah berupa suruhan, larangan, nasihat, hukuman, peringatan, bimbingan, hadiah, pujian, dan sebagainya.

Terlepas dari pembicaraan mengenai bentuk-bentuk dan jenis-jenis media dalam pendidikan, dan terkait dengan masalah pemilihan media, maka semuanya akan berpulang kepada guru yang juga berfungsi sebagai media. Guru merupakan satu-satunya media bergerak yang membimbing siswa. Setiap guru memiliki kepribadian masing-masing sesuai ciri-ciri pribadi yang mereka miliki. Ciri-ciri ini yang membedakan seorang guru dengan guru lainnya. Kepribadian sebenarnya adalah suatu masalah yang abstrak, yang hanya dapat dilihat lewat penampilan, tindakan, ucapan, cara berpakaian, dan dalam menghadapi setiap persoalan.

Seorang guru harus menampilkan kepribadian yang baik, tidak saja ketika melaksanakan tugasnya di sekolah, tetapi di luar sekolahpun guru harus menampilkan kepribadian yang baik. Hal ini untuk menjaga wibawa dan citra guru sebagai pendidik yang selalu digugu dan ditiru oleh siswa atau masyarakat. Bila seorang guru melakukan suatu perbuatan asusila dan amoral maka ia telah merusak wibawa dan citranya di tengah masyarakat.

Kepribadian adalah unsur yang cukup menentukan keakraban hubungan guru dan siswa. Kepribadian guru akan tercermin dalam sikap dan perbuatannya dalam membina dan membimbing siswa. Guru yang dapat mengerti tentang kesulitan siswa dalam hal belajar dan kesulitan lainnya di luar masalah belajar yang dapat menghambat kegiatan belajar, maka akan disenangi siswanya.

Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi mutlak dimiliki oleh seorang calon guru sebagai bekal terlaksananya tugas mengajar dengan baik. Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan kompetensi mengajar adalah merupakan suatu bentuk kemampuan yang dimiliki oleh guru maupun calon guru dalam proses transformasi pendidikan yang ditandai dengan adanya: (1) penguasaan bahan, meliputi; penguasaan bahan bidang studi; (2) penguasaan metode, meliputi; metode ceramah, metode tanya jawab, dan metode diskusi; (3) pengelolaan kelas, meliputi; pengaturan tempat duduk, dan penciptaan iklim kelas yang kondusif, dan; (4) penggunaan media, meliputi; media itu sendiri, dan guru sebagai media.

Daftar Pustaka

- Borich, G.D. (1977). *The appraisal of teaching: Concepts and process*. California: Addison-Wesley Publishing Company.
- Cohen, G. (1983). *The psychology of coqniton*. London: Academic press, Inc.
- Connel, W.F. (1965). *The fondation of education*. Sydney: Ian Novak Publishing, Co.
- Ecclestone, K. (1966). *How to assess the vocational curriculum*. London: Kogan Page Limited.
- Field, Barbara, & Terry. (1994). *Teacher as mentor: A practical guide*. London: The Falmer Press.
- Gerlach, Vernon S., et. al. (1980). *Teaching and media: A systematic approach*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Hall, G.E. & Jones, H.L. (1976). *Competency-based education: A process for the improvement or education*. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Imron, A. (1995). *Pembinaan guru di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Inlow, G.M. (1963) *Maturity in high school teaching*. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Lemlech, Johanna K. (1979) *Classroom management*. New York: Harper and Row Publishers.
- Niepoth William E. Leisure. (1983) *Leadership: Working with people in recreation park setting*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Parkay, F.W., & Stanford, B.H. (1992). *Becoming a teacher: Accepting the challenge of a profession*. Boston: Allyn and Bacon.
- Samana A. (1994). *Profesionalisme keguruan*. Yogyakarta: Kanisius.

Cakupan Kompetensi dan Standard Kompetensi Lulusan Perguruan Tinggi

Endang Nugraheni

Universitas didirikan untuk mengembangkan individu yang memiliki pengetahuan luas, pandangan luas, kemampuan berpikir kritis, dan peka terhadap situasi lingkungan, serta kematangan emosional, dan moral yang tinggi. Visi tersebut diturunkan dari tantangan dan keadaan masyarakat secara global yang berpengaruh terhadap setiap institusi pendidikan tinggi (PT), termasuk pendidikan tinggi di Indonesia. Mempertimbangkan tantangan tersebut, maka Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi di Indonesia mendeskripsikan visi tersebut sebagai: "Pada tahun 2010, Indonesia memiliki kemampuan kompetitif yang diakibatkan oleh keberadaan institusi pendidikan tinggi yang sangat bereputasi tinggi". Agar visi tersebut dapat tercapai tepat pada waktunya maka visi harus dijabarkan ke dalam sasaran dan tujuan yang lebih operasional se spesifik mungkin sampai ke dalam kurikulum.

Peningkatan daya saing menjadi kata kunci pencapaian visi, yang diterjemahkan ke dalam Kurikulum 2002, yang dikenal sebagai Pendidikan Berbasis Kompetensi (PBK). Dalam PBK tersebut cakupan kompetensi PT meliputi kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain. Ketiga kelompok kompetensi tersebut harus mengakomodasi empat pilar pendidikan tinggi yang dicanangkan pada Konferensi Pendidikan Tinggi yang diselenggarakan UNESCO tahun 1998, yaitu *learning to know*, *learning to do*, *learning to be*, dan *learning to live together*. Selain keempat pilar tersebut untuk mempersiapkan lulusan PT agar dapat berdaya saing menghadapi berbagai

tantangan abad 21 maka diusulkan pendekatan *learning how to learn* yang menekankan kemampuan belajar secara berkelanjutan. Artikel ini membahas bagaimana keterkaitan berbagai latar belakang konsep tersebut dengan cakupan kompetensi dan standar kompetensi PT.

Tantangan Global Pendidikan Tinggi

Dunia tengah menghadapi tantangan perubahan secara besar-besaran. Masyarakat di abad 21 antara lain akan dibentuk dan sangat dipengaruhi oleh globalisasi kegiatan ekonomi, revolusi teknologi informasi dan komunikasi (ICT), demokratisasi dalam sistem politik, dan meningkatnya kepentingan ilmu pengetahuan sebagai mesin pertumbuhan di segala bidang aktivitas. Dalam proses perubahan masyarakat tersebut, pendidikan secara umum dan terutama pendidikan tinggi akan sangat berperan (Sadlak, 1998).

Konsep globalisasi merupakan ekspresi geopolitik baru, yang mana kekuatan dan kekuasaan atas teritorial menjadi berkurang pentingnya dibanding kemampuan kontrol dan akses terhadap pasar, kemampuan menghasilkan dan menggunakan pengetahuan dan teknologi baru, dan kapasitas mengembangkan sumber daya manusia (SDM). Daya saing bangsa semakin bergerak dari kekayaan sumberdaya alam dan tenaga kerja murah, menuju kepada inovasi teknologi dan penerapan pengetahuan secara kreatif, atau kombinasi dari kedua hal tersebut (Sadlak, 1998). Globalisasi tidak hanya menyangkut masalah ekonomi saja, melainkan akan meliputi segala bidang, termasuk bidang pendidikan. Dengan demikian bangsa yang tidak mengikuti perkembangan tersebut akan cenderung semakin tertinggal.

Selain pengaruh globalisasi, masih ada beberapa faktor lain yang tidak kalah kompleksnya dalam mempengaruhi dunia pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut UNESCO dalam *Policy Paper for Change and Development in Higher Education* (1995, dalam Sadlak, 1998), faktor pengaruh tersebut adalah demokratisasi, regionalisasi, polarisasi ketidakadilan, marginalisasi dan fragmentasi.

Demokratisasi menandai perubahan global yang menyebabkan banyak pemerintah otoriter jatuh digantikan oleh regim pemerintah yang lebih demokratis. Proses demokratisasi tersebut erat kaitannya dengan meningkatnya tuntutan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Proses demokratisasi tersebut membutuhkan waktu penyesuaian. Di negara berkembang proses demokratisasi tersebut tidak selalu berjalan mulus, terutama demokratisasi bidang politik (Tilaar, 2002).

Regionalisasi terjadi ketika beberapa negara bergabung dalam rangka memfasilitasi integrasi ekonomi sebagaimana pada Masyarakat Ekonomi Eropa. Persetujuan regionalisasi tersebut juga berdampak pada bidang pendidikan, kebudayaan, kerjasama ilmiah, dan pasar tenaga kerja akademik (Sadlak, 1998).

Polarisasi ketidakadilan terjadi akibat meningkatnya perbedaan yang tajam antara negara miskin dan negara kaya. Selain itu polarisasi yang sama terjadi pula di antara kelompok sosial dalam suatu masyarakat, yang mana jurang pemisah antara kelompok masyarakat miskin dan masyarakat kaya semakin melebar. Fenomena tersebut terjadi di Indonesia yang berdampak pada penyelenggaraan PT, terutama dalam hal penerimaan mahasiswa baru.

Marginalisasi dan fragmentasi dalam berbagai bentuk terjadi akibat kurangnya pembangunan, eksklusi sosial dan budaya, yang memecah belah masyarakat menjadi kelompok-kelompok etnis, kesukuan, dan keagamaan (UNESCO, 1995 dalam Sadlak, 1998). Untuk mengatasi tekanan-tekanan tersebut diperlukan pengambilan keputusan yang bijaksana.

Di antara berbagai tekanan dan kondisi situasi yang ada, peran PT justru terbukti meningkat, yang antara lain dapat dilihat dari peningkatan jumlah kebutuhan akan akses terhadap PT di seluruh dunia, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Hal tersebut merupakan respons terhadap meningkatnya tuntutan kualifikasi SDM yang terlatih dan terampil di era ekonomi baru. SDM dituntut untuk memiliki kompetensi dan kemampuan yang tinggi, terutama yang berkaitan dengan teknologi informasi. Tanpa mengasumsikan suatu monopoli maka hanya PT lah yang mampu menyediakan SDM dengan kualifikasi tersebut.

Menurut Sadlak (1998), jumlah mahasiswa peserta PT di seluruh dunia meningkat sekitar 61%, dari 51 juta di tahun 1980 menjadi 82 juta di tahun 1995. Peningkatan tersebut tentunya tidak merata di seluruh bagian dunia. Menurut data dari World Bank, ada korelasi yang jelas antara pembangunan ekonomi suatu negara dengan jumlah peserta didik di tingkat PT. Jumlah mahasiswa di negara kaya meningkat sekitar 51%, negara berpenghasilan menengah meningkat sekitar 21%, dan negara miskin meningkat sekitar 6% (World Bank 1995, dalam Sadlak, 1998).

Secara umum kebutuhan akan akses terhadap PT tersebut lebih merupakan suatu keharusan akibat tututan pasar tenaga kerja. Di negara industri, sekitar 40% dari seluruh lowongan pekerjaan yang ada menuntut sekitar 16 tahun masa sekolah dan pelatihan. Tuntutan tersebut akan segera menyebar pula ke negara berkembang mengingat pasar tenaga kerja yang juga mengglobal. Dengan demikian semakin jelas bahwa orang dituntut untuk lebih menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi informasi.

Dalam proses globalisasi harus disebutkan pula faktor pengaruh yang sangat besar yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama ICT. Perkembangan bidang ICT yang sangat berpengaruh besar tentunya adalah adanya jaringan internet. Internet pada awalnya dikembangkan untuk menyediakan jaringan komunikasi yang murah, cepat, dan berdaya jangkau tinggi, namun pada akhirnya internet menjadi alat canggih bagi perkembangan ekonomi dan budaya pula. Internet juga terbukti menyebabkan revolusi dalam perolehan informasi di kalangan PT, mempengaruhi bagaimana mahasiswa mendapatkan sumber pengetahuan, dan bagaimana ilmuwan bekerja berkolaborasi dengan ilmuwan lain, serta menyebarkan hasil penelitiannya.

Istilah *the university without walls* yang marak sejak 1970an, dan berkembangnya konsep universitas terbuka serta pendidikan jarak jauh, semakin matang dengan bantuan ICT sehingga pada era sekarang menjadi *virtual university*. Menurut berbagai estimasi ada ratusan intitusi pendidikan jarak jauh yang dibuka saat ini, dan jutaan mahasiswa menjadi pesertanya di seluruh dunia. Institusi tersebut selain memberikan gelar akademis, juga dapat menyelenggarakan pelatihan bagi pegawai

yang telah bekerja. Keuntungan utama jenis pendidikan tersebut adalah pelayanannya bagi mahasiswa untuk dapat belajar mandiri tanpa harus meninggalkan pekerjaan.

Manfaat perkembangan ICT tersebut dimanfaatkan pula oleh institusi pendidikan konvensional. Bahkan semakin banyak tanda menunjukkan bahwa terjadi perpaduan atau percampuran antara pendidikan konvensional dengan pendidikan terbuka jarak jauh dengan memanfaatkan ICT. Masing-masing institusi saling bekerjasama, yang satu menutup kelemahan yang lainnya (Sadlak, 1998).

Perkembangan tersebut seringkali menimbulkan kekhawatiran yang tidak semestinya bahwa pendidikan konvensional dengan citra guru yang mengajar di kelas akan hilang sama sekali. Untuk mengembangkan pendidikan terbuka dan jarak jauh yang berkualitas tinggi diperlukan pula keahlian para guru dan pendidik konvensional tersebut. Pengembangan materi dan bahan ajar tetaplah harus dilakukan oleh pendidik profesional. Bagi negara berkembang, pendirian institusi pendidikan terbuka dan jarak jauh tersebut bahkan merupakan solusi yang logis bagi peningkatan kebutuhan PT dan keterbatasan dana yang dimiliki. Menurut Daniel (1996), di negara berkembang, untuk menjaga agar persentasi angka partisipasi mahasiswa konstan saja harus dibuka satu universitas setiap minggunya untuk mengimbangi peningkatan jumlah penduduk yang sangat besar. Tanpa bentuk alternatif PT seperti universitas terbuka dan jarak jauh atau universitas virtual, tentu negara berkembang tidak akan mampu mengembangkan SDMnya.

Visi Pendidikan Tinggi di Indonesia

Dalam menghadapi tantangan globalisasi, pembangunan pendidikan tinggi di Indonesia dilakukan dengan menggunakan paradigma baru yang mana otonomi institusi dan akuntabilitas menjadi isu strategis. Mempertimbangkan tantangan tersebut, maka Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi di Indonesia mendeskripsikan visi tersebut sebagai: "Pada tahun 2010, Indonesia memiliki kemampuan kompetitif yang diakibatkan oleh

keberadaan institusi pendidikan tinggi yang sangat bereputasi tinggi" (HELTS, 2003, hal. 2).

Peningkatan daya saing bangsa menjadi kata kunci pencapaian dari visi pendidikan tinggi di Indonesia, yang dapat dijabarkan kepada lulusan pendidikan tinggi yang memiliki daya saing. Adapun lulusan yang memiliki daya saing digambarkan sebagai manusia yang memiliki kemampuan intelektual untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab, dan berkontribusi terhadap peningkatan daya saing bangsa.

Daya saing bangsa yang tinggi hanya dapat dicapai dengan *frame work* karakter bangsa dan kebudayaan dan peradaban yang kuat. Dalam hal ini, sistem PT bertanggung jawab untuk menyediakan pengetahuan dan pemahaman yang bersungguh-sungguh untuk menjadi warga negara yang baik, dan memiliki kehidupan yang bermakna kepada anak didiknya. Sistem PT juga harus berkontribusi kepada proses pembentukan masyarakat yang demokratis, beradab, inklusif, menjaga integritas nasional. Selain itu melalui peran dan kekuatan moralnya PT dapat bertindak sebagai pendukung suara rakyat.

Pemerintah melalui Dirjen Dikti harus menyediakan infrastruktur dan kerangka acuan yang memungkinkan dan mendorong setiap institusi pendidikan tinggi untuk meningkatkan inovasi dan respons terhadap kebutuhan peningkatan daya saing bangsa. Mahasiswa harus dapat bertumbuh secara intelektual dan emosional sehingga memiliki bekal yang cukup untuk bekerja dan berkontribusi secara efektif kepada masyarakat, disamping berhasil mencapai kesuksesan bagi diri sendiri.

Tantangan global juga meningkatkan kesempatan bagi PT untuk berperan terhadap pengembangan *knowledge economy* atau ekonomi berbasis ilmu pengetahuan, dan masyarakat demokratis. Kontribusi PT terhadap pertumbuhan ekonomi yang berbasis pengetahuan dan penurunan kemiskinan dilakukan melalui kapasitasnya untuk: (1) melatih tenaga kerja yang mampu dan adaptif, (2) mengembangkan ilmu pengetahuan baru untuk meningkatkan daya saing bangsa, dan (3) akses dan adaptasi pengetahuan global untuk penggunaan lokal.

Keunggulan menutut sumberdaya yang cukup. Namun demikian, disadari pula adanya dampak permasalahan penurunan ekonomi di Indonesia yang akan mempengaruhi pencapaian visi

misi tersebut. Penurunan ekonomi telah menyebabkan terhambatnya usaha peningkatan partisipasi. Dikti akan berusaha melibatkan sebanyak mungkin pihak dan partisipasi swasta untuk mendukung pendanaan bagi PT. Sebaliknya institusi PT harus meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya secara terus menerus.

Untuk itu dalam strateginya, salah satu cara untuk mengatasi dilema permasalahan ekonomi tersebut adalah mendorong institusi PT untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dibanding menekankan pada kuantitas. Ekspansi PT hanya dilakukan apabila pasar memang benar-benar membutuhkan. Selain itu, setiap institusi didorong untuk mendemonstrasikan kualitas lulusannya. *Outcome indicators* merupakan salah satu alat ukur bagi kualitas yang dimaksud, yang dapat dilakukan dalam proses evaluasi lulusan PT (HELTS, 2003).

Pendidikan Berbasis Kompetensi

Selama ini sistem pendidikan di Indonesia lebih dititik beratkan pada masukan dan isi yang difokuskan pada mata kuliah apa yang harus diajarkan secara sendiri-sendiri (Kurikulum 1994). Penguasaan lulusan S1 lebih cenderung kepada penguasaan teori dengan pertimbangan bahwa S1 merupakan dasar bagi jenjang belajar S2 dan S3. Pada kenyataannya pendekatan ini kemudian dianggap kurang tepat karena kebanyakan lulusan S1 tidak melanjutkan sekolah lagi ke jenjang berikutnya, dan langsung terjun ke dunia kerja. Dengan demikian pembekalan ketrampilan bagi lulusan S1 dianggap kurang adaptif bagi tuntutan dunia kerja yang terus menerus berkembang sesuai perkembangan teknologi dan informasi (Soewono, 2002).

Tanggal 5 - 9 Oktober 1998 di Paris merupakan tonggak bersejarah bagi dunia pendidikan, terutama pendidikan tinggi, UNESCO mengadakan *World Conference on Higher Education* dalam rangka menyongsong abad 21 (Rao, 2003). Dalam konferensi tersebut dicanangkan empat pilar pendidikan untuk menghadapi tantangan abad 21, yaitu: (1) *learning to know*, (2) *learning to do*, (3) *learning to be*, dan (4) *learning to live together*.

Pilar pertama berkaitan dengan landasan ilmu pengetahuan yang harus dikuasai pembelajar, yang terus

berkembang secara pesat. Sedangkan domain penguasaan ilmu dasar tersebut juga dituntut untuk semakin mendalam dan semakin tinggi tingkatannya. Peserta didik tidak boleh hanya sekedar mengetahui, memahami, dan menghafal saja, melainkan juga dapat melakukan analisis, sintesis, dan evaluasi.

Dalam penguasaan ilmu dasar peserta didik dituntut pula untuk dapat mengaplikasikan ilmu yang dipelajari (*learning to do*), sehingga dikemudian hari ketika sudah lulus dan memasuki lapangan kerja, maka yang bersangkutan dapat menerapkan apa yang dipelajari, dan dianggap siap untuk bekerja. Pilar yang pertama dan kedua, belumlah dianggap cukup untuk menghadapi tantangan abad 21, sehingga perlu dilengkapi dengan pilar yang ketiga dan keempat.

Pilar ketiga menggarisbawahi pentingnya penggalian potensi diri dan kepribadian peserta didik, yang harus selalu diberi kesempatan untuk berkembang terus seumur hidup. Kemampuan individu untuk selalu belajar mengenai berbagai hal dalam hidup merupakan kunci dari *learning to be*. Sedangkan pilar yang keempat berkaitan dengan hidup bersama orang lain, berkomunikasi, berinteraksi, dan bekerjasama. Bagi seorang individu, modal kecerdasan intelektual saja tidak cukup, melainkan harus pula disertai dengan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual (Agustian, 2001). Ketiga jenis kecerdasan tersebut selain berguna bagi perkembangan diri sendiri (*learning to be*), juga sangat bermanfaat bagi hubungan interpersonal dengan orang lain (*learning to live together*).

Keempat pilar yang menjadi kesepakatan dunia tersebut juga diadopsi oleh Indonesia, dan menjadi dasar bagi pemikiran atau konsep Pendidikan Berbasis Kompetensi (PBK), yang kemudian diterapkan melalui Kurikulum Nasional 2002. Dengan penggunaan PBK ini diharapkan: mutu pendidikan menjadi lebih terjamin; kebutuhan lapangan kerja dapat lebih terpenuhi; dan peran perguruan tinggi sebagai agen perubah masyarakat dapat lebih terpenuhi (Soewono, 2002).

Prinsip dasar PBK terutama mencakup hal sebagai berikut.

1. Menekankan pada hasil/*outcomes*.
2. *Outcomes* merupakan kompetensi yang dapat diukur.

3. Evaluasi keberhasilan merupakan pengukuran penguasaan kompetensi yang telah dicapai.
4. Relevansi yang lebih besar pada dunia kerja yang nyata.
5. Menekankan kepada kemampuan berfikir pada level yang lebih tinggi.

Dalam PBK tersebut, yang dimaksudkan dengan kompetensi adalah: “seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab, yang dimiliki seseorang sebagai syarat kemampuan untuk mengerjakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu” (Keputusan Mendiknas RI Nomor 045/U/2002). Jelas bahwa kompetensi lulusan yang diharapkan mencakup bidang studi, keterampilan, sikap, kepribadian, dan nilai sebagai seorang profesional. Hal tersebut sesuai dengan pilar yang telah dicanangkan UNESCO, yaitu bahwa seseorang lulusan harus mampu secara keilmuan, terampil bekerja, berkepribadian, dan dapat bekerja sama dengan orang lain.

Cakupan Kompetensi

Bagi perguruan tinggi di Indonesia, maka cakupan kompetensi yang harus dikuasai termuat dalam Kep. Mendiknas RI No. 045/U/2002. Kompetensi tersebut meliputi tiga hal berikut ini.

1. Kompetensi Utama, yaitu kompetensi inti yang diharapkan dikuasai lulusan bidang studi yang kemudian disebut kurikulum inti.
2. Kompetensi Pendukung, yaitu kompetensi yang dibutuhkan untuk menunjang penguasaan kompetensi utama.
3. Kompetensi lain, yaitu kompetensi yang dianggap perlu untuk melengkapi kedua kompetensi di atas.

Pengelompokan kompetensi tersebut berkaitan pula dengan empat pilar *learning* yang telah diuraikan sebelumnya. Melengkapi semua konsep tersebut perlu dipertimbangkan pendekatan *learning how to learn* yang menjadi kunci utama untuk mencapai SDM yang kompetitif dalam menghadapi tantangan masa depan. Kerangka berpikir yang diusulkan penulis tertera pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Berpikir Cakupan Kompetensi Pendidikan Tinggi

Untuk memenuhi tujuan keempat pilar peserta didik dituntut untuk selalu dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja dan belajar secara berkelanjutan sehingga perlu dipertimbangkan pendekatan *learning how to learn*, yang selama ini kurang banyak ditekankan. Padahal dari pengalaman selama ini, informasi yang kita dapatkan sewaktu bersekolah banyak yang kemudian menjadi kedaluwarsa ketika kita sudah bekerja akibat perubahan dan perkembangan situasi. Mungkin pelajaran yang masih terpakai hanya beberapa prinsip dasar, logika, cara berpikir, atau cara analisis. Berbagai macam hafalan yang kita pelajari secara susah payah di sekolah (dari SD sampai universitas) ternyata sudah ketinggalan jaman ketika kita sudah bekerja. Untuk banyak hal yang lainnya seseorang dituntut untuk mampu belajar secara mandiri. Apabila keterampilan cara belajar (*learning how to learn*) tersebut secara sistematis kita pelajari, maka harapannya adalah proses belajar mandiri secara berkelanjutan seumur hidup itu dapat dilakukan secara lebih efektif.

Learning to learn sebenarnya bukan hal yang baru. Dalam Ilmu Pendidikan dapat dikelompokkan pada *cognitive approach to curriculum*, yang mana kuncinya adalah lebih kepada bagaimana peserta didik belajar, bukan masalah apa yang dipelajari (Dukacz & Babin, 1980). Selain itu di era kecanggihan informasi ini, ketersediaan informasi bagi seseorang bukan menjadi permasalahan lagi, melainkan justru kemampuan pembelajar untuk menyeleksi dan memilahkan informasi yang tersedia.

Secara operasional konsep *learning to learn* mencakup beberapa subjek yaitu: Bahasa Inggris, Keterampilan Komputer, Keterampilan Informasi, *Study skill*, dan *Self Management*. Kelima subjek yang diusulkan tersebut tentunya harus melebur ke dalam struktur kurikulum sesuai Kep. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002. Namun demikian kita perlu berhati-hati untuk memasukkan subjek tersebut ke dalam kurikulum, mengingat beban kurikulum yang dikeluarkan sebagai relatif berat bagi peserta didik. Beberapa subjek mungkin dapat berbentuk matakuliah, misalnya dalam kelompok matakuliah pendukung atau matakuliah lain, sedangkan yang lainnya dapat diintegrasikan ke dalam matakuliah yang telah ada. Bahasa Inggris pada umumnya masuk ke dalam kelompok kompetensi pendukung di samping ilmu dasar yang merupakan *prerequisite* bagi matakuliah dalam kompetensi utama. Adapun keempat keterampilan lainnya dapat menjadi bagian dari kelompok kompetensi lain.

Untuk kompetensi utama, sesuai dengan tradisi akademik yang telah mendarah daging, tentunya akan mencakup mata kuliah utama atau inti dari suatu program studi. Kompetensi utama mencakup bagian untuk memenuhi *learning to know* dan *learning to do*. Kurikulum inti merupakan kesepakatan antara perguruan tinggi, masyarakat profesi, dan pengguna lulusan. Pada umumnya bagian ini relatif lebih *rigid* dibanding kompetensi lainnya, karena selalu dipimpin oleh tradisi akademik sejak kurun waktu yang lama.

Untuk meningkatkan daya saing, maka kualitas penguasaan kompetensi utama harus ditingkatkan. Untuk meningkatkan kualitas, maka semua proses pembelajaran, sejak perencanaan pembelajaran, pengajaran, pemberian tugas, evaluasi dan pengukuran hasil belajar harus memenuhi suatu

standar kualitas tertentu. Proses kontrol kualitas yang pada awalnya diterapkan di bidang manufaktur harus pula diterapkan di bidang pendidikan.

Dalam pelaksanaannya, dosen tidak dapat hanya mengajar secara seadanya dan sembarangan. Materi yang diajarkan ataupun bahan belajar harus direncanakan, dikembangkan, dan dikemas sedemikian rupa sehingga dapat dipastikan bahwa peserta didik dapat belajar dengan baik. Perlu disadari bahwa apabila pada waktu yang lalu dosen merupakan sumber utama informasi keilmuan, maka pada jaman sekarang, informasi keilmuan bisa didapatkan oleh mahasiswa dari berbagai sumber, terutama internet. Peran dosen lebih banyak sebagai fasilitator dibanding sebagai satu-satunya sumber. Selain itu, proses pengukuran hasil belajar juga harus disusun dengan adil dan etis. Berbagai teknik pengukuran dapat digunakan, mulai dari bentuk tes (uraian dan objektif), non tes (praktek, tugas), sampai dengan tes alternatif (portofolio, kinerja). Dalam hal ini teknologi instruksional dapat berperan besar membantu kelancaran proses belajar mengajar tersebut.

Sedangkan kompetensi pendukung dan kompetensi lain merupakan elemen kurikulum institusional yang yang ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi. Pada kedua jenis kompetensi inilah sebenarnya setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan kekhasan masing-masing dengan konsep pemikiran yang inovatif. Pada kedua bagian ini pula pertimbangan atas visi lulusan yang kompetitif dapat dijabarkan secara lebih kreatif. Pada bagian ini kebutuhan untuk *learning to be* dan *learning to live together* dapat diakomodasikan.

Kompetensi di luar kompetensi utama, yaitu kompetensi pendukung dan kompetensi lain, pengklasifikasiannya tidak seketat pada kompetensi utama. Dalam hal ini setiap program studi dapat berbeda cara pengelompokannya. Demikian pula dalam menentukan standar penguasaan kompetensi tersebut. Standar bisa ditentukan sendiri oleh institusi dalam bentuk kisi-kisi, ataupun menggunakan standar kompetensi yang telah ada atau dikembangkan oleh pihak lain. Sebagai contoh, untuk Bahasa Inggris ada TOEFL.

Tabel 1. Cakupan Kompetensi dan Standar Kompetensi Perguruan Tinggi

Pilar Pendidikan	Kelompok Kompetensi	Bidang Kompetensi	Standar
<i>Learn to know</i> <i>Learn to do</i>	Kompetensi utama	Sesuai kurikulum inti masing-masing program studi	Kisi-kisi, atau standar kompetensi di bidang relevan (bila ada)
<i>Learn to know</i> <i>Learn to do</i>	Kompetensi Pendukung	Ilmu Dasar (<i>prerequisite</i>) Bahasa Inggris	Kisi-kisi/TOEFL, IELTS, dll.
<i>Learn to be</i>	Kompetensi lain	Kewargaan Negara Filsafat Manajemen Pribadi	Kisi-kisi
<i>Learn to live together</i>	Kompetensi Lain	Keterampilan Komputer Keterampilan Informasi Keterampilan Belajar	Kisi-kisi <i>Information Literacy Standard for Higher Education</i>

Untuk memenuhi tujuan *learning to be* dapat diberikan subjek seperti Kewargaan Negara (*Civics*), Filsafat, Manajemen Pribadi, dan lain-lain, yang dapat dikelompokkan ke dalam kompetensi lain. Pilar ke empat yaitu *learning to live together* dapat dipenuhi dengan subjek seperti keterampilan komputer, keterampilan informasi, dan keterampilan belajar. Suparno (2002), menyebut kompetensi pendukung di luar ilmu dasar dan kompetensi lain tersebut sebagai kompetensi umum, walaupun mengemukakan subjek-subjek yang berbeda.

Secara praktis, usulan tentang cakupan kompetensi untuk perguruan tinggi beserta alternatif standar yang digunakan tertera pada Tabel 1. Untuk kelompok kompetensi utama tidak akan dijelaskan secara mendalam, karena setiap program studi akan memiliki kurikulum yang berbeda. Hal tersebut pada umumnya banyak dibahas atau menjadi urusan masing-masing bidang studi. Demikian pula dengan kompetensi pendukung yang merupakan matakuliah atau ilmu dasar bagi matakuliah pada kompetensi utama, dan kelompok subjek umum lainnya yang dapat diterapkan untuk semua program studi.

Subjek yang akan dibahas secara lebih mendalam adalah kelima subjek yang dapat mendukung konsep *learning to learn*, yaitu Bahasa Inggris, Keterampilan Komputer, Keterampilan Informasi, Keterampilan Belajar, dan Manajemen Pribadi. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya maka kelima subjek tersebut masuk dalam pengelompokan kurikulum yang telah ada, baik sebagai kompetensi pendukung maupun sebagai kompetensi lain. Dengan pendekatan konsep tersebut diharapkan tujuan PBK dan tujuan peningkatan daya saing bangsa untuk menghadapi masa depan dapat tercapai secara utuh dan menyeluruh.

Bahasa Inggris. Di era globalisasi kemampuan untuk berkomunikasi dalam bahasa internasional tentunya merupakan suatu keharusan. Bahasa Inggris telah diajarkan mulai sejak sekolah dasar dan seterusnya sampai ketika seseorang kuliah. Namun demikian kompetensi rata-rata yang dimiliki lulusan relatif rendah. Untuk itu kurikulum dan metode pengajaran Bahasa Inggris perlu dievaluasi kembali secara khusus dan diperbaiki. Setelah lulus perguruan tinggi, maka kompetensi Bahasa Inggris harus dikuasai baik pasif maupun aktif. Bahasa tersebut menjadi media komunikasi dalam masyarakat global, baik lisan maupun tertulis. Bahkan sebenarnya untuk menempuh perkuliahan di perguruan tinggi penguasaan Bahasa Inggris juga sudah harus dikuasai, minimal penguasaan secara pasif. Jadi sebenarnya kompetensi Bahasa Inggris merupakan kompetensi mutlak agar seseorang dapat belajar mandiri dan terus mengembangkan diri (*learning to learn*) dan sekaligus untuk memenuhi tujuan mampu hidup bersama dengan orang lain (*learning to live together*).

Keterampilan Komputer. Pada masa kini penggunaan komputer, khususnya komputer personal tidak hanya sebagai alat bantu kerja saja, melainkan juga sebagai alat komunikasi utama. Dengan adanya jaringan internet, maka tersedia berbagai jenis informasi yang dapat diakses dalam proses belajar. Selain itu internet juga merupakan alat komunikasi yang cepat, murah, dan luas jangkauannya. Bagi lulusan PT, kompetensi ini mutlak pula dikuasai karena ketersediaan lowongan kerja seringkali dimuat pula di internet. Orang tidak harus memiliki perangkat komputer

dahulu sebelum belajar menggunakannya, mengingat menjamurnya tempat penyewaan komputer yang dapat mengakses internet (Warnet). Apabila kompetensi ini tidak diajarkan secara formal di perguruan tinggi, maka perguruan tinggi dapat membantu mahasiswa dengan menyelenggarakan kursus komputer, atau bekerjasama dengan lembaga kursus komputer yang ada (Suparno, 2002). Keterampilan Komputer ini berkaitan erat dengan Keterampilan Informasi.

Kemelekan Informasi. Kemelekan informasi adalah satu set kemampuan seseorang untuk mengetahui kapan suatu informasi dibutuhkan, dan memiliki kemampuan untuk mencari sumbernya, mengevaluasi, dan menggunakan informasi tersebut secara efektif (ALA, 1989, dalam ACRL, 2005). Kompetensi tersebut semakin penting akhir-akhir ini seiring dengan perkembangan ICT yang sangat pesat. Karena kondisi tersebut seseorang dihadapkan pada masalah berlebihannya pilihan informasi yang tersedia di bidang akademik, pekerjaan, dan pribadi, baik secara tertulis, lisan, melalui berbagai media, dan terutama melalui jaringan internet. Seringkali informasi tersebut ada dalam format yang tidak tersaring, sehingga dapat diragukan keaslian, validitas, dan reliabilitasnya. Semua itu menjadi tantangan baru bagi individu untuk mengevaluasi dan memahaminya. Keberadaan informasi yang berlebihan tersebut tidak otomatis membuat masyarakat menjadi lebih tahu dan paham, kecuali dengan kemampuan untuk memilah informasi tersebut yang umum pula disebut sebagai kemelekan informasi (ACRL, 2005).

Secara operasional, keterampilan informasi memungkinkan seseorang untuk memiliki kemampuan sebagai berikut (ACRL, 2005).

1. Menentukan sejauh mana informasi yang dibutuhkan.
2. Mengakses informasi yang dibutuhkan secara efektif dan efisien.
3. Mengevaluasi secara kritis sumber dan informasi yang didapatkan.
4. Mengintegrasikan informasi tersebut kepada kerangka pengetahuan yang telah dimiliki.

5. Menggunakan informasi secara efektif untuk memenuhi tujuan yang spesifik.
6. Memahami permasalahan legal, ekonomis, dan sosial yang berkaitan dengan akses dan penggunaan informasi secara etis dan sah secara hukum.

Keterampilan informasi menjadi dasar bagi belajar seumur hidup, diperlukan oleh seluruh disiplin ilmu, semua lingkungan belajar, dan setiap tingkatan pendidikan. Di lingkungan PT kompetensi tersebut perlu dikembangkan untuk menyiapkan lulusan agar mampu terus belajar seumur hidup. Apabila hendak dimasukkan ke dalam kurikulum, maka diperlukan kerjasama dan kolaborasi erat antara pihak fakultas, perpustakaan, dan pengelola atau administrator. Tujuan instruksional dapat dimasukkan ke dalam matakuliah inti dari program studi, dan dosen memberikan semacam tugas yang berkaitan dengan kompetensi di bidang keterampilan informasi. Sedangkan prinsip dasar dan pengantarnya dapat diberikan saat orientasi studi ataupun pada awal kuliah. Keterampilan ini telah berkembang pesat sehingga sekelompok ahli bahkan telah menyusun standar untuk mengukur kompetensi tersebut secara kuantitatif (ACRL, 2005).

Keterampilan Belajar. Menurut pengalaman para pengajar, beberapa kemampuan akademik yang berperan penting dalam kesuksesan belajar ternyata dapat diajarkan, seperti keterampilan membaca efektif, mendengarkan, dan membuat catatan, bahkan sampai cara analisis dan logika berpikir. Dengan demikian berkembanglah penelitian tentang teknik bagaimana cara belajar yang efektif, dan bagaimana keterampilan tersebut dapat dilatihkan secara sistematis (Devine, 1987).

Secara teknis materi tentang keterampilan belajar mencakup keterampilan seperti: membaca, mendengarkan, berpikir, menulis, membuat catatan, melakukan penelitian, mencari sumber informasi, menyusun laporan, melakukan presentasi, mengingat, dan menghadapi ujian (Gawith, 1991). Untuk mempelajari matakuliah tertentu, bahkan ada pula keterampilan belajar khusus yang bisa diajarkan yang nantinya akan memudahkan mahasiswa menyelesaikan matakuliah

tersebut, yaitu keterampilan belajar khusus dalam bidang matematika, ilmu pengetahuan alam, sastra, bahasa (pengembangan perbendaharaan kata), dan lain sebagainya (Devine, 1987).

Keterampilan tersebut apabila dengan sengaja diajarkan kepada mahasiswa, maka keberhasilan belajar mereka akan meningkat. Selain itu keterampilan tentang bagaimana cara belajar tersebut dapat selalu dipakai setelah mahasiswa lulus dan masuk ke dunia kerja. Dengan penguasaan kompetensi tersebut diharapkan mereka menjadi lebih terampil bekerja dan mampu mempelajari pengetahuan dan keterampilan baru secara lebih efektif. Keterampilan belajar ini berkaitan erat pula dengan manajemen pribadi dan menjadi modal utama bagi seseorang untuk *learning how to learn*.

Manajemen Pribadi. Manajemen pribadi adalah kompetensi yang berkaitan dengan bagaimana membuat seseorang menjadi lebih efektif dalam bekerja, belajar, dan memecahkan permasalahan secara pribadi. Manajemen pribadi merupakan sekumpulan teknik tentang bagaimana merencanakan dan mencapai tujuan, bagaimana mendapatkan arahan dan dukungan yang dibutuhkan, dan bagaimana mengelola pribadi dan hubungan interpersonal secara lebih efektif (Covey, 1989). Secara teknis, materi ini akan mencakup topik seperti bersikap proaktif, menentukan visi pribadi, menentukan prioritas, mengelola waktu, teknik berkomunikasi dan bekerjasama dengan empati, serta sikap selalu memperbaiki diri secara terus menerus.

Karena sifatnya yang praktis dan tergolong sebagai keterampilan hidup, keterampilan ini mungkin tidak perlu dikemas dalam satu matakuliah yang khusus namun dapat diberikan dalam bentuk rangkaian kursus atau pelajaran tambahan di luar kurikulum. Pengetahuan dan keterampilan ini sangat praktis untuk diterapkan baik dalam proses belajar ataupun dalam pekerjaan. Dengan kompetensi tersebut seseorang diharapkan dapat lebih adaptif menghadapi lingkungan sosialnya, kondisi kerja, dan memiliki sikap hidup yang efektif.

Standar Kompetensi

Standar kompetensi menggambarkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dipersyaratkan sehingga lulusan suatu pendidikan tinggi dapat bekerja secara efektif di tempat kerjanya. Standar mencakup deskripsi tentang kompetensi yang harus dikuasai dan kriteria kinerja atau ukuran keberhasilan seperti apa yang harus dicapai. Standar kompetensi secara akademik memberi arahan pada proses kegiatan belajar mengajar, menunjukkan secara jelas apa yang harus dipelajari mahasiswa, dan apa yang harus diajarkan oleh dosen.

Banyak ahli pendidikan yang berpendapat bahwa penyusunan standar akan bermanfaat untuk mencapai setidaknya 3 tujuan sebagai berikut (Duffy, 2002).

1. Standar memperjelas dan menyatakan bahwa semua pembelajar diharapkan dapat berhasil secara akademik.
2. Penyusunan standar melibatkan para *stakeholder* dalam keputusan tentang apa yang harus diketahui dan dapat dikerjakan oleh para lulusan.
3. Penyusunan standar melibatkan guru dan anggota institusi lainnya dalam proses perbaikan secara terus menerus.

Standar akademik pada umumnya mencakup tiga hal sebagai berikut (Duffy, 2002).

1. Standar materi akademik, yang menunjukkan ide, ketrampilan, dan pengetahuan yang dianggap penting untuk dipelajari mahasiswa.
2. Standar kinerja, yang disebut juga sebagai indikator mendefinisikan kinerja atau keberhasilan menguasai kompetensi, misalnya seberapa baikkah yang dianggap baik, sangat baik, dan lain sebagainya.
3. Tingkat profisiensi, yang menentukan sampai seberapa atau sampai sederajat apa mahasiswa diharapkan dapat mempraktekkan kompetensi yang dimaksud.

Untuk menghadapi tuntutan global dan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan, maka standard kompetensi perguruan tinggi harus dikembangkan, baik secara lokal, nasional, regional, dan internasional. Secara nasional, negara dapat memprakarsai penyusunan standar kompetensi bagi pendidikan tinggi, misalnya

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang mengakreditasi setiap program studi, ataupun para asosiasi profesi, misalnya Ikatan Arsitek Indonesia yang memberikan pengakuan bagi arsitek yang memenuhi standar dan kualifikasi mereka. Penyusunan standar tersebut selain pada penyelenggaraan dan kualitas program studi secara umum, juga harus berlanjut sampai dengan kompetensi di tingkat matakuliah, apabila memang diinginkan adanya standar kompetensi yang spesifik secara nasional.

Negara yang paling maju di bidang penyusunan standar di bidang pendidikan adalah Amerika Serikat yang menyusun standar tingkat nasional, negara bagian, dan lokal, untuk bidang studi seperti matematika, sains, geografi, dan sejarah. Standar tersebut disusun mulai untuk sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi, dan penyusunnya pun melibatkan semua *stakeholder* mulai dari pihak sekolah, peserta didik, orang tua, pemerintah sampai dengan organisasi bisnis (Duffy, 2002).

Apabila standar kompetensi belum ada, maka dalam teknologi pembelajaran dikenal adanya kisi-kisi atau *blue print* untuk mengukur keberhasilan belajar peserta didik, dan menunjukkan sampai dimana penguasaan mereka terhadap suatu tujuan pembelajaran tertentu. Kisi-kisi tersebut menjadi pegangan bagi pengajar dalam penyusunan soal tes atau ujian. Dengan demikian untuk memperbandingkan kualitas lulusan dari berbagai institusi pendidikan antara lain dapat dilakukan dengan menganalisis isi matakuliah yang mencakup deskripsi matakuliah, tujuan instruksional, dan kisi-kisi ujian. Kisi-kisi tersebut dapat dikatakan sebagai langkah awal dalam menuju standardisasi kompetensi.

Proses standardisasi ini tidak hanya berlaku eksklusif dalam suatu negara tertentu, namun juga dapat lintas negara atau internasional. Sebagai contoh, *International Standard for Quality System – ISO 9001*, yang berasal dari dunia industri Amerika Serikat, telah mulai masuk bidang pendidikan untuk memastikan kualitas dalam disain, pengembangan, produksi, instalasi, dan pelayanan yang diberikan oleh institusi. *International Council for Open and Distance Education (ICDE standard agency)* juga memberikan sertifikasi dan akreditasi untuk kualitas penyelenggaraan bagi institusi pendidikan tinggi terbuka dan jarak

jauh, yang mana Universitas Terbuka mendapatkannya pada 1 Agustus 2005.

Penutup

Dalam rangka mencapai tujuan dan visi pendidikan tingkat PT, dan mempersiapkan lulusan untuk memiliki daya saing yang cukup dalam menghadapi tantangan abad 21, diusulkan pendekatan *learning how to learn* melengkapi konsep *learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together*. Sedangkan cakupan kompetensi untuk *learning to learn* tersebut meliputi subjek: Bahasa Inggris, Keterampilan Komputer, Keterampilan Informasi, Keterampilan Belajar, dan Manajemen Pribadi. Adapun standar kompetensi merupakan ukuran atas sampai dimana kompetensi harus dicapai oleh lulusan. Proses penyusunan standar relatif kompleks dan melibatkan berbagai pihak sehingga dibutuhkan waktu, biaya, dan upaya yang khusus. Apabila standar kompetensi secara ideal belum tersedia, maka teknik disain instruksional yang umum digunakan di dunia pendidikan dapat membantu, yaitu dengan menggunakan kisi-kisi dan tujuan instruksional matakuliah. Selain cakupan dan standar kompetensi PT, penting pula dipahami bagaimana cara mengukur kompetensi untuk para lulusan PT, yang dalam tulisan ini tidak dibahas. Pengukuran tersebut selain harus berdasarkan konsep teori yang tepat mengenai pengukuran kompetensi, juga harus mempertimbangkan pasar tenaga kerja dan jenis kompetensi yang diukur. Untuk itu harus dikembangkan suatu model pengukuran kompetensi lulusan PT yang komprehensif.

Daftar Pustaka

- Agustian, A.G. (2001). *Rahasia sukses membangun kecerdasan emosional dan epiritual*. Jakarta: Arga Wijaya Perkasa.
- Association of College & Research Libraries (2005). Information literacy competency standard for higher education, <http://www.ala.org/ACRLPrinterTemplate.cfm?Section=acrlstandards&Template=Co>. Diambil pada 4 Oktober 2005.
- Covey, S.R. (1998). *The seven habits of highly effective people*. New York: Simon & Schuster.
- Daniel, J. (1996). *The world cuisine of borderless knowledge*. Times Higher Education Supplement.
- Devine, T.G. (1987). *Teaching study skills*. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
- Duffy, F.M. (2002). *Step-up-to-excellence, An innovative approach to managing and rewarding performance in school system*. Lantham: The Scarecrow Press, Inc.
- Dukacz, A.S. & Babin, P. (1980). Perspectives on curriculum. Dalam F.M. Connelly, et.al. (Ed.) *Curriculum planning for the classroom*. Hal. 13-22. Ontario: The Ontario Institute for Studies in Education.
- Gawith, G. (1991). *Power learning: A guide to success*. Singapore: Heinemann Asia.
- HELTS. (2003). *Higher Education Long Term Strategy, 2003 – 2010*. Jakarta: Directorate General of Higher Education, Ministry of National Education, Republic of Indonesia.
- Kementrian Pendidikan Nasional (2002). Keputusan Mendiknas RI Nomor 045/U/2002. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Rao, D.B. (Ed.) (2003). *Higher education in the 21st century, Vision and action*. New Delhi: Discovery Publishing House.
- Sadlak, J. (1998). Globalization and concurrent challenges for higher education. Dalam P. Scott (Ed.). *The Globalization of Higher Education*. Hal.100-107. Buckingham: Open University Press.

- Soewono, J. (2002). Pendidikan Berbasis Kompetensi (PBK). Dalam A.J. Wibowo & F. Tjiptono (Ed.). *Pendidikan Berbasis Kompetensi*. Hal. 49-65. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Suparno, P. (2002). Kompetensi umum lulusan perguruan tinggi di masyarakat global. Dalam A.J. Wibowo & F. Tjiptono (Ed.). *Pendidikan Berbasis Kompetensi*. Hal. 67-81. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Tilaar, H.A.R. (2002). *Perubahan sosial dan pendidikan, pengantar pedagogik transformatif untuk Indonesia*. Jakarta: Grasindo.

Penilaian Proses dan Hasil Pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka

Agnes P. Sudarmo

Susanti

*P*enilaian proses belajar merupakan kunci penting dalam menentukan kualitas suatu proses pembelajaran. Penilaian proses belajar akan memberi dampak positif kepada dua hal yaitu kepada peserta didik dan institusi di mana peserta didik tersebut berada. Makalah ini akan membahas mengenai penilaian proses dan hasil pendidikan di institusi pendidikan tinggi khususnya institusi pendidikan jarak jauh. Secara khusus proses penilaian proses itu akan terfokus pada proses pembelajaran khususnya proses tutorial yang diadakan oleh program Pascasarjana Universitas Terbuka.

Universitas Terbuka (UT) telah membuka program Pascasarjana dengan telah diterbitkannya Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 3507/D/T/2004 tanggal 31 Agustus 2004 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Magister Administrasi Publik (MAP) dan Magister Manajemen (MM) dalam jenjang program Pascasarjana (S-2). Tahun 2005 Program Pascasarjana UT juga telah membuka program Magister Manajemen Perikanan (MMP) dengan surat keputusan Dirjen DIKTI tanggal 30 Juni 2005 Nomor 2054/D/T/2005. Program Magister (S-2) ini proses pembelajarannya dilakukan dengan sistem belajar jarak jauh.

Pada sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh, proses belajar mahasiswa sepenuhnya bergantung pada kemampuan dan kecepatan mahasiswa itu sendiri dalam mempelajari materi (Keegan, 1993; Depdiknas, 2005). Pada prinsipnya, proses belajar mahasiswa terdiri dari belajar mandiri, belajar terbimbing, dan pemanfaatan sumber belajar lainnya. Jika mahasiswa melakukan tahapan proses belajar mandiri, belajar terbimbing, dan pemanfaatan sumber belajar lainnya sebagai satu kesatuan utuh dalam sistem pembelajaran; maka diharapkan mahasiswa dapat melakukan proses belajar yang optimal dengan hasil yang memuaskan secara utuh.

Berbeda dengan program-program reguler lainnya yang ada di UT, program Pascasarjana mengenal adanya seleksi tes masuk untuk menekan angka *drop out* (DO). Selain itu dalam proses pembelajaran program Pascasarjana, mahasiswa diwajibkan mengikuti tutorial. Tutorial yang diwajibkan adalah 4 kali Tutorial Tatap Muka (TTM) dan Tutorial *Online* (Tuton) sepanjang waktu selama semester berjalan. Program Pascasarjana UT mempunyai keunikan walaupun dilaksanakan dengan sistem jarak jauh tetapi penanganannya tidak dilakukan secara massal tetapi pendekatannya lebih secara individual (*one to one student*) karena jumlah mahasiswa tidak sebanyak mahasiswa reguler yang berjumlah ribuan.

Sistem Evaluasi

Proses evaluasi pada Program Pascasarjana mempunyai penerapan yang berbeda dengan program reguler. Sistem evaluasi belajar di program Pascasarjana dilaksanakan secara komprehensif, dengan meneliti input, proses, dan output. Evaluasi hasil belajar dilakukan untuk mengukur kompetensi mahasiswa dalam satu mata kuliah atau program studi yang sudah diambil. Unsur-unsur dalam evaluasi belajar pada Program Pascasarjana terdiri dari (Depdiknas, 2005):

1. Partisipasi Tutorial
Partisipasi tutorial terdiri dari partisipasi pada tutorial tatap muka dan partisipasi pada tutorial *online*

2. Tugas Tutorial
Tugas tutorial diselesaikan pada saat tutorial tatap muka. Nilai tutorial hanya berlaku untuk satu semester. Jika mahasiswa mengulang matakuliah, maka tutorialnya juga harus diulang.
3. Ujian Akhir Semester (UAS)
Merupakan evaluasi sumatif matakuliah di akhir semester yang diberikan dalam bentuk uraian
4. Seminar dan *Workshop*
Seminar dan *Workshop* merupakan suatu cara untuk mempresentasikan hal-hal yang telah dilakukan oleh mahasiswa dalam proses penyusunan tesis untuk mendapat masukan demi kesempurnaan penulisan tesisnya
5. Studi Lapangan
Studi Lapangan merupakan studi awal untuk menyusun proposal penelitian. Dalam kegiatan ini mahasiswa diarahkan untuk melakukan perencanaan dan / atau eksperimen yang berkaitan dengan tesis yang akan disusun.
6. Tugas Akhir Program Magister (TAPM)
TAPM merupakan evaluasi sumatif program yang ditujukan untuk mengukur pemahaman komprehensif mahasiswa mengenai materi program yang diambilnya. TAPM dapat berbentuk tesis, *research project*, perencanaan bisnis (*business plan*), atau penelitian lapangan.

Penggunaan komponen evaluasi di atas disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik matakuliah dan program studi.

Tutorial Tatap Muka (TTM)

Tutorial tatap muka Program Pascasarjana diselenggarakan di UPBJJ penyelenggara Program Pascasarjana. Tutorial tatap muka berlangsung selama empat kali dengan tiga tugas dalam satu semester per mata kuliah. Tutorial tatap muka ini sudah terjadwal dan merupakan satu kesatuan dengan tutorial *online*. Rekrutmen tutor tatap muka dilakukan oleh UPBJJ dengan persetujuan dan koordinasi dari Direktur PPs UT.

Tutorial *online* (Tuton)

Tutorial *online* dilakukan melalui internet dan merupakan bagian integral dari tutorial tatap muka. Tutorial *online* dilakukan sepanjang semester dan wajib diikuti oleh mahasiswa dan tutor tatap muka. Tutor pada tutorial *online* adalah Tutor dari UT Pusat dan menjadi koordinator pada proses tutorial ini. Tutor pada tutorial *online* akan memberi delapan kali materi inisiasi. Kemudian tutor TTM yang berada di daerah akan menindaklanjuti materi-materi tersebut pada kegiatan tutorial tatap muka. Tutor *online* yaitu tutor UT Pusat wajib merancang materi tutorial dan memberikan tugas akademik yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa. Tutor tatap muka wajib menindaklanjuti rancangan tutorial ini pada pelaksanaan tutorial tatap muka serta memeriksa tugas-tugas akademik mahasiswa.

Interaksi melalui internet tidak hanya antara mahasiswa dengan tutor, tetapi juga di antara sesama tutor, baik yang berada di UT Pusat maupun yang di daerah. Dengan demikian akan terjalin komunikasi yang intensif antar tutor sehingga mereka dapat memfasilitasi belajar mahasiswa dengan sebaik-baiknya

Tutorial Residensial

Selain kedua tutorial di atas (TTM dan Tuton), juga dikenal adanya tutorial residensial. Tutorial ini merupakan tutorial khusus dalam pembimbingan Tugas Akhir Program Magister (TAPM). Mahasiswa diharuskan tinggal di kota tempat UPBJJ-UT penyelenggara program Pascasarjana untuk jangka waktu tertentu. Penyelenggara dan penanggung jawab kegiatan ini adalah UPBJJ-UT di bawah koordinasi PPs.

Dalam pelaksanaan TTM mahasiswa mempunyai batas toleransi ketidakhadiran mahasiswa untuk dapat diakui tugas-tugasnya adalah 75%. Artinya bila mahasiswa tidak hadir 1 kali TTM maka ketiga tugas-tugasnya masih diperhitungkan; bila mahasiswa tidak hadir dalam 2 kali TTM maka hanya 2 tugas yang diperhitungkan; bila mahasiswa tidak hadir dalam 3 TTM maka hanya 1 tugas yang dapat diperhitungkan dalam penentuan nilai tutorial.

Tabel 1. Skema Proses Tutorial di Jenjang Pascasarjana (Depdiknas, 2005)

WAKTU / ASPEK	M 1	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 9	M 10	M 11	M 12	M 13	M 14
Tutorial Online	*		*		*	*		*	*		*	*		
Tutorial Tatap Muka			Tugas 1			Tugas 2			Tugas 3					U A S

M = Minggu

TTM dalam pendidikan jarak jauh ini dimungkinkan dengan jumlah yang sangat 'terbatas', dan bila dibandingkan dengan perguruan tinggi konvensional perbandingan itu dapat dilihat dalam diagram di bawah ini:

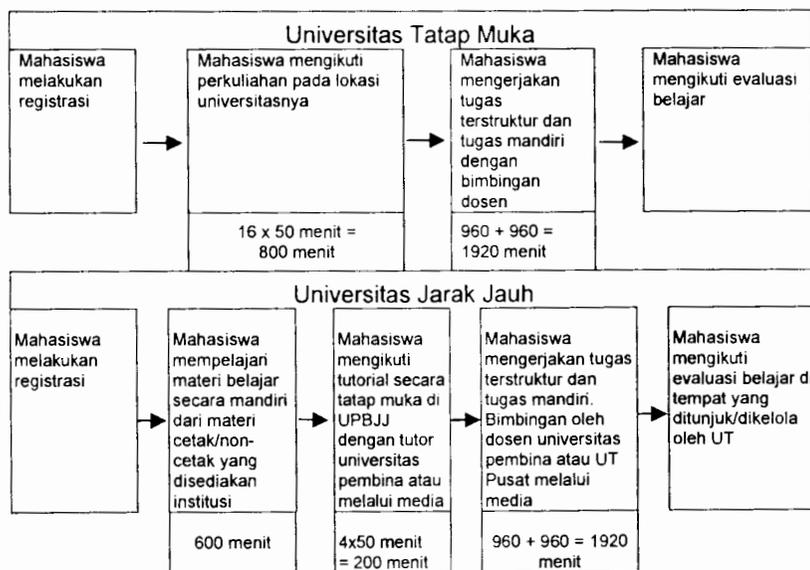


Diagram 1. Perbandingan Proses Pembelajaran Program S-2 pada Perguruan Tinggi Tatap Muka dan Jarak Jauh (Depdiknas, 2002)

Perhitungan waktu belajar didasarkan pada perhitungan proses pembelajaran tatap muka per sks berikut:

Perkuliahan tatap muka : $16 \times 50 \text{ menit} \times 1 \text{ sks} = 800 \text{ menit}$
 Tugas terstruktur : $16 \times 60 \text{ menit} \times 1 \text{ sks} = 960 \text{ menit}$
 Tugas mandiri : $16 \times 60 \text{ menit} \times 1 \text{ sks} = \underline{960 \text{ menit}}$
 Jumlah 2720 menit

Tabel 2. Perbandingan Perhitungan Waktu Belajar Mahasiswa Perguruan Tinggi Tatap Muka dan Jarak Jauh (per sks)

Proses belajar	Tatap Muka			Tugas Terstruktur	Tugas Mandiri	Total
Perkuliahan Tatap Muka	16 x 50 menit = 800 menit			16 x 60 menit = 960 menit	16 x 60 menit = 960 menit	2720 menit (45.3 jam)
Perkuliahan Sistem Jarak Jauh	Belajar mandiri	Tutorial tatap muka	Tutorial elektronik	960 menit	960 menit	
	400 menit	200 menit	4 x 50 menit = 200 menit			

Cara Penilaian

Proses pembelajaran pada program Pascasarjana UT berlangsung sebagai berikut:

1. Pada minggu pertama, tutor tuton memberikan materi inisiasi 1 kepada mahasiswa melalui internet. Waktu yang disediakan untuk mempelajari materi inisiasi 1 adalah selama dua minggu. Selain itu tutor tuton akan memberi arahan/petunjuk bahwa mahasiswa harus terlibat aktif dalam proses tuton ini. Mahasiswa juga diminta untuk mengikuti diskusi melalui internet atas materi yang akan didiskusikan. Mahasiswa mempelajari materi tersebut dan memberi respon atas apa yang telah dipelajari kepada tutor tuton dengan memberi umpan balik melalui internet. Partisipasi mahasiswa dan interaksi antara tutor tuton dan mahasiswa inilah yang

akan dinilai oleh tutor tutor. Mahasiswa harus aktif dalam diskusi melalui internet yang dipandu oleh tutor tutor.

2. Selain itu agar terjadi integrasi antara tutor tutor dan tutor TTM, tutor tutor wajib memberikan Rancangan Aktivitas Tutorial (RAT)/Matriks Aktivitas Tutorial (MAT) elektronik. RAT/MAT elektronik ini oleh tutor TTM wajib dijabarkan dalam 4 MAT TTM sebagai panduan bagi tutor TTM agar terjadi integrasi materi pembelajaran dalam tutor dan TTM. Tutor TTM juga berkewajiban merespon diskusi dalam tutor, sehingga diharapkan terjadi dialog antara tutor tutor, tutor TTM, dan mahasiswa. Diskusi ini dapat direspon sampai dengan akhir minggu ke-2.
3. Pada minggu ke-3, tutor tutor selain memberikan materi diskusi 2 juga memberikan Tugas 1. Materi diskusi 2 ini dapat direspon mahasiswa sampai akhir minggu ke-4. Sedangkan tugas yang diberikan oleh tutor tutor ini haruslah lengkap, jelas, mudah dipahami, dan mencantumkan pedoman penskoran (*marking scheme*) yang dapat digunakan sebagai acuan penilaian tugas mahasiswa oleh tutor TTM. Diskusi yang terjadi antara tutor tutor dan tutor TTM dapat terjadi untuk mendiskusikan beberapa topik, misalnya : pedoman penskoran, diskusi materi, atau koordinasi materi dalam tutor dan TTM. Diskusi ini dapat terjadi dalam forum diskusi antar tutor dan atau antara tutor tutor - tutor TTM - mahasiswa. Mahasiswa mengakses tugas 1 ini melalui internet, mengerjakannya, dan mengumpulkan tugas tersebut pada Tutor TTM pada waktu TTM ; serta memberikan tembusan file elektroniknya kepada tutor tutor terhadap semua tugas yang dikerjakan.
4. Minggu ke-4 adalah pelaksanaan TTM pertama di kota UPBJJ-UT penyelenggara program. Materi TTM ini sudah dirancang oleh tutor TTM dengan acuan pada MAT TTM 1 yang dibuat oleh tutor TTM dengan berpatokan pada RAT/MAT elektronik. Diskusi yang terjadi dalam TTM 1 ini, umumnya selain pengayaan materi tutor juga membahas tugas 1. Selanjutnya tugas tutor TTM adalah memberi masukan dan penilaian terhadap tugas-tugas mahasiswa.
5. Minggu ke-5, tutor tutor memberikan materi diskusi 3, dan waktu yang disediakan untuk meresponnya hanya 1 minggu.

6. Selanjutnya pada minggu ke-6, tutor tutor selain memberikan materi diskusi 4 juga memberikan tugas 2. Mahasiswa selain merespon tutor juga wajib mengakses serta mengerjakan tugas 2. Tugas 2 yang dikerjakan mahasiswa ini dikumpulkan pada waktu TTM 2 yang terjadi pada minggu ke-7. Sedangkan waktu yang disediakan untuk merespon diskusi ke-4 ini adalah 2 minggu (sampai akhir minggu ke-7). Dalam TTM 2 ini, tutor TTM selain memberikan umpan balik tugas mahasiswa, juga membahas tugas 2. Pembahasan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya: presentasi makalah mahasiswa baik dilakukan secara individu/kelompok.
7. Proses seperti di atas akan berulang kembali, yaitu pada minggu ke-8 dimana tutor tutor akan memberikan materi diskusi ke-5 dan waktu yang disediakan untuk merespon hanya 1 minggu.
8. Kembali pada minggu ke-9; tugas tutor tutor adalah menyampaikan bahan diskusi ke-6 dan tugas 3. Waktu yang disediakan untuk merespon diskusi ke-6 ini adalah 2 minggu (sampai akhir minggu ke-10). Sama dengan tugas-tugas sebelumnya, mahasiswa wajib mengakses tugas 3 melalui internet, mengerjakannya, dan mengumpulkannya pada waktu TTM ke-3 pada tutor TTM; serta mengirim file elektroniknya ke tutor tutor.
9. Selanjutnya pada minggu ke-11, tutor tutor akan memberikan materi diskusi ke-7, dan mahasiswa serta tutor TTM wajib meresponnya dalam waktu 1 minggu.
10. Memasuki minggu ke-12, tutor tutor memberikan materi diskusi terakhir yang dapat direspon mahasiswa selama 2 minggu.
11. Minggu ke-13 adalah pelaksanaan TTM ke-4 (terakhir) di mana para tutor TTM diharapkan akan memberikan penguatan dan kesimpulan materi yang dipelajari secara komprehensif sebagai bekal mahasiswa menghadapi UAS. Akhir pembelajaran proses pembelajaran program Pascasarjana ini adalah pelaksanaan UAS, yaitu pada minggu ke-14 dan ke-15.

Kewajiban Tutor Tutor

Dalam pelaksanaan tutorial ini, kewajiban utama tutor tutor adalah merespon diskusi dalam waktu 1x 24 jam, sedangkan mahasiswa diharapkan membuka internet minimal 2 hari sekali dan meresponnya. Sedangkan kewajiban utama tutor TTM selain harus melakukan dialog dengan tutor tutor melalui internet, wajib merespon diskusi tutor, mengevaluasi hasil pekerjaan mahasiswa (tugas-tugas mahasiswa). Tugas-tugas yang dikerjakan mahasiswa sesuai dalam instruksi dalam internet. Untuk setiap matakuliah ada 3 tugas yang harus dikerjakan mahasiswa, bentuknya pun dalam setiap matakuliah bervariasi. Bentuk tugas ini umumnya adalah : *book review* dengan buku acuan yang ditetapkan oleh tutor tutor, menganalisis kasus sesuai topik tugas matakuliah, dan membuat makalah.

Kendala yang terjadi selama ini adalah belum ada sanksi bagi tutor tutor dan tutor TTM yang tidak aktif melakukan diskusi. Sanksi bagi mahasiswa adalah ditutupnya diskusi tutor, sehingga mahasiswa tidak dapat merespon diskusi pada diskusi tutor yang sudah ditutup. Bagi tutor tutor yang tidak aktif, sanksinya mungkin mahasiswa yang dirugikan; sebab diskusi-diskusi yang ada di tutor tidak ada yang memoderatori dan tidak direspon tutor. Sanksi bagi tutor TTM juga belum ada, namun yang jelas bila tidak ada komunikasi (baik via internet, telpon, dsb) mahasiswalah yang dirugikan. Pengalaman selama ini yang terjadi di lapangan adalah belum matchnya antara diskusi tutor, diskusi TTM, dan soal-soal UAS. Akibat lebih lanjut adalah mahasiswa tidak dapat mengerjakan soal-soal UAS secara memuaskan, sehingga nilai UAS mahasiswa "jatuh".

Penentuan Nilai Akhir Matakuliah

Penentuan nilai akhir matakuliah ditentukan oleh dua komponen dengan kontribusi nilai:

1. Nilai tutorial = 60%
2. Ujian akhir semester = 40%

Komponen penilaian tutorial ini sifatnya terintegrasi, artinya mahasiswa wajib berpartisipasi baik dalam tuton dan TTM.

Partisipasi dalam tutorial online adalah mutlak karena semua tugas tutorial diberikan melalui tutorial online dan setiap komponen penilaian harus ada. Kemutlakan ini wajar, sebab tidak mungkin mahasiswa dapat mengerjakan tugas-tugasnya tanpa pernah mengikuti tuton. Walaupun diluar cara-cara, misalnya mahasiswa bertanya kepada sesama teman mahasiswa untuk mencari tahu tugas-tugas yang diberikan. Namun karena sifatnya yang terintegrasi, maka mahasiswa wajib mengakses dan merespon semua diskusi tuton dan mengerjakan tugas-tugas tuton. Partisipasi mahasiswa dalam tuton ini akan diperhitungkan sebesar 10 %, sedangkan dalam TTM 50%.

Komponen penilaian dalam TTM itu adalah: Nilai 3 (tiga) tugas dan nilai partisipasi.

Adapun perhitungan untuk memperoleh nilai akhir TTM adalah sebagai berikut:

$$(4 \times \text{Nilai Akhir Tugas}) + (1 \times \text{Nilai Partisipasi}) : 5$$

Adapun Nilai Akhir Tugas ini diperoleh dari tumus sebagai berikut :

$$(\text{Nilai Tugas 1} + \text{Nilai Tugas 2} + \text{Nilai Tugas 3}) : 3$$

Hal ini berarti bahwa tugas-tugas mahasiswa diperhitungkan 80% sedangkan partisipasi mahasiswa diperhitungkan 20% dari perhitungan nilai akhir TTM.

Sebagai contoh: Dalam matakuliah X Andi mengerjakan 3 tugas dengan mendapat nilai masing-masing 80, 80, 75. Selama 4 kali TTM, Andi hanya mengikuti 3 kali karena yang bersangkutan sakit. Adapun selama 3 kali mengikuti TTM, Andi termasuk mahasiswa yang aktif dalam merespon pertanyaan tutor TTM, sesama mahasiswa atau menyatakan ide-ide inovatif sesuai topik diskusi; oleh karena itu nilai partisipasi Andi dalam TTM adalah 85. Sedangkan dalam tuton, Andi aktif merespon dalam 8 diskusi tuton dan jawaban-jawaban Andi dianggap berbobot oleh tutor tuton maka Andi berhak mendapat nilai aktif dan oleh tutor tuton diberi nilai 90. Namun dalam UAS, Andi mendapat nilai 45.

Berdasar data kasus di atas, maka ketiga tugas Andi dapat diperhitungkan semua dalam penentuan nilai tugas.

Dengan demikian untuk penentuan nilai akhir Andi langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menghitung nilai tutorial
 - a. Menentukan nilai tugas.
 Nilai tugas Andi : $(80+80+75) : 3 = 78,33$
 - b. Menentukan nilai partisipasi = 85
 - c. Menghitung nilai akhir TTM = $(4 \times 78,33) + (1 \times 85) : 5 = (313,32 + 85) : 5 = 398,32 : 5 = 79,66$.
 - d. Menentukan nilai tuton = 90
 - e. Menghitung nilai tutorial adalah = $(50\% \times 79,66) + (10\% \times 90) = 39,83 + 9 = 48,83$.
2. Menghitung nilai UAS = $40\% \times 45 = 18$
3. Menentukan nilai Akhir = Nilai tutorial + Nilai UAS = $48,83 + 18 = 66,83$.

Mengingat penilaian akhir matakuliah dalam bentuk huruf A, B, C, D, dan E maka nilai Andi juga harus dikonversikan. Selama ini, hampir sebagian besar matakuliah PPs (85%) menggunakan grade standar kecuali matakuliah yang termasuk kategori sangat sulit bisa diturunkan gradenya menjadi Kategori I. Hal ini bertujuan untuk menjamin kualitas pembelajaran. Kesetaraan nilai-nilai itu tertulis dalam panduan Simintas UT-JKAK PB10 (Depdiknas, 2004) yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. *Standard Grade*

Pilih	Kategori	Nilai Minimal				
		A	B	C	D	E
1	Standar	80	70	55	40	< 40
2	I	75	65	50	35	< 35
3	II	70	60	45	30	< 30
4	III	65	55	40	25	< 25

Mengacu pada Tabel 3 apabila suatu matakuliah menggunakan kategori standar maka mahasiswa yang mendapat:

skor ≥ 80	mendapat nilai A,
skor 70 sd 79,9	mendapat nilai B,
skor 55 sd 69,99	mendapat nilai C,
skor 40 sd 54,99	mendapat nilai D,
skor < 40	mendapat nilai E.

Bila menggunakan kategori standar, maka nilai akhir Andi untuk matakuliah 'X' sebesar 66.63 bila dikonversi dalam bentuk huruf adalah C.

Nilai C ini termasuk kategori rendah, sehingga Andi dapat mengulanginya. Mengingat komponen nilai tutorial Andi sudah bagus, maka Andi dalam semester berjalan dapat mengikuti ujian perbaikan UAS. Perihal kriteria mengulang ini, pada program Pascasarjana UT mengenal adanya:

1. Mengulang UAS dapat terjadi bila mahasiswa memperoleh nilai akhir matakuliah kurang dari B karena nilai UASnya rendah. Mengulang UAS dilakukan pada semester berjalan. Namun bila nilai akhir setelah mengulang UAS juga rendah, maka mahasiswa dapat memperbaiki nilai dengan cara mengulang paket matakuliah.
2. Mengulang tutorial dapat terjadi bila mahasiswa memperoleh nilai akhir matakuliah kurang dari B karena nilai tutorialnya rendah, maka mahasiswa dapat mengulang tutorial pada semester berikutnya tanpa harus mengikuti UAS.
3. Mengulang matakuliah terjadi bila nilai UAS dan nilai tutorial mahasiswa rendah, sehingga mahasiswa harus mengulang tutorial dan UAS pada semester berikutnya.

Penilaian Akhir Program

Setelah mahasiswa menyelesaikan semua paket matakuliah yang dipersyaratkan dalam paket dengan nilai rata-rata B, tanpa nilai E dan D; tidak memiliki nilai C lebih dari dua matakuliah; memiliki nilai IPK minimal 3,00 pada skala 0,00-4,00; tesis sudah dinyatakan layak uji oleh pembimbing; maka mahasiswa berhak mengajukan permohonan ujian sidang tesis.

Pada ujian sidang tesis, penguji yang terdiri dari pembimbing, penguji ahli, dan ketua penguji dapat meminta penjelasan, menyanggah, memvalidasi, mengkritisi, memberi penguatan dengan menggunakan teknik komunikasi akademik dialogis yang menghargai adanya perbedaan pandangan dan pendapat serta tidak menunjukkan sikap atau menggunakan kata-kata yang dapat ditafsirkan merendahkan harkat dan martabat kandidat.

Tema tesis mahasiswa ini sebelumnya sudah pernah didiskusikan dengan pembimbing pada waktu studi mandiri, dan minimal 2 kali seminar individu (pada waktu bimbingan tesis residensial), sehingga diharapkan masukan dari berbagai pihak (pembimbing, teman mahasiswa, pengampu) dapat menjadi masukan penting bagi mahasiswa. Seminar pertama dilakukan ketika mahasiswa pertama kali mengajukan proposal di awal semester; sedangkan seminar kedua dilakukan setelah mahasiswa mengumpulkan dan mengolah data lapangan.

Berbeda dengan penilaian matakuliah, unsur-unsur yang dinilai oleh penguji dalam ujian tesis ini mencakup:

1. Kemampuan kandidat di dalam mengemukakan gagasan inti yang ada dalam tesis dengan menggunakan alur pikir yang sistematis dan logis.
2. Kemampuan kandidat di dalam memberikan argumen induktif-empiris dan atau deduktif-logis untuk menopang gagasan inti yang ada dalam tesis
3. Keterbukaan, kepekaan, dan ketanggapan kandidat terhadap pertanyaan, sanggahan, atau kritisi yang diberikan oleh para penguji
4. Kemampuan kandidat untuk menarik kesimpulan atau mengintisarkan substansi yang menjadi fokus dalam dialog akademis dengan penguji, dan
5. Sikap personal kandidat sesuai dengan tatakrama akademis dan sosial kultural yang berlaku.

Nilai akhir ujian sidang tesis dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: $(3 N1 + 2 N2) : 5$.

N1 adalah Nilai dari pembimbing diberi bobot 3 dengan alasan pembimbing lebih memahami potensi dan usaha yang dilakukan oleh kandidat.

N2 adalah Nilai rerata dari dua penguji (ketua komisi penguji dan penguji ahli) yang diberi bobot 2 dengan alasan intensitas pemahaman kedua penguji tersebut tidak akan sama dengan pembimbing, mengingat pertemuan dengan kandidat terbatas pada saat ujian sidang tesis). Mahasiswa dinyatakan lulus ujian sidang tesis, bila memperoleh nilai tesis minimal B.

Adapun acuan penilaian ini sudah dibakukan, dan kelulusan ditentukan berdasarkan pada kriteria penilaian sebagai berikut.

Tabel 4. Konversi Angka ke Huruf

Angka	Huruf
3,51 – 4,00	A
3,00 – 3,50	B
2,51 – 2,99	C
< 2,51	D

Setelah mahasiswa menempuh ujian sidang tesis, maka setiap lulusan pada program Pascasarjana UT akan diberikan predikat berdasarkan pada nilai IPK dan nilai ujian sidang tesis dengan rumus sbb.

$$\frac{(3 \times \text{IPK}) + (2 \times \text{Nilai ujian sidang tesis})}{5}$$

Tiga macam predikat akan diberikan kepada lulusan yang berprestasi. Masing-masing predikat ditentukan dengan kriteria sbb.

1. Cumlaude (3,51 – 4,00)
2. Sangat Memuaskan (3,26 – 3,50)
3. Memuaskan (3,00 – 3,25)

Setelah mahasiswa menyelesaikan semua kewajiban akademik, maka mahasiswa berhak memperoleh ijazah dan transkrip. Ijazah ini mencantumkan gelar magister sesuai program magister yang diambilnya (Magister Administrasi Publik atau M.AP; Magister Manajemen atau M.M, atau Magister Manajemen Perikanan atau MMP).

Kesimpulan dan Saran

Tutorial yang terintegrasi sebagaimana yang diterapkan dalam program Pascasarjana UT harus didukung oleh sistem yang transparan untuk setiap komponen penilaian sehingga setiap mahasiswa dapat mengevaluasi kekurangan penilaian untuk dirinya sendirinya. Bagi pihak PPs sendiri perlu dirumuskan kriteria yang menjadi acuan baku, yaitu pada grade nilai akhir, ataupun setiap komponen harus ada nilai minimalnya.

Bila *grade* nilai akhir yang dijadikan patokan, maka ada kemungkinan mahasiswa yang tidak memenuhi semua komponen

tugas pada TTM (misalnya hanya mengerjakan 2 tugas namun nilainya maksimal), UAS maksimal; maka mahasiswa dimungkinkan mendapat nilai lulus (B atau A).

Bila yang dijadikan patokan skore minimal UAS (misalnya 55), maka dimungkinkan mahasiswa yang sudah lulus (mendapat nilai minimal B) harus mengulang pada UAS.

Bila yang dijadikan patokan skore minimal tutorial (misalnya 55), maka dimungkinkan mahasiswa yang sudah lulus (mendapat nilai minimal B) harus mengulang tutorial. Oleh karena itu perlu ditetapkan standar mana yang akan digunakan.

Bagi mahasiswa yang nilainya pada batas atas nilai C untuk setiap komponen, bila mengikuti ujian perbaikan pada semester berjalan pun, belum tentu menjamin nilainya Untuk itu perlu dipikirkan solusinya, ataukah diperlukan tutorial yang dipadatkan (misalnya selama 3 minggu melalui tuton) ditambah dengan tugas-tugas tambahan yang memang secara akademik setara dengan tugas-tugas pada TTM. Dengan demikian diperlukan perbaikan pada produk tanpa mengabaikan proses yang pernah ada.

Sistem tutorial yang terintegratesi ini memerlukan pemahaman yang sama dari semua unsur, baik oleh pihak UT Pusat termasuk PPs dan unit-unit yang terkait di UT, UPBJJ-UT Penyelenggara Program S-2, dan mahasiswa. Pemahaman yang sama itu tentang perlunya ketaatan pada sistem yang telah disusun, misalnya: ketaatan dalam melakukan registrasi sesuai kalender akademik. Diperlukan juga kesadaran yang sama bahwa keterlambatan dalam registrasi berarti akan menghambat proses pembelajaran, karena mahasiswa tidak dapat mengakses tuton.

Saran untuk mengatasi persoalan tentang proses evaluasi pada Program Pascasarjana adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang sama sekali tidak mengakses Internet disebabkan oleh beberapa faktor: mahasiswanya gagap teknologi, jeleknya jaringan, lokasi tempat tinggal mahasiswa belum tersentuh jaringan. Dalam sistem UT, sejak awal dirancang bahwa mahasiswa harus/mutlak mengakses tuton, oleh karena itu mahasiswa yang tidak mengakses tuton maka

nilai akhir mahasiswa tidak akan dapat diproses (ingat sifat terintegrasi).

2. Terhadap mahasiswa yang gptek, pada semester 1 Program Pascasarjana memberi *hard copy* inisiasi 1 s.d 3 serta tugas 1. Inisiasi ini dapat direspon secara tertulis, baik via fax atau surat; namun pada diskusi-diskusi selanjutnya mahasiswa wajib merespon diskusi via tuton. Ini pekerjaan yang sulit, sebab tidak jarang mahasiswa menyampaikan berbagai macam alasan, namun solusi yang ditawarkan adalah mahasiswa merespon diskusi via email para tutor tuton atau PPs. Ini cukup berhasil, sebab dapat 'memaksa' mahasiswa untuk mau mengakses tuton. Alasan tentang jeleknya jaringan atau lokasi tempat tinggal mahasiswa yang belum tersentuh jaringan dapat diatasi dengan berbagai cara: bila jaringan sedang jelek, mahasiswa dapat merespon diskusi tuton via fax atau surat saat itu juga; namun ketika jaringan sudah bagus, mahasiswa wajib merespon diskusi tuton via internet. Cara seperti ini pernah dilakukan PPs untuk menghadapi kendala jeleknya jaringan internet sampai kemudian diketahui bahwa ada beberapa warnet yang memang menutup fasilitas *php* (*personal home page*, dan UT termasuk dalam kriteria itu). Sampai dengan saat ini kendala jaringan dapat teratasi, dengan demikian perlu dibuat dalam bentuk sistem bahwa mahasiswa yang sama sekali tidak pernah mengakses internet nilai akhirnya tidak akan keluar.
3. Mahasiswa yang hanya mengerjakan 2 tugas (namun nilai tugasnya maksimal, misalnya tugas 1 mendapat nilai 90, tugas 2 nilainya 85, partisipasi 80) dan nilai UASnya juga maksimal yaitu 85; maka ada kecenderungan bahwa ybs masih mendapat nilai bagus (B). Oleh karena itu diperlukan adanya kriteria akademik, bahwa mahasiswa yang mendapat nilai A dan atau B adalah yang mengerjakan semua tugas-tugas matakuliah, dan diperlukan standar minimal nilai UAS (misalnya nilai UAS tidak boleh kurang dari 55).
4. Pembimbingin jarak jauh untuk tesis selama ini menghadapi hambatan, mengingat ada beberapa pembimbing yang gptek. Sehingga diperlukan bimbingan via surat dan atau telpon dan atau kurir. Hal ini sangat merugikan mahasiswa, sebab diperlukan waktu minimal 1 minggu untuk pengiriman via pos

(pulang balik); sehingga tidak efisien baik dari segi waktu ataupun dana.

5. Selama ini komponen penentuan nilai akhir yaitu nilai tutorial dan nilai UAS belum secara transparan tercetak dalam DNU, sehingga mahasiswa merasa kesulitan mengidentifikasi komponen mana yang harus diulang. Solusi yang dilakukan selama ini adalah melakukan cara manual dengan mengidentifikasi per mahasiswa sambil membangun SRS (*Student Report System*).
6. Kualitas tugas-tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa yang tutor TTMnya tidak pernah melakukan diskusi dengan tutor tutor sulit dipantau. Oleh karena itu solusi yang diberikan adalah menginformasikan kepada semua mahasiswa agar memberikan tembusan tugas-tugasnya via internet kepada tutor tutor sebagai cara mengontrol kualitas tugas mahasiswa.

Daftar Pustaka

- Departemen Pendidikan Nasional. (2002). *Proposal program S-2 administrasi publik universitas terbuka*. Jakarta: FISIP Universitas Terbuka.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Pedoman penyelenggaraan program Pascasarjana*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Keegan, D. (1993). *Theoretical principles of distance education*. 1st Ed. London: Routledge.
- Universitas Terbuka. (2004). *Pedoman finalisasi naskah ujian – JKAK PB10*. Jakarta: Universitas Terbuka.

KONTEKS, STRUKTUR, DAN POLA ORGANISASI MATERI KURIKULUM SEKOLAH DASAR

————— *Mohammad Imam Farisi*

*S*elama ini, materi kurikulum dibatasi dan selalu dikaitkan dengan struktur disiplin ilmu. Bahwa materi kurikulum secara ketat harus diturunkan dari materi kajian disiplin keilmuan, dan/atau mengikuti garis dan cara berpikir ilmuwan, termasuk materi kurikulum Sekolah Dasar. Penurunan suatu materi keilmuan ke dalam organisasi kurikulum sekolah dasar (SD) didasarkan pada prinsip penyederhanaan (*simplifying*) agar relevan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Sejalan dengan perkembangan teori pendidikan, khususnya kurikulum, didukung oleh hasil-hasil penelitian mutakhir, pandangan di atas mulai ditinggalkan. Kini, materi kurikulum, apalagi kurikulum SD, tidak lagi harus ketat mengikuti struktur materi suatu disiplin ilmu. Materi kurikulum SD kini lebih dipandang sebagai suatu keterpaduan antara tiga sumber, yakni: ilmu pengetahuan, peserta didik, dan sosial-budaya masyarakat, berdasarkan prinsip kurikulum eklektik, yang merupakan kecenderungan baru dalam pemikiran kurikulum posmodern, yang terjadi sejak medio 1980an (Bank, 1995; Doll, 1995).

Tulisan ini akan mengkaji dan membahas aspek-aspek yang perlu diperhatikan di dalam mengembangkan materi kurikulum SD berdasarkan prinsip eklektisisme. Artikel ini mengemukakan sebuah gagasan/ide tentang materi kurikulum, yang dikembangkan berdasarkan hasil-hasil kajian pustaka berbagai pemikiran para pakar kurikulum maupun hasil-hasil penelitian mutakhir tentang kurikulum, khususnya untuk jenjang

SD. Tujuan yang ingin dicapai melalui tulisan ini adalah, membuka wacana pemikiran "baru" tentang materi kurikulum SD, yang lebih difokuskan pada signifikansi konteks sebagai basis pengembangannya. Berpijak pada konteks ini pula, struktur, dan pola organisasi materi kurikulum SD dikembangkan. Selain itu, pemikiran ini juga diharapkan dapat memenuhi tuntutan normatif PP. RI Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) tentang Isi/Materi Kurikulum, khususnya di SD.

Standar Nasional Pendidikan tentang Isi/Materi Kurikulum SD

PP RI Nomor 19/2005 tentang SNP menetapkan bahwa aspek-aspek dalam sistem pendidikan nasional yang harus terstandarisasi secara nasional meliputi standar: isi; proses; kompetensi lulusan; pendidik dan tenaga kependidikan; sarana dan prasarana; pengelolaan; dan penilaian pendidikan. Materi kurikulum termasuk di dalam lingkup standar isi, yakni lingkup materi dan tingkat kompetensi yang harus dikuasai setiap peserta didik untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi pendidikan yang dimaksudkan, juga harus memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik.

Berdasarkan ketentuan SNP maka materi kurikulum sebagai isi pendidikan, perlu dikaitkan dan mendukung pencapaian kompetensi standar tertentu. Sedangkan kompetensi menurut Spencer & Spencer (1993) merupakan karakteristik mendasar dari seseorang yang secara kausal berhubungan dengan referensi kriteria yang efektif dan/atau penampilan yang terbaik dalam pekerjaannya pada suatu situasi. Karakteristik yang mendasar berarti bahwa kompetensi tersebut cukup mendalam dan bertahan lama dalam penampilan seseorang dan dapat digunakan untuk memprediksi tingkah laku seseorang ketika berhadapan dalam berbagai situasi dan tugas. Hubungan kausal berarti suatu kompetensi dapat menyebabkan atau memprediksi perubahan tingkah laku dan kinerja seseorang. Referensi Kriteria menentukan dan memprediksi apakah seseorang bekerja dengan baik atau tidak dalam ukuran yang spesifik atau standar.

Sementara dalam visi Center for Civic Education (CCE) kompetensi merupakan interseksi antara pengetahuan dan keterampilan.

Dengan demikian, materi kurikulum sebagai isi pendidikan berdasarkan ketentuan SNP, pada dasarnya merupakan materi kurikulum berbasis kompetensi, dan diarahkan pada pengembangan karakter dasar setiap peserta didik dalam berbagai konteks dan situasi personal, sosial-kultural yang dialami. Dengan kata lain, materi kurikulum yang berbasis kompetensi secara teoretik seharusnya mengembangkan karakter peserta didik sebagai manusia, baik dalam arti makhluk personal/individu, sosial-budaya, dan berketuhanan (UU Nomor 20/2003).

Dalam konteks pemikiran seperti itu maka konsep kurikulum 2004 yang diklaim sebagai Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) di dalamnya masih terdapat kerancuan konseptual, karena kompetensi masih kental dengan nuansa isi dan tujuan keilmuan (Depdiknas, 2003) dan belum membentuk karakter peserta didik (Hasan, 2004; Farisi, 2005). Pengetahuan, termasuk pengetahuan disiplin keilmuan bukanlah sebagai tujuan, melainkan hanya sebagai sumber dan substansi kurikuler dalam upaya pembentukan karakter dasar peserta didik sebagai manusia. Singkatnya, materi kurikulum pada dasarnya tidak memiliki kaitan struktural dengan isi suatu disiplin ilmu tertentu dan bagi pencapaian tujuan-tujuan keilmuan (Hasan, 2004; Farisi, 2005).

Untuk mencapai ideal pendidikan di atas, maka dalam pengembangan materi kurikulum SD berbasis kompetensi, ada tiga aspek kurikulum yang perlu dipertimbangkan, yaitu: konteks pembentukan dan pengembangan kurikulum, struktur materi kurikulum, dan pola organisasi kurikulum. Ke tiga aspek ini saling berkaitan satu dengan yang lain dan ketiganya akan menjadi fokus pembahasan berikut.

Konteks Pengembangan Materi Kurikulum SD

Konteks yang dimaksudkan di dalam tulisan ini adalah situasi atau lingkungan yang merupakan bagian integral di dalam proses dan hasil pengembangan materi kurikulum. Konteks bisa

berupa situasi atau lingkungan fisik, psikologis, sosial, dan kultural; baik bersifat personal, interpersonal, maupun sosial-kemasyarakatan (Cornbleth, 1991; Gauvain, 2001; Johnson, 2002) yang dipandang berpengaruh terhadap proses dan hasil materi kurikulum yang dikembangkan. Konteks pengembangan materi kurikulum yang perlu diperhatikan dalam pengembangan materi kurikulum SD, meliputi: (1) konteks personal; (2) konteks inter-personal/sosiokultural; dan (3) konteks sosial, kultural, dan historikal masyarakat.

Konteks Personal

Konteks personal dimaksudkan kondisi atau lingkungan internal yang sudah terdapat dan terbentuk di dalam diri peserta didik, yang mempengaruhi dan membatasi dalam mengabstraksikan, mengorganisasikan, dan menggunakan obyek (informasi, nilai, sikap, tindakan) yang dialami. Konteks personal peserta didik yang menjadi dasar pengembangan tersebut adalah konstruksi pengetahuan awal; domain pengalaman; jaringan struktur internal, domain psikologi, dan identitas sosiokultural peserta didik. Konteks ini menyediakan prinsip bahwa *materi kurikulum harus dapat dimengerti, dijelaskan, dan dimaknai secara personal oleh peserta didik (individually defined)* (Ausubel, 1963; Bruner, 1978; Dewey, 1964; Gagne, 1977; Purta, 1991; Suparno, 1997).

Konstruksi pengetahuan awal, adalah konstruksi pengetahuan yang sudah terdapat di dalam struktur kognitif (*cognitive scheme*) peserta didik tentang alam semesta yang dibangun dan dikembangkan dari keseharian pengalaman personal, sosial dan kulturalnya di masyarakat. Konstruksi pengetahuan awal peserta didik tersebut terdiri dari: (1) konstruksi pengetahuan alamiah yang dibangun secara personal/psikologis melalui mekanisme-mekanisme intra-psikologis atau fungsi-fungsi psikologisnya—persepsi, memori, perhatian, dll; (2) konstruksi pengetahuan interpersonal/sosiokultural yang dibangun berdasarkan mekanisme hubungan-hubungan interpersonal antara peserta didik dengan sejawat atau orang lain, dan dalam hubungan-hubungan dialektis individu dengan konteks lingkungan kehidupan sosial-kultural tertentu melalui alat-alat psikologis

dalam bentuk artefak-artefak simbolik—tanda, simbol, teks/tulisan, sistem numerikal, rumus, alat-alat simbolik-grafis; dan (3) konstruksi pengetahuan sosiologis yang dibangun dalam proses-proses sosialisasi dan pembudayaan oleh masyarakat (Kozulin, 1998).

Domain pengalaman; adalah segala bentuk pengalaman yang telah dimiliki oleh peserta didik berdasarkan obyek yang dialami. Pengalaman yang dimaksudkan dibatasi pada pengalaman edukatif, yaitu setiap jenis pengalaman peserta didik yang memiliki relevansi, kebermaknaan, dan signifikansi dengan keseluruhan jenis pengalaman belajar kurikuler, dalam rangka pengembangan kreativitas dan produktivitasnya (Dewey, 1963). Signifikansi domain pengalaman sebagai konteks rekonstruksi pola organisasi materi awalnya dikemukakan oleh Piaget. Namun, pengembangan dasar-dasar filosofinya dirumuskan oleh Dewey (1938) dalam karyanya *'Experience and education'*. Domain pengalaman peserta didik dapat dibedakan menjadi: pengalaman kognitif dan meta-kognitif; pengalaman sosial-budaya; pengalaman fisik; pengalaman logika-matematika; dan pengalaman normatif/afektual.

Jaringan struktur internal; adalah suatu organisasi sistemik yang saling berkaitan atau saling berhubungan di antara tiga struktur, yakni: (1) muatan, yaitu jaringan konseptual (Toulmin menyebut sebagai ekologi konseptual, afektual, tindakan, dan pengalaman yang digunakan ketika individu mempersepsi, memahami, mengingat, menginternalisasi dan bertindak atas obyek (pengetahuan, nilai, moral, sikap, dan tindakan); (2) operasi-operasi, yaitu kemampuan memanipulasi, mentransformasikan, menggunakan, dan mengontrol obyek dan struktur internal untuk mencapai suatu pengertian dan membangun struktur internalnya, meliputi: operasi kognitif/metakognitif, afektif, dan motorik; dan (3) fungsi-fungsi, yaitu kemampuan individu untuk mengembangkan atau meningkatkan muatan struktur kognitif, afektif, dan motoriknya. Fungsi-fungsi tersebut meliputi: fungsi-fungsi alamiah yaitu fungsi-fungsi internal yang dibangun oleh individu melalui mekanisme-mekanisme intra-psikologisnya (Gagne, 1977; Bruner, 1978; Cornbleth, 1991; Purta, 1991; Karthwohl, 2002); dan fungsi-fungsi budaya, yaitu fungsi-fungsi internal yang dibangun oleh individu

melalui mekanisme-mekanisme inter-psikologisnya melalui alat-alat simbolik dan material yang diciptakan dan digunakan di dalam komunikasi interpersonal dan hubungan dialektisnya dengan lingkungan sosiokultural masyarakat (Gagne, 1977; Bruner, 1978; Sanders, 1996; Kozulin, 1998; Wells, 2000; Karthwohl, 2002; Ogawa, 2002).

Domain Psikologi, adalah aspek-aspek yang secara psikologis terdapat pada diri peserta didik dan dipandang berpengaruh terhadap personalitas peserta didik sebagai pribadi. Aspek-aspek psikologis/personal yang dimaksudkan segala keunikan karakteristik dan ciri-ciri khas peserta didik, seperti: minat, kebutuhan, pengalaman, nilai, sikap, perasaan, konsepsi, kapasitas, identitas-diri, rasa keingintahuan, kepedulian diri, emosi, tingkat pengertian, tingkat kemampuan/pemahaman, predisposisi-nilai, konsep-diri, potensi-potensi atau dorongan-dorongan dasar anak, dan kultur personal atau identitas kultural peserta didik.

Identitas sosio-kultural, yakni jatidiri atau karakter sosio-kultural peserta didik yang dibangun dan dikembangkan berdasarkan pengalaman-pengalamannya di dalam relasi-relasi sosio-kulturalnya, baik secara intra dan/atau antar lingkungan sosio-kultural budaya di mana peserta didik menjalani aktivitas keseharian hidupnya di dalam masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah identitas etnis dan gender. Seluruh identitas sosio-kultural peserta didik tersebut, terjemakan di dalam setiap cara berpikir, bersikap, dan bertindak peserta didik atas berbagai obyek dan fenomena yang ditemui, termasuk dalam hal cara-cara peserta didik belajar dan membangun struktur-struktur internalnya (Kozulin, 1998).

Konteks Inter-personal/Sosiokultural

Konteks inter-personal/sosiokultural dimaksudkan sebagai kondisi atau lingkungan sosiokultural yang memediasi, menjembatani antara fungsi-fungsi internal peserta didik (kognitif, afektif, dan motorik) dengan prasyarat-prasyarat tindakan-tindakan peserta didik. Kondisi atau lingkungan sosiokultural mediatif tersebut berupa alat-alat psikologis yang diciptakan oleh masyarakat dan budayanya, dan digunakan di dalam hubungan-

hubungan dialektis antara individu dengan individu lain yang sudah dewasa dan dengan masyarakat. Perangkat tersebut dipandang banyak berperan penting bagi terjadinya modifikasi dan melakukan fungsi kontrol terhadap cara bekerjanya fungsi-fungsi internal individu. Perangkat-perangkat psikologis tersebut berupa artifak-artifak simbolik, dari yang sederhana seperti tanda, simbol, teks, rumus, bahasa, dan alat-alat grafik-simbolik, hingga yang kompleks seperti teks kompleks dan literatur (Kozulin, 1998).

Konteks interpersonal/sosiokultural ini menyediakan prinsip bahwa pola organisasi dan struktur materi kurikulum SD harus merupakan perangkat-perangkat psikologis yang dapat mediasi dan jembatan bagi peserta didik untuk melakukan modifikasi dan tranformasi struktur dan fungsi-fungsi internalnya (kognitif, afektif, dan motorik) ketika interaksi dan komunikasi pembelajaran terjadi (Kozulin, 1998).

Konteks Sosial, Budaya, dan Historis Masyarakat

Konteks sosial, budaya, dan historis masyarakat dimaksudkan sebagai kondisi atau lingkungan sosial, budaya, dan historis masyarakat yang mempengaruhi apa yang sesuai dan layak bagi masyarakat; juga yang menentukan cara-cara peserta didik mengabstraksikan, mengorganisasikan, dan menggunakan obyek (informasi, nilai, sikap, tindakan) yang sesuai dan layak bagi masyarakat di mana peserta didik menjalani keseharian hidupnya. Konteks ini menyediakan prinsip bahwa pola organisasi dan struktur materi kurikulum SD harus memiliki relevansi dan signifikansi tinggi secara sosial, kultural, dan historis (Bruner, 1969).

Konteks sosial, budaya, dan historis masyarakat, yang dimaksudkan mencakup: keinginan, harapan, dan kebutuhan keluarga, masyarakat, pemerintah, kelompok-kelompok komunitas, cita-cita, efisiensi, loyalitas, nilai-nilai, dan harga-diri bangsa, nilai, keyakinan, kecenderungan, perubahan, tradisi, dan kebutuhan sosial--termasuk kebutuhan legal, sistem sosial, identitas kultural masyarakat, perubahan dan tantangan masyarakat global, karakteristik jaman, perkembangan iptek, nilai dan tradisi masyarakat, perubahan sosial; hakikat peserta didik

sebagai makhluk sosio-kultural, kondisi atau realitas masyarakat, serta karakteristik dan realitas masyarakat Indonesia, kebudayaan nasional, ideologi negara.

Pola Organisasi Materi Kurikulum SD

Dalam pandangan Piaget dan Vygotsky, organisasi muatan internal anak terbentuk di dalam suatu organisasi sistemik atau tubuh informasi dan keyakinan yang tersimpan dalam bentuk skema-skema yang saling berkaitan satu dengan lain membangun sebuah jaringan struktural-fungsional; bukan sebatas sebagai agregat dari kemampuan, keterampilan, dan potongan-potongan informasi yang terpisah-pisah (Thomas, 1979; Kozulin, 1998).

Pola perkembangan organisasinya sendiri menurut Piaget, mengikuti prinsip sirkularitas atau siklus-berjenjang sejalan dengan tahapan perkembangan personal peserta didik; atau menurut Vygotsky mengikuti prinsip saling kerjasama, saling mendukung, dan saling memediasi di antara fungsi-fungsi psikologis (Kozulin, 1998) melalui mekanisme internal atau intra-psikologis; mekanisme interpersonal, inter-psikologis, atau sosial; juga melalui mekanisme eksternal atau sosiologis. Dengan demikian, maka secara paradigmatik, materi kurikulum SD dipandang memiliki sebuah pola organisasi dan struktur, apabila tercipta dalam bentuk sebuah jalinan atau relasi sistemik yang saling berkaitan penuh makna di antara satu bagian materi dengan bagian materi yang lain, hingga membangun sebuah totalitas atau kesatuan bidang-materi berdasarkan prinsip sirkularitas atau siklus-berjenjang, serta sejalan dengan mekanisme-mekanisme personal, interpersonal, dan sosiologis.

Berdasarkan konteks dan prinsip di atas maka pola organisasi materi kurikulum SD perlu dikembangkan berdasarkan prinsip *a student's psychological, socio-cultural, and intellectual horizons reconstructions character-based*; artinya bahwa materi kurikulum SD: (1) dapat dimengerti, dijelaskan, dan dimaknai secara personal. Artinya, bahwa pola organisasi isi kurikulum harus assimilatif, akomodatif, dan adaptif dengan mekanisme-mekanisme dan fungsi-fungsi internal peserta didik; (2) merupakan alat-alat psikologis yang bersifat sosiokultural yang

dapat dijadikan mediasi dan jembatan bagi peserta didik untuk melakukan modifikasi dan transformasi struktur dan fungsi-fungsi internalnya (kognitif, afektif, dan motorik) ketika interaksi dan komunikasi pembelajaran terjadi; (3) memiliki relevansi dan signifikansi tinggi secara sosial, kultural, dan historikal; (4) merupakan suatu jalinan atau relasi yang saling berkaitan penuh makna di antara satu bagian materi dengan bagian materi yang lain, menjadi sebuah totalitas atau kesatuan materi; (5) mengikuti pola sirkular, spiral, atau siklus-berjenjang dengan cakupan materi yang semakin luas, kaya, variatif, dan berlapis; (6) memungkinkan peserta didik mampu melakukan rekonstruksi-rekonstruksi terhadap konstruksi pengetahuan, domain pengalaman, dan jaringan struktur pengetahuan (faktual, deklaratif/konseptual, prosedural, metakognitif, dan normatif/afektif) yang ada, menjadi sesuatu yang baru, dan lebih baik. Agar rekonstruksi terjadi, isi kurikulum harus menantang dan sarat masalah yang dapat menstimulasi dan menuntut peserta didik terlibat secara aktif, kritis, dan reflektif untuk menemukan pemecahannya; (7) berpijak pada dan bertujuan mengembangkan kompetensi-kompetensi personal, sosial, dan intelektual, sebagai dasar bagi peserta didik untuk melakukan rekonstruksi-rekonstruksi pengetahuan, nilai, sikap, dan tindakan secara mandiri di dalam konteks kehidupan personal dan sosial; dan (8) mampu menyinambungkan, memperkuat, dan memperluas struktur alamiah dan sosiokultural peserta didik dan masyarakat yang menjadi konteks kehidupan peserta didik sebagai makhluk sosio-kultural, kultural, dan historikal.

Pola tersebut dipandang sangat bermanfaat bagi peserta didik untuk memodifikasi dan sekaligus memperluas struktur pengetahuan, domain pengalaman, jaringan struktur internalnya (pengetahuan, nilai, sikap, dan tindakan), dan identitas kultural peserta didik sebagai konteks terjadinya rekonstruksi yang sesungguhnya menjadi esensi di dalam kurikulum berbasis kompetensi.

Struktur Materi Kurikulum SD

Setidak-tidaknya, hingga Piaget menemukan teori-epistemologis tentang asal-usul pembentukan dan perkembangan

pengetahuan pada manusia (epistemologi genetik), dan teori tentang struktur internal anak, belum ada satupun ikhtiar keilmuan yang mengarah pada perumusan teori tentang struktur materi kurikulum. Sungguhpun, debat teoretis dan filosofis tentang hakikat materi-kajian dalam kurikulum pendidikan sudah terjadi sejak lama (Dewey, 1897, 1962, 1964; Brubacher, 1947).

Pakar pertama yang mengajukan teori tentang struktur materi materi kajian, berdasarkan perspektif Piagetian, adalah Bruner (1978) yang menyatakan bahwa "*the structure of a subject*" haruslah dikaitkan dengan teori tentang struktur pengetahuan, termasuk materi kurikulum SD. Asumsinya adalah bahwa intelektualitas atau cara-cara manusia membangun pengetahuan sama atau paralel bagi semua manusia, tak pandang usia—tak terkecuali pada anak dan ilmuwan. Karena itu, "*the foundations of any subject may be taught anybody at any age in some [regardless of their age]*" (Bruner, 1978). Bahwa anak adalah seorang ilmuwan atau pembangun teori (Chaille & Britain, 1991). Implikasinya, adalah bahwa struktur materi kurikuler dapat diturunkan dari struktur disiplin ilmu, dan tugas para ilmuwan lah yang memilih dan merumuskan masing-masing struktur disiplin untuk dijadikan sebagai struktur materi kurikulum. Atau seperti dikatakan Shavelson, "*a structure of a subject matter, ultimately, rests in the minds of the great scientists*" (Philip, 1987).

Hasil hasil-kajian mutakhir dari perspektif multikultural, oleh Jegede & Aikenhead (2000), Zamroni (2001), Stanley & Brickhouse (2001), Ogawa (2002), menolak pandangan tersebut. Bahkan, mereka berkesimpulan bahwa keniscayaan kurikuler esensialistik semacam itu, dapat menghambat perkembangan tahapan progresif kognitif anak, mendistorsi atau merusak *genuine concepts, indigenous science*, atau *spontaneous concept* peserta didik tentang alam semesta yang dibangun dan dikembangkan dari keseharian pengalaman personal, sosial dan kulturalnya di masyarakat; mencabut peserta didik dari situasi nyata yang menjadi basis pembentukan dan penggunaannya; kurang bermakna bagi peserta didik; dan menunjukkan adanya "hegemoni atau imperialisme pendidikan" atas diri peserta didik. Lebih jauh lagi dipandang dapat mendistorsi atau merusak *self-concept* peserta didik yang merupakan faktor esensial bagi

pembentukan identitas atau karakter peserta didik (Sumantri, 2002).

Berdasarkan pemikiran dan hasil-hasil penelitian di atas, maka struktur materi kurikulum SD harus merupakan sebuah organisasi sistemik atau tubuh informasi dan keyakinan yang tersimpan dalam bentuk skema-skema yang saling berkaitan satu dengan lain membangun sebuah jaringan struktural-fungsional.

Berpijak pada prinsip struktur internal peserta didik tadi, maka struktur materi kurikulum SD secara eklektik harus merupakan sebuah jaringan organisasi isi yang sistemik, struktural maupun fungsional antara tiga struktur dasar, yakni:

1. Struktur substantif (Philip, 1987), atau struktur konseptual (Michaelis, 1978); atau Toulmin menyebut ekologi konseptual (Suparno, 1997), dan dalam konsep Piaget disebut "isi". Struktur substantif dimaksudkan sebagai jalinan atau relasi antar-materi kurikulum yang saling berkaitan penuh makna di antara berbagai dimensi pengetahuan (faktual, konseptual/deklaratif, metakognitif) yang memberikan "konsepsi yang sama, jelas, dan utuh" kepada peserta didik di dalam: merumuskan pertanyaan, menemukan cara yang tepat untuk memperoleh dan menafsirkan data, menyediakan kerangka berpikir, bersikap, dan bertindak, dan membangun pengertian, nilai, sikap, dan tindakannya, terhadap berbagai realitas, fenomena, masalah, dan/atau kasus-kasus yang dihadapi di dalam latar kehidupan personal dan sosialnya.

Prinsip eklektisisme di dalam pengembangan struktur substantif kurikulum SD, akan memberikan dua kekuatan yang bersifat komplementer—meminjam istilah Capra—, yaitu ekologisisme personal dan sosiokultural dan egoisme keilmuan. Dalam wacana teoretis dan epistemologis dewasa ini, dengan maraknya kajian-kajian keilmuan dalam perspektif lintas-budaya, prinsip eklektisisme antara pengetahuan alamiah dengan pengetahuan ilmiah semakin menjadi keniscayaan di dalam rekonstruksi struktur materi kurikulum posmodernisme. Para pakar menyebutnya sebagai eklektik antara *western science* dengan *native reality* (Kawagley & Barnhardt, 2000); *indigenous science* dan *western science* (Michie, 2001); *western sciences* dan *aboriginal sciences* (Aikenhead, 2002). Dalam konteks paradigma baru ini pula, di dalam pendidikan

keilmuan belakangan lahir konsep *science for all* dalam pendidikan sains atau *realistic mathematics* dalam pendidikan matematika.

Paling mendasar dari semua itu adalah bahwa struktur materi kurikulum SD harus memfasilitasi kemungkinan yang luas dan terbuka kepada peserta didik untuk: (1) membangun kesadaran diri peserta didik sebagai subyek atas realitas yang dialami selama pembelajaran dan kehidupan sehari-harinya; (2) mengembangkan kemampuan diri membangun pengertian, nilai, sikap, dan tindakannya secara mandiri berdasarkan pengetahuan-pengetahuan substantif yang dipelajari; dan bukan dimaksudkan untuk penguasaan struktur disiplin ilmu *an sich*.

2. Struktur sintaktik (Philips, 1987), yang dalam konsep Piaget disebut "operasi-operasi". Struktur sintaktik dimaksudkan sebagai jalinan atau relasi antar-materi kurikulum yang saling berkaitan penuh makna di antara berbagai jenis prosedur, yang dapat memfasilitasi peserta didik di dalam hal: (a) pendekatan, strategi, cara, teknik, keterampilan, proses, dan/atau prosedur dalam mengkaji, menguji, memperluas, dan membangun pengertian, nilai, sikap, dan tindakannya; (b) prinsip-prinsip dan kriteria-kriteria yang harus ditaati ketika menggunakan atau menerapkan pendekatan, strategi, cara, teknik, keterampilan, proses, dan/atau prosedur tersebut untuk mengkaji, menguji, menginterpretasi, dan membangun pengertian, nilai, sikap, dan tindakannya.

Seperti pada struktur substantif di atas, struktur sintaktik materi kurikulum SD, secara eklektik juga mencakup dua jenis struktur sintaksis yang bersifat komplementer, yaitu: (1) struktur sintaksis keseharian, yang telah dimiliki dan dipraktikkan peserta didik dalam realitas kehidupan keseharian, khususnya dalam cara-cara mereka: (a) mengaitkan pengetahuan, nilai, keterampilan, dan sikap yang sudah ada di dalam dirinya dengan pengalaman-pengalaman baru yang mereka peroleh; dan (b) membangun pengetahuan, nilai, keterampilan, dan sikap dari pengalaman kesehariannya; dan (2) struktur sintaksis keilmuan (sosial dan non-sosial) yang dipandang memiliki keterkaitan dengan struktur sintaksis peserta didik; didasarkan pada

pertimbangan kemungkinan aplikasinya oleh peserta didik SD; sesuai dengan karakteristik bidang kajiannya; dan sudah diadaptasi, dimodifikasi, khusus untuk kepentingan pembelajaran di SD.

Sebagai substansi materi kurikulum SD, penggunaan kedua jenis pengetahuan tersebut secara eklektik bukan dimaksudkan untuk melatih peserta didik ke arah penguasaan pendekatan, strategi, cara, teknik, keterampilan, proses, dan prinsip-prinsip dan kriteria-kriteria keilmuan; melainkan lebih pada upaya untuk memperkuat dan memperluas operasi-operasi dasar yang terdapat di dalam struktur atau organisasi tindakan-tindakan anak.

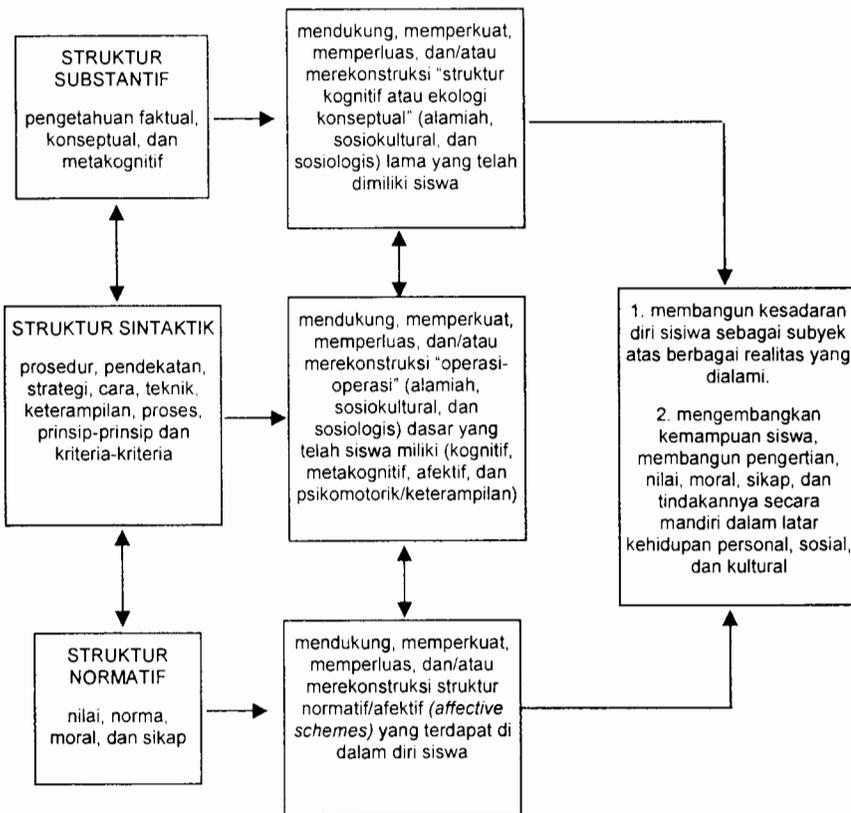
Operasi-operasi dasar tersebut mencakup: (a) operasi kognitif, atau lazim pula disebut proses-proses kognitif (Krathwohl, 2002), atau keterampilan intelektual (Gagne, 1977); (b) operasi meta-kognitif, atau strategi kognitif (Bruner, 1971; Gagne, 1977), atau juga lazim disebut strategi metakognitif (Cornbleth, 1991:41), fungsi eksekutif atau struktur kontrol (Greeno & Bjork); kemampuan pengelolaan-diri (Skinner); dan/atau aktivitas matemagenik (Rothkopf); (c) operasi afektif (Bloom, eds. 1956; NVCC, 2004); dan (d) operasi psikomotorik (keterampilan fisik) (Bloom, eds. 1956; NVCC, 2004).

3. Struktur normatif/afektif (Cornbleth, 1991), atau oleh Piaget disebut *affective schemes*. Struktur normatif/afektif dimaksudkan sebagai jalinan atau relasi antar-materi kurikulum yang saling berkaitan penuh makna di antara berbagai muatan pengetahuan normatif atau afektual. Struktur normatif/afektif tersebut harus memberikan kepada peserta didik sebuah kerangka berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma dan sikap-sikap berdasarkan kelayakannya dari sisi standar etika, budaya, moral, agama, maupun estetika (Philips, 1987).

Nilai, norma, moral, dan sikap tersebut secara eklektik bersumber dari nilai, norma, dan sikap yang terdapat di dalam agama, budaya, hukum, moral, ilmu pengetahuan, etika, maupun estetika yang: (1) menjadi kesepakatan umum atau bersama, di kalangan masyarakat luas dan komunitas pendidikan di SD; dan (2) yang dimiliki dan menjadi acuan

personal peserta didik dalam berpikir, bersikap, dan bertindak dalam latar kehidupan personal dan sosiokulturalnya. Kedua jenis muatan struktur normatif/afektif tersebut secara sinergis harus mampu mendukung, memperkuat, memperluas, dan/atau merekonstruksi struktur normatif/afektif yang terdapat di dalam diri peserta didik.

Struktur muatan kurikulum SD secara keseluruhan dapat digambarkan sbb:



Gambar 1. Struktur Materi Kurikulum SD Berdasarkan Pendekatan Kurikulum Eklektik

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, disimpulkan bahwa:

Pertama, materi kurikulum SD pada dasarnya merupakan materi kurikulum berbasis kompetensi, dan diarahkan pada pengembangan karakter dasar setiap peserta didik makhluk personal/individu, sosial-budaya, dan berketuhanan, dalam berbagai konteks dan situasi personal, sosial-kultural yang dialami.

Kedua, pola organisasi isi kurikulum SD tidak dikembangkan berdasarkan pola organisasi isi struktur disiplin ilmu, melainkan diorganisasi secara sistemik sebagai pengalaman-pengalaman belajar bersifat pedagogis, sosiokultural, psikologis berdasarkan prinsip *a student's psychological, sociocultural, and intellectual horizons reconstructions character-based*, yang bercirikan: kontekstual—personal dan sosiokultural; keterjalinan tematikal penuh makna antara satu dengan yang lain sebagai sebuah totalitas atau kesatuan isi kurikulum; mengembangkan kompetensi-kompetensi personal, sosial, dan intelektual, siswa; dan memungkinkan terjadinya rekonstruksi-rekonstruksi terhadap muatan, operasi-operasi dan fungsi-fungsi internal siswa.

Ketiga, struktur isi kurikulum SD tidak disusun berdasarkan struktur isi disiplin ilmu, melainkan sejauh memiliki relevansi dengan struktur internal siswa yang dibangun dari hasil pengalaman-pengalaman personal dan sosiokulturalnya di dalam kehidupan masyarakat, yang mencakup: (1) struktur substantif, yang secara eklektik memuat pengetahuan fungsional dan non-fungsional; (2) struktur sintaktik, yang secara eklektik memuat struktur sintaksis keseharian siswa dan struktur sintaksis keilmuan; dan (3) struktur normatif/afektif, yang memuat nilai-nilai, norma-norma, dan sikap-sikap, yang sudah menjadi kesepakatan umum atau bersama di kalangan komunitas pendidikan di SD dan masyarakat luas; dan nilai-nilai, norma-norma, dan sikap-sikap personal dan sosiokultural siswa.

Daftar Pustaka

- Aikenhead, G. (2002). Integrating Western and Aboriginal Sciences: Cross-Cultural Science Teaching. www.usak.ca/education/people/aikenhead/researticle.html Diambil 20 Pebruari 2002.
- Ausubel, D.P. (1963). *The Psychology of meaningful verbal learning*. New York: Grune & Stratton.
- Banks, J.A. (1995). Transformative challenges to the social sciences disciplines: Implications for social studies teaching and learning. *Theory and Research in Social Education*, XXIII(1), 2-20.
- Bloom, B.S. (Eds). (1956). *Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook I: Cognitive domain*. New York, Toronto: Longmans, Gree.
- Brubacher, J.S. (1947). *A history of the problems of education*. New York & London: McGraw-Hill Book Co., Inc.
- Bruner, J.S. (1969). *After John Dewey, What?* dalam R.D. Archambault. (2d). *Dewey on Education: Appraisals*. New York: Random-House. 211-227.
- Bruner, J.S. (1978). *The process of education*. Cambrigde: Harvard University Press.
- Chaille, C. & Britain, L. (1991). *The young child as scientist: A constructivist approach to early childhood science education*. New York: Harper Collins Publishers.
- Cornbleth, C. (1985). Critical thinking and cognitive processes. dalam Stanley, W. (ed). *Review of research in Social Studies Education: 1976-1983*. New York: NCSS. 11-64.
- Cornbleth, C. (1991). *Research on context, research in context*. dalam J.P. Shaver (Ed). *Handbook of Research on Social Studies Teaching and Learning*. New York: Macmillan Publishing Company. Halaman 265-275.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2003). *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Pusbangkurrandik, Depdiknas.
- Dewey, J. (1897). *My pedagogic creed*. www.infed.org/the_informal_education_archives.html. Diambil 10 Juni 2002.

- Dewey, J. (1910). *How we think*. www.spartan.ac.brocku.ca/~lward/dewey/dewey1910.html. Diambil 10 Juni 2002.
- Dewey, J. (1962). *Child and curriculum. The school and society*. London: University of Chicago Press.
- Dewey, J. (1963). *Experience and education*. New York: Collier Books, Macmillan Publishing Company.
- Dewey, J. (1964). *Democracy and education: An introduction to the philosophy of education*. New York: Mcmillan Co.
- Doll, W.E. (1995). *Curriculum possibilities in a "Post"-future*. dalam C.F. Conrad & J.G. Haworth (Eds). *Revisioning Curriculum in Higher Education*. USA: Simon & Schuster Custom Publishing. Halaman 58-69.
- Farisi, M.I. (2005). Rekonstruksi dasar-dasar pemikiran pendidikan IPS SD berdasarkan perspektif konstruktivisme. *Disertasi Doktor*. Bandung: PPS-UPI.
- Gagne, R.M. (1977). *The conditions of learning*. New York: Holt, Rinehart & Winston.
- Gauvain, M. (2001). *The social context of cognitive development*. New York: The Guilford Press.
- Hasan, S.H. (2004). Kurikulum dan tujuan pendidikan. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 23 (XIII), edisi Juli – Desember 2004, 1-13.
- Jegede, O.J. & Aikenhead, G.S. (2000). *Transcending cultural border: Implications for science teaching*. <http://www.jegede@ouhk.edu.hk>. Diambil 20 Pebruari 2005.
- Johnson, E.B. (2002). *Contextual teaching and learning*. California: Corwin Press, Inc. A Sage Publications Company.
- Kawagley, A.O. & Barnhardt, R. (2000). *Education Indigenous to place: Western science meets native reality*. <http://www.ankn.uaf.edu/EIP.html>. Diambil 20 Pebruari 2005.
- Kozulin, A. (1998). *Psychological tools: A socio-cultural approach to education*. London: Harvard University Press.
- Krathwohl, D.R. (2002). A Revision of Bloom's Taxonomy: An overview - Benjamin S. Bloom. http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m0NQM/is_4_41/ai_94872707. Diambil 27 Agustus 2004.

- Michie, M. (2001). Why I think indigenous science should be included in the school science curriculum. *Paper presented at the 32nd conference of the Australasian Science Education Research Association*, held in Sydney NSW in July 2001. www.members.ozemail.com.au/~mmichie/indigscience.html. Diambil 20 Februari 2002.
- NVCC (2004). *Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. www.nvcc.edu. Diambil 27 Agustus 2004.
- Ogawa, M (2002). *Science as the culture of scientist: How to cope with scientism?*. Diakses di www.ouhk.edu.hk/cridal/misc/ogawa.htm. Diambil 27 Januari 2005
- Philip, D.C. (1987). *Philosophy, science and social inquiry: Contemporary methodological controversies in social science and related applied fields of research*. Oxford: Pergamon Press.
- Piaget, J., & Inhelder, B. (1971). *The psychology of the child*. New York: Basic Books.
- Purta, J.T. (1991). Schema theory and cognitive psychology: Implications for social studies. *Theory and Research in Social Education*, XIX(2). 189-210.
- Spencer, L.M. & Spencer, S.M. (1993). *Competence at work: Models for superior performance*. New York: John Willey and Sons, Inc.
- Sanders, J.T (1996). *An ecological approach to cognitive science*. <http://www.phil.indiana.edu/ejap/1996.spring/contents.htm> Diambil 20 Maret 2003.
- Sumantri, M. (2002). *Pengembangan potensi siswa dengan kurikulum terpadu untuk menjadi manusia Indonesia seutuhnya*. Pidato pengukuhan jabatan Guru Besar tetap dalam bidang Ilmu Perencanaan Kurikulum pada FIP-UPI. Bandung:UPI.
- Suparno, P. (1997). *Filsafat konstruktivisme dalam pendidikan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Thomas, R.M. (1979). *Comparing theories of child development*. Belmont, California: Wadsworth Publishing Company, Inc.
- Wells, G. (2000). *Learning and teaching scientific concepts: Vygotsky's Ideas Revised*. www.marxists.org/archive/vygotsky/ diambil 10 Agustus 2002.

Zamroni. (2001). School and university colaboration for improving science and mathematics instruction in school. *Paper presented in National Seminar on Science and Mathematic Education*. Bandung, 21 Agustus 2001.

Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Serta Lingkup Materi pada Tingkat Pendidikan Tinggi

A.P. Hardhono



Artikel ini ditulis dalam kerangka standarisasi pendidikan nasional yang pada waktu artikel ini ditulis Peraturan Pemerintah mengenai hal ini masih dalam penggodokan. Selain itu tulisan ini mengenai pendidikan tinggi yang saat ini Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Pendidikan Tinggi juga sedang pembahasan. Oleh karena itu pendekatan yang akan ditempuh dalam artikel adalah pertama melihat kerangka dasar dan struktur kurikulum serta materi pendidikan sebagaimana dijelaskan dalam ke dua rancangan peraturan pemerintah tersebut. Selanjutnya pembahasan akan ditujukan untuk melihat institusi pendidikan tinggi di berbagai negara untuk melihat bagaimana pendidikan tinggi di negara tersebut dikelola. Pemilihan negara dilakukan berdasarkan kemajuan negara dalam bidang sosial ekonomi dengan dugaan bahwa pendidikan tinggi telah berperan sangat signifikan pada kemajuan sosial ekonomi negara negara tersebut. Negara yang dipilih diantaranya meliputi negara tetangga yang telah masuk dalam kategori macan Asia meliputi Malaysia, China, Korea, dan Jepang, serta Australia, Inggris, Belanda, dan Amerika Serikat. Dari telaah ini kemudian perbandingan dapat dilakukan dan akhirnya pilihan yang dapat diambil oleh perguruan tinggi nasional dapat diformulasikan.

Pendidikan Tinggi di Indonesia: Kerangka Dasar, Kurikulum dan Isi

Bagian dari artikel ini akan menguraikan kerangka dasar, kurikulum, dan isi materi pendidikan tinggi di Indonesia berdasarkan desain yang telah digariskan dalam Undang-Undang RI No 20 mengenai Sistem Pendidikan Nasional serta dua Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) masing-masing tentang Standar Nasional Pendidikan dan Pendidikan Tinggi. Pembahasan tidak akan dilakukan pada semua aspek dalam dua RPP tersebut melainkan hanya hal yang relevan dengan topik bahasan artikel ini yaitu mengenai kerangka dasar, kurikulum, serta materi pendidikan tinggi.

Mengingat pendidikan tinggi merupakan bagian integral dari pendidikan nasional maka sebaiknya pembahasan mengenai kerangka dasar, kurikulum, dan isi materi pendidikan tinggi juga perlu mengacu pada tugas dan fungsi pendidikan nasional. Seperti yang gariskan dalam Undang-Undang Nomor 3. tentang Pendidikan Nasional, fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional maka dalam RPP Pendidikan Tinggi ditentukan bahwa tiga fungsi pendidikan tinggi meliputi:

1. menyiapkan mahasiswa menjadi warganegara beriman dan berakhlak, memiliki kemampuan akademik dan intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan /atau seni, yang memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu mengembangkan potensi dirinya menjadi manusia produktif bagi kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa, dan umat manusia;
2. mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni untuk meningkatkan

- taraf hidup masyarakat dan daya saing bangsa, serta memperkaya budaya;
3. mendorong perubahan dan pembaharuan masyarakat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.

Selanjutnya tujuan pendidikan tinggi adalah yang pertama sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam UU Nomor 3 tentang Pendidikan Nasional yang telah dikemukakan ditambah dengan pembentukan manusia yang berkualitas secara intelektual, spiritual dan emosional, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni, berlandaskan pada semangat kebangsaan, sistem nilai, moral, dan watak serta peradaban bangsa, yang mendukung peningkatan daya saing bangsa.

Dalam RPP Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa pendidikan tinggi adalah pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis. Pendidikan tinggi tersebut diselenggarakan oleh perguruan tinggi dalam berbagai bentuk institusi yang meliputi akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Sedangkan jenis pendidikan tinggi meliputi akademik, profesi atau vokasi. Perbandingan tujuan jenis pendidikan serta jejang dapat dilihat pada Tabel 1.

Untuk mencapai tujuan pendidikannya, masing-masing jenis pendidikan mempunyai kurikulum dimana dalam Bab 1, pasal 1, ayat 14 Ketentuan Umum RPP Pendidikan Tinggi tersebut kurikulum didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

Mengingat kurikulum ada pada program studi dan bukan pada universitas, pertanyaan selanjutnya adalah apakah tujuan pengajaran pada program studi. Secara umum tujuan pembelajaran pada program studi tidak terlepas dari tujuan pendidikan nasional seperti yang telah diuraikan. Hal khusus yang hendak dicapai adalah mengembangkan potensi, minat, dan kepribadian dalam mencapai kompetensi sesuai dengan persyaratan program studi dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. Selanjutnya, apakah isi kurikulum program studi?

Tabel 1. Perbandingan Tujuan dan Jenjang Pendidikan Berdasarkan Jenis Pendidikan

Jenis	Tujuan	Jenjang	Institusi
Akademik	penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu,	Sarjana, magister, dan doktor	sekolah tinggi, institut dan universitas
Profesi	mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus	setelah sarjana	sekolah tinggi, institut dan universitas
Vokasi	penguasaan keahlian terapan tertentu	Diploma s.d. sarjana	Akademi, sekolah tinggi, institut, universitas, dan Politeknik

Kurikulum setiap program studi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Isi kurikulum yang lain ditentukan oleh program studi di masing-masing perguruan tinggi dengan memperhatikan kekhasan program studi dan dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, dinamika perkembangan global, dan kelestarian budaya bangsa. Bila program studi dalam pendidikan akademik maka isi pembelajaran ditujukan untuk penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni. Bila program studi dalam pendidikan profesi maka pembelajaran diarahkan untuk penguasaan dan pengembangan iptek pada keahlian tertentu. Sedangkan bila program studi dalam pendidikan vokasi maka pembelajaran diarahkan untuk penguasaan iptek dan/atau seni terutama pada kesiapan penerapan keahlian khusus.

Untuk memperkaya bahasan dalam artikel ini maka pendidikan tinggi di berbagai negara juga akan secara garis besar diuraikan sehingga dapat dipakai sebagai bahan perbandingan sehingga hal-hal yang bagus dan bermanfaat dapat dicontoh. Hal-

hal yang disampaikan berikut ini berasal dari laporan komite nasional pendidikan tinggi di Inggris (NCIHE, 1997).

Kerangka Dasar Pendidikan Tinggi di Berbagai Negara

Inggris, sebagai suatu negara yang terkenal maju dalam bidang sosial ekonomi selama berabad-abad, merasa perlu untuk mereformasi pendidikan tinggi agar tetap dapat berperan secara signifikan dalam percaturan dunia. Untuk melakukan reformasi tersebut, Inggris telah membentuk suatu Komisi untuk merumuskan reformasi tersebut dimana sebelum memformulasikan rumusannya Komisi tersebut telah juga melakukan studi pendidikan tinggi di berbagai benua yang meliputi Australia, Asia (terbatas pada negara dalam kategori macam Asia), Amerika Serikat, dan Eropa. Studi yang berakhir pada tahun 1997 tersebut dapat dipakai untuk memperkaya artikel ini dan juga menambah wawasan pembaca artikel ini

Pendidikan Tinggi di Inggris

Pendidikan tinggi di Inggris ditujukan secara umum untuk mempertahankan kelangsungan masyarakat belajar. Tujuan umum ini kemudian dijabarkan dalam empat tujuan spesifik yaitu:

1. memotivasi dan mengantar individu untuk mengembangkan kemampuan tertinggi mereka sepanjang hayat sedemikian rupa sehingga tumbuh kemampuan intelektualnya, mempunyai bekal untuk bekerja serta dapat berkontribusi secara efektif kepada masyarakat serta mencapai kebutuhan pribadinya,
2. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk kepentingan mereka sendiri serta menerapkannya demi keuntungan ekonomi dan masyarakatnya,
3. memenuhi kebutuhan dari ekonomi berbasis pengetahuan yang fleksibel, berkesinambungan baik pada tingkat lokal, regional maupun nasional, dan
4. berperan cukup signifikan dalam mengarahkan perkembangan masyarakat yang demokratis, beradab dan inklusif.

Dari uraian tujuan yang hendak dicapai tersebut terlihat bahwa peran pendidikan tinggi di Inggris dalam perkembangan ekonominya yang berbasis pengetahuan sangat besar dan vital. Untuk itu, Pemerintah Inggris menegaskan bahwa institusi pendidikan tinggi harus berperan dalam pengembangan wilayah dimana mereka berada. Hal ini diusahakan dengan membangun kemitraan antara institusi pendidikan tinggi dengan badan pengembangan wilayah atau *Regional Development Agencies* (RDAs) dan institusi lain yang berperan dalam pengembangan ekonomi.

Berbagai macam program yang dikembangkan dalam kemitraan tersebut antara lain pemberian peran lebih besar kepada RDAs dalam memberikan arahan atas Dana Inovasi Pendidikan Tinggi (*Higher Education Innovation Fund*). Dengan demikian kebutuhan pengembangan wilayah dapat ditunjang dengan inovasi sebagai hasil dari kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh pendidikan tinggi di wilayahnya. Selain itu program kemitraan juga dapat dilakukan dalam transfer pengetahuan dan teknologi, serta penalaran keterampilan antara industri dan perdagangan dengan pendidikan tinggi dalam bentuk pengembangan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk pengembangan industri dan perdagangan wilayahnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka pendidikan tinggi di Inggris dilaksanakan melalui institusi yang disebut sebagai pendidikan lanjut (*Further Education*) dan pendidikan tinggi (*Higher Education*). Pendidikan lanjut ini diselenggarakan baik oleh kolese pendidikan lanjut maupun universitas sedangkan pendidikan tinggi pada umumnya diselenggarakan oleh universitas. Pendidikan lanjut mengarah pada pencapaian gelar dasar atau *Foundation Degree*. Kurikulum pada pendidikan lanjut ini berfokus untuk menyiapkan lulusan untuk siap kerja selama dua tahun atau yang disebut sebagai *two-year work-focused foundation degrees*. Mereka yang lulus dari pendidikan lanjut ini dirancang untuk siap bekerja sebagai teknisi atau operator tingkat lanjut.

Sebagaimana namanya mengisyaratkan, peran industri dan perdagangan dalam merancang kurikulum untuk *two-year work-focused foundation degrees* sangat besar. Bahkan

Departemen Pendidikan dan Keterampilan Inggris mendorong kalangan industri dan perdagangan untuk berkolaborasi dengan institusi pendidikan lanjut untuk mengembangkan program *two-year work-focused foundation degrees*. Kolaborasi semacam ini menguntungkan banyak pihak. Pihak industri dan perdagangan mendapat jaminan pasokan tenaga kerja yang dibutuhkan. Mahasiswa dapat jaminan pekerjaan sedangkan masyarakat secara keseluruhan mendapat keuntungan dari perkembangan sosial ekonomi dari kolaborasi ini.

Salah satu contoh kolaborasi semacam ini adalah kolaborasi antara KLM-UK Engineering dengan Konsorsium Universitas Kingston dalam pengembangan program gelar dasar di bidang rekayasa pesawat. Dalam program kolaborasi, mahasiswa tidak saja mendapatkan keahlian akademik melainkan juga pengalaman kerja dan praktek yang diperlukan oleh industri. KLM-UK terlibat secara aktif sejak awal dalam merancang program pembelajaran. Selain itu kurikulum juga dirancang dengan mematuhi aturan untuk mendapatkan lisensi dari Otoritas Penerbangan (*Joint Aviation Authority*). Dalam pelaksanaan pembelajaran, mahasiswa juga belajar dari dan dibimbing oleh mentor yang berpengalaman dalam suasana kerja yang nyata.

Pendidikan Tinggi di Amerika Serikat

Pendidikan tinggi di Amerika Serikat (AS) terdiri atas kolese dan universitas. Kolese menyelenggarakan program pendidikan tinggi yang menuju ke pencapaian gelar asosiat dan *bachelor*. Gelar asosiat dirancang untuk lama belajar selama dua tahun sedangkan gelar *bachelor* dicapai dalam kurun waktu empat tahun. Sedangkan universitas, selain menyelenggarakan program yang mengarah ke pencapaian gelar master dan doktor, juga menyelenggarakan program *bachelor*.

Sedangkan dari sisi kurikulum, pendidikan tinggi di AS terkenal dengan istilah *liberal education* atau pendidikan liberal. Sesuai dengan namanya pendidikan liberal ditujukan untuk menumbuhkan liberasi. Sekalipun demikian, ada banyak pemaknaan atas konsep pendidikan liberal, namun ada pula kesamaan dari berbagai pemaknaan yang diusulkan oleh Mearsheimer, Pippin, & Abbott (Chrucky, 2003). Kesamaan

pemaknaan terdapat pada pandangan bahwa manusia hidup dalam dunia yang kompetitif oleh karena pendidikan liberal harus berperan dalam memberikan bekal kepada mahasiswa untuk menghadapi persaingan tersebut. Oleh karena itu bekal yang perlu diberikan menurut Chrucky (2003) meliputi kemampuan kognitif (fakta dan teori), moral, dan emosi. Namun demikian Mearsheimer tidak sepenuhnya setuju dengan usulan Chrucky tersebut. Menurut Mearsheimer, pendidikan seharusnya tidak meliputi moral karena yang diperlukan dalam kompetisi adalah kemenangan, misalnya memenangkan kasus di pengadilan bagi seorang penasehat hukum. Padahal sebenarnya moral adalah ketaatan pada kesepakatan masyarakat yang dibuat secara rasional sehingga proses pemenangan harus dilakukan dengan tidak melanggar kesepakatan tersebut.

Ada perbedaan pula antara Abbot dan Chrucky. Abbot membatasi liberasi pada sisi individual saja sedangkan Chrucky aspek liberasi harus mencakup aspek sosial atau liberasi sosial. Liberasi pada sisi individual terbatas pada memberikan kemampuan pada individual supaya mereka dapat menghadapi persaingan dalam memperoleh kehidupan sedangkan liberasi pada sisi sosial harus membebaskan anggota masyarakat dari berbagai jenis kompetisi dengan jalan ketaatan pada kesepakatan sosial yang dibuat secara rasional. Oleh karena itu yang menjadi isi pembelajaran adalah telaah sejarah dan peristiwa dari sisi moral – ketaatan pada kesepakatan rasional – atau telaah atas hal dari sisi manfaat ekonomi dan politik bagi setiap orang. Sejalan dengan itu pelajaran yang perlu diberikan meliputi masalah moral sebagaimana dihadirkan dalam sejarah, antropologi, sosiologi, ekonomi, dan politik. Salah satu bahan yang disarankan untuk diajarkan adalah telaah buku Interpretasi Ekonomi atas Konstitusi US. Untuk mencapai tujuan akhir tersebut, tujuan antara perlu dicapai antara lain kemampuan mahasiswa dalam pengetahuan dan ketrampilan umum, logika, dan bahasa. Hal lain yang perlu diajarkan adalah jalan yang dapat ditempuh untuk membangun kesepakatan yang rasional melalui diskusi yang diselenggarakan melalui cara yang santun dan tidak dengan emosi yang meledak-meledak.

Bagaimana dengan pendidikan tinggi di Belanda, negara yang pernah menjajah Indonesia selama 350 tahun? Masih

adakah jejak peninggalan pemikiran Belanda yang ada dalam pendidikan tinggi di Indonesia? Pendidikan tinggi di Belanda memang terlihat lain dari negara lainnya. Di Belanda terdapat pengaturan di sekolah lanjutan dimana hanya 15% dari lulusan sekolah lanjutan yang akan melanjutkan ke universitas, dan 20% melanjutkan ke pendidikan tinggi profesional. Program doktor yang ditawarkan oleh universitas di Belanda pada dasarnya mirip dengan program master di Inggris yang dirancang untuk diselesaikan dalam waktu empat tahun. Sedangkan program yang ditawarkan baik oleh pendidikan tinggi profesional dan kolese yang dirancang untuk diselesaikan dalam waktu empat tahun kurang lebih setara dengan *two-year work-focused foundation degree* di Inggris. Mengingat orientasi yang berbeda maka perpindahan mahasiswa dari pendidikan tinggi profesional dan universitas sangatlah jarang.

Selain hal tersebut pendidikan tinggi di Belanda secara terpusat dikendalikan oleh Kementerian Pendidikan, Budaya, dan Ilmu Pengetahuan melalui mekanisme yang disebut sebagai perencanaan komunikatif. Melalui mekanisme ini universitas, institusi pendidikan tinggi profesional, dan mahasiswa menyampaikan hal yang penting yang terkait dengan pendidikan tinggi. Komunikasi dilakukan dalam rangka siklus perencanaan tiga tahunan. Setiap tiga tahun, sebagai hasil dari komunikasi dengan institusi pendidikan tinggi, Kementerian menyampaikan Rencana Pendidikan Tinggi dan Penelitian kepada Parlemen untuk dibahas.

Pendidikan Tinggi di Negara Macan Asia

Negara yang termasuk dalam macan Asia (Malaysia, Singapore, China, Hong Kong, Taiwan, dan Korea Selatan). Predikat tersebut diberikan karena pertumbuhan sosial ekonomi yang sangat tinggi antara 8-10% per tahun dalam kurun waktu yang cukup panjang. Hal yang umum tampak di kalangan negara macan Asia ini adalah pengarahannya tujuan pendidikan tinggi untuk mendorong kemajuan ekonomi dan untuk pengembangan nilai sosial dan moral. Kedua tujuan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa kerukunan sosial dalam masyarakat yang heterogen seperti Malaysia dan Singapore merupakan prasyarat

bagi pertumbuhan ekonomi. Namun dalam negara yang masyarakatnya homogen sekalipun, seperti Taiwan, pendidikan tinggi juga bertujuan untuk menanamkan nilai kemanusiaan dan mencegah tumbuhnya sifat individualistik, malas-malasan, ketidakjelasan norma, serta sensualisme.

Di kalangan negara macan Asia, ada dua sistem pendidikan tinggi yang diacu. Kelompok pertama, Singapore, Malaysia, dan Hong Kong mengacu pada pendidikan tinggi di Inggris. Di tiga negara ini terdapat universitas dan politeknik, namun khusus di Singapore selain itu masih terdapat *Junior College*. Politeknik dan *Junior College* tidak diperkenankan untuk memberi gelar *Bachelor* (sarjana strata satu) melainkan hanya sertifikat atau diploma. Sejalan dengan itu pula biasanya penelitian juga hanya boleh dilakukan oleh lingkungan universitas saja.

Kelompok ke dua adalah Korea Selatan yang mengacu pendidikan tinggi di Amerika Serikat yang terdiri atas politeknik, *Junior College*, dan universitas. Namun demikian ada perbedaan yang menonjol antara pendidikan tinggi di Korea Selatan dan Amerika Serikat yaitu fleksibilitas perpindahan antara politeknik, *Junior College* dan universitas. Di Amerika, mahasiswa dapat pindah dari institusi tersebut secara fleksibel sedangkan perpindahan semacam ini sangat sulit atau tidak mungkin dilakukan oleh mahasiswa di Korea Selatan.

Sebagai konsekuensi dari orientasi pendidikan tinggi untuk mendukung perkembangan ekonomi maka peran pelaku industri dan perdagangan cukup besar dalam menentukan apa yang dipelajari dalam pendidikan tinggi. Banyak institusi industri dan perdagangan yang menjadi anggota *governing board* dari perguruan tinggi. Bahkan di Singapore, pihak industri dan perdagangan menjadi anggota dalam Dewan Penasehat Kurikulum. Selain itu pemerintah Singapore juga melakukan studi daya serap lulusan pendidikan tinggi.

Sebagai contoh, misalnya, pendidikan tinggi di Malaysia mempunyai komitmen untuk:

1. meningkatkan kualitas dan relevansi dari perkuliahan yang ditawarkan sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan tenaga kerja yang diperlukan,

2. meningkatkan daya tampung dalam pendidikan sains, rekayasa, serta mata kuliah yang berkaitan dengan teknik dalam rangka mengintensifkan produksi tenaga kerja dengan pengetahuan dalam bidang sains dan teknik, dan
3. meningkatkan kapasitas dan kemampuan untuk melakukan penelitian dan pengembangan khususnya pada hal yang relevan dengan sektor industri dan jasa.

Di Taiwan, misalnya, 50% mahasiswa belajar dalam bidang rekayasa dan administrasi niaga.

Pendidikan Tinggi di Australia

Bagaimana dengan pendidikan tinggi di Australia? Pendidikan tinggi di Australia terdiri atas universitas dan kolese untuk pendidikan teknik dan lanjut (TAFE – *Technical and Further Education*). Tujuan pendidikan tinggi di Australia adalah untuk:

1. warga Australia yang mempunyai kualifikasi untuk memegang peran kepemimpinan dalam pengembangan intelektual, budaya serta sosial baik pada tingkat wilayah ataupun nasional,
2. penciptaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan
3. penerapan ilmu pengetahuan dan penemuan-penemuan baru demi perbaikan masyarakat di Australia dan dunia.

Lebih jauh, universitas di Australia juga diharapkan menghasilkan lulusan yang mampu berkiprah dimanapun serta pada tingkat apapun secara profesional yang konsisten dengan standar internasional serta mengacu pada standar etika tertinggi.

Dari segi gelar, universitas di Australia menawarkan gelar *bachelor* yang dirancang untuk diselesaikan dalam waktu tiga tahun dan gelar *bachelor with honour* yang memerlukan waktu studi tambahan selama kurang lebih satu tahun, serta master, dan doktor. Sedangkan kolese pendidikan teknik dan lanjut menawarkan enam level diploma. Diploma tertinggi kurang lebih setara dengan gelar menengah di universitas atau *bachelor*. Sedangkan diploma pada umumnya setara dengan *associate degree* (sarjana muda) yang ditawarkan oleh universitas yang dirancang untuk diselesaikan dalam waktu dua tahun.

Bahasan

Dari uraian mengenai pendidikan tinggi di Indonesia berdasarkan peraturan dan rancangan peraturan dalam pendidikan tinggi di atas serta uraian pendidikan tinggi di AS, Inggris, Belanda, negara macan Asia, serta Australia, ada beberapa hal yang dapat disampaikan di sini. Pertama, ada kesamaan tujuan pendidikan tinggi yaitu untuk penciptaan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta penerapannya demi kemajuan sosial, budaya, dan ekonomi. Namun dalam implementasinya terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Misalnya di Inggris contoh yang paling ekstrem, jelas sekali dalam langkah yang diambil dalam mengkaitkan pendidikan tinggi dengan kemajuan sosial dan ekonomi wilayah di mana institusi pendidikan tinggi itu berada di wilayahnya. Dekatnya pengkaitan tersebut dapat dilihat dari:

1. kemitraan institusi pendidikan tinggi dengan Institusi-institusi Pengembangan Wilayah (RDAs) dalam transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan sumberdaya manusia dan pengembangan teknologi yang dibutuhkan untuk pengembangan wilayah,
2. pemberian peran lebih besar terhadap RDAs dalam menentukan Dana Inovasi untuk pendidikan tinggi, dan
3. dorongan kepada kalangan industri dan perdagangan untuk berkolaborasi dengan institusi pendidikan lanjut untuk mengembangkan program studi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya seperti yang terjadi kerjasama antara KLM-UK dengan Konsortium pendidikan tinggi di Kingston.

Di lingkungan negara macan Asiapun keterkaitan antara pendidikan tinggi dan dunia industri dan perdagangan cukup besar. Misalnya di Singapore, pihak industri dan perdagangan duduk dalam Dewan Penasehat Kurikulum. Di Malaysia juga ada komitmen untuk meningkatkan program penelitian yang mendorong perkembangan industri barang dan jasa.

Pengkaitan pendidikan tinggi dengan perkembangan ekonomi yang akhirnya akan mempersiapkan lulusan dalam mencari penghidupan menurut beberapa ahli pendidikan di AS, yaitu telah sesuai dengan makna pendidikan liberal. Namun bagi

ahli pendidikan liberal yang lain (Chrucky) hal tersebut belum memenuhi makna pendidikan liberal yang penuh karena menurutnya pendidikan liberal harus mengantar lulusannya untuk mampu membebaskan dari semua jenis kompetisi dengan jalan membekali lulusan dengan kemampuan untuk mencapai dan tunduk kesepakatan sosial yang dibuat secara rasional, atau yang disebut sebagai moral, serta mampu menghasilkan berbagai hal yang menguntungkan setiap orang dari sisi ekonomi dan politis. Untuk itu bekal pengetahuan dasar dalam sejarah, antropologi, sosiologi, ekonomi, dan politik. Hal yang penting diajarkan adalah menelaah sejarah dan peristiwa dari aspek moral sebagaimana didefinisikan di atas. Singkatnya menurut Chrucky, pendidikan tinggi bukanlah semata-mata penyiapan lulusan untuk siap masuk kompetisi dalam mencari penghidupan dalam persaingan/ kompetisi di dunia kerja.

Agaknya pendidikan tinggi di Indonesia mirip dengan pendidikan di AS. Banyak kritik yang telah dilontarkan bahwa lulusan pendidikan kita tidak siap kerja. Kritikan ini dijawab bahwa memang pendidikan bukan disiapkan untuk siap kerja. Sayangnya pendidikan di Indonesia seperti telaah terhadap sejarah dan berbagai peristiwa penting lebih banyak dari sisi penghafalan fakta dan kurang dalam melihat permasalahan dari sisi moral.

Sekalipun demikian, ada pula pendidikan tinggi di Indonesia yang dibuat mirip dengan apa yang telah dibuat oleh Konsortium pendidikan tinggi di Kingston, Inggris dengan perusahaan KLM-UK, yaitu Politeknik Manufaktur Astra (Sinar Harapan, 2005). Tujuan pendirian politeknik ini adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli yang diperlukan di lingkungan industri otomotif. Kurikulum di politeknik ini dikembangkan dengan konsep *link and match* yang diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (waktu itu) Wardiman Djoyonegoro. Konsep *link and match* ini pada prinsipnya adalah menyesuaikan program pembelajaran dengan kebutuhan dunia industri barang dan jasa. Untuk keperluan ini dalam politeknik ini telah mempunyai Komite Industri (*Industrial Committee*) yang berfungsi untuk mengantisipasi kebutuhan industri otomotif dan memberi masukan kepada politeknik.

Dalam struktur pendidikan tinggi terdapat kesamaan dalam hal pemisahan orientasi dalam pendidikan tinggi. Ada

orientasi yang secara spesifik untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diemban oleh universitas serta orientasi yang menyiapkan lulusan untuk terjun dalam industri barang dan jasa.

Kesimpulan

Berdasarkan paparan tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Pertama bahwa peran pendidikan tinggi di berbagai negara sangat besar dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya serta terdapat penekanan yang cukup nyata khususnya pada pengembangan ekonomi baik pada level negara, wilayah dalam suatu negara, atau pada level individu. Sehubungan dengan peran itu yang diharapkan maka yang terjadi adalah kecenderungan kolaborasi antara institusi pendidikan tinggi dengan kalangan dunia usaha semakin tinggi. Kolaborasi ini akan bermuara pada kurikulum yang akan ditawarkan institusi pendidikan tinggi serta kegiatan riset yang akan dilakukan; kegiatan riset ditujukan untuk mendukung pengembangan dunia usaha.

Kecenderungan yang berorientasi pada pengembangan ekonomi baik pada zona individu, masyarakat, maupun negara tersebut dapat dipahami dari teori hirarki kebutuhan yang dikemukakan Maslow (Boeree, 2004) yang menyatakan bahwa kebutuhan hidup manusia perlu dipenuhi mengikuti urutan tertentu. Urutan pemenuhan tersebut dimulai dari kebutuhan fisiologi yang meliputi oksigen, air, protein, garam, gula, kalsium, mineral yang lain, dan vitamin. Kebutuhan selanjutnya adalah keselamatan dan keamanan yang meliputi tempat yang aman, stabilitas termasuk di dalamnya stabilitas dalam mendapat pekerjaan, serta perlindungan. Kebutuhan ke tiga, empat, dan lima masing-masing adalah kebutuhan akan cinta dan hubungan sosial, citra diri, serta aktualisasi diri. Dari urutan prioritas pemenuhan kebutuhan manusia tersebut, khususnya kebutuhan nomor dua dan tiga, penyusunan program atau kurikulum pada pendidikan tinggi dapat dipahami. Kebutuhan kedua dan ketiga mengenai stabilitas atas pekerjaan, serta keamanan, hubungan antara manusia atau masyarakat satu dengan yang lain muncul. Untuk pemenuhan kebutuhan inilah isi kurikulum dalam bidang

sejarah, antropologi, sosiologi, ekonomi, politik, bahasa dan komunikasi, serta kemampuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam dunia kerja perlu diberikan kepada mahasiswa atau peserta ajar pada pendidikan tinggi.

Daftar Pustaka

- Boeree, C.G. (2004). *Abraham Maslow: Biography and theory*. <http://www.ship.edu/~cgboeree/maslow.html>. Diambil 12 Oktober 2005.
- Chrucky, A. (2003). *The aim of liberal education*. University of Chicago. <http://www.ditext.com/chrucky/chrucky.html>. Diambil 7 September 2005.
- Department of Education and Skill (2003). *The future of higher education. Presented to Parliament by the Secretary of State for Education and Skills by Command of Her Majesty*, January 2003, Crown, Colegate, UK.
- NCIHE (1997). *Report of the National Committee*. http://www.leeds.ac.uk/educol/ncihe/a5_058.htm. Diambil 8 September 2005.
- Pendidikan Nasional. (2005). *Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Pendidikan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Pendidikan Nasional. (2005). *Rencana Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Pendidikan Nasional. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Sinar Harapan (2005). *POLMAN ASTRA: Mencetak ahli industri pendukung*. Sinar Harapan, Mei 2, 2005. http://www.sinarharapan.co.id/POLMAN_ASTRA.htm
- US Study Guide (2005). *USA Education System: Overview of the American Education System*. <http://www.usastudyguide.com/overview.htm>. Diambil 2 September 2005.

Analisis Kualitatif Soal Persiapan Ujian Akhir Nasional

Suroyo

Atun Ismarwati

Ujian Akhir Nasional (UAN) merupakan salah satu alat evaluasi hasil belajar yang banyak mendapat sorotan dalam masyarakat. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Mardapi, *et al.* (2004) tentang dampak UAN antara lain menyimpulkan bahwa UAN mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positif berpengaruh kepada motivasi semangat belajar dan mengajar meningkat, sedangkan dampak negatif adalah tingkat kecemasan yang dapat menyebabkan stres bagi siswa, guru, termasuk orang tua. Hassan (2004) menegaskan perlunya acuan bagi pengamat maupun pakar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti ditegaskan dalam Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional antara lain dalam pasal 58 ayat 2, yaitu: "evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan" (hal. 25).

Standar mengacu ke dalam masyarakat belajar menurut Husen (1974) dijelaskan antara lain:

"Hemat saya, istilah 'standar' dapat diberi arti rasional dipandang dari dua aspek: (1) standar erat hubungannya dengan tujuan pendidikan yang harus dicapai sekolah sesuai dengan tujuan kurikulum. Tujuan ini dapat dikemukakan dalam bentuk tujuan kognitif dan non kognitif, tetapi juga dapat dibuat operasional dalam bentuk perilaku nyata; (2)

kemampuan sesuatu jenis sekolah untuk mencapai tujuan dapat diungkapkan dalam bentuk statistik deskriptif. Namun, belum jelaslah statistik mana yang harus dipakai.

.....Di sinilah timbul kesulitan dalam membandingkan bermacam-macam sistem pendidikan dan jenis sekolah. Pertama-tama, standar harus didasarkan pada tujuan yang ada. Dengan demikian, tes yang dipakai untuk mengukur tujuan harus representatif, sehingga tidak ada satu sistem pendidikan maupun satu jenis sekolah pun yang dianak-emaskan atau dianak-tirikan." (hal. 43-44)

Untuk mengetahui seberapa jauh upaya dalam mengembangkan standar pada ujian akhir nasional, memerlukan penelitian terhadap perangkat tes dapat dilakukan agar dapat diperoleh informasi sebagai sarana kajian mendalam yang bersifat evaluatif demi perbaikan ke arah tujuan pencapaian standar.

Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui sejauh mana cakupan kompetensi materi yang diujikan, sebaran jejang kognitif dan tingkat kesukaran soal dan menguji seberapa kecukupan waktu pengerjaan per soal maupun keseluruhan set soal, serta temuan permasalahan apa saja yang terjadi dalam penyelesaian soal. Permasalahan dibatasi untuk menganalisis soal UAN periode tahun 2005-2006 untuk SMA/MA IPA bidang studi matematika.

Metodologi yang digunakan adalah menganalisis secara kualitatif pada sampel soal UAN berdasarkan peta kompetensi, taksonomi, tingkat kesukaran, kecukupan waktu pengerjaan, dan strategi pengerjaan soal. Peta kompetensi dikonfirmasi mengacu kepada kurikulum 2004 standar kompetensi mata pelajaran Matematika Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah Departemen Pendidikan Nasional (2003).

Sebaran taksonomi tujuan pendidikan diselaraskan dengan tabel revisi taksonomi Bloom oleh Anderson & Krathwohl (2001) dari kerangka taksonomi asli yang bersifat satu dimensi menjadi dua dimensi, yaitu Dimensi Proses Kognitif dan Dimensi Pengetahuan. Dimensi Proses Kognitif berisi enam kategori, yaitu:

mengingat, memahami, menerapkan, menganalisa, mengevaluasi, dan menciptakan. Dimensi pengetahuan berisi empat kategori: pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognitif.

Taraf kesukaran soal dianalisis sebagai acuan untuk menganalisis karakteristik butir secara kualitatif. Taraf kesukaran soal diujicobakan dengan mengerjakan soal berdasarkan instrumen penelitian berdasarkan urutan waktu pengerjaan, lama pengerjaan soal (waktu cepat dan lambat), yang menghasilkan temuan permasalahan dalam langkah penyelesaian soal. Penentuan taraf kesukaran secara kualitatif nantinya dapat dikonfirmasi dengan taraf kesukaran kuantitatif yang diperoleh dari data hasil ujian peserta. Menurut Naga (2004) dalam menguji akurasi pada sistem ujian bergantung pada kemampuan peserta ujian (θ) dengan taraf kesukaran (b), dirumuskan sebagai $(\theta - b)$. Akurasi pada sistem ujian akan mencapai titik tertinggi apabila terdapat kecocokan di antara taraf kesukaran butir soal dengan kemampuan peserta ujian termasuk kecukupan waktu pengerjaan soal atau dengan kata lain $(\theta - b) = 0$. Berkaitan dengan taraf kesukaran yang nantinya berbeda dari tahun ke tahun maka menurut Umar (2004) dengan kemampuan peserta dalam ujian yang dilakukan secara nasional bersifat heterogen, data kuantitatif yang membandingkan kemampuan peserta ujian dengan taraf kesukaran dapat digunakan sebagai dasar penentuan tabel konversi nilai UAN agar sehingga keputusan yang diambil bersifat objektif dan adil.

Hasil penelitian kualitatif ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi siswa, guru, dan semua pihak yang terkait dalam guna mempersiapkan diri menghadapi UAN. Hasil analisis meliputi deskripsi menyeluruh dan mendalam persoalan UAN ditinjau dari aspek materi dan kompetensi dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi kualitas pembelajaran dan instrumen penilaian dalam upaya meningkatkan kualitas instrumen penilaian yang lebih akurat dan objektif.

Hasil dan Pembahasan

Sistematika penyampaian hasil penelitian mencakup aspek urutan pengerjaan soal, kelas, kompetensi, indikator, materi pokok, jenjang kognitif, taraf kesukaran, dan waktu pengerjaan. Hasil penelitian secara menyeluruh dirangkum ke dalam Tabel 1.

Pada Tabel 1 kolom (a) berisi nomor soal secara urut yang terdiri dari 30 soal dalam bentuk pilihan ganda. Kolom (b) adalah urutan pengerjaan soal yang dilakukan oleh peneliti dan terlihat bahwa dalam pengerjaan soal, beberapa soal awal dapat dikerjakan secara sekuensial kemudian melompat pada nomor lain secara acak dan seterusnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengerjaan soal, urutan pengerjaan ditentukan antara lain oleh kecenderungan peserta ujian menyakini akan dapat mengerjakan atau menghindari soal yang dipengaruhi oleh tingkat kesukaran, pemahaman, dan panjangnya langkah penyelesaian soal. Kolom-kolom kelas (c), kompetensi/indikator (d), dan materi pokok (e) adalah hasil konfirmasi antara soal dengan acuan standar kompetensi kurikulum 2004. Pada kolom kelas (c) terlihat bahwa ada 9 soal (30 %) dari kelas X SMA/MA, 10 soal (33,3%) dari kelas XI, dan 11 soal (36,7%) dari kelas XII dengan sebaran yang cukup proporsional. Kolom kompetensi/indikator (d) berisi nomor kompetensi dan indikator yang akan dijabarkan pada Tabel 2. Kolom (e) berisi materi pokok dari soal-soal yang diujikan meliputi: (a) Kelas X terdiri dari Sistem persamaan linear dan kuadrat (2 soal), Trigonometri (4 soal), Logika matematika (1 soal), Ruang tiga dimensi (2 soal); (b) Kelas XI terdiri dari Lingkaran (2 soal), Limit fungsi (2 soal), Diferensial (4 soal), Statistika (1 soal), Peluang (1 soal); (c) Kelas XII terdiri dari Program linear (1 soal), Transformasi Geometri (1 soal), Persamaan, Fungsi dan Pertidaksamaan logaritma (1 soal), Matriks (1 soal), Vektor (1 soal), Notasi sigma, Baris, dan Deret (4 soal), Integral (2 soal) yang memperlihatkan penekanan pada materi pokok untuk menghitung luas daerah.

Kolom taksonomi terdiri dari 6 kolom untuk dimensi proses kognitif, yaitu: C1 (f), C2 (g), C3 (h), C4 (i), C5 (j), dan C6 (j) dan pada baris diisi dengan mencantumkan dimensi

pengetahuan pada kolom dimensi proses kognitif yang sesuai. Sebaran taksonomi dapat dilihat pada Tabel 3.

Dari Tabel 3, terlihat bahwa sebagian besar soal sebanyak 19 butir (63,3%) berkumpul di taksonomi dimensi proses kognitif C3 (menerapkan) pada pengetahuan prosedural (C), sedangkan sebagian lain, yaitu : 8 soal (26,7%) pada taksonomi C5 (mengevaluasi) dan pengetahuan prosedural (C). Ada 3 soal yaitu: 1 soal (3,3%) terletak pada C4 (menganalisa) dan pengetahuan faktual (A), 1 soal (3,3%) pada C5 (mengevaluasi) dan pengetahuan meta-kognitif (D), dan 1 soal (3,3%) pada C6 (menciptakan) dan pengetahuan konseptual (B). Hal ini memperlihatkan bahwa penekanan soal secara dominan terletak pada soal penerapan matematika dalam dimensi proses kognitif dan dimensi proses kognitif dalam kategori mengevaluasi pada pengetahuan prosedural. Sedangkan beberapa dimensi proses kognitif dan dimensi pengetahuan yang tidak terwakili. Kolom Taraf Kesukaran terdiri dari 3 kolom yang membagi soal ke dalam kategori soal mudah (l) sebanyak 7 soal (23,3%) , sedang (m) 14 soal (46,6%) , dan sukar (n) 9 soal (30%). Dengan komposisi pembagian tingkat kesukaran soal yang demikian diharapkan akan diperoleh data skor hasil ujian yang berdistribusi normal. Namun hal ini harus dibuktikan melalui analisis kuantitatif lebih lanjut. Kolom waktu pada Tabel 1, terdiri dari kolom waktu cepat (o) dikaitkan dengan pengerjaan soal dikondisikan seperti saat ujian yang terbatas (120 menit) dan kolom waktu lambat (p) yang dikerjakan tanpa mengacu pada waktu ujian. Terlihat pada kolom waktu cepat (o) dikerjakan dalam waktu 118 menit atau lebih cepat dari batas waktu ujian (kurang dari 2 menit) dengan jumlah jawaban salah sebanyak 4 soal. Sedangkan untuk waktu lambat dengan soal benar semua memerlukan waktu 150 menit atau lebih lama dari batas waktu ujian (lebih dari 30 menit). Berdasarkan hasil pengukuran waktu pengerjaan tersebut UAN secara kualitatif relatif dapat diselesaikan dengan menjawab benar semua waktu yang bervariasi dengan rata-rata antara 4 sampai 5 menit per soal.

Temuan-temuan dalam pengerjaan soal disertai penjabaran taksonomi dan kompetensi yang diharapkan dirangkum ke dalam tabel pada Tabel 3.

Berdasarkan Tabel 3 hasil analisis secara mendetail berupa penjabaran taksonomi dan kompetensi berikut temuan dalam pengerjaan untuk tiap soal yang dapat dijadikan analisis lebih lanjut untuk mengkaji kesulitan yang mungkin dihadapi oleh peserta UAN sebagai masukan proses evaluasi kegiatan untuk persiapan pembelajaran, konsep-konsep dan kompetensi yang harus dikuasai.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis, kajian dan temuan penelitian kualitatif ini, dapat disimpulkan enam hal berikut ini:

1. Penentuan urutan pengerjaan soal dapat membantu penyelesaian ujian secara keseluruhan, jika peserta ujian mampu memahami persoalan, tingkat kesukaran, dan langkah penyelesaian soal.
2. Cakupan kompetensi pada soal UAN SMA/MA IPA bidang studi Matematika tahun 2005 untuk kategori kelas terwakili dan proporsional.
3. Penyebaran materi pokok dalam soal-soal UAN terwakili.
4. Sebaran taksonomi terkumpul pada dimensi pengetahuan prosedural yang sebagian besar berkumpul pada dimensi proses kognitif menerapkan dan mengevaluasi.
5. Proporsi taraf kesukaran antara soal mudah, sedang, dan sukar sudah memenuhi kriteria penyusunan set soal yang proporsional yang diharapkan data skor hasil ujian akan berdistribusi normal.
6. Waktu pengerjaan relatif cukup untuk siswa normal dengan kesalahan sekitar 13 % (4 dari 30 soal salah).

Berdasarkan hasil analisis pengerjaan soal dan temuan penelitian, dapat disarankan tiga hal berikut ini:

1. Ada soal yang memenuhi kriteria sangat bagus (**) untuk diujikan di UAN dalam tipe soal pilihan ganda (soal nomor 2, 4, 12, 21, dan 30).
2. Ada soal yang memenuhi kriteria tidak cocok (?) untuk diujikan di UAN dalam tipe soal pilihan ganda (soal nomor 6, 11, 16, dan 24).
3. Soal selebihnya merupakan soal-soal bagus (*) untuk UAN.

Tabel 1. Analisis Kompetensi, Taraf Kesukaran Soal dan Pengukuran Waktu Pengerjaan

No Soal	Urutan Pengerjaan	Kelas	Kompetensi/ Indikator	Materi Pokok	Jenjang Kognisi						Taraf Kesukaran			Waktu (menit)		
					C1	C2	C3	C4	C5	C6	Mudah	Sedang	Sukar	Cepat	Lambat	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	
1	1	X	1.8 / 2,3,4	SPL dan kuadrat					C			V		4	4	
2	2	XI	4.5 / 3,4	Diferensial					C			V		6	6	
3	3	X	1.8 / 2,3,4	SPL dan kuadrat					C			V		6	6	
4	4	X	2.3 / 2,4	Trigonometri				C				V		4	4	
5	5	X	2.3 / 2,3,4	Trigonometri				C				V		7	7	
6	6	XII	2.13 / 1,2,3	Persamaan, fungsi & pertdkS Log.					D				V	4(salah)	7	
7	14	XII	2.5 / 3,4,5	Matriks				C				V		2	2	
8	15	XII	2.7 / 2,4	Vektor				A				V		4	4	
9	18	XII	2.4 / 2,3	Notasi sigma, bars & deret				C				V		7	7	
10	19	XI	4.2 / 2	Limit fungsi				C				V		2	2	
11	20	XI	4.2 / 2	Limit fungsi				C				V		2	2	
12	23	XI	4.3 / 1,4	Diferensial				C					V	5	5	
13	24	XII	1.2 / 1,3	Integral				C					V	Salah	10	
14	25	XII	1.1 / 2	Integral				C					V	1	1	
15	30	X	1.12 / 1	Logika matematika						B			V	1	1	
16	22	XI	4.4 / 5	Diferensial				C					V	2	2	
17	28	X	2.1 / 3,4,5,6,7,8	Trigonometri				C						V	Salah	5
18	26	X	3.1 / 1,2,3	Ruang tiga dimensi				C						V	5	5
19	27	X	3.2 / 2,6	Ruang tiga dimensi				C						V	10	10
20	21	XI	4.4 / 2,5	Diferensial					C				V	2	2	
21	7	XI	1.4 / 3,5,6	Peluang				C						V	5	5
22	9	XI	3.2 / 1,2,3	Lingkar				C					V	7	7	
23	10	XI	3.2 / 1,2,3	Lingkar				C					V	5	5	
24	12	XII	2.2 / 2,5	Notasi sigma, bars & deret					C				V	7	7	
25	13	XII	2.2 / 2,5	Notasi sigma, bars & deret					C				V	2	2	
26	11	X	2.1 / 5,6,8	Trigonometri					C					V	Salah	7
27	17	XII	2.4 / 2,3	Notasi sigma, bars & deret				C					V	2	2	
28	29	XII	2.1 / 1,2,3,4,5	Program linear					C					V	5	5
29	16	XII	2.9 / 3,5	Transformasi geometri					C					V	11	11
30	8	XI	1.2 / 1	Statistika					C					V	Salah	3
Total					0	0	18	1	10	1	7	14	9	118'	150'	
Proporsi (%)					0	0	60	3,3	33,3	3,3	23,3	46,6	30	98,3	125	

Tabel 2. Sebaran Taksonomi

Dimensi Pengetahuan	Dimensi Proses Kognitif																		Total (%)	
	C1 Mengingat			C2 Memahami			C3 Menerapkan			C4 Menganalisa			C5 Mengevaluasi			C6 Menciptakan				
	Md	Sd	Sk	Md	Sd	Sk	Md	Sd	Sk	Md	Sd	Sk	Md	Sd	Sk	Md	Sd	Sk		
A. Pengetahuan Faktual										15									1 (3,3)	
B. Pengetahuan Konseptual																		30	1 (3,3)	
C. Pengetahuan Prosedural							4, 14, 17, 19, 20.	5, 8, 9, 10, 18, 22, 23.	7, 24, 25, 26, 27, 28					21	1, 2, 3, 12, 13,	11, 16, 29,				27 (90)
D. Pengetahuan Meta-Kognitif															6				1 (3,3)	
Subtotal	0	0	0	0	0	0	5	7	6	1	0	0	1	5	4	0	1	0		
%	0	0	0	0	0	0	16,6	23,3	20	3,3	0	0	3,3	16,6	13,3	0	3,3	0		
Total	0			0			18			1			10			1			30	
%	0			0			60			3,3			3,3			3,3			100	

Tabel 3. Analisis Taksonomi, Tingkat Kesukaran, Kelas, Nomor Kompetensi, Indikator, dan Materi Pokok Soal Ujian Akhir Nasional SMA IPA Bidang Studi Matematika Tahun 2005-2006

No	Analisis
1 *	<p>Mengevaluasi-Pengetahuan prosedural, C5/C, Sedang, Kelas X, Kompetensi 1.8, Indikator butir 2, 3, dan 4, Sistem persamaan linear (SPL) dan kuadrat: 1.8 Merancang model matematika yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dan menyelesaikan modelnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • (butir 2) : menentukan besaran dalam masalah yang dirancang sebagai variabel. • (butir 3) : merumuskan SPL yang merupakan model matematika dengan menggunakan rumus keliling segitiga • (butir 4) : menghitung panjang sisi segitiga dengan menggunakan rumus yang telah diperoleh. <p>Temuan: Langkah penyelesaian relatif pendek, soal mudah, namun siswa memerlukan pemahaman konsep segitiga samakaki, hal ini memerlukan latihan dan pengalaman. (Saran : Soal bagus untuk UAN, karena menguji kompetensi untuk merancang model matematika dan menyelesaikannya).</p>
2 **	<p>Mengevaluasi-Pengetahuan prosedural, C5/C, Sedang, Kelas XI, Kompetensi 4.5, Indikator butir 3 dan 4, Diferensial 4.5 Merancang model yang berkaitan dengan ekstrim fungsi dan menyelesaikan modelnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • (butir 3) : merumuskan persamaan yang merupakan model matematika dengan menggunakan rumus keliling dan luas empat persegi panjang. • (butir 4) : menentukan luas maksimum dengan mengambil turunan pertama sama dengan nol, sehingga diperoleh besaran panjang. <p>Temuan: Langkah penyelesaian relatif pendek, siswa perlu memahami konsep maksimum fungsi. (Saran : Soal sangat bagus untuk UAN, karena siswa harus jeli membaca gambar dan tidak terkecoh pada rumus baku empat persegi panjang).</p>
3 *	<p>Mengevaluasi-Pengetahuan prosedural, C5/C, Sedang, Kelas X, Kompetensi 1.8, Indikator butir 2, 3, dan 4, SPL dan Kuadrat. 1.8 Merancang model matematika yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dan menyelesaikan modelnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • (butir 2) : menentukan besaran (umur Ayah = x) dan besaran (umur Budi = y). • (butir 3) : merumuskan SPL dari besaran yang telah ditentukan untuk Menentukan model matematika. • (butir 4) : menyelesaikan SPL dari rumus yang diperoleh. <p>Temuan: Langkah penyelesaian memerlukan ketelitian yang tinggi. Siswa harus mampu mengabstraksikan persoalan nyata ke dalam bentuk persamaan dengan dua variabel tidak diketahui. (Saran: Soal bagus untuk</p>

No	Analisis
4 **	<p>UAN, karena menguji kependaian merumuskan persoalan nyata).</p> <p>Menerapkan-Pengetahuan prosedural, C3/C, Mudah, Kelas X, Kompetensi 2.3, Indikator butir 2 dan 4, Trigonometri. 2.3 Merancang model matematika yang berkaitan dengan fungsi trigonometri dan menyelesaikan modelnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • (butir 2) : menerapkan konsep trigonometri dalam permasalahan yang berkaitan dengan rumus sinus dan rumus cosinus. • (butir 4) : menggunakan rumus sinus dan cosinus dalam menyelesaikan soal. <p>Temuan : Siswa memerlukan ketrampilan menggambar dalam konsep trigonometri berdasarkan situasi nyata.(Saran: Soal ini sangat bagus untuk UAN, karena walau persoalan nyata cenderung dihindari, namun jika memahami dan pengalaman menyelesaikan, sebenarnya mudah).</p>
5 *	<p>Menerapkan-Pengetahuan prosedural, C3/C, Sedang Kelas XI., Kompetensi 2.3, Indikator butir 2, 3, dan 4, Trigonometri: 2.3 Menentukan nilai dari suatu permasalahan yang ditentukan, tetapi harus menggunakan konsep-konsep pertidaksamaan trigonometri</p> <ul style="list-style-type: none"> • (butir 2) : menentukan besaran dalam masalah yang dirancang sebagai variabel yang berkaitan dengan ekspresi trigonometri. • (butir 3) : merumuskan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan fungsi trigonometri. • (butir 4) : menentukan penyelesaian dari model matematika. <p>Temuan: Siswa selain hafal rumus trigonometri juga dibutuhkan ketrampilan dan ketelitian dalam menghitung. (Saran : Soal bagus untuk UAN, karena semua siswa cenderung mencoba menyelesaikan).</p>
6 ?	<p>Mengevaluasi-Pengetahuan meta-kognitif, C5/D, Sukar Kelas XII, Kompetensi 2.13, Indikator butir 1,2, dan 3, Persamaan, Fungsi dan Pertidaksamaan logaritma. 2.13 Menggambar grafik dan menggunakan sifat-sifat fungsi logaritma dalam penyelesaian persamaan logaritma.</p> <ul style="list-style-type: none"> • (butir 1) : menggambar grafik fungsi. • (butir 2) : menentukan penyelesaian persamaan logaritma. • (butir 3) : menjelaskan sifat-sifat fungsi logaritma yang digunakan dalam proses penyelesaian persamaan logaritma. <p>Temuan: Siswa memerlukan pemahaman yang berubah-ubah, jadi harus menggunakan strategi pengerjaan yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strategi 1. Perhitungan konseptual tentang logika - Strategi 2. Aplikasi konsep barisan bilangan - Strategi 3. Konsep dasar logaritma - Strategi 4. Konsep himpunan dan integrasi dengan konsep bilangan. <p>(Saran: Soal tidak cocok untuk UAN?, karena terlalu mendalam dan siswa mungkin belum sampai pada tahap ini).</p>
7 *	<p>Menerapkan-Pengetahuan prosedural, C3/C, Sukar Kelas XI, Kompetensi 1.4, Indikator butir 3,5, dan 6, Peluang. 1.4 Menentukan peluang kejadian dari berbagai situasi serta tafsirannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • (butir 3) : memberi tafsiran peluang kejadian. • (butir 5) : menerapkan konsep kombinasi dalam masalah peluang.

No	Analisis
	<ul style="list-style-type: none"> • (butir 6) : menerapkan konsep kombinasi peluang dalam perumusan perhitungan. <p>Temuan : Siswa memerlukan intuisi yang tajam dalam menerapkan konsep peluang dalam persoalan yang bersifat simulasi. (Saran : Soal bagus untuk UAN, karena selain mampu menghitung, siswa harus pandai menentukan rumus yang akan digunakan).</p>
8 *	<p>Menerapkan-Pengetahuan prosedural, C3/C, Mudah, Kelas XI, Kompetensi 1.2., Indikator 1, Statistika.</p> <p>1.2 menghitung ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran data serta penafsirannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • (butir 1) menggunakan aturan statistik dalam menentukan nilai rata-rata data pada suatu diagram. <p>Temuan: Siswa memerlukan penalaran, kecepatan ketelitian dalam perhitungan statistika. (Saran: soal bagus untuk UAN sebagai soal pengayaan untuk menguji kompetensi penerapan konsep penyajian data statistik).</p>
9 *	<p>Menerapkan-Pengetahuan Prosedural, C3/C, Sedang, Kelas XI, Kompetensi 3.2, Indikator butir 1,2, dan 3, Lingkaran</p> <p>3.2. Menentukan persamaan lingkaran yang memenuhi kriteria tertentu dengan beberapa ketentuan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • (butir 1) : menentukan persamaan garis singgung yang melalui suatu titik pada lingkaran. • (butir 2) : menentukan persamaan garis singgung yang gradiennya sudah ditentukan. • (butir 3) : menggunakan diskriminan untuk menentukan persamaan garis singgung pada lingkaran. <p>Temuan: Langkah penyelesaian memerlukan ketrampilan algoritma tertentu untuk menentukan persamaan garis singgung suatu lingkaran dan ketelitian yang tinggi. (Saran: Soal bagus untuk UAN, karena semua siswa cenderung akan menyelesaikan soal dan menguji ketahanan berpikir).</p>
10 *	<p>Menerapkan-Pengetahuan prosedural, C3/C, Sedang, Kelas XI, Kompetensi 3.2, Indikator butir 1,2, dan 3, Lingkaran</p> <p>3.2 Menentukan persamaan garis singgung lingkaran tegak lurus pada suatu garis, dengan langkah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • (butir 1) : menentukan gradien k dari suatu garis singgung yang diketahui. • (butir 2) : menentukan syarat suatu garis singgung tegak lurus. • (butir 3) : menentukan gradien g dari suatu garis singgung • (butir 2) : menentukan persamaan lingkaran dengan menggunakan salah satu garis singgung yang telah diperoleh. • (butir 3) : menggunakan diskriminan untuk Menentukan persamaan garis singgung pada lingkaran. <p>Temuan: Langkah penyelesaian memerlukan ketrampilan algoritma tertentu untuk menentukan persamaan garis singgung suatu lingkaran dan ketelitian yang tinggi. (Saran: Soal bagus untuk UAN, karena semua</p>

No	Analisis
	siswa cenderung akan menyelesaikan soal dan menguji ketahanan berpikir).
11 ?	<p>Mengevaluasi-Pengetahuan prosedural, C5/C, Sukar Kelas X, Kompetensi 2.1, Indikator butir 5, 6 dan 8, Trigonometri.</p> <p>2.1 Menggunakan sifat dan aturan tentang fungsi trigonometri, rumus sinus dan cosinus dalam pemecahan masalah</p> <ul style="list-style-type: none"> • (butir 5) : menentukan sinus, cosinus dan tangen dari sudut di semua kuadran. • (butir 6) : menentukan besarnya suatu sudut yang nilai sinus, cosinus dan tangennya diketahui. • (butir 8) : menggunakan rumus sinus dan cosinus dalam penyelesaian soal. <p>Temuan: Langkah penyelesaian panjang sehingga memerlukan waktu pengerjaan. Walaupun siswa dapat mengerjakan, soal ini akan dihindari (Saran: Soal tidak cocok untuk soal pilihan ganda? Karena terlalu rumit dan soal menjebak siswa untuk mengerjakan soal yang tidak mudah).</p>
12**	<p>Mengevaluasi-Pengetahuan prosedural, C5/C, Sedang Kelas XII, Kompetensi 2.2, Indikator butir 2 dan 5, Notasi sigma, barisan dan deret, dan induksi Matematika.</p> <p>2.2 Merumuskan dan Menentukan suku ke-n dan jumlah n suku pada barisan geometri, dengan langkah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • (butir 2) : menentukan rumus suku ke-n dan jumlah n suku pada barisan geometri. • (butir 5) : menghitung jumlah n suku deret geometri dengan menggunakan rumus yang diperoleh. <p>Temuan: Langkah penyelesaian relatif pendek, soal sedang. Siswa harus mampu mengabstraksikan simulasi konsep deret geometri. (Saran : Soal bagus sekali untuk UAN, karena benar-benar menguji kompetensi siswa mengabstraksikan persoalan nyata ke dalam model matematika).</p>
13*	<p>Mengevaluasi-Pengetahuan prosedural, C5/C, Sedang Kelas XII, Kompetensi 2.2, Indikator butir 1, 2 dan 5, Notasi sigma, barisan dan deret, dan induksi Matematika.</p> <p>2.2 Merumuskan dan menentukan suku ke-n dan jumlah n suku pada barisan aritmatika, dengan langkah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • (butir 1) : menjelaskan ciri barisan aritmatika • (butir 2) : menentukan rumus suku ke-n dan jumlah n suku pada barisan aritmatika. • (butir 5) : menghitung jumlah n suku deret aritmatika dengan menggunakan rumus yang diperoleh. <p>Temuan: Siswa harus memahami konsep bunga dan menerapkan konsep deret aritmatika.</p> <p>(Saran: Soal bagus untuk UAN, karena menguji kompetensi siswa mengabstraksikan persoalan nyata ke dalam model matematika).</p>
14 *	<p>Menerapkan-Pengetahuan prosedural, C3/C, Mudah Kelas XII, Kompetensi 2.5, Indikator butir 3, 4 dan 5, Matriks.</p> <p>2.5 Menggunakan sifat-sifat dan operasi matriks untuk menentukan invers matriks ordo 2, dengan langkah sebagai berikut:</p>

No	Analisis
	<ul style="list-style-type: none"> • (butir 3) : melakukan operasi aljabar atas dua matriks ordo 2. • (butir 4) : menentukan determinan suatu matriks orde 2 dan kaitannya dengan matriks yang mempunyai invers. • (butir 5) : menentukan invers matriks ordo 2. <p>Temuan: Siswa memerlukan pemahaman yang kuat dalam menggunakan konsep matriks. (Saran: Soal bagus untuk UAN, untuk memotivasi siswa bahwa tidak semua soal sukar, walaupun tidak juga mudah, tetapi dapat menjawab).</p>
15*	<p>Menganalisa-Pengetahuan faktual, C4/A, Mudah Kelas XII, Kompetensi 2.7, Indikator butir 2 dan 4, Vektor. 2.7 Dengan diketahui faktual yaitu jarak dua titik dalam bidang, kemudian diperbandingkan dengan langkah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • (butir 2) : menentukan panjang antara vektor pada suatu bidang. • (butir 4) : menggunakan rumus perbandingan vektor pada bidang. <p>Temuan: Siswa memerlukan pemahaman yang baik terhadap konsep vektor untuk dapat menyelesaikan soal dengan benar. (Saran: Soal bagus untuk UAN, karena menguji kompetensi dimensi proses kognitif yang bersifat evaluatif).</p>
16 ?	<p>Mengevaluasi-Pengetahuan prosedural, C5/C, Sukar Kelas XII, Kompetensi 2.9, Indikator butir 3 dan 5, Transformasi Geometri. 2.9 Menentukan suatu persamaan kuadrat dengan menggunakan translasi dan transformasi, dengan langkah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • (butir 3) : menentukan persamaan transformasi rotasi pada bidang beserta aturan dan matriks rotasinya. • (butir 5) : menentukan persamaan transformasi dilatasi pada bidang. <p>Temuan: Langkah penyelesaian memerlukan pemahaman yang tinggi terhadap masalah geometri. Soal ini sukar dinalarkan. (Saran: Soal tidak cocok untuk UAN?, karena siswa cenderung akan menghindari soal).</p>
17*	<p>Menerapkan-Pengetahuan prosedural, C3/C, Mudah. Kelas XI, Kompetensi 2.4, Indikator butir 2 dan 3. Notasi sigma, barisan dan deret. 2.4 Merumuskan masalah nyata yang masalah matematikanya berbentuk deret, menyelesaikan modelnya dan menafsirkan hasil yang diperoleh.</p> <ul style="list-style-type: none"> • (butir 2) : merumuskan deret yang merupakan model matematika. • (butir 3) : menentukan penyelesaian dari model matematika. <p>Temuan: Langkah penyelesaian cukup singkat, tetapi memerlukan logika berfikir yang kuat agar memperoleh rumus yang tepat. (Saran: Soal ini bagus untuk UAN).</p>
18*	<p>Menerapkan-Pengetahuan prosedural, C3/C, Sedang. Kelas XII, Kompetensi 1.1, Indikator butir 5, Integral. 1.1 Menggunakan konsep, sifat dan aturan dalam perhitungan integral.</p> <ul style="list-style-type: none"> • (butir 5) : menghitung integral dengan rumus integral substitusi. <p>Temuan: Siswa membutuhkan ketelitian, kecerdikan, dan kecerdasan . (Saran: soal bagus untuk UAN menguji kompetensi).</p>
19*	<p>Menerapkan-Pengetahuan prosedural, C3/C, Mudah Kelas XI, Kompetensi 4.2, Indikator butir 2, Limit fungsi.</p>

No	Analisis
	<p>4.2 Menggunakan sifat limit fungsi untuk menghitung bentuk tak tentu fungsi aljabar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • (butir 2) : menghitung limit fungsi aljabar pada suatu titik tertentu. <p>Temuan: Langkah penyelesaian cukup panjang, sedang, untuk menghitung limit fungsi aljabar memerlukan kecermatan karena memerlukan taktik dan strategi. (Saran: Soal bagus untuk UAN).</p>
20*	<p>Menerapkan-Pengetahuan prosedural, C3/C, Sedang Kelas XI, Kompetensi 4.2, Indikator butir 2, Limit fungsi.</p> <p>4.2 Menggunakan sifat limit fungsi untuk menghitung bentuk tak tentu fungsi Trigonometri.</p> <ul style="list-style-type: none"> • (butir 2) : menghitung limit fungsi trigonometri yang mengarah pada konsep turunan. <p>Temuan: Siswa membutuhkan ketelitian dan kecermatan dalam menerapkan konsep trigonometri untuk menghitung limit fungsi. (Saran: Soal bagus untuk UAN, karena menguji kompetensi).</p>
21**	<p>Menganalisa-Pengetahuan prosedural, C5/C, Mudah. Kelas XI, Kompetensi 4.4, Indikator butir 2 dan 5, Diferensial.</p> <p>4.4 Menggunakan turunan untuk menentukan karakteristik suatu fungsi dan memecahkan masalah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • (butir 2) : menentukan titik stasioner suatu fungsi beserta jenis ekstrimnya. • (butir 5) : menggunakan turunan dalam perhitungan kecepatan dan percepatan <p>Temuan: Siswa disamping harus mampu merumuskan model matematika, juga diharapkan dapat menerapkan konsep turunan untuk menentukan nilai ekstrim. (Saran: Soal bagus sekali untuk UAN, karena menguji kompetensi dalam persoalan nyata).</p>
22 *	<p>Menerapkan-Pengetahuan prosedural, C3/C, Mudah Kelas XI, Kompetensi 4.4, Indikator butir 5, Diferensial.</p> <p>4.4 Menggunakan turunan untuk menentukan karakteristik suatu fungsi dan memecahkan masalah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • (butir 5) : menentukan kecepatan gerak partikel dari suatu persamaan garis yang sudah ditentukan. <p>Temuan: Langkah penyelesaian relatif pendek dan tertentu. Siswa harus mampu menerapkan konsep fisika dengan model matematika. (Saran: Soal bagus untuk UAN).</p>
23 *	<p>Menerapkan-Pengetahuan prosedural, C3/C, Sedang. Kelas XI, Kompetensi 4.3, Indikator butir 1 dan 4, Diferensial.</p> <p>4.3 Menggunakan konsep, sifat dan aturan dalam perhitungan turunan fungsi</p> <ul style="list-style-type: none"> • (butir 1) : menentukan turunan fungsi dengan menggunakan definisi turunan. • (butir 4) : menggunakan aturan turunan untuk menghitung turunan fungsi trigonometri. <p>Temuan: Siswa memerlukan ketrampilan dan ketelitian dalam menyelesaikan soal diferensial fungsi trigonometri. (Saran: Soal bagus untuk UAN, sekilas soal rumit, namun apabila mengetahui strategi pengerjaan dan</p>

No	Analisis
	pengalaman akan mampu menyelesaikan soal).
24 ?	<p>Menerapkan-Pengetahuan prosedural, C3/C, Sukar Kelas XII, Kompetensi 1.2, Indikator butir 1 dan 3,Integral.</p> <p>1.2 Menggunakan konsep integral dalam menghitung luas, dengan langkah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • (butir 1) : menentukan persamaan garis dan kurva yang melalui titik-titik pada bidang. • (butir 3) : menghitung luas dengan menggunakan konsep integral. <p>Temuan: Langkah penyelesaian panjang, membutuhkan ketelitian dan kecermatan yang tinggi. (Saran: Soal tidak cocok untuk UAN, karena ada beberapa kompetensi yang diuji yang bersifat <i>ambigu</i>).</p>
25 *	<p>Menerapkan-Pengetahuan prosedural, C3/C, Sedang Kelas XII, Kompetensi 1.1, Indikator butir 2, Integral.</p> <p>1.1 Menggunakan konsep, sifat dan aturan dalam perhitungan integral.</p> <ul style="list-style-type: none"> • (butir 2) : menghitung integral tak tentu dari fungsi trigonometri. <p>Temuan: Siswa membutuhkan kecermatan dan ketepatan dalam menggunakan rumus trigonometri. (Saran: Soal bagus untuk UAN, karena menguji suatu kompetensi tertentu).</p>
26 *	<p>Menerapkan-Pengetahuan prosedural, C3/C, Sukar Kelas X, Kompetensi 3.1, Indikator butir 1, 2, 3, Ruang dimensi tiga.</p> <p>3.1 Memahami komponen, menggambar dan menghitung volume benda ruang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • (butir 1) : menentukan kedudukan titik, garis dan bidang dalam ruang. • (butir 2) : menentukan volume benda-benda ruang. • (butir 3) : menghitung perbandingan volume dua benda dalam suatu bangun ruang. <p>Temuan: Langkah pengerjaan relatif panjang, siswa memerlukan pemahaman yang baik terhadap konsep ruang dimensi tiga. (Saran: Soal bagus untuk UAN, karena menguji kompetensi dimensi ruang).</p>
27 *	<p>Menerapkan-Pengetahuan prosedural, C3/C, Sukar Kelas X, Kompetensi 3.2, Indikator butir 2 dan 6, Ruang dimensi tiga.</p> <p>3.2 Menggunakan abstraksi ruang untuk menggambarkan dan menghitung jarak dan sudut, dengan langkah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • (butir 2) : menggambar dan menghitung jarak dua garis bersilangan yang membentuk segitiga pada ruang. • (butir 6) : menggunakan rumus luas segitiga untuk menghitung panjang salah satu sisi segitiga. <p>Temuan: Langkah pengerjaan relatif panjang, siswa memerlukan pemahaman yang baik terhadap konsep ruang dimensi tiga. (Saran: Soal bagus untuk UAN, karena menguji kompetensi dimensi ruang dengan indikator sudut segitiga).</p>
28 *	<p>Menerapkan-Pengetahuan prosedural, C3/C, Sedang Kelas X, Kompetensi 2.1, Indikator butir 3, 6, dan 8, Ruang dimensi tiga. Trigonometri.</p> <p>2.1 Menggunakan sifat dan aturan tentang fungsi trigonometri.</p> <ul style="list-style-type: none"> • (butir 3) : menentukan sinus, cosinus dan tangen dengan

No	Analisis
	<p>perbandingan trigonometri.</p> <ul style="list-style-type: none"> • (butir 6) : menentukan besarnya suatu sudut yang nilai sinus, cosinus dan tangennya diketahui. • (butir 8) : menggunakan rumus sinus dan cosinus dalam penyelesaian soal. <p>Temuan: Langkah pengerjaan relatif panjang, siswa memerlukan pemahaman yang baik terhadap konsep ruang dimensi tiga. (Saran: Soal bagus untuk UAN, karena menguji kompetensi dimensi ruang dengan indikator konsep rumus trigonometri.)</p>
29 *	<p>Mengevaluasi-Pengetahuan prosedural, C5/C, Sukar. Kelas XII, Kompetensi 2.1, Indikator butir 1, 2, 3, 4, dan 5, Program linear. 2.1 merumuskan masalah nyata ke dalam model matematika sistem pertidaksamaan linear, menyelesaikan, dan menafsirkan hasil yang diperoleh.</p> <ul style="list-style-type: none"> • (butir 1) : menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. • (butir 2) : menentukan fungsi tujuan beserta kendala yang harus dipenuhi dalam masalah program linear. • (butir 3) : menggambarkan kendala sebagai daerah di bidang yang memenuhi sistem pertidaksamaan linear. • (butir 4) : menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan sebagai penyelesaian dari program linear. • (butir 5) : menafsirkan nilai optimum yang diperoleh sebagai penyelesaian masalah program linear. <p>Temuan: Siswa harus mampu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - menerapkan konsep program linear - merumuskan kondisi bentuk dan pertidaksamaan - menentukan konsep aljabar untuk menentukan titik sudut - menyelidiki beberapa titik untuk menentukan titik yang dimaksud. <p>(Saran : Soal bagus untuk UAN dengan catatan: Soal pada nomor akhir dan hanya dapat dikerjakan oleh siswa yang mempunyai waktu cukup.)</p>
30**	<p>Menciptakan-Pengetahuan konseptual, C6/B, Sedang. Kelas X, Kompetensi 1.12, Indikator butir 1, Logika Matematika. 1.12 Menggunakan sifat dan prinsip logika untuk penarikan kesimpulan dan pembuktian sifat matematika.</p> <ul style="list-style-type: none"> • (butir 1) : menarik kesimpulan dengan silogisme, modus ponens dan modus tollens. <p>Temuan: Menciptakan pernyataan baru dari beberapa pernyataan yang berisi kesimpulan yang sah dengan menggunakan konsep logika. (Saran: Soal bagus sekali untuk UAN, karena menguji dimensi proses kognitif menciptakan untuk menajring siswa pandai).</p>

Keterangan:

* Soal bagus untuk UAN

** Soal sangat bagus untuk UAN

? Soal tidak cocok untuk UAN

Tabel 4. Sampel Analisis Kualitatif Soal UAN SMA/MA Th. 2005

Sampel soal yang tidak sesuai dengan model pilihan ganda (Nomor 11)*

11. Nilai x yang memenuhi persamaan $2\sqrt{3} \cos^2 x^\circ - 2 \sin x^\circ \cos x^\circ - 1 - \sqrt{3} = 0$, untuk $0 \leq x \leq 360$ adalah...

- A. 45, 105, 225, 285 D. 15, 135, 195, 315
 B. 45, 135, 225, 315 E. 15, 225, 295, 315
 C. 15, 105, 195, 285

Penyelesaian	Analisis
$2\sqrt{3} \cos^2 x^\circ - 2 \sin x^\circ \cos x^\circ - 1 - \sqrt{3} = 0$ $\sqrt{3} \cdot 2 \cos^2 x^\circ - 2 \sin x^\circ \cos x^\circ - 1 - \sqrt{3} = 0$ $\sqrt{3} (\cos 2x + 1) - \sin 2x - 1 - \sqrt{3} = 0$ $\sqrt{3} \cos 2x + \sqrt{3} - \sin 2x - 1 - \sqrt{3} = 0$ $\sqrt{3} \cos 2x - \sin 2x - 1 = 0 \rightarrow \sqrt{3} \cos 2x - \sin 2x = 1$ $\sqrt{3} \cos 2x - \sin 2x = k \cos(2x - q) = k \cos 2x \cos q + k \sin 2x \sin q$ $\left. \begin{matrix} k \cos q = \sqrt{3} \\ k \sin q = -1 \end{matrix} \right\} \rightarrow \tan q = \frac{k \sin q}{k \cos q} = -\frac{1}{\sqrt{3}} = -\frac{1}{3}\sqrt{3} \rightarrow q = 150^\circ$ $k = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-1)^2} = \sqrt{3+1} = \sqrt{4} = 2$ $\sqrt{3} \cos 2x - \sin 2x = 1$ $2 \cos(2x - 150^\circ) = 1 \Rightarrow \cos(2x - 150^\circ) = \frac{1}{2}$ $2x - 150^\circ = \pm 60^\circ + k \cdot 360^\circ$ $2x = \pm 60^\circ + 150^\circ + k \cdot 360^\circ$ $x = \pm 30^\circ + 75^\circ + k \cdot 180^\circ$ $x_1 = 30^\circ + 75^\circ + k \cdot 180^\circ$ $k = 0 \rightarrow x_{11} = 105^\circ + 0 \cdot 180^\circ = 105^\circ$ $k = 1 \rightarrow x_{12} = 105^\circ + 1 \cdot 180^\circ = 285^\circ$ $x_2 = -30^\circ + 75^\circ + k \cdot 180^\circ$ $k = 0 \rightarrow x_{21} = 45^\circ + 0 \cdot 180^\circ = 45^\circ$ $k = 1 \rightarrow x_{22} = 45^\circ + 1 \cdot 180^\circ = 225^\circ$ $HP: \{45^\circ, 105^\circ, 225^\circ, 285^\circ\}$	<p>Jawaban: A</p> <p>Mengevaluasi-Pengetahuan prosedural, C5/C, Sukar Kelas X, Kompetensi 2.1, Indikator butir 5, 6 dan 8, Trigonometri.</p> <p>2.1 Menggunakan sifat dan aturan tentang fungsi trigonometri, rumus sinus dan cosinus dalam pemecahan masalah</p> <ul style="list-style-type: none"> • (butir 5) : menentukan sinus, cosinus dan tangen dari sudut di semua kuadran. • (butir 6) : menentukan besarnya suatu sudut yang nilai sinus, cosinus dan tangennya diketahui. • (butir 8) : menggunakan rumus sinus dan cosinus dalam penyelesaian soal. <p>Temuan: Waktu cepat : 12 menit Waktu lambat : 15 menit Langkah penyelesaian panjang sehingga memerlukan waktu pengerjaan. Walaupun siswa dapat mengerjakan, soal ini akan dihindari Saran: Soal tidak cocok untuk soal pilihan ganda. Karena terlalu rumit dan soal menjebak siswa untuk mengerjakan soal yang tidak mudah.</p>

Daftar Pustaka

- Anderson, O.W. & Krathwohl, D.R. (Eds.). (2001). *A taxonomy for learning, teaching, and assessing*. New York: Longman.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2003). *Kurikulum 2004 standar kompetensi mata pelajaran Matematika Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2003). *Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Hassan, F. (2004). Peraturan perundang-undangan sebagai acuan pelaksanaan evaluasi hasil belajar dan ujian akhir satuan pendidikan. Makalah *Seminar Nasional UAN dan Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Psikologi UI.
- Husen, T. (1974). *Masyarakat belajar (The learning society)* terjemahan oleh Y. Miarso & S. P. Hargosewoyo. Jakarta: Pusat Antar Universitas untuk Peningkatan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional (PAU-PPAI) Universitas Terbuka.
- Mardapi, D., dkk. (2004). Dampak ujian akhir nasional. Kumpulan makalah *Seminar nasional UAN dan standar nasional pendidikan*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Psikologi UI.
- Naga, D.S. (2004). Tabel konversi sistem konversi nilai dalam UAN: Pergeseran paradigma pada sistem ujian. Makalah *Seminar Nasional UAN dan Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Psikologi UI.
- Supriyoko, K. (2004). Ujian nasional untuk merealisasi standar nasional pendidikan. Makalah *Seminar nasional UAN dan standar nasional pendidikan*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Psikologi UI.
- Tim Widya Gamma. (2005). *Pemantapan menghadapi ujian nasional (UN) dan ujian sekolah (US) SMA IPA 2005/2006*. Bandung: CV. Yrama Widya.

Umar, J. (2004). Tabel konversi sistem konversi nilai dalam UAN: Heboh tabel konversi. Makalah *Seminar Nasional UAN dan Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Psikologi UI.

Evaluasi Pembelajaran Bahasa

Lis Setiawati

Evaluasi merupakan suatu kegiatan yang penting dalam suatu kegiatan di samping perencanaan dan pelaksanaan. Termasuk juga dalam kegiatan pembelajaran. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui seberapa tinggi ketercapaian tujuan suatu kegiatan. Hasil evaluasi digunakan untuk meningkatkan hasil yang telah diperoleh, atau memperbaiki suatu kegiatan karena memperoleh keberhasilan yang rendah, atau sama sekali gagal.

Pembelajaran sebagai bagian dari program pendidikan yang dan berjalan sepanjang masa, memerlukan evaluasi yang dilakukan secara sungguh-sungguh serta ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh pula. Itu sebabnya, kegiatan evaluasi sebaiknya tidak dilakukan secara setengah hati karena akan menyangkut banyak komponen yang dirugikan dalam waktu yang sangat panjang.

Begitu pentingnya kegiatan evaluasi seperti diungkapkan Sudjana (1990) bahwa penilaian atau evaluasi tidak hanya diarahkan kepada tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, tetapi juga terhadap tujuan yang tersembunyi, termasuk efek samping yang mungkin timbul.

Banyak kekurangan yang terjadi dalam pembelajaran bahasa, salah satunya adalah kesalahan dalam melakukan evaluasi pembelajaran bahasa yang meliputi hasil belajar keterampilan berbahasa yaitu menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Dengan materi berupa keterampilan berbahasa, maka siswa diharapkan memiliki kompetensi berupa terampil menggunakan bahasa atau berbahasa baik lisan maupun lisan.

Sebagai suatu kegiatan yang berproses, evaluasi pada pembelajaran bahasa tidak hanya menekankan pada evaluasi hasil (hasil belajar) tetapi juga memperhatikan proses yang berlangsung dalam mencapai hasil tersebut. Oleh karena itu,

evaluasi dalam pembelajaran bahasa meliputi evaluasi proses dan hasil belajar bahasa. Evaluasi hasil belajar sudah biasa dilakukan guru, namun evaluasi proses sering kali, bahkan tidak pernah mendapat perhatian para guru. Hal ini memerlukan pembenahan yang serius dan dilakukan secara disiplin demi tercapainya kualitas pembelajaran yang lebih baik.

Keluhan yang dihadapi para guru dalam melaksanakan evaluasi hasil belajar bahasa adalah kurangnya waktu untuk melakukan evaluasi yang berupa sebuah keterampilan. Pernyataan tersebut harus dikaji secara cermat kebenarannya. Berdasarkan masalah tersebut, diharapkan artikel ini dapat membantu para guru melakukan evaluasi secara menyeluruh (proses dan hasil) yang berdampak pada kemampuan siswa menggunakan bahasa (bahasa Indonesia) lisan dan tulis dengan baik dan benar dan dampak berkemampuan adalah kualitas pembelajaran yang menunjang program pendidikan di negara ini.

Pengertian Evaluasi

Evaluasi berasal dari bahasa Inggris *evaluation* yang bermakna penilaian. Dipandang dari sudut semantik penilaian dapat dimaknai sebagai serangkaian kegiatan dalam rangka memperoleh nilai yang akurat atas sesuatu. Oleh karena itu, evaluasi dapat dilakukan terhadap segala sesuatu yang berupa benda, sifat atau perilaku, dan hasil dari suatu pekerjaan atau kegiatan. Dengan demikian terdapat banyak ragam evaluasi, seperti evaluasi program, evaluasi produk sebuah industri, evaluasi diri, atau evaluasi hasil belajar.

Dalam kaitan dengan pembelajaran, evaluasi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui seberapa efektifnya pembelajaran yang telah dilakukan. Efektif tidaknya sebuah pembelajaran dapat diketahui dengan cara mengukur seberapa besar tujuan pembelajaran tersebut dapat dicapai.

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa, kegiatan evaluasi berkaitan erat dengan kegiatan pengukuran dan penilaian. Hal ini dapat diartikan bahwa, di dalam kegiatan evaluasi atau mengevaluasi terkandung kegiatan pengukuran dan penilaian. Kedua istilah ini, yaitu pengukuran dan penilaian sering

kali dianggap memiliki makna yang sama, dan pemakaiannya sering dipertukarkan.

Jika dikaji dari sisi morfologi, kata pengukuran dan penilaian terbentuk melalui proses yang sama, yaitu kata dasar bergabungnya morfem bebas dengan morfem terikat yang menimbulkan makna baru. Sebagai morfem bebas, kata dasar ukur dan nilai mendapat afiks yang sama yaitu pe- -an menjadi pengukuran dan penilaian. Namun jika dikaji dari sisi semantik kedua kata ini memiliki perbedaan. Kata pengukuran sering kali melekat pada jenis kata benda seperti ukuran atau mengukur (tinggi) badan, bukan menilai (tinggi) badan; ukuran atau mengukur (luas) tanah, bukan menilai (luas) tanah. Sedangkan kata penilaian umumnya melekat dengan jenis kata sifat, seperti bagus atau tidak bagus, baik atau buruk. Misal, nilai rapor anak itu tidak bagus; perilakunya hanya mendapat nilai C (cukup), dan sebagainya.

Sehubungan dengan evaluasi, penjelasan tentang perbedaan istilah pengukuran dan penilaian di atas dapat disimpulkan bahwa istilah pengukuran digunakan dalam kegiatan evaluasi yang bertujuan memperoleh angka atau bersifat kuantitatif atau menekankan evaluasi ranah kognitif siswa, sedangkan penilaian digunakan dalam kegiatan evaluasi yang bertujuan memperoleh nilai dengan kriteria baik atau tidak baik, bagus atau tidak bagus atau bersifat kualitatif, atau menekankan evaluasi pada ranah afektif siswa. Hal ini bukan berarti bahwa dalam kegiatan evaluasi pembelajaran, kedua istilah ini digunakan secara terpisah dengan memilih salah satu, tetapi kedua istilah ini dapat digunakan atau bahkan sebaiknya digunakan keduanya.

Kegiatan pengukuran dan penilaian ini dapat dicontohkan sebagai berikut.

Pada pembelajaran menulis, guru akan mengevaluasi hasil belajar menulis siswa. Pada kegiatan ini, guru dapat mengevaluasi dengan cara mengukur penggunaan bahasa siswa yakni memperhatikan penggunaan/penerapan ejaan, penyusunan/struktur kalimat, dan penggunaan tanda baca. Pemberian skor dilakukan dengan cara menghitung kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam hasil belajar menulis siswa dan membandingkannya dengan skor maksimal. Skor atau angka

yang diperoleh siswa dihitung dengan menggunakan rumus-
rumus penilaian atau acuan patokan yang ditetapkan guru. Hasil
akhir dari penghitungan tersebut merupakan skor sebagai hasil
belajar menulis siswa, setelah itu hasil ini diinterpretasi atau
ditafsirkan dengan menggunakan kriteria hasil pembelajaran. Hasil
dari kegiatan interpretasi akan menempatkan siswa ke dalam
kelompok hasil yang baik atau kurang baik.

Pengukuran yang dilakukan tersebut merupakan
pengukuran terhadap ranah kognitif siswa. Evaluasi hasil belajar
menulis ini sebaiknya dilengkapi dengan penilaian terhadap ranah
afektif siswa yaitu dengan cara menilai kerapian, keindahan, dan
ketepatan waktu yang digunakan oleh siswa dalam menulis. Hasil
penilaian terhadap ranah afektif ini biasanya menggunakan abjad
A, B, C, atau D, yang dapat berarti sangat baik, baik, cukup, atau
kurang. Jika kedua kegiatan ini dilakukan, berarti guru telah
melakukan kegiatan evaluasi hasil belajar siswa yang meliputi
ranah kognitif dan ranah afektif dalam pembelajaran menulis.

Pengukuran maupun penilaian memerlukan alat yaitu tes
untuk suatu pengukuran, dan nontes bagi suatu penilaian. Hasil
dari pengukuran dan penilaian tersebut diinterpretasikan dan
ditafsirkan menjadi hasil akhir dari kegiatan evaluasi dalam
sebuah pembelajaran. Hasil akhir ini yang menentukan apakah
siswa dapat melanjutkan pelajarannya ke tahap atau tingkat
berikutnya, atau ia harus mengulang pelajaran yang sama.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, evaluasi adalah
kegiatan yang memerlukan proses yang di dalamnya terkandung
kegiatan pengukuran, penilaian, dan interpretasi atau penafsiran.
Kegiatan evaluasi dapat dilihat pada Diagram 1.

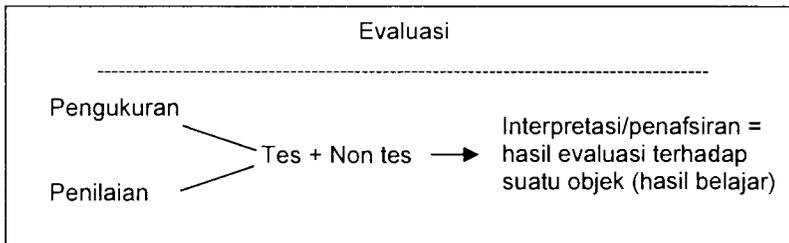


Diagram 1. Alur Kegiatan Evaluasi

Evaluasi Proses dan Evaluasi Hasil Belajar Bahasa

Evaluasi Proses dalam Pembelajaran

Sebuah pembelajaran adalah sebuah kegiatan yang memerlukan adanya kerja sama antara guru dan siswa. Proses pembelajaran dirancang oleh guru dan dilaksanakan oleh guru dan siswa. Gagalnya sebuah proses dapat dipastikan gagal mencapai tujuan. Dalam hal ini yang lebih banyak berperan adalah guru. Artinya, kegagalan dalam sebuah pembelajaran lebih berat disebabkan oleh pihak guru dibandingkan dari pihak siswa. Oleh karena itu, evaluasi proses merupakan kegiatan yang tidak boleh diabaikan, seperti diungkapkan Sudjana (1990) bahwa:

“Evaluasi terhadap proses belajar dan mengajar sering diabaikan, setidaknya-tidaknya kurang mendapat perhatian dibandingkan dengan evaluasi hasil belajar. Pendidikan tidak berorientasi kepada hasil semata-mata, tetapi juga kepada proses. Oleh sebab itu evaluasi terhadap hasil dan proses belajar harus dilaksanakan secara seimbang dan, kalau dapat, dilaksanakan secara simultan. Evaluasi yang dilaksanakan tanpa menilai proses cenderung melihat faktor siswa sebagai kambing hitam kegagalan pendidikan. Padahal tidak mustahil kegagalan yang dialami siswa disebabkan oleh lemahnya proses belajar-mengajar di mana guru merupakan penanggung jawab.”

Evaluasi proses dalam pembelajaran menyangkut kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran meliputi kegiatan menentukan kompetensi yang akan diberikan kepada siswa, menentukan pendekatan, metode dan teknik yang akan digunakan, pemilihan dan penentuan media, serta evaluasi hasil belajar. Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi perencanaan atau rancangan pembelajaran yang telah disusun.

Kegiatan evaluasi proses dalam pembelajaran bahasa tidak berbeda dengan evaluasi proses dalam pembelajaran yang

lain, yaitu mengevaluasi kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan pembelajaran yang direlevansikan dengan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam perencanaan/rancangan pembelajaran.

Beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam pelaksanaan evaluasi proses pembelajaran adalah sebagai berikut.

1. Konsistensi kegiatan pembelajaran dengan kurikulum.
Keberhasilan proses pembelajaran dilihat dari sejauh mana acuan yang terdapat dalam kurikulum dilaksanakan secara nyata dalam hal menanamkan kompetensi, materi, kegiatan penyampaian, alat atau media serta penggunaannya dalam rangka menunjang pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan.
2. Keterlaksanaan program.
Dalam hal ini, evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan program atau rencana pembelajaran yang telah disusun oleh guru. Adakah hambatan atau kesulitan dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut. Aspek keterlaksanaan program meliputi pengelolaan kelas, pengelolaan waktu, fungsi guru sebagai motivator dan vasilitator, serta pelaksanaan rencana evaluasi hasil belajar.
3. Keterlaksanaan oleh siswa.
Pelaksanaan evaluasi terhadap keterlaksanaan pembelajaran oleh siswa menilai sejauh mana siswa melakukan kegiatan belajar sesuai dengan program yang telah ditentukan tanpa mengalami hambatan dan kesulitan yang berarti yang meliputi pemahaman siswa terhadap petunjuk belajar yang ditentukan guru, melaksanakan kegiatan dan tugas-tugas belajar, serta memanfaatkan sumber belajar yang disediakan.
4. Motivasi belajar siswa.
Keberhasilan proses pembelajaran dapat dilihat melalui motivasi yang ditunjukkan oleh para siswa pada saat pelaksanaan pembelajaran. Hal ini dapat dilihat pada minat dan perhatian siswa terhadap pelajaran, semangat dan tanggung jawab siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas, rasa senang dan puas atas hasil belajar yang diperoleh.

5. Keaktifan siswa dalam pembelajaran.

Keaktifan siswa dalam pembelajaran mejadi indikator evaluasi dalam proses pembelaran. Hal-hal yang dapat dilihat pada aspek ini meliputi peran serta siswa dalam memecahkan masalah, berdiskusi, bertanya jawab antar siswa dengan siswa atau siswa dengan guru, menggunakan kesempatan untuk menerapkan apa yang diperolehnya atau dimilikinya dalam menyelesaikan tugas atau masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran.

6. Kemampuan mengajar guru.

Kemampuan guru menerapkan sifat professional dengan cara mengaplikasikan prinsip-prinsip dasar mengajar yaitu kemampuan membuka dan menutup pelajaran, melemparkan pertanyaan, mengadakan variasi, dan memfasilitasi.

Komponen evaluasi proses pembelajaran di atas dapat dinilai dengan menggunakan alat penilaian berupa teknik non tes. Sumber data dapat diperoleh dari tiga kelompok, yakni dari tenaga kependidikan yaitu guru, kepala sekolah, atau pengawas, siswa, dan orang tua siswa.

Guru secara jujur harus dapat menilai aspek pembelajaran yang dirancangnya berdasarkan kurikulum seperti ketercapaian tujuan atau kompetensi yang diharapkan, ketepatan penggunaan metode dan teknik, ketepatan pemilihan media dan sumber pembelajaran, serta relevansi evaluasi aspek pembelajaran yang lain.

Kepala sekolah dapat memberi masukan terhadap apa yang telah dilakukan guru dan segala apa yang ditetapkan guru di dalam pembelajaran. Segala masukan yang diberikan oleh kepala sekolah berkaitan dengan hasil belajar yang diperoleh siswa.

Pengawas sekolah dapat memberikan masukan atas perencanaan sebagai bukti fisik persiapan mengajar guru yang dikorelasikan dengan hasil belajar siswa. Alangkah baiknya jika sesekali seorang pengawas berperan sebagai pengamat sebuah pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa siap seorang guru melaksanakan pembelajaran dan seberapa tinggi tingkat keprofessionalan yang dimiliki seorang guru.

Siswa sebagai subjek didik memiliki hak untuk menilai proses pembelajaran yang merupakan suatu kegiaiatn yang telah dialaminya. Dalam hal ini siswa dapat memberi masukan

berkenaan dengan cara dan sikap guru ketika mengajar; kesulitan yang dihadapi siswa dalam belajar; pandangan siswa terhadap bahan, sumber, dan alat atau perlengkapan yang digunakan dalam pembelajaran, dan lain-lain.

Orang tua, secara tidak langsung turut berperan serta dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itu, orang tua dapat memberi informasi tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan proses dan hasil belajar siswa. Orang tua juga dapat memberi masukan dan bantuan berkenaan dengan media dan sumber belajar yang sangat menunjang kelancaran proses pembelajaran yang berdampak pada pencapaian tujuan pembelajaran.

Semua informasi tentang penilaian atau evaluasi proses pembelajaran ini dapat diperoleh dengan alat penilaian berikut ini.

1. Kuesioner yakni pertanyaan secara tertulis.
2. Pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang akan dilakukan secara lisan.
3. Format observasi atau pengamatan yang digunakan untuk melihat langsung peristiwa, kejadian, dan perilaku guru atau siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
4. Skala, baik skala penilaian maupun skala sikap yang ditujukan kepada guru ataupun siswa berkenaan dengan proses pembelajaran.
5. Studi kasus, yakni mempelajari secara mendalam perilaku dan perkembangan siswa tertentu yang mengalami kesulitan belajar, kesulitan menyesuaikan diri, dan lain-lain.
6. Sosiometri, yakni alat yang digunakan untuk memperoleh data mengenai hubungan sosial para siswa di dalam kelas.

Evaluasi Hasil Belajar Bahasa

Belajar bahasa pada hakikatnya adalah belajar berkomunikasi atau belajar menggunakan bahasa dalam kegiatan komunikasi. Pengertian tersebut menyiratkan bahwa, pembelajaran bahasa ditujukan untuk menerampilkkan siswa berkomunikasi baik lisan maupun tulis.

Kemampuan berbahasa lisan meliputi kemampuan mendengarkan (menyimak) dan berbicara, kemampuan berbahasa tulis meliputi kemampuan membaca dan menulis.

Berdasarkan hal tersebut maka proses pembelajaran dilaksanakan dengan cara melatih siswa menggunakan bahasa baik lisan maupun tulis.

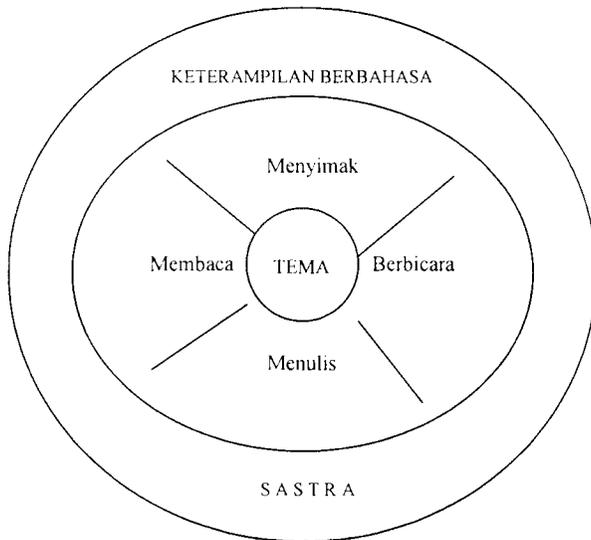


Diagram 2. Keterpaduan antarketerampilan berbahasa dan Sastra

Sekalipun kemampuan berbahasa meliputi empat keterampilan yang memiliki karakteristik yang berbeda namun pada pelaksanaannya keempat keterampilan berbahasa ini saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Setidaknya seorang pembicara memerlukan adanya penyimak demikian sebaliknya dan seorang penulis memerlukan adanya pembaca demikian juga sebaliknya.

Hasil belajar tidak akan lepas dari proses belajar. Oleh sebab itu, sulit sekali berbicara tentang hasil belajar tanpa menyinggung proses belajarnya. Pada proses pembelajaran bahasa, keempat keterampilan berbahasa ini (menyimak, berbicara, membaca, dan menulis) dapat dilaksanakan secara terpadu. Artinya dengan menggunakan satu tema dapat dilatih

empat keterampilan berbahasa kepada para siswa. Hal ini tertera dalam kurikulum (2004, hal. 11) yang berbunyi:

“Kompetensi dasar mencakup aspek kemampuan berbahasa dan bersastra. Masing-masing ini dirinci lagi ke dalam empat subaspek, yaitu keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Aspek dan subaspek tersebut disajikan secara seimbang dan dilaksanakan secara terpadu.”

Keterpaduan ini tampak pada Diagram 2.

Dengan proses pembelajaran bahasa yang dilaksanakan secara terpadu, guru tidak memiliki alasan untuk mengatakan tidak cukup waktu untuk melatih siswa terampil berbahasa.

Pengukuran Hasil Belajar Bahasa

Telah dijelaskan bahwa pengukuran merupakan salah satu kegiatan yang terdapat dalam evaluasi. Untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat kemampuan berbahasa siswa dapat dilakukan pengukuran dengan menggunakan alat ukur berupa tes dan nontes. Karena proses pembelajaran bahasa berlangsung secara terpadu, maka evaluasi hasil belajar sebaiknya dilaksanakan secara terpadu, yaitu antar-dua keterampilan berbahasa, tiga, atau kalau mungkin antar-empat keterampilan berbahasa.

Sebagai contoh, dapat dilihat standar kompetensi yang terdapat pada komponen kompetensi dasar, indikator, dan materi pokok dalam kurikulum mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia untuk SMP. Pada aspek mendengarkan tertulis standar kompetensi: Mampu mendengarkan dan memahami ragam wacana lisan melalui kegiatan menanggapi isi berita dan menyampaikan isi wawancara (Kurikulum 2004). Pada kata mendengarkan dapat ditangkap dengan jelas bahwa keterampilan berbahasa yang diharapkan dimiliki oleh siswa adalah kemampuan mendengarkan atau menyimak, namun pada kata menanggapi dan menyampaikan, tersirat adanya kemampuan berbahasa lisan atau tulis yang harus dimiliki siswa yaitu, berbicara atau menulis. Dengan demikian, dari satu standar

kompetensi ini dapat dipadukan minimal dua keterampilan berbahasa (mendengarkan dan berbicara atau mendengarkan dengan menulis) dan maksimal tiga keterampilan berbahasa (mendengarkan, berbicara, dan menulis).

Keterpaduan pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi hasil belajar akan lebih jelas tampak jika kita mencermati indikator yang tertuang dalam kurikulum untuk aspek tersebut, yaitu:

1. Mampu menuliskan pokok berita yang didengarkan.
 2. Mampu menuliskan isi berita ke dalam beberapa kalimat.
 3. Mampu memberikan tanggapan mengenai isi berita (*)
- Tanda (*) menyatakan kebebasan bagi guru untuk menugasi siswa dengan kemampuan berbicara atau menulis.

Melalui tiga indikator di atas, guru dapat merancang pembelajaran bahasa dengan fokus mendengarkan, menyiapkan alat bantu pembelajaran, menentukan pendekatan, metode/teknik pembelajaran, menetapkan langkah pembelajaran, dan merancang evaluasi.

Rancangan evaluasi dalam pembelajaran ini dapat berupa tes tertulis atau tes lisan, atau menggunakan keduanya yakni tes tertulis dan tes lisan. Tes tertulis yang tepat untuk memperoleh kompetensi di atas adalah berupa tes uraian dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan berita yang diperdengarkan. Jika menggunakan tes lisan, tugas-tugas atau soal-soal yang diberikan sama seperti pada tes tertulis hanya diajukan secara lisan.

Pemberian skor terhadap hasil belajar siswa dapat menggunakan format penskoran/penilaian. Berikut ini contoh format-format tersebut, yaitu:

1. Format Penilaian Kemampuan Mendengarkan
2. Format Penilaian Kemampuan Menulis
3. Format Penilaian Kemampuan Berbicara

Format Penilaian Kemampuan Mendengarkan

Kelas : VII
 Sekolah : SMPN VII
 Materi : Teks Berita
 Tanggal : 27 – 08 – 2006

Nama	Ranah Kognitif			Jml	Ranah Afektif			Jml	Total	Ket.
	Kemampuan Menangkap Pokok Berita	kemampuan Menuliskan Isi Berita dalam Kalimat	Kemampuan memberi Tanggapan terhadap Isi Berita		Motivasi/Perhatian	Disiplin	Percaya Diri			
Andin	8	8	9	25	7	8	8	23	48	
Bandi										
Caca										

Kolom keterangan diisi dengan hal-hal yang menjadi catatan bagi guru yang berkenaan dengan perilaku siswa dalam mengerjakan tugas.

Kegiatan Interpretasi

Jika guru menetapkan skor untuk setiap aspek penilaian adalah 10, maka skor maksimal yang akan diperoleh siswa pada ranah kognitif dalam kemampuan menulis tersebut adalah 30. Dari skor maksimal tersebut, guru menyusun kriteria. Misal, kriteria yang ditetapkan guru adalah:

Kriteria	Angka	Huruf
Sangat Baik	25 - 30	A
Baik	20 - 24,99	B
Cukup	15 - 19,99	C
Kurang	10 – 14,99	D

Dengan kriteria tersebut, guru dapat menginterpretasikan atau menafsirkan bahwa hasil belajar bahasa Andini pada aspek

kemampuan mendengarkan pada ranah kognitif, sangat baik. Sedangkan pada ranah afektif pada kesempatan ini mendapat skor 23 yaitu menduduki kategori baik.

Jika guru ingin menggabungkan nilai kedua ranah tersebut, harus dibuat rumusan penilaian, yakni:

$$\frac{Sk + Sa}{2} = Skm$$

Sk = skor kognitif

Sa = skor afektif

Skm = skor kemampuan mendengarkan

Dengan rumus tersebut diketahui bahwa kemampuan menyimak Andin secara menyeluruh adalah:

$$\frac{25 + 23}{2} = 24, \text{ berarti baik.}$$

Format Penilaian Kemampuan Menulis

Kelas : VII
Sekolah : SMPN VII
Materi : Teks Berita
Tanggal : 27 – 08 – 2006

Nama	Ranah Kognitif			Jml	Ranah Afektif			Jml	Total	Ket.
	Kemampuan Memilih Kata/Diksi	Kemampuan Menyusun Struktur Kalimat	Kemampuan Menyusun Paragraf		Kebersihan	Keindahan	Percaya Diri			
Andin	7	6	6	19	8	7	7	22	41	
Bandi										
Caca										

Kolom keterangan diisi dengan hal-hal yang menjadi catatan bagi guru yang berkenaan dengan perilaku siswa dalam mengerjakan tugas.

Kegiatan interpretasi

Dengan menggunakan kriteria yang sama (kesamaan jumlah aspek yang dinilai) dengan kriteria pada kemampuan mendengarkan, maka dapat ditafsirkan bahwa kemampuan menulis Andini berada pada kategori cukup pada ranah kognitif, dan baik pada ranah afektif. Jika guru ingin menggabungkan nilai kedua ranah tersebut, dapat menggunakan rumus yang sama, yakni:

$$\frac{Sk + Sa}{2} = Skm$$

Sk = skor kognitif

Sa = skor afektif

Skm = skor kemampuan menulis

Dengan rumus tersebut diketahui bahwa kemampuan menyimak Andin secara menyeluruh adalah:

$$\frac{19 + 21}{2} = 20,5, \text{ berarti baik.}$$

Format Penilaian Kemampuan Berbicara

Kelas : VII
 Sekolah : SMPN VII
 Materi : Teks Berita
 Tanggal : 27 – 08 - 2006

Nama	Ranah Kognitif			Jml	Ranah Afektif			Jml	Total	Ket.
	Kemampuan Menggunakan Kata/Diksi	Kemampuan Menyusun Struktur Kalimat	Kemampuan Menerapkan Intonasi		Kejelasan lafal	Keberanian	Sikap/ Tata Krama			
Andin	7	7	7	21	8	8	7	23	44	
Bandi										
Caca										

Kolom keterangan diisi dengan hal-hal yang menjadi catatan bagi guru yang berkenaan dengan perilaku siswa dalam mengerjakan tugas-tugas. Kegiatan interpretasi.

Dengan menggunakan kriteria yang sama (kesamaan jumlah aspek yang dinilai) dengan kriteria pada kemampuan mendengarkan, maka dapat ditafsirkan bahwa kemampuan menulis Andini berada pada kategori baik pada ranah kognitif, demikian pula pada ranah afektif.

Dengan menggunakan rumus yang sama pula, guru dapat mengetahui nilai kemampuan berbicara Andin secara menyeluruh (kognitif dan afektif), yakni:

$$\frac{Sk + Sa}{2} = Skb \text{ (skor kemampuan berbicara)}$$

Sehingga diperoleh hasil evaluasi kemampuan berbicara Andin adalah: $\frac{21 + 23}{2} = 22$ yang berarti berada pada kategori baik.

Format penilaian seperti contoh dapat dikembangkan oleh guru-guru di sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan kelas/sekolah. Demikian pula halnya dengan kemampuan bersastra. Aspek-aspek yang dinilai disesuaikan dengan kriteria-kriteria yang ada dalam materi kesastraan.

Penilaian terhadap aspek psikomotor dapat dengan mudah dilakukan dalam kegiatan bersastra seperti pembacaan puisi, bercerita atau mendongeng, dan bermain drama. Penilaian diberikan terhadap kemampuan siswa menggunakan organ mulut, ekspresi wajah, dan gerak tubuh ketika berbicara atau bercerita, membacakan puisi, dan memerankan tokoh drama.

Asesmen Portofolio

Asesmen portofolio merupakan salah satu strategi yang digunakan dalam kegiatan evaluasi. Zainul & Mulyana (2004) mendeskripsikan asesmen portofolio sebagai suatu proses dan tempat. Tempat yang dimaksud di sini adalah koleksi materi fisik atau data yang disimpan dalam suatu folder atau boks. Berkenaan dengan asesmen Shanklin dalam Rhoders yang dikutip oleh Yunus (2002) mengungkapkan bahwa asesmen merupakan proses pengumpulan, pencatatan atau perekaman, dan penganalisisan proses dan hasil perkembangan belajar siswa yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar.

Sehubungan dengan evaluasi dalam pembelajaran bahasa, asesmen portofolio digunakan dalam pengumpulan data perkembangan kemampuan berbahasa siswa dari waktu ke waktu. Data diperoleh melalui proses pembelajaran dan evaluasi hasil belajar. Oleh karena itu, asesmen portofolio lazimnya berisi data berikut.

1. Data proses belajar siswa.
2. Data hasil belajar siswa.
3. Refleksi atau evaluasi diri siswa, yang dilakukan oleh siswa sendiri.
4. Hasil observasi dan penilaian guru terhadap diri siswa.
5. Komentar orang tua siswa.
6. Informasi lain yang dikumpulkan melalui pelbagai strategi asesmen.

Penerapan asesmen portofolio dalam pembelajaran bahasa ditandai dengan hal berikut ini.

1. Didasari atas pengalaman berbahasa sehari-hari secara otentik (nyata dan wajar).
2. Dilakukan selaras dengan hakikat belajar bahasa sebagai suatu proses yang berkembang secara bertahap dan terus menerus.
3. Diarahkan pada penilaian proses dan hasil yang dilakukan secara formal dan informal.
4. Menginformasikan kegiatan pembelajaran atau apa yang terjadi di dalam kelas sehari-hari.
5. Memperhatikan keunikan setiap individu. Artinya, penilaian ini lebih menekankan pada perbandingan kemajuan dan hasil belajar yang dicapai oleh setiap siswa pada hari ini dengan hasil belajar sebelumnya.
6. Melibatkan siswa dalam penilaian untuk mengukur kekuatan dan kelemahannya, menetapkan tujuan dan keputusan untuk kegiatan berikutnya.

Yunus (2002) mengutip pendapat Valencia tentang tiga prinsip yang harus ada dalam asesmen portofolio sebagai berikut.

1. Memandang pembelajaran dan penilaian sebagai satu kesatuan.
2. Melibatkan siswa secara aktif di dalam kegiatan belajar dan evaluasi.

3. Melihat perkembangan siswa sebagai suatu proses yang unik, utuh, dan terus menerus.

Berdasarkan pengertian dan prinsip-prinsip penerapan asesmen portofolio, maka evaluasi dalam pembelajaran bahasa dengan menerapkan asesmen portofolio memerlukan buku atau wadah berupa:

1. format-format observasi selama proses pembelajaran bahasa berlangsung yang berkenaan dengan perubahan perilaku siswa dalam belajar bahasa, kemajuan yang diperoleh siswa yang berupa hasil belajar bahasa, aspek yang mempengaruhi pengalaman dan hasil belajar siswa;
2. kumpulan hasil belajar siswa yang meliputi aspek keterampilan berbahasa dan bersastra;
3. perkembangan atau kemajuan bidang kognitif, afektif, dan psikomotor siswa.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui ketercapaian sebuah tujuan. Hasil evaluasi pembelajaran tidak hanya bermanfaat dalam menentukan hasil belajar siswa, tetapi juga bermanfaat dalam menentukan keberhasilan sebuah program pengajaran dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, terdapat dua kegiatan besar dalam evaluasi pembelajaran yaitu mengevaluasi proses dan hasil belajar siswa, dan mengevaluasi program pengajaran yang disusun oleh guru sendiri.

Sebagaimana sebuah kegiatan, evaluasi harus dilakukan dengan menggunakan sebuah perencanaan yang cermat dan relevan dengan tujuan yang diharapkan. Evaluasi pembelajaran bahasa dilakukan selama dalam proses dan pada akhir sebuah program pembelajaran. Alat yang digunakan dalam pengumpulan data dalam evaluasi pembelajaran bahasa berupa tes dan non tes. Aspek yang diukur dalam evaluasi pembelajaran bahasa tidak hanya menekankan pada aspek kognitif siswa, tetapi juga meliputi aspek afektif dan psikomotor.

Asesmen portofolio sebagai salah satu teknik yang digunakan dalam evaluasi pembelajaran bahasa sangat membantu guru dalam pengumpulan data tentang kemampuan berbahasa siswa. Alat ini digunakan saat proses pembelajaran berlangsung dan sebagai inventaris/koleksi hasil belajar siswa yang sekaligus sebagai data kemajuan belajar siswa.

Saran

Untuk Guru

Untuk memperoleh hasil sebuah pembelajaran, guru perlu menyusun perencanaan yang matang untuk setiap kegiatan. Pertama, perencanaan pembelajaran dan kedua adalah perencanaan evaluasi itu sendiri. Oleh sebab itu, ada dua hal penting yang harus dilakukan guru sebelum mengajar yaitu: menyusun rencana atau rancangan pembelajaran; dan menyusun atau merancang evaluasi pembelajaran.

Evaluasi pembelajaran memiliki dua tujuan, yaitu untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan program pembelajaran, dan untuk mengetahui hasil belajar siswa. Untuk dapat mengumpulkan data tentang keberhasilan sebuah program pembelajaran secara akurat, diperlukan alat ukur yang benar-benar dapat digunakan dalam evaluasi pembelajaran. Oleh sebab itu guru harus menyiapkan sejumlah instrumen untuk menilai aktivitas siswa dalam proses pembelajaran dan hasil belajar siswa pada akhir pembelajaran, serta alat untuk mengukur keberhasilan guru dalam program pembelajaran.

Untuk mengukur keberhasilan siswa dalam belajar bahasa guru harus menggunakan teknik tes dan nontes, oleh sebab itu guru juga harus dapat menyusun instrumen yang berupa: soal-soal berkaitan dengan keterampilan berbahasa yang meliputi keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis serta bersastra, berbagai format observasi untuk mengikuti perkembangan belajar siswa selama proses pembelajaran, dan menyiapkan alat untuk mengumpulkan data perkembangan hasil belajar bahasa siswa.

Perencanaan program pembelajaran yang disusun oleh guru juga perlu dievaluasi sebab dapat terjadi kekurangberhasilan siswa dalam belajar bahasa disebabkan oleh perencanaan

pengajaran yang kurang baik. Hasil evaluasi terhadap perencanaan program pengajaran bahasa digunakan untuk memperbaiki perencanaan pengajaran bahasa tersebut.

Untuk para Pengelola Bidang Pendidikan

Tugas guru bukan tugas yang ringan, oleh sebab itu kepala sekolah mempunyai tanggung jawab menyediakan fasilitas yang diperlukan guru dalam melaksanakan tugasnya. Sarana dan prasarana pembelajaran merupakan hal mutlak diperlukan dalam sebuah pembelajaran jika ingin memperoleh hasil yang maksimal. Betapapun keras usaha guru dalam menyiapkan dan melaksanakan kewajibannya dalam mengajar, tanpa ada bantuan yang sungguh-sungguh dari kepala sekolah dan pihak-pihak yang berwenang dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, usaha guru hanya akan menjadi sia-sia.

Pengembangan SDM merupakan salah satu hal penting yang harus selalu dilakukan. Perkembangan ilmu dan teknologi tidak dapat diabaikan jika menginginkan kualitas yang baik dalam bidang pendidikan. Segala hal yang menyangkut perkembangan dalam bidang pendidikan harus dapat diikuti dan dimiliki oleh para guru, jika tidak, tidak akan pernah terjadi peningkatan kualitas pembelajaran yang berdampak pada kemajuan bangsa dan negara.

● ————— **Daftar Pustaka**

- Kurikulum. (2004).
- Nurgiantoro, B. (1988). *Penilaian dalam pengajaran bahasa dan sastra*. Yogyakarta: BPFE.
- Sudjana, N. (1990). *Penilaian hasil proses belajar mengajar*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Tuckman, B.W. (1988). *Testing for teachers*. USA: Florida State University.
- Yunus, M. (2002). Asesmen alternatif dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Dalam *Sistem Pembelajaran Bahasa Indonesia*. Hal. 8.9 & 8.13 (modul). Jakarta: Universitas Terbuka.
- Zainul, A. & Mulyana, A. (2004). Asesmen Portofolio di Sekolah Dasar dalam *Tes dan Asesmen di SD*. Hal. 6.2 (Modul). Jakarta: Universitas Terbuka.

Kajian Standar Pelayanan Minimal Sarana dan Prasarana di Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Agnes P. Sudarmo

Tita Rovita

Implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan di tingkat sekolah antara lain dimaksudkan untuk mewujudkan sekolah yang memiliki kompetensi organisasi unggul dan kinerja yang baik secara seimbang. Lingkungan internal meliputi sejumlah variabel yang ada di dalam organisasi yang membentuk suasana di mana pekerjaan dilakukan. Hunger dan Wheelen (1996) mengidentifikasi variabel lingkungan internal meliputi struktur, budaya, dan sumber daya organisasi. Unsur sarana dan prasarana merupakan bagian sumber daya organisasi yang bersifat substantif dan mendukung keberhasilan proses penyelenggaraan pendidikan.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah dengan maksud agar sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan (Koster, 2005). MBS merupakan upaya untuk memberdayakan sekolah, di mana pengelola sekolah diberi kewenangan penuh untuk mengelola sekolahnya masing-masing dengan sebaik mungkin di mana segala sumber daya yang ada di sekolah digunakan seoptimal mungkin untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah.

Masalah yang dihadapi oleh dunia pendidikan di Indonesia adalah merosotnya kualitas pendidikan di Indonesia (Sagala, 2004). Untuk meningkatkan kualitas pendidikan tersebut,

maka sekolah sebagai unsur terpenting dalam mencerdaskan bangsa harus diberdayakan. Pemberdayaan sekolah dapat meningkatkan kinerja sekolah yang pada muaranya adalah terangkatnya kualitas pendidikan dengan memberikan peran dan ruang gerak kepada masyarakat dan kesempatan yang sama dalam mengelola pendidikan (Sagala, 2004).

Salah satu unsur dalam peningkatan kualitas sekolah adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Dalam kaitan dengan penjaminan kualitas penyediaan sarana dan prasarana dengan konteks MBS termasuk dalam spesifikasi standar material/ bahan yang digunakan (Sagala, 2004). Hal ini sejalan dengan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan diantaranya adalah peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan termasuk standar bangunan dan perabot sekolah (Depdiknas, 2003). Jika sekolah diasumsikan sebagai suatu lembaga pendidikan yang mirip dengan suatu industri yang menghasilkan suatu produk maka produk yang dihasilkan merupakan produk pendidikan berupa lulusan (Depdiknas, 2005). Jika hal ini dikaitkan dengan penjaminan kualitas penyediaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah yang memenuhi spesifikasi standar yang telah ditetapkan akan mendukung/memfasilitasi proses pembelajaran yang ada di sekolah.

Sagala (2004) menyatakan sekolah sebagai institusi pendidikan dapat mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada secara efektif dalam mencapai tujuan dan efisien dalam penggunaan sumber daya tersebut. Dalam konteks MBS, pengelola sekolah dengan kewenangan/otonomi yang ada akan berusaha agar sekolah yang dikelolanya mempunyai mutu yang unggul. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki supaya lebih baik dan lengkap. Jika sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah mempunyai mutu/kualitas yang baik dan dalam jumlah yang lengkap, diharapkan hal tersebut dapat mendukung proses pembelajaran siswa sehingga hasil belajar siswa menjadi optimal yang pada akhirnya diharapkan mutu belajar siswa meningkat.

Uraian dalam artikel ini akan menfokuskan pada masalah tentang sarana dan prasarana pendidikan yang harus tersedia di

institusi jenjang pendidikan dasar, khususnya sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Topik bahasan akan dimulai dari pengertian sarana dan prasarana, klasifikasi sarana dan prasarana, undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur hal tentang masalah sarana dan prasarana, standarisasi sarana dan prasarana SMP, masalah-masalah yang ada pada ketersediaan sarana dan prasarana serta manajemen perlengkapan sekolah di Indonesia.

Acuan ini diperlukan dalam pengadaan bangunan dan perabot sekolah yang meliputi penentuan lokasi, persyaratan bangunan, tipe sekolah, persyaratan dan dasar penentuan perabot sekolah (Depdiknas, 2003). Hal ini bertujuan agar dalam pembangunan suatu sekolah, bangunan sekolah dapat tertata dengan baik, dan diisi dengan perabot yang dapat menunjang proses pembelajaran siswa (Depdiknas).

Pembahasan

Pengertian Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan prasarana memiliki beragam makna, Soerjani (1987) menyatakan bahwa sarana sekolah meliputi semua peralatan serta perlengkapan yang langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah, seperti gedung sekolah, ruangan, meja, kursi, dan alat peraga. Sedangkan prasarana merupakan semua komponen yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses belajar mengajar atau pendidikan di sekolah, seperti jalan menuju sekolah, halaman sekolah, dan tata tertib sekolah. Arti kata prasarana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dsb).

Sementara itu, ditinjau dari fungsinya terhadap Proses Belajar Mengajar (PBM), Gunawan (1996) menyatakan bahwa prasarana pendidikan berfungsi tidak langsung (kehadirannya tidak sangat menentukan). Termasuk dalam prasarana pendidikan adalah tanah, halaman, pagar, tanaman, gedung/bangunan sekolah, jaringan jalan, air, listrik, telepon, serta perabot. Sedangkan sarana pendidikan berfungsi langsung

(kehadirannya sangat menentukan) terhadap PBM, seperti alat pengajaran, alat peraga, alat praktek, dan media pendidikan.

Bafadal (2004) berpendapat bahwa sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sedangkan prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah.

Sarana dan prasarana perlu dikelola agar dapat bermanfaat bagi sekolah. Gunawan (1996) menyatakan bahwa administrasi sarana dan prasarana pendidikan merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap benda-benda pendidikan, agar senantiasa siap-pakai dalam PBM sehingga PBM semakin efektif dan efisien guna membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Bafadal menyatakan secara sederhana, manajemen perlengkapan dapat didefinisikan sebagai proses kerja sama pendayagunaan semua perlengkapan pendidikan secara efektif dan efisien. Pengertian dari sarana dan prasarana dapat dikelompokkan menjadi dua bagian (Bafadal) yaitu:

1. sarana pendidikan meliputi semua peralatan, bahan dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan; dan
2. prasarana pendidikan meliputi semua hal yang secara tidak langsung membantu kelancaran pelaksanaan pendidikan.

Nawawi (1983) berpendapat

“..., Administrasi Perbekalan dapat diartikan sebagai usaha pelayanan dalam bidang material dan fasilitas kerja lainnya bagi personal dalam satuan kerja di lingkungan suatu organisasi guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja” (hal.62).

Nawawi menyatakan bahwa sarana pendidikan dapat diklasifikasikan/ditinjau menjadi beberapa hal antara lain: habis tidaknya dipakai; dan bergerak atau tidaknya. Ditinjau dari aspek habis tidaknya dipakai maka hal tersebut dapat dibagi lagi

menjadi sarana pendidikan yang habis dipakai dan sarana pendidikan yang tahan lama.

Dari pengertian arti kata sarana dan prasarana dan memperhatikan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana mutlak diperlukan di suatu institusi pendidikan yaitu sekolah. Hal ini dilakukan dalam mendukung terciptanya proses belajar dan mengajar secara efektif dan efisien.

Landasan Hukum

Undang-undang (UU) dan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur tentang sarana dan prasarana pendidikan di antaranya UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menyatakan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan (Dikmenum, 2005 :1).

Merujuk pada UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 45 bahwa:

1. Setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
2. Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur lebih lanjut Peraturan Pemerintah.

PP Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab VIII pasal 42 menyebutkan:

1. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
2. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan

pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Berbagai kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan sehingga mendorong adanya keputusan layanan minimal yang harus dilakukan disemua jenjang pendidikan. Hal ini tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (SPM). SPM Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang berhubungan dengan sarana dan prasarana pendidikan adalah butir c yaitu: 90 persen sekolah memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan secara nasional.

Implikasi dari UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) tahun 2003 di dalam butir tentang pemerataan pendidikan, di mana sistem pendidikan nasional harus dapat menjamin program perluasan dan pemerataan pendidikan antara lain penyusunan standarisasi sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan pengadaan sarana dan prasarana sekolah, peningkatan pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana baik yang sudah ada di sekolah, maupun di luar sekolah.

Kajian Manajemen Sarana dan Prasarana di Sekolah Menengah Pertama

Konsep Dasar Perencanaan Perancangan Bangunan dan Perlengkapan Sekolah

Pendekatan yang dilakukan dalam perencanaan dan perancangan gedung SMP memakai pendekatan terhadap kurikulum yang berlaku (Depdiknas, 2005; Depdikbud, 1997). Pendekatan melalui kurikulum yang digunakan dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Berdasarkan kurikulum yang berlaku dapat diketahui

mengenai jenis kegiatan, jumlah orang yang terlibat dan jumlah ruang yang dapat menampung kegiatan tersebut.

1. Sarana Pendidikan.

Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam penentuan sarana pendidikan di SMP meliputi (Depdiknas, 2003):

- a. Peta Pendidikan diperlukan untuk mengetahui kebutuhan sekolah dalam suatu wilayah untuk menentukan lokasi sekolah yang dapat dicapai oleh siswa berdasarkan kepadatan penduduk dan jumlah usia siswa SMP dengan memperhatikan proyeksi arus siswa.
- b. Kriteria lokasi ditentukan berdasarkan kesesuaian dengan peta pendidikan yang berisikan populasi siswa dengan memperhatikan kesesuaian peta pendidikan dan Ketersediaan Dokumen Administrasi.
- c. Lahan Sekolah dengan memperhatikan rencana peruntukan lahan dan kondisi fisik lahan.

Menurut kriteria yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Penyediaan tanah/lahan harus memenuhi ketentuan, antara lain:

1. luas tanah sekurang-kurangnya 10.000m²;
2. permukaan tanah relatif cukup datar, batas kemiringan maksimal 30 derajat;
3. lahan relatif tidak berbukit;
4. lahan tidak berada pada daerah aliran sungai;
5. di dalam lokasi lahan tidak terdapat tebing curam yang dapat menimbulkan longsor;
6. lahan tidak merupakan daerah hulan lindung;
7. lahan tidak merupakan daerah resapan air;
8. lahan tidak merupakan daerah purbakala;
9. lahan tidak merupakan daerah rawan genangan/banjir;
10. lahan tidak berdekatan dengan daerah/lokasi/tempat pembuatan asusila;
11. lahan tidak berupa tanah bekas kuburan/sampah/limbah kimia;
12. lahan mempunyai kondisi yang memungkinkan hidupnya vegetasi untuk kebun percobaan, kenyamanan dan keindahan;
13. lahan harus sudah siap bangun;

14. kemudahan untuk mendapatkan sumber air bersih (termasuk air minum) dari PDAM atau air tanah atau air permukaan atau air hujan;
15. kemudahan drainase untuk saluran pembuangan air hujan, air kotor/limbah;
16. kemudahan penyambungan/penyediaan jaringan listrik;
17. kemungkinan penyambungan jaringan komunikasi; dan
18. lokasi harus memungkinkan dicapai dengan kendaraan roda empat atau perahu.

2. Gedung/Bangunan Sekolah (Depdiknas, 2005)

Pada saat ini bangunan fisik sekolah beraneka ragam terutama bangunan dan penataan ruangnya. Untuk itu perlu adanya standarisasi bangunan sekolah agar sekolah dapat menjalankan fungsi dan tujuan dengan baik.

Persyaratan umum

Hal-hal umum yang harus diperhatikan dalam perencanaan bangunan adalah menentukan jumlah dan besaran (dimensi) ruang kegiatan. Standarisasi (pembakuan) gedung sekolah, standarisasi jenis ruang, kondisi.

Standarisasi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama

Secara umum sarana dan prasarana pendidikan yang bermutu (Depdiknas, 2005) dari suatu sekolah terdiri dari antara lain:

1. Bangunan sekolah yang lengkap dengan ruang kantor, ruang kelas, perpustakaan laboratorium, ruang pertemuan, kamar mandi/WC dengan penataan yang tertata indah, rapi, bersih, segar, dan nyaman;
2. Perabot kantor, meubeler dengan peralatan yang lengkap dan baik.
3. Perpustakaan dengan jumlah, jenis, judul buku yang lengkap terjaga rapi, bersih, dan dilengkapi dengan ruang baca yang nyaman.
4. Laboratorium IPA, Bahasa, dan komputer, dengan fasilitas lengkap dan *modern*.

5. Taman halaman yang tertata indah, bersih dan segar, serta pagar halaman yang baik dan aman.

Tabel 1. Sarana dan prasarana minimal dalam satu unit sekolah

Jenis ruang	Ukuran	Keterangan
Ruang kelas	9 x 8 m ²	40 set meja dan kursi siswa
		1 set meja kursi guru
		2 papan tulis masing-masing ukuran 120 x 240 cm ²
Ruang fungsi kantor		Ruang kasel, ruang wakasek, ruang tamu, ruang tatausaha, ruang reproduksi, ruang guru lengkap dengan meubelair masing-masing 1 ruang\
Ruang laboratorium IPA	15 x 8 m ²	Lengkap dengan meubelair dan peralatan
Ruang perpustakaan	12 x 8 m ²	Lengkap dengan meubelair dan peralatan
Kamar mandi / WC guru	4 x 3 m ²	
Kamar mandi / WC siswa minimal 3 lubang	1,5 x 1,35 m ²	
Gudang	3 x 8 m ²	
Instalasi air bersih dan air kotor		
Instalasi listrik		
Pagar halaman		
Penataan halaman		

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) telah dibakukan oleh Direktorat Sarana Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional

(Depdiknas, 2005). Tipe-tipe gedung SMP yang telah dibakukan dapat digolongkan ke dalam 9 tipe (Depdiknas, 2005) yaitu:

1) tipe A	4) tipe B	7) tipe C
2) tipe A1	5) tipe B1	8) tipe C1
3) tipe A2	6) tipe B2	9) tipe C2

Di bawah ini disajikan secara lengkap tipe gedung SMP beserta pembakuannya mengenai: jenis ruang, fungsi ruang, jumlah ruang, luas ruang, dan luas tanah (Depdiknas, 2005). Secara garis besar proses belajar mengajar membutuhkan fasilitas fisik berupa ruang di mana jenis ruang dapat dikelompokkan ke dalam 3 bagian besar yaitu: ruang belajar, ruang kantor, dan ruang penunjang (Depdiknas, 2005). Untuk memudahkan penyajian maka data masing-masing tipe gedung disajikan dalam Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Gedung SMP Tipe A, A1, A2 berdasarkan jenis ruang, fungsi ruang, jumlah ruang, luas ruang, dan luas tanah

Gedung Jenis ruang	Tipe A		Tipe A1		Tipe A2	
	Σ	Luas (m ²)	Σ	Luas (m ²)	Σ	Luas (m ²)
R. Belajar						
R. teori / kelas	27	1.701	24	1.512	21	1.323
R. perpustakaan	1	126	1	126	1	126
R. ketrampilan	1	120	1	120	1	120
R. kesenian	1	120	1	120	1	120
R. laboratorium PA	2	240	2	240	1	120
R. Lab. Komputer TI & K	2	192	2	192	1	96
R. Lab. Bahasa	2	240	2	240	1	120
R. serbaguna	1	120	1	120	1	120
R. sanggar MGMP	1	120	1	120	1	120
Jumlah luas r. Belajar		2.979		2790		2.265

R. Kantor						
R.kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, tata usaha, tamu		187		187		187
R. Penunjang						
Gudang, reproduksi, pantry, KM/WC guru, KM/WC siswa,BK, UKS, PMR/Pramuka, OSIS, Ibadah, ganti, hall, koperasi, kantin, rumah jaga, pos jaga, selasar/tangga		1.428		1.381		1.219
Jumlah luas r. Belajar, r.kantor dan r. Penunjang		4.924		4.667		3.922
Luas tanah minimal	3 lantai	9.000	3 lantai	7.000	3 lantai	7.000
	2 lantai	12.000	2 lantai	9.000	2 lantai	9.000
	1 lantai	15.000	1 lantai	12.000	1 lantai	12.000

Sumber: Depdiknas. (2005). *Manajemen Perawatan Preventif Sarana dan Prasarana Pendidikan: Sekolah Menengah Pertama.*

Untuk gedung SMP Tipe B analisis berdasarkan ruang, fungsi, jumlah ruang, luas ruang dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Gedung SMP Tipe B, B1, B2 berdasarkan jenis ruang, fungsi ruang, jumlah ruang, luas ruang, dan luas tanah

Gedung Jenis ruang	Tipe B		Tipe B1		Tipe B2	
	Σ	Luas (m2)	Σ	Luas (m2)	Σ	Luas (m2)
R. Belajar						
R. teori / kelas	18	1.134	15	945	12	756
R. perpustakaan	1	126	1	126	1	126
R. ketrampilan	1	120	1	120	1	120
R. kesenian	1	120	1	120	1	120
R. laboratorium PA	1	120	1	120	1	120
R. Lab. Komputer TI & K	1	96	1	96	1	96
R. Lab. Bahasa	1	120	1	120	1	120

R. serbaguna	1	120	1	120	1	120
R. sanggar MGMP	1	120	-	-	-	-
Jumlah luas r. Belajar		2.076		1.767		1.578
R. Kantor						
R. kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, tata usaha, tamu		166		166		166
R. Penunjang						
Gudang, reproduksi, pantry, KM/WC guru, KM/WC siswa, BK, UKS, PMR/Pramuka, OSIS, Ibadah, ganti, hall, koperasi, kantin, rumah jaga, pos jaga, selasar/tangga		1.141		1.037		990
Jumlah luas r. Belajar, r.kantor dan r. Penunjang		3.585		3.123		2.856
Luas tanah minimal	3 lantai	7.000	3 lantai	7.000	-	-
	2 lantai	9.000	2 lantai	9.000	2 lantai	7.000
	1 lantai	12.000	1 lantai	12.000	1 lantai	9.000

Sumber: Depdiknas. (2005). *Manajemen Perawatan Preventif Sarana dan Prasarana Pendidikan: Sekolah Menengah Pertama*.

Untuk gedung SMP Tipe C dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Gedung SMP Tipe C, C1, C2 berdasarkan jenis ruang, fungsi ruang, jumlah ruang, luas ruang, dan luas tanah

Gedung	Tipe C		Tipe C1		Tipe C2	
	Σ	Luas (m ²)	Σ	Luas (m ²)	Σ	Luas (m ²)
R. Belajar						
R. teori / kelas	9	567	6	378	3	189
R. perpustakaan	1	105	1	105	1 ruang Perpustakaan, media, TI&K	63
R. ketrampilan	1	120	1 ruang ketrampilan/ kesenian	120		
R. kesenian	1	120				
R. laboratorium PA	1	120	-	-	1 ruang Serbaguna/ ketrampilan/ kesenian	120
R. Lab. Komputer TI & K	1	96	1	96		
R. Lab. Bahasa	1	120	1	120	-	-
R. serbaguna	1	120	1	120	-	-

R. sanggar MGMP	-	-	-	-	-	
Jumlah luas r. Belajar		1.368		843	372	
R. Kantor						
R.kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, tata usaha, tamu		105		75	75	
R. Penunjang						
Gudang, reproduksi, pantry, KM/WC guru, KM/WC siswa,BK, UKS, PMR/Pramuka, OSIS, Ibadah, ganti, hall, koperasi, kantin, rumah jaga, pos jaga, selasar/tangga		828		761	616	
Jumlah luas r. Belajar, r.Kantor dan r. Penunjang		2.401		1.679	1.063	
Luas tanah minimal	1 lantai	7.000	1 lantai	6.000	1 lantai	4.000

Sumber: Depdiknas (2005). *Manajemen Perawatan Preventif Sarana dan Prasarana Pendidikan: Sekolah Menengah Pertama*.

Manajemen Perlengkapan Sekolah

Manajemen perlengkapan merupakan upaya untuk mengelola sarana dan prasarana sedemikian rupa sehingga organisasi dapat melakukan tugasnya mencapai tujuan sesuai yang direncanakan.

Sarana dan prasana dalam hal ini tidak dapat dipisahkan dari konteks manajemen perlengkapan sekolah. Menurut Bafadal (2004) “..... manajemen perlengkapan sekolah dapat didefinisikan sebagai proses kerjasama pendayagunaan semua perlengkapan pendidikan secara efektif dan efisien” (hal 2).

Gunawan (1996) menyebutkan bahwa administrasi sarana dan prasarana pendidikan merupakan suatu kegiatan yang harus direncanakan secara terpadu dan menyeluruh.

Pengelolaan (manajemen) Perlengkapan merupakan proses kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengadaan, pemeliharaan, penghapusan dan pengendalian logistik atau perlengkapan. (Soebagia,1988). Beberapa fungsi manajemen yang dilakukan dalam manajemen perlengkapan sekolah adalah:

1. Prosedur Perencanaan Pengadaan Perlengkapan Sekolah

Perencanaan perlengkapan pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu proses memikirkan dan menetapkan program pengadaan fasilitas sekolah, baik yang berbentuk sarana maupun prasarana pendidikan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan tertentu (Bafadal, 2003).

Tujuan yang ingin dicapai dengan perencanaan pengadaan perlengkapan atau fasilitas sekolah tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan.

Perencanaan perlengkapan sekolah harus memenuhi prinsip-prinsi:

- a. perencanaan perlengkapan sekolah harus betul-betul merupakan proses intelektual
- b. perencanaan didasarkan pada analisis kebutuhan melalui studi komprehensif mengenai masyarakat sekolah dan kemungkinan pertumbuhannya, serta prediksi populasi sekolah
- c. perencanaan perlengkapan sekolah harus realistis, sesuai dengan kenyataan anggaran
- d. visualisasi hasil perencanaan perlengkapan sekolah harus jelas dan rinci, baik jumlah, jenis, merek dan harganya.

Jones (Bafadal, 2003) mendeskripsikan langkah perencanaan pengadaan perlengkapan pendidikan di sekolah adalah:

- a. Menganalisis kebutuhan pendidikan suatu masyarakat dan menetapkan program untuk masa yang akan datang sebagai dasar untuk mengevaluasi keberadaan fasilitas dan membuat model perencanaan perlengkapan yang akan datang
- b. Melakukan survey ke seluruh unit sekolah untuk menyusun master plan untuk jangka waktu tertentu
- c. memilih kebutuhan utama berdasarkan hasil survey
- d. Mengembangkan *educational specification* untuk setiap proyek yang terpisah-pisah dalam usulan *master plan*
- e. merancang setiap proyek yang terpisah-pisah sesuai dengan spesifikasi pendidikan yang diusulkan

f. mengembangkan atau menguatkan tawaran atau kontrak dan melaksanakan sesuai dengan gambaran kerja yang diusulkan.

g. Melengkapi perlengkapan gedung dan meletakkannya sehingga siap untuk digunakan.

Desain perlengkapan sekolah harus mengarah pada perwujudan perabot yang ideal bagi SLTP antara lain dengan memperhatikan fungsi, kesesuaian pemakai (ukuran perabot), kualitas bahan, teknik pengerjaan serta memperhatikan modul/ukuran (Depdiknas, 2002).

Pada prinsipnya perlengkapan sekolah harus mengacu kepada beberapa realitas berikut ini.

- a. *Fungsi*. Dalam konteks pendidikan, perlengkapan berperan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar dan kegiatan administrasi
- b. *Antropometris*. Perlengkapan sekolah telah memperhitungkan ukuran postur tubuh pemakai (siswa, tenaga kependidikan dan lain-lain)
- c. *Ergonomis*. Perlengkapan memperhatikan segi kesehatan dan kenyamanan pemakai
- d. *Estetis*. Perabot harus menyenangkan untuk dipakai karena bentuk dan warnanya menarik
- e. *Ekonomis*. Perlengkapan bukan hanya berkaitan dengan harga, tetapi juga merupakan transformasi wujud efisiensi dan efektivitas dalam pengadaan dan pendayagunaan

Khusus untuk faktor antropometri, ukuran meja dan kursi belajar siswa perlu mendapat perhatian karena siswa SMP sedang mengalami perkembangan tubuh yang cepat, sedangkan waktu yang paling banyak dalam proses belajar mengajar adalah duduk dan menulis.

Untuk menentukan ukuran meja dan kursi dipergunakan rumus antropometrik dari "*Architech Data Ems Neufert*" Crosby Lockwood Stafles, London 1977 yang telah dikembangkan dan disesuaikan oleh Balitbang Depdiknas dengan kebutuhan siswa Indonesia.

Untuk kajian ergonomik pada dasarnya bagaimana menciptakan kenyamanan antara pekerjaan dengan orang yang mengerjakannya, juga mempelajari hubungan antara manusia

dalam melaksanakan pekerjaan dengan peralatan atau benda yang dihadapinya.

Syarat pokok yang harus dipenuhi meja dan kursi adalah:

- a. telapak kaki harus rata dengan lantai
- b. ketiak lutut bebas dari tekanan bidang tempat duduk
- c. Bagian bawah paha tidak sepenuhnya menekan pada tempat duduk
- d. Cukup jarak antara bagian bawah/laci meja dan paha
- e. Posisi sikut kira-kira sama tinggi dengan daun meja
- f. Sandaran punggung tepat dibawah tulang belikat
- g. Cukup jarak antara sandaran dan bidang dudukan
- h. Menghindarkan sudut / tonjolan yang dapat membahayakan
- i. Stabilitas kesesuaian warna atau finishing perabot

2. Pengadaan Perlengkapan Sekolah

Pengadaan perlengkapan pendidikan pada dasarnya merupakan upaya merealisasikan rencana pengadaan perlengkapan yang telah disusun sebelumnya. Dalam kerangka peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah atau dalam kerangka manajemen berbasis sekolah, pengadaan perlengkapan sekolah harus dilakukan sendiri oleh sekolah., baik dengan menggunakan dana bantuan pemerintah. Artinya dalam kerangka MBS semua bentuk penyerahan perlengkapan pemerintah harus diubah dari bentuk pemberian dana ke dalam bentuk block grant kepada sekolah, kemudian sekolah bersama guru dan bila perlu bersama komite sekolah merencanakan dan melakukan pengadaan sendiri perlengkapan yang dibutuhkan secara efektif dan efisien.

3. Pendistribusian Perlengkapan Sekolah

Pendistribusian atau penyaluran perlengkapan sekolah merupakan kegiatan pemindahan barang dan tanggung jawab dari seorang penanggung jawab penyimpanan kepada unit-unit atau orang-orang yang membutuhkan barang itu. Dalam prosesnya ada empat hal yang harus diperhatikan yaitu: ketepatan barang yang disampaikan baik jumlah maupun jenisnya, ketepatan sarana penyampainnya, ketepatan sasaran penyampian, dan ketepatan kondisi barang yang disalurkan.

Dalam memenuhi hal tersebut paling tidak ada tiga langkah yang harus dipenuhi, yaitu penyusunan alokasi barang, pengiriman barang, penyerahan barang.

Barang yang telah diterima diinventarisasikan oleh panitia pengadaan, setelah kebenarannya diperiksa berdasarkan daftar yang ada pada surat pengantar, tidak berarti semua personil sekolah dapat menggunakannya secara bebas. Barang-barang tersebut perlu diatur lebih lanjut untuk memudahkan pengawasan dan pertanggungjawabannya.

4. Inventarisasi dan Penghapusan Perlengkapan Sekolah

Inventarisasi perlengkapan sekolah adalah kegiatan pencatatan semua perlengkapan yang ada di sekolah. Kegiatan ini merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Secara definitif, inventarisasi adalah pencatatan dan penyusunan daftar barang milik Negara secara sistematis, tertib dan teratur berdasarkan ketentuan-ketentuan atau pedoman yang berlaku. Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor Kep 225/MK/V/4/1971 barang milik Negara adalah berupa semua barang yang berasal atau dibeli dengan dana yang bersumber, baik secara keseluruhan atau sebagiannya, dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ataupun dana lainnya yang barang-barangnya di bawah penguasaan pemerintah, baik pusat, provinsi maupun daerah otonom baik yang berada di dalam maupun luar negeri.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 16 Januari 1979 Nomor 20/MPK/1979 pengurusan barang-barang di sekolah dilakukan oleh Kepala Sekolah sendiri. Namun dalam pelaksanaan sehari-hari Kepala Sekolah selaku administrator dapat menunjuk stafnya atau guru-guru untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab tersebut. Kegiatan inventarisasi perlengkapan pendidikan meliputi dua kegiatan, yaitu:

- a. kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan dan pembuatan kode barang perlengkapan, dan
- b. kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan laporan.

Selama proses inventaris kadang-kadang petugas menemukan barang-barang atau perlengkapan sekolah yang

rusak berat. Barang-barang itu tidak dapat digunakan atau diperbaiki lagi. Demikian pula, ketika melakukan inventarisasi petugas menemukan beberapa perlengkapan pendidikan yang jumlahnya berlebihan. Apabila disimpan biaya penyimpanan lebih besar daripada harga barang yang bersangkutan. Untuk itu terhadap semua barang atau perlengkapan tersebut dilakukan penghapusan.

Secara definitif penghapusan perlengkapan adalah kegiatan meniadakan barang-barang milik lembaga (bisa juga milik Negara) dari daftar inventaris dengan cara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan penghapusan perlengkapan adalah:

- a. Mencegah atau membatasi kerugian yang lebih besar sebagai akibat pengeluaran dana untuk pemeliharaan atau perbaikan perlengkapan
- b. Mencegah terjadinya pemborosan biaya pengamanan perlengkapan yang tidak berguna lagi
- c. Membebaskan lembaga dari tanggung jawab pemeliharaan dan pengamanan
- d. Meringankan beban inventarisasi

Barang-barang perlengkapan pendidikan di sekolah yang memenuhi syarat penghapusan adalah barang-barang:

- a. dalam keadaan rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi
- b. tidak sesuai dengan kebutuhan
- c. kuno, yang penggunaannya tidak sesuai lagi
- d. terkena larangan
- e. mengalami penyusutan di luar kekuasaan pengurus barang
- f. biaya pemeliharaan tidak seimbang dengan kegunaannya
- g. berlebihan dan tidak digunakan lagi
- h. dicuri
- i. diselewengkan
- j. terbakar atau musnah akibat bencana alam

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, langkah-langkah penghapusan perlengkapan pendidikan sekolah seperti di SMP adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Sekolah (biasanya menunjuk seseorang) mengelompokkan perlengkapan yang akan dihapus dan meletakkannya di tempat yang aman namun tetap di sekolah
- b. Menginventarisasi perlengkapan yang akan dihapus
- c. Kepala sekolah mengajukan usulan penghapusan barang dan pembentukan panitia penghapusan
- d. Membuat Berita Acara Pemeriksaan
- e. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, panitia mengusulkan penghapusan barang yang terdaftar di dalam Berita Acara Pemeriksaan. Usulan tersebut diteruskan ke kantor pusat di Jakarta
- f. Setelah SK penghapusan dari Jakarta Terbit bisa segera dilakukan penghapusan barang. Ada dua kemungkinan cara penghapusan yaitu dimusnahkan dan atau di lelang.

Masalah-masalah yang Berhubungan dengan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Apabila membicarakan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan sarana dan prasarana pendidikan, ada hal yang perlu dipertimbangkan yaitu menyangkut tentang:

1. Biaya. Biaya adalah hal yang paling krusial dalam hal penyediaan sarana dan prasarana sekolah. Karena hal ini berpengaruh pada seberapa besar perencanaan dan perancangan suatu unit sekolah dapat terwujud dan terlaksana. Dikaitkan dengan telah diimplementasikannya MBS pihak pengelola sekolah dapat bekerja sama dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) sekolah untuk bersama-sama membicarakan mengenai perkiraan sumber dana yang di dapat dari siswa, pemerintah, dan masyarakat. Mereka dapat bekerjasama untuk merancang sarana dan prasarana apa yang paling dibutuhkan oleh sekolah tersebut sehingga kebutuhan sekolah dapat terpenuhi sesuai kurikulum dan anggaran yang ada. Keterbatasan anggaran membuat pihak sekolah harus membuat skala prioritas dalam

hal perbaikan sarana dan prasana yang ada di sekolah. Sarana dan prasarana harus diperbaiki seperti memperbaiki meja kursi yang rusak, atap yang bocor. Keadaan ini harus dilakukan oleh pengelola sekolah karena proses pembelajaran harus tetap berjalan dengan semestinya dengan tetap menjaga mutu pendidikan.

2. Ketersediaan lahan. Indriyanto (1998) dalam Sagala (2004) menyebutkan masih ada keterbatasan sarana dan prasarana baik untuk sekolah yang berada di perkotaan maupun pedesaan. Keterbatasan ini tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga ditingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Selain kenyataan yang dihadapi di atas masih dapat terlihat secara nyata dewasa ini keanekaragaman kondisi fisik sarana dan prasarana yang ada. Sebagai contoh: jumlah ruang belajar sedikit, lokasi sekolah berada di daerah yang kurang memenuhi syarat untuk belajar (seperti bersebelahan dengan pasar, tempat pembuangan sampah), perabotan (meja, kursi nya sudah tua dan rusak). Seringkali koran maupun berita-berita tv menulis tentang sekolah-sekolah yang kondisinya memprihatinkan yaitu kondisinya nyaris ambruk ataupun kondisinya tidak layak sebagai tempat kegiatan belajar dan mengajar karena atapnya ambruk, ataupun gedungnya roboh. Pada keadaan tersebut tidak jarang seluruh lokal gedung sekolah sudah tidak dapat digunakan lagi untuk belajar. Keadaan ini bisa dijumpai di daerah perkotaan tak jauh dari ibu kota, sebagaimana bisa dijumpai juga di daerah yang jauh dari perkotaan.
3. Efisiensi. Efisiensi berhubungan dengan apakah pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan tersebut telah memberikan manfaat yang optimal kepada penggunanya. Ada kecenderungan bagi sekolah-sekolah yang telah terpenuhi sarana dan prasarannya ternyata pemanfaatannya tidak semaksimal dengan tujuan yang telah ditetapkan semula (Indriyanto, 1998 dalam Sagala, 2004). Pengelolaan sarana dan prasarana harus efisien dan optimal agar mempunyai manfaat yang tinggi bagi para penggunanya utamanya adalah siswa yang bersekolah di situ. Untuk dapat mengelola fasilitas tersebut dengan baik maka pengelola sekolah harus membuat perencanaan yang baik, dan mempunyai tujuan

- penggunaan yang jelas, dan dapat menentukan prioritas peralatan yang benar-benar digunakan (Sagala, 2004).
4. Relevansi. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus ditangani secara efektif dan efisien untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar di sekolah. Dalam penyediaan sarana dan prasarana maka faktor relevansi harus diperhatikan. Agar pada saat fasilitas tersebut hendak digunakan pada waktunya maka perlu dikelola secara baik. Pengelolaannya memerlukan anggaran yang besar sedangkan pengadaannya juga memerlukan investasi yang cukup besar sehingga sangat relevan jika pihak pengelola maupun pemerintah dan masyarakat sangat cermat untuk memperhatikan hal tersebut. Selain itu pihak pengelola perlu juga memperhatikan kebutuhan pengadaan fasilitas ini sesuai dengan perkembangan sekolah yang dipimpinnya dan dapat menentukan kebutuhan apa yang paling relevan dengan dana yang dipunyai.

Kesimpulan

Menurut Gorton (1976) seperti yang dikutip oleh Bafadal (2004) “..... *the physical environment in which we work can and does influence what we do and how we feel*” (hal.v.). Jadi dapat diartikan bahwa efektifitas dan efisiensi kerja seseorang sangat didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai dalam institusi pendidikan. Kondisi persekolahan di Indonesia saat ini masih terdapat keanekaragaman dalam hal fasilitas sarana dan prasarana pendidikan yang ada di sekolah. Melihat kondisi tersebut maka diperlukan adanya standarisasi sarana dan prasarana khususnya untuk sekolah menengah pertama. Perlu diingatkan bahwa standarisasi hendaknya merujuk pada persyaratan fungsional bukan spesifikasi karena hal ini dapat mengurangi prinsip desentralisasi pada MBS (Umaedi, 2004).

Saran

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan hal yang mutlak dilakukan oleh kita semua. Sekolah Menengah Pertama merupakan palang pintu terakhir dalam jenjang pendidikan dasar setelah seseorang menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasarnya. Seyogyanya penanganan perbaikan mutu pendidikan untuk jenjang SD dan SMP dilakukan berkesinambungan dan merupakan satu kesatuan yang utuh tidak terpecah-pecah.

Daftar Pustaka

- Depdiknas (2005). *Manajemen perawatan preventif sarana dan prasarana pendidikan: Sekolah Menengah Pertama*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama.
- Depdiknas (2003). *Pedoman bangunan dan perabot: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama.
- Depdikbud (1997). *Pembakuan bangunan: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Dikmenum (2005). Block Grant Pendahuluan.
<http://www.dikmenum.go.id/content.php?cid=4&sid=2020&mode=view&id=88>. Diambil 20 Oktober 2005.
- Bafadal, I. (2004). *Manajemen perlengkapan sekolah: Teori dan Aplikasinya Edisi ke 2*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Gunawan, A.H. (1996). *Administrasi sekolah: Administrasi Pendidikan Mikro*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Koster, W. (2005). *Restrukturisasi penyelenggaraan pendidikan: Studi kapasitas sekolah dalam rangka desentralisasi pendidikan*.
http://www.depdiknas.go.id/Jurnal/26/restrukturisasi_penyelenggaraan_wayan_koster.htm. Diambil 12 Oktober 2005.
- Nawawi, H. (1983). *Administrasi Pendidikan Edisi ke 2*. Jakarta: CV. Haji Mas Agung.
- Sagala, S. (2004). *Manajemen berbasis sekolah dan masyarakat: Strategi memenangkan persaingan mutu*. Jakarta: PT Nimas Multima.
- Soerjani (1989). *Pengelolaan sarana & prasarana sekolah, dan keuangan sekolah dalam Indrafachrudi, & Soetopo - Tim Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan FIP IKIP Malang*

(Eds.), *Administrasi Pendidikan*. Edisi ke 2. hal. 134–171.
Malang: Penerbit IKIP Malang.

Umaedi (2004). *Manajemen mutu berbasis sekolah/Madrasah (MMBS/M): Mengelola pendidikan dalam era masyarakat berubah*. Jakarta: Centre for Education Quality Management – Pusat Kajian Manajemen Mutu.

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam Peningkatan Mutu SDM

Wia Zuwila Nuzia

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan di hampir semua aspek kehidupan manusia dengan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia juga membawa manusia pada era persaingan global. Sebagai bangsa yang sedang membangun, Indonesia hendaknya bersaing dan berperan dalam persaingan global dengan terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), salah satunya melalui pendidikan yang memegang peranan besar dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Berbicara mengenai kualitas, SDM memiliki peran yang sangat strategis dan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan pendidikan, pemerintah harus berupaya membangun pendidikan yang berkualitas yang salah satunya melalui perbaikan sarana dan prasarana pendidikan yang dimulai dari tingkat pendidikan dasar, tingkat pendidikan menengah, hingga pada tingkat pendidikan tinggi.

Mengapa pembangunan di bidang sarana dan prasarana pendidikan sangat dianjurkan di semua jenjang pendidikan baik itu di pendidikan dasar, di pendidikan menengah, maupun di pendidikan tinggi? Pembangunan disarankan karena pembangunan SDM yang berkualitas berkaitan erat dengan masalah pengadaan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan di semua jenjang pendidikan yang memadai baik kualitas maupun kuantitas.

Istilah sarana dalam konteks pendidikan terkondisikan dalam bentuk kelas, laboratorium, perpustakaan, guru, alat-alat belajar, sementara itu prasarana dalam konteks pendidikan merupakan pendukung didalam sekolah seperti komputer, jalan, gedung, wisma, lapangan olahraga, kendaraan dinas, telephone, alat tulis kantor, bahan ajar, instalasi air, listrik, AC, mesin kantor, mesin diesel, perabotan, *sound system*, halaman, ruang sidang, ruang pertemuan, ruang penginapan (Mukhtar & Widodo, 2003).

Sebelum melangkah pada uraian berikutnya, perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah formal yang terdiri dari (a) pendidikan pra sekolah, yaitu pendidikan untuk meletakkan dasar-dasar perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta serta kemampuan dasar untuk memasuki jenjang pendidikan dasar; (b) pendidikan dasar, yaitu suatu jenjang pendidikan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan tingkat dasar yang berguna untuk hidup di masyarakat dan bekal memasuki pendidikan menengah, (c) pendidikan menengah, yaitu merupakan jenjang pendidikan yang memperuntukkan peserta didik memiliki kemampuan membuka hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, alam dan mengembangkan kemampuan untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi, dan (d) pendidikan tinggi, yaitu suatu jenjang pendidikan yang merupakan lanjutan dari pendidikan menengah yang menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat dan punya kemampuan akademik yang dapat diterapkan di masyarakat (Idris, hal 53).

Pengertian sarana pendidikan menurut Idris (hal 68,1992) yaitu "Gedung sekolah yang memenuhi syarat sehingga peserta didik betah dan bergairah belajar di dalamnya". Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa sarana pendidikan merupakan perlengkapan sekolah yang dapat memenuhi kebutuhan untuk belajar. Selain itu sarana merupakan fasilitas atau peralatan belajar yang ada pada tempat terselenggaranya proses pendidikan yang dapat untuk memenuhi kebutuhan belajar klasikal, kelompok maupun individual. Untuk itu peralatan belajar harus lengkap sehingga peserta didik dapat melakukan bermacam kegiatan seperti latihan keterampilan, penelitian, maupun eksperimen.

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Nawawi (1985) yaitu bahwa “sarana dan prasarana merupakan alat kelengkapan yang berdaya guna dalam pencapaian tujuan pendidikan. Dari pernyataan tersebut dijelaskan bahwa sekolah sebagai sebuah organisasi kerja dalam mencapai tujuan pendidikan bekerjasama dengan sejumlah personal dalam bentuk kegiatan bersifat kurikuler maupun ekstra kurikuler termasuk kegiatan non edukatif, memerlukan berbagai alat kelengkapan yang langsung berhubungan dengan mutu pendidikan, seperti perpustakaan sekolah, laboratorium sekolah, BP3 (badan pembantu penyelenggaraan pendidikan), kantin sekolah, koperasi sekolah, organisasi murid, pramuka sekolah, dewan guru, bagian pengajaran dan ujian, tata usaha sekolah, bagian penelitian, bagian pengabdian masyarakat (bagi perguruan tinggi), sedangkan bagi disekolah dapat diintegrasikan dengan unit kerja lain yang dianggap serasi.

Selain itu Mukhtar & Suparto (2003) berpendapat bahwa sarana dan prasarana pendidikan sekolah adalah sebagai media pendidikan generasi penerus harus mengembangkan kualitas manajemen sekolah dan guru, sebab guru sebagai ujung tombak yang langsung berhadapan dengan pengguna fasilitas sekolah (murid). Dari pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa guru sebagai agen pembaharuan bisa menentukan kecerdasan murid yang terbentuk pada saat murid mendapat pelajaran, karena guru akan menerapkan sistem yang ada disekolah dengan cara yang dikreasikan sedemikian rupa, sehingga sekolah memerlukan guru yang dapat merangsang motivasi siswa dalam belajar, luwes dalam bersikap dan luas dalam wawasan. Dengan demikian tidak dapat disangkal kendala dalam proses pendidikan terletak pada alasan sarana dan prasarana yang tidak memadai menyangkut kualitas guru, kurikulum, proses belajar dan mengajar serta sarana penunjang lainnya yang merupakan suatu lingkaran sistem dalam rangka proses transfer pengajaran.

Pendapat yang mendukung mengenai sarana dan prasarana pendidikan terlontar dari Wijaya (1996) yang menyatakan bahwa, “Setiap siswa mempunyai kebutuhan yang berlainan dalam hal minat belajar, ada yang mau belajar jika termotivasi, ada juga yang belajar dengan mempertimbangkan peran lingkungan. Hal lain yang perlu dipertimbangkan yaitu

peran lingkungan yang dapat menentukan meningkat tidaknya aktivitas belajar di sekolah". Dari pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa menciptakan lingkungan belajar yang efektif yaitu lingkungan fisik dan non fisik, dapat membantu menerapkan prinsip-prinsip belajar. Lingkungan belajar non fisik yaitu dapat berupa suasana emosional diri siswa, bisa juga perkembangan intelektualnya, bisa juga keadaan sosial ekonomi, dapat juga semangatnya. Sedangkan lingkungan fisik belajar yaitu ruang belajar dimana tempat guru mengajar dan murid belajar berlangsung. Lingkungan fisik belajar dapat berupa perpustakaan, laboratorium bahasa, auditorium, ruang konseling, papan display, ruang musik, lapangan olah raga, labortorium ilmu pengetahuan, Mesjid, kendaraan, klinik sekolah, perpustakaan, dan kantor guru.

Pendapat di atas juga didukung oleh Nurkolis (2003) yang menyatakan bahwa

"Pengelolaan sarana dan prasarana sebagai fasilitas sekolah dilakukan oleh sekolah mulai dari pengadaan, pemeliharaan, perbaikan hingga pengembangannya, juga iklim sekolah yang kondusif akademik, tertib dan aman karena fasilitas ini sangat erat kaitannya dengan semangat belajar siswa dan proses belajar mengajar".

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa pengelolaan peralatan dan fasilitas sekolah serta pengelolaan iklim sekolah merupakan kewenangan sekolah dan diperlukan adanya peningkatan intensitas dan ekstensitasnya sehingga dapat meningkatkan kinerja sekolah dan kinerja siswa menjadi lebih baik.

Adapun kegalauan yang muncul perihal sekolah berkisar seputar input, proses, dan output belum sesuai dengan harapan, selain itu media massa banyak mengungkapkan pembiayaan pendidikan yang berada di luar batas kemampuan orang tua murid, munculnya sekolah elite, sekolah unggulan, sekolah favorit yang pada umumnya merupakan sekolah swasta yang dikelola oleh yayasan tertentu dengan manajemen yang baik, modern, dan profesional. Persoalannya mengapa sekolah negeri yang merupakan sekolah pemerintah kurang subsidi, kurang fasilitas, dan gaji guru yang tidak layak. Selain itu berita yang sedang

hangat-hangatnya diberitakan di media massa, televisi maupun media lainnya, yaitu adanya potret fasilitas pendidikan di daerah yang berupa gedung sekolah yang ambruk dan banyaknya siswa mengungsi untuk belajar. Dapat dibayangkan secara teknis dan psikologis proses pembelajaran terganggu dan menurunkan mutu proses pembelajaran. Ada tiga indikator penyebab bangunan sekolah roboh yaitu adanya bencana alam, faktor usia dan mutu bangunan. Dengan adanya bangunan sekolah yang roboh penyebabnya tetaplah pada faktor mutu yang membuat tragedi pada kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Hal ini membutuhkan partisipasi besar dari masyarakat, pemerintah dan pendidik, karena ini adalah refleksi dari anggaran rehabilitasi yang minim dan bukti proses pembangunan yang tidak melibatkan *quality control* dan cenderung mengabaikan tanggung jawab dan komitmen pendidikan nasional dalam hal mendasar penyiapan SDM masa depan.

Kondisi gedung sekolah yang buruk bukanlah cerita baru bagi kita, tetapi merupakan kisah lama yang belum terselesaikan hingga sekarang. Dimulai dari dekade 1970an dimana meningkatnya harga minyak bumi membuat pemerintah memiliki uang yang banyak sehingga memunculkan ide untuk membangun gedung SD secara massal. Sekitar tahun 1971 keluar Instruksi Presiden Nomor 10 untuk pembangunan gedung-gedung SD yang dikenal dengan SD Inpres dengan jumlah puluhan ribu (Ahmad, 2004). Dari hasil survey Beeby (1981) seorang konsultan dari Selandia Baru dinyatakan bahwa gedung-gedung sekolah bersifat permanen hanya 50% saja, sedangkan 10-15% memerlukan perbaikan dan tidak memenuhi persyaratan. Namun muncul isu bahwa pembangunan gedung SD dari setengah permanen menjadi permanen dengan menggunakan kerangka bangunan dari kayu-kayu bekas dan perbandingan campuran antara semen, pasir dan kapur tidak seimbang yang menyebabkan usia gedung itu tidak sampai 10 tahun dan harus direhabilitasi kembali, ternyata kasus ini terjadi di banyak tempat. Tentunya timbul pertanyaan mengapa hanya gedung SD saja yang parah tingkat kerusakannya?, Mengapa gedung SMP dan SMA tidak? Hal ini karena pembangunan gedung SD menggunakan dana pembangunan yang sudah dipotong untuk Pemerintah Tingkat I dan II, Kecamatan dan Kelurahan.

Sedangkan untuk pembangunan gedung SMP dan SMA, jalur birokrasinya lebih pendek yaitu dari Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah langsung ke bangunan dan hanya memberi tahu secara tertulis kepada Pemerintah Tingkat I dan II, Kecamatan dan Kelurahan, sehingga dana itu sungguh-sungguh untuk pembangunan seutuhnya yang pada akhirnya menunjukkan bahwa gedung SMP dan SMA relatif lebih kokoh dari gedung SD Inpres (Widistono, 2004).

Berbicara mengenai kualitas dan keunggulan, menurut Mukhtar & Widodo (2003) sasaran utamanya yaitu keberadaan manajemen sekolah, dimana lembaga pendidikan (sekolah swasta) sejak awal telah memiliki otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan yang dikelolanya. Lain halnya dengan sekolah pemerintah (negeri) yang dalam mengelola proses pendidikan lebih banyak tergantung pada pemerintah dari segi subsidi anggaran, fisik dan non fisik, penggajian guru dan karyawannya. Situasi pendidikan nasional yang jauh dari kemandirian, keinovatifan, dan profesionalisme dalam mengelola pendidikan menyebabkan output jauh dari harapan. Manajemen pendidikan yang demikian pada akhirnya banyak melahirkan determinan atas kelambanan perkembangan pendidikan dari segi sarana dan prasarana serta kualitas maupun pelaku pendidikan, khususnya guru.

Untuk menata kembali sarana dan prasarana pendidikan disekolah negeri sehingga dapat mengoptimalkan kinerja diperlukan manajemen modern dan profesional yaitu manajemen yang berkembang dari potensi dasar yang dimiliki sekolah negeri itu sendiri. Adapun manajemen modern atau Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagaimana telah dirumuskan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi, 2002) mencakup (a) peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dan personalia, (b) peningkatan profesionalisme guru, (c) implementasi reformasi kurikulum, dan (d) peningkatan pemberdayaan masyarakat.

Manajemen pendidikan yang tertuang dalam empat pilar MBS, idealnya dapat dilaksanakan dengan baik oleh sekolah, namun tidak menutup kemungkinan hanya pada aspek tertentu yang dapat dilaksanakan dengan baik. Yang ingin dicapai dalam MBS secara teoritis, tujuan utamanya melakukan perbaikan atas

kinerja sekolah yang selama ini dinilai konservatif, dengan melakukan pemberdayaan sekolah dengan perangkatnya dan dibantu andil kuat dari masyarakat demi meningkatkan prestasi belajar siswa. Dalam artikel ini penulis membatasi hanya pada peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dan personalia yang berikut ini mengenai gambarannya.

Sumber Daya Sekolah

Sumber Daya Sekolah merupakan sumber daya yang paling penting pada suatu organisasi, termasuk sekolah. Mukhtar & Widodo (2003) menyatakan bahwa sumber daya sekolah mencakup sumber daya manusia, yakni orang yang menyediakan tenaga, bakat, kreatifitas pada suatu organisasi dengan menyesuaikan visi dan tujuan sekolah dengan sumber daya yang ada. Sebagai unsur sekolah, sumber daya sekolah adalah segala sesuatu yang berada dan dimiliki sekolah yang mendukung proses menjalankan fungsi manjerial. Dalam era otonomi ini, sekolah pemerintah/negeri harus dapat mengoptimalkan kinerja tanpa meminta bantuan dari pemerintah dan menata sistem lembaga persekolahan dengan potensi dasar yang dimiliki sekolah. Dalam hal ini seorang manajer (kepala sekolah) harus mengembangkan manajemen sumber daya sekolah dengan rekrutmen, penempatan, pelatihan, dan pengembangan anggota organisasi. Untuk menghasilkan pembelajaran yang berkualitas, diperlukan peralatan pendidikan yang dapat digunakan oleh guru dan murid dalam proses pendidikan, seperti perangkat keras berupa gedung sekolah, alat-alat penunjang proses belajar-mengajar, laboratorium dan perpustakaan. Sedangkan perangkat lunak berupa kurikulum, metode mengajar, dan administrasi pendidikan. Sekolah negeri harus inovatif dan mandiri. Memang membangun sifat mandiri sangat berat sekali dikarenakan sekolah negeri sudah terbiasa selama puluhan tahun menerima rancangan anggaran sekolah dari pemerintah dari dana APBN. Selain itu sekolah negeri biasa menerima segala fasilitas pembangunan fisik dari alokasi proyek pendidikan, juga terbiasa menerima subsidi berupa fasilitas sekolah, buku-buku, karena pemerintah merasa kalau sekolah negeri merupakan milik pemerintah sehingga menjadikan

pemerintah menganggap sekolah negeri sebagai proyek di bidang pendidikan (Mukhtar & Widodo, 2003). Juga diperlukan dana bagi pengadaan peralatan sekolah, berbagai keperluan dan operasional kerja. Penggunaan dana adalah untuk pengadaan alat-alat pendukung proses belajar, membayar gaji guru dan pegawai dan untuk memelihara alat-alat operasional.

Sumber Daya Manusia

Dalam manajemen pendidikan, sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor utama dalam pembangunan bangsa. Menurut Sudjana (2004) SDM merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pembangunan bangsa. Hal tersebut karena SDM merupakan pelaku utama dan yang menerima hasil beserta dampak dari pembangunan bangsa. SDM Indonesia terkondisi berangkat dari tradisi yang tumbuh di masyarakat yang memiliki naluri hidup bertetangga baik, mempunyai kerjasama dalam bentuk gotong royong, tenggang rasa yang tinggi, bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan, dan memiliki semangat juang yang tinggi (Sudjana). Dalam bidang seni, manusia Indonesia sudah dikenal secara nasional dan internasional namun dibidang IPTEK masih jauh tertinggal dari negara Asean lainnya (Sudjana). Dari segi pendidikan, manusia Indonesia merupakan masyarakat pencari kerja seperti buruh dan belum menjadi pencipta pekerjaan. Seharusnya untuk menjadi bangsa yang maju dipengaruhi oleh pencipta pekerjaan, selain itu masih banyak penduduk dewasa yang buta aksara, kurang lebih 16%, penguasaan bahasa Inggris yang lemah menyebabkan daya saing di masyarakat internasional tertinggal dari negara Asean lainnya (Sudjana).

Pendidikan yang diperlukan untuk pengembangan SDM Indonesia agar menjadi bangsa yang maju di masa depan yaitu pendidikan yang disesuaikan dengan perubahan masyarakat agraris menjadi masyarakat industri dan kemudian meningkat ke masyarakat informasi. Belajar secara inovatif dengan memadukan belajar mengantisipasi dan belajar dengan orang lain dengan cara berpikir yang sesuai dengan lingkungan.

Dari pemberdayaan kedua sumber daya sekolah dan sumber daya manusia seperti yang dijelaskan diatas memberikan

suatu keuntungan bagi siswa dan sekolah antara lain peluang meningkatkan keterampilan dan keahlian bagi peningkatan mutu layanan pendidikan dan pembelajaran, meningkatkan prestasi dan mutu guru dalam perluasan tugas di dalam kelas maupun di luar sekolah dan meningkatkan etos kerja kepala sekolah.

Kesimpulan

Dari uraian, dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dapat memberikan kecerdasan bagi murid sejak awal ketika mendapat pelajaran. Menciptakan suasana sekolah yang menyenangkan dimana dengan penataan taman sekolah, lingkungan sekolah yang bersih. Selain itu perbaikan mutu akademik siswa dapat dilakukan dengan menetapkan kriteria perilaku mengajar guru, etos kerja kepala sekolah, dan perilaku belajar siswa juga menjadikan anak didik sebagai fokus perhatian utama kegiatan pembelajaran, juga penyediaan infrastruktur disekolah membantu keberlanjutan dan keberhasilan peningkatan prestasi siswa.

Daftar Pustaka

- Ahmad, D. (2004). *Perbaikan gedung SD, usaha yang patut didukung semua pihak*. Jakarta: Harian Kompas.
- Beeby, C.E. (1981). *Pendidikan di Indonesia, Penilaian dan pedoman perencanaan*. LP3ES. Jakarta: PT Djaya Pirusa.
- Danim, S. (2002). *Konsep dan teori manajemen berbasis sekolah*, Naskah Buku Teks Perguruan Tinggi. Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.
- Idris, Z. & Jamal, L. (1992). *Pengantar pendidikan Jilid 2*. Jakarta: PT Gramedia
- Mukhtar & Widodo (2003). *Manajemen berbasis sekolah*. CV Fifamas
- Nawawi, H. (1981). *Organisasi sekolah dan pengelolaan kelas*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Nurkolis. (2003). *Manajemen berbasis sekolah, teori, model, dan aplikasi*. Jakarta: PT Grasindo.
- Sudjana, S. (2004). *Manajemen program pendidikan*. Bandung: Falah Production.
- Widiastono, T. D. (2004). *Pendidikan manusia Indonesia*. Jakarta: Harian Kompas.
- Wijaya, C. (1996). *Pendidikan remedial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.